

Jurnalis dan pers, dalam sejarahnya, tidak dimaksudkan untuk mengelabui atau menyesatkan. Justru pers digunakan untuk memastikan ketersediaan informasi yang membentuk kesadaran, kepekaan dan menunjukkan cara-cara dalam memperoleh apa yang menjadi hak masyarakat.

Disinformasi politik terjadi ketika informasi dimanfaatkan dengan motif dan kepentingan tertentu. Jadinya, penyajian dan produksi informasi, tidak lagi menjadi merata dan jujur. Ketika produksi informasi melimpah dan kepentingan saling bersaing, maka independensi informasi pasti diragukan. Narasumber yang sengaja menyesatkan, jurnalis yang tidak lagi peka dan tergoda dengan berbagai kepentingan, para pemilik media asyik dengan kepentingannya, dan dorongan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, mengakibatkan tidak saja terjadi asimetri informasi, namun sekaligus menyesatkannya, yang tidak dapat dibedakan mana yang penting dan mana yang artifisial.

Buku Disinformasi Berita Politik ini merupakan hasil penelitian yang melibatkan berbagai pihak dan prosedur yang berbeda-beda untuk mengidentifikasi kondisi dan faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan sebuah pemberitaan merupakan pemberitaan disinformatif. Di tengah informasi yang dapat dikontrol dan diproduksi oleh siapa saja, hasil penelitian ini, sangat penting menjadi bahan pertimbangan kajian, permenungan, dan kebijakan di dalam pengelolaan informasi dan pemberitaan untuk berbagai kepentingan.

ISBN: 979-8680-21-9



Disinformasi Berita Politik

Disinformasi Berita Politik

Penyusun :
**Lembaga Pengkajian Kebijakan dan Pemberdayaan Sinergi DIY
Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta**

**Disinformasi
Berita Politik
dalam
Media Massa**

Disinformasi Berita Politik dalam Media Massa

Penyusun:

Lembaga Pengkajian Kebijakan dan Pemberdayaan Sinergi DIY
Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta

Penulis:

Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si
Dra. Susilastuti Dwi N, M.Si
Dra. Esti Susilarti, M.Pd
Dr. Adi Soeprapto, M.Si
Drs. Sihono HT, M.Si
Drs. Hudono, SH
Didik Indarwanta, S.Sos, M.AB.

Disain Sampul & Tatal Letak :
Hendriyati

©2010 BIGRAF Publishing
Jl. Sisingamangaraja 93, Yogyakarta 55153
Telp/Fax : (0274) 377623/373631
Website : <http://www.bigraf.com> e-mail: publishing@bigraf.com

ISBN : 979-8680-21-9

ABTRAKSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa perkembangan terkini bahwa, pertama, informasi mempunyai peran dan fungsi yang besar. Kedua, keterbukaan informasi akan memberi peluang bagi transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, informasi dapat dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Keempat, penyebaran informasi dapat dibatasi, ditahan, disimpan atau justru disimpangkan.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk melihat berbagai faktor penyebab terjadinya pemberitaan politik yang disinformatif yang dilakukan oleh media massa baik sebagai kesadaran atau tidak yang terwujud dalam berbagai tarik ulur kepentingan yang terjadi.

Sumber data utama penelitian adalah data-data rekaman berita politik yang ditayangkan televisi, individu-individu yang terlibat dalam *mode of discourse* dalam berita politik, para pengambil kebijakan seperti KPI, para jurnalis, risalah-risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pers, yang diperoleh dengan cara : wawancara, observasi, analisis isi dan *focus group discussion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan yang disinformatif dapat bersumber dari media itu sendiri dan kekuatan-kekuatan kepentingan luar media. Dua kepentingan besar di antaranya yang mempengaruhinya adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Berbagai bentuk kompetisi, persaingan dan konflik digerakkan oleh kepentingan-kepentingan yang ada, seperti pencitraan, perjuangan mendapatkan kewenangan, pendapatan tambahan, status quo, jabatan, dan kekuasaan. Media massa, di dalam konteks ini adalah pers (termasuk jurnalistik televisi), sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berekspresi, *freedom of speech/freedom of expression* serta kebebasan pers, sebagai sebagai kekuatan keempat di dalam pemerintahan adalah sangat rapuh dan rentan. Perlu adanya upaya penguatan bagi meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas para jurnalis, mencakup aspek kelembagaan dan

struktural dan personal para pekerja media, dari segi ekonomis, yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan dan kepastian terhadap jaminan-jaminan yang selayaknya mereka dapatkan dan aspek ketrampilan dan pengetahuan. Pemberitaan disinformatif bukan merupakan penyebab, melainkan sebagai akibat adanya kesimpangsiuran regulasi, ketentuan, aturan-aturan politik, serta keterlibatan para aktor politik, yang bersembunyi di balik aturan-aturan.

Kata kunci : Disinformasi; Media Massa, Berita Politik, Televisi.

PENGANTAR

Disinformasi Berita Politik: Kerangka Politik

(Catatan untuk hasil penelitian *Lembaga Kajian Kebijakan dan Pemberdayaan Sinergi DIY - Persatuan Wartawan Indonesia* Cabang Yogyakarta 2010)

Kajian mengenai disinformasi berita politik memiliki signifikansi kuat dengan tumbuh-berkembangnya praktek-praktek pemberitaan oleh media massa yang oleh kalangan umum dan akademisi dinilai sebagai tidak adil (*unfair*), memihak (*partial*), dan bahkan menyesatkan publik. Sebagian dari pemberitaan yang bersifat disnifomatif dapat dikatakan, walau seringkali sulit dibuktikan, merupakan upaya sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu. Namun demikian kadangkala juga dijumpai disinformasi pemberitaan yang sulit untuk dikatakan disengaja. Disinformasi berita politik yang bersifat disengaja terutama yang dilakukan oleh pihak-pihak atas nama negara, sampai tingkat tertentu setidaknya, dapat diasosiasikan dengan penggunaan tehnik-tehnik persuasi dan propaganda. Tehnik yang dimaksudkan termasuk misalnya tehnik penonjolan (*intensify*) dengan cara pengulangan, pengkaitan, dan jalinan komposisi argumentatif dalam mengekspose sisi-sisi positif pemrakarsa (aktor) yang kadangkala (tergantung tujuan dan konteks) disertai dengan ekspose sisi-sisi negatif dari pihak yang dianggap musuh atau kompetitor. Disinformasi berita politik bernuansa propaganda seringkali juga dijumpai dalam tehnik penyembunyian (*downplay*) yakni mengelakkan, mengubah, dan mengkaburkan fakta untuk upaya menyembunyikan sisi negatif pemrakarsa sambil menyembunyikan sisi negatif musuh atau kompetitor.

Dalam kondisi normal (tidak dalam keadaan darurat) maka pemerintah, organisasi, dan institusi-institusi biasanya merasa perlu untuk melakukan upaya-upaya meyakinkan kepada rakyat atau publik bahwa berbagai langkah telah dilakukan dan banyak hal telah diperbuat yang kesemuanya adalah demi rakyat dan karena itu diharapkan rakyat tetap atau kalau bisa meningkatkan dukungannya. Ketika timbul permasalahan-permasalahan, salah urus, dan apalagi ancaman-ancaman maka upaya-upaya peyakinan demikian perlu dilakukan secara lebih sistematis termasuk penggunaan sebagian dari teknik-teknik sebagaimana disebutkan di atas. Media massa dalam hubungan ini seringkali mengambil peran-peran tertentu yang unik dalam segitiga kepentingan: kepentingan pemerintah, kepentingan media, dan kepentingan masyarakat. Dari sini kemudian timbul keniscayaan bahwa media massa merupakan kancah pergumulan kepentingan, pergumulan politik, dan pergumulan citra.

Konsep disinformasi berita politik, dalam pada itu, seolah memiliki karakter bawaan yakni kecenderungan bernuansa prasangka (*prejudice*) negatif terhadap pemrakarsa yang seringkali tampil dalam sifat kolaboratif (misalnya antara media dengan kalangan pemerintah, media massa dengan kelompok kepentingan) untuk mencapai maksud atau tujuan-tujuan tertentu walau banyak juga dijumpai dalam sifat tunggal (*single actor*). Karena ini maka dapat dimaklumi sederet cara pemaksaan serta pemikiran-pemikiran mengenai konsep ini sebagaimana termuat dalam laporan kajian misalnya halaman 85-110. Dalam politik maka disinformasi berita melalui media massa, termasuk televisi, seringkali terjadi karena esensi politik adalah kepentingan dan media massa dapat dipandang sebagai alat yang memadai untuk secara diskursif mencapai kepentingan-kepentingan; di samping sudah tentu media lain termasuk *computer-mediated communication* (CMC). Namun demikian penting kiranya menentukan kerangka pikir mengenai konsep ini dalam kajian ilmiah dengan memperhatikan setidaknya dua hal; disinformasi politik sebagai variabel independen, dan disinformasi politik sebagai variabel dependen.

Disinformasi berita politik sebagai variabel independen

Kajian mengenai disinformasi berita politik dengan menempatkannya sebagai variabel independen berarti mencermati konsekuensi (pengaruh, dampak) dari ada/terjadinya pemberitaan politik oleh media massa, termasuk televisi, terhadap kehidupan politik secara luas. Lacakan mengenai hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengacu teori konvensional tentang efek yang mencakup setidaknya tiga aspek dari pengaruh (a) kognitif, (b) afektif, dan (c) perilaku di (setidaknya) empat entitas kehidupan sosial-politik: (a) individu, (b) kelompok, (c) organisasi/institusi, dan (d) massa. Dalam hubungan ini pengaruh kognitif menunjuk pada pemahaman dan persepsi publik mengenai isu (peristiwa atau persoalan) politik yang diberitakan, aspek afektif menunjuk sikap-sikap serta penilaian-penilaian, dan aspek perilaku menunjuk pada hal-hal seperti keputusan, dan tindakan.

Entitas-entitas kehidupan sosial-politik sebagaimana dikemukakan di atas lebih berkenan dengan keberadaannya sebagai konsumen dari pemberitaan politik yang kendati dapat dirasakan perbedaannya namun dalam banyak realitas politik keempat entitas ini seringkali bersifat baur. Entitas individu memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan politik namun lazimnya menjadi bagian dari entitas kelompok. Kemudian entitas kelompok juga memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan politik namun tak jarang organisasi/institusi memiliki faksi-faksi dengan karakternya masing-masing. Massa dalam pada itu biasanya dipahami sebagai entitas yang terbangun dari kumpulan individu-individu yang kemudian memiliki semacam kesejiwaan tertentu dengan kepentingan, aspirasi, dan perilaku yang cenderung dipersatukan oleh persoalan-persoalan dan/atau tantangan-tanganan. Kemudian bagaimana disinformasi berita politik membawa konsekuensi/pengaruh terhadap entitas-entitas ini dapat ditunjukkan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Konsekuensi Disinformasi Berita Politik

Level	Individu	Kelompok	Organisasi/ Institusi	Massa
Kognitif (pemahaman, persepsi)	Pemahaman yang cenderung keliru.	Pemahaman yang cenderung keliru. Perbedaan persepsi di antara individu.	Pemahaman yang cenderung keliru. Perbedaan persepsi di antara faksi-faksi yang ada	Pemahaman yang cenderung keliru. Kompleksitas pemahaman.
Afektif (sikap, penilaian)	Sikap percaya/tidak percaya. Sikap/penilaian yang cenderung keliru. Apatis	Sikap percaya/tidak percaya. Sikap/penilaian yang cenderung keliru. Perbedaan sikap di antara individu.	Sikap percaya/tidak percaya. Sikap/penilaian yang cenderung keliru. Perbedaan sikap di antara faksi-faksi yang ada walau akhirnya keputusan resmi dapat dihasilkan.	Sikap yang cenderung keliru. Kompleksitas sikap yang cenderung mudah terprovokasi. Apatis.
Perilaku (keputusan, tindakan, respon)	Mencari informasi alternatif atau informasi lebih jauh. Keputusan yang keliru. Apatis (<i>take no action</i>)	Mencari informasi alternatif atau informasi lebih jauh. Keputusan yang keliru. Apatis (<i>take no action</i>)	Mencari informasi alternatif atau informasi lebih jauh. Keputusan yang keliru.	Tindakan yang keliru. Keputusan yang keliru.

Disinformasi sebagai dependent variabel

Kajian mengenai disinformasi berita politik dengan menempatkannya sebagai variabel dependen berarti melacak faktor-faktor apa yang sekiranya menjadi penyebab timbulnya disinformasi berita politik. Hal ini, secara hipotetik setidaknya, dapat ditunjukkan dalam Tabel 2. Secara garis besar dapatlah kiranya dikatakan bahwa disinformasi memiliki dua makna sebagaimana telah disinggung sebelumnya: yang disengaja (**intentional disinformation**), dan yang tidak disengaja (*uniintentional disinformation*). Kemudian perhatian mengenai faktor penyebab terjadinya disinformasi berita dapat dipusatkan juga pada dua aspek pokok: media dan sumber berita. Disinformasi berita politik bersifat disengaja lebih merupakan upaya sistematis sebagai bagian dari strategi politik dan/atau upaya pencapaian tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan pemahaman, penilaian, respon, dukungan publik sesuai dengan yang diinginkan oleh pemrakarsa (aktor) baik dari pihak media massa (pemilik media ataupun jurnalis) maupun pihak sumber berita. Disinformasi berita politik yang bersifat tidak disengaja dalam pada itu menunjuk pada “kesalahan” (misundertaken) atau keterbatasan obyektif baik yang berasal dari media maupun sumber berita.

Tabel 2: Faktor Penyebab Disinformasi Berita Politik.

Jenis Disinformasi	Faktor Penyebab				
	Media			Sumber berita	
	Faktor Kepemilikan	Faktor Jurnalis	Faktor obyektif media	Kepentingan	Kompetensi
Sengaja	+	+	-	+	-
Tidak sengaja	-	+	+	-	+

Catatan + = positif (ya, dapat terjadi); dan - = negatif (tidak dapat terjadi)

Dalam hubungan ini disinformasi berita oleh media yang bersifat disengaja menunjuk pada relatif kuatnya kesengajaan oleh dua pertama dari tiga unsur utama media pekabaran yakni kepemilikan

modal dan jurnalis (reporter dan/atau editor). Faktor-faktor obyektif yang ada pada media seperti misalnya keterbatasan ruang (durasi waktu) dan teknologi sulit untuk dikatakan dapat menjadi faktor penyebab disinformasi berita yang bersifat sengaja sebab yang sengaja atau tidak sengaja dalam pemberitaan media hanya manusianya. Pemilik media, karena memiliki kepentingan termasuk kepentingan akumulasi kapital, dapat melakukan intervensi terhadap pemberitaan yang kemudian menyebabkan disinformasi. Pada jurnalis (reporter dan editor) memiliki potensi untuk berperan mengambil keputusan yang menyebabkan timbulnya disinformasi berita walau tidak semua disinformasi dikarenakan faktor kesengajaan para jurnalis.

Kemudian disinformasi berita oleh sumber berita secara sederhana dapat dilihat dari dua sisi: kepentingan sumber berita dan kompetisi sumber berita. Sumber berita, karena memiliki kepentingan maka dapat mengambil peran-peran tertentu dan kenyataannya memang banyak terjadi, untuk adanya disinformasi berita. Disinformasi berita yang dikarenakan kurang/tidak adanya kompetensi sumber pada umumnya bersifat tidak sengaja.

Penutup

Mengakhiri catatan ini penting kiranya untuk dikemukakan bahwa realitas sosial, bahkan yang terkesan sangat sederhana sekalipun, seringkali timbul bukan dikarenakan oleh hanya satu faktor penyebab tetapi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Karena ini maka kajian mengenai disinformasi berita politik (baik sebagai independen maupun dependen variabel) akan lebih memadai kalau mencermati kompleksitas serta ramifikasi dari faktor-faktor yang ada atau yang mungkin ada.***

Prof. Drs. Pawito, Ph D.
- guru besar Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Sebelas Maret Solo

Yogyakarta, 30 Oktober 2010

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xI
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	23
1.3. Tujuan Penelitian	24
1.4. Manfaat Penelitian	24
BAB II KERANGKA TEORI	25
2.1. Prinsip-prinsip kebebasan Informasi	25
2.2. Konsep informasi dan disinformasi	35
2.3. Media Massa, Demokrasi dan Kebebasan Informasi	44
2.3.1. Fungsi Media Massa	48
2.3.2. Media Massa dan Kepentingan Publik	53
2.3.3. Media Massa dalam Lingkungan Politik	59
2.4. Opini Politik dan Media Massa	61
2.5. Media Massa dan Disinformasi	72
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	79
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian	79
3.2. Sumber Data Penelitian	82
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	84
3.3.1, Wawancara	84
3.3.2, Observasi	85
3.3.4. Analisis Isi	85
3.3.5. Focus Group Discussion	87

3.4. Keandalan dan Keabsahan Data.....	88
3.5. Pengolahan dan Analisis Data	89
3.6. Skema dan Prosedur Penelitian	91
BAB IV PERSPEKTIF DISINFORMASI POLITK DALAM PERTARUNGAN KEPENTINGAN	93
4.1. Landasan Data dan Deskripsi	93
4.2. Disinformasi Politik Komunikasi dan Komunikasi Politik	94
4.3. Disinformasi : Ekonomi Politik Media	104
4.4. Disinformasi : Perspektif Politik-Kebijakan Politik .	113
4.4.1. Aspek narasumber	117
4.4.2. Aspek Media dan Jurnalis	120
4.4.3. Aspek Akuntabilitas Publik	125
4.4.4. Masyarakat Jadi Korban	127
4.4.5. Pendidikan Politik	129
4.4.6. Etika Politik	134
BAB V MEDIA TELEVISI PEMIRSA DAN ORIENTASI PEMBERITAAN POLITIK.....	137
5.1. Khalayak dan Media Televisi.....	137
5.2. Karakteristik Pemirsa Media Televisi	139
5.2.1 Identitas Khalayak Pemirsa	141
5.2.2 Sebaran Jenjang Pendidikan Khalayak Pemirsa	142
5.2.3 Pekerjaan Khalayak Pemirsa.....	143
5.2.3.1. Karakteristik Umum.....	144
5.2.3.2. Pekerjaan yang Dibayar	144
5.2.3.3. Bekerja Sendiri	145
5.2.3.4. Tidak Bekerja.....	146
5.3. Pemirsa dan Media Habit.....	147
5.3.1. Media TV dan Pemirsa	149
5.3.2. Pemirsa dan Preferensi Stasiun Televisi	149
5.3.3. Pemirsa dan Preferensi Program Televisi	150
5.3.4. Waktu dan Pola Menonton	151
5.4. Pemirsa, Kebutuhan dan Orientasi Berita Politik ..	153
5.4.1. Fungsi dan Kedudukan Berita Politik	153
5.4.2. Preferensi Berita Politik	154

5.4.3. Preferensi Program Pemberitaan dan dan Stasiun televisi	155
5.4.4. Preferensi Diskusi dan Berita Politik	157
5.5. Pemirsa dan Pemberitaan Politik: Kasus <i>Bailout</i> Bank Century	159
5.5.1. Orientasi Kebutuhan Informasi Politik	159
5.5.2. Berita Politik:Kecukupan dan Kejelasan Informasi	160
5.5.3. Posisi Media Televisi dan Kasus <i>Bailout</i> Bank Century	162
5.5.4. Media Televisi dan Disinformasi Politik	165
5.6. Media Televisi dan Pemberitaan Kasus Cicak Versus Buaya	168
5.6.1. Kejelasan dan Kecukupan Informasi	169
5.6.2. Disinformasi Berita Politik: Cicak Versus Buaya	171
5.7. Media Televisi dan Pemberitaan Kasus Susno Duadji	173
5.7.1, Prioritas isu-isu dalam Pemberitaan Susno Duadji.	174
5.7.2. Berita dan Diskusi Berita Politik Kasus Susno Duadji	176
5.7.3. Televisi dan Disinformasi Kasus Susno Duadji	177
 BAB VI DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK DI RUANG SIDANG DPR	181
6.1. Kompleksitas Komunikasi Politik Antar Suprastruktur Politik.....	182
6.2. Isi Pesan dalam Rapat DPR	199
 BAB VII DISINFORMASI BERITA POLITIK DAN MEDIA MASSA: INTERPREASI	221
7.1. Kausalitas Disinformasi Berita Politik	221
7.2. Disinformasi Pemberitaan Politik: Jalan Masuk	234
7.2.1 Fungsi Agenda Media	235
7.2.2 Kepentingan Individu Jurnalis	236
7.2.3 Rutinitas dan Ketergantungan Narasumber	237

7.2.4 Pengaruh Pemilik Media Massa	238
7.2.5 Kesimpangsiuran Aturan Main Politik dan Kelembagaan	239
7.2.6 Kompetisi Dalam Industri Media	240
7.2.7 Penciptaan Opini Publik	241
7.3. Khalayak: Kesadaran terhadap Pemberitaan Disinformatif	245
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	247
8.1 Kesimpulan	248
8.2 Implikasi Penelitian	
8.2.1 Implikasi Kebijakan	253
8.2.2 Implikasi Program dan Aksi	255
8.3 Saran	256
DAFTAR PUSTAKA	258
INDEKS	261
TENTANG PENULIS	265

Daftar Tabel

5.1.	Responden berdasarkan Jenis Kelamin	142
5.2.	Data Responden berdasarkan Pendidikan	143
5.3.	Data Responden berdasarkan Pekerjaan	144
5.4.	Data Responden berdasarkan Pekerjaan Dibayar	145
5.5.	Data Responden berdasarkan Pekerjaan Sendiri	146
5.6.	Data Responden berdasarkan Pekerjaan Tidak Bekerja	147
5.7.	Data Responden berdasarkan Pilihan Media Televisi	149
5.8.	Data Responden berdasarkan Pilihan Stasiun Televisi	150
5.9.	Data Responden berdasarkan Pilihan Program Siaran	151
5.10.	Data Responden berdasarkan Pola Menonton	152
5.11.	Data Responden berdasarkan Fungsi Berita Politik	154
5.12.	Data Responden berdasarkan Minat Berita Politik	155
5.13.	Data Responden, Media Televisi dan Minat Berita Politik ..	156
5.14.	Data Responden dan Waktu Menonton Berita Politik	138
6.15.	Data Responden berdasarkan Teman Berbincang Berita Politik	158
6.16.	Data Responden berdasarkan Penggunaan Jenis Media	158
6.17.	Data Responden berdasarkan Prioritas Informasi	160
6.18.	Data Responden terhadap Kejelasan Informasi Kasus Bank Century	161
6.19.	Data Responden berdasarkan Kejelasan Informasi Arah dan Tujuan Pansus <i>Bailout</i> Bank Century	162
6.20.	Data Responden berdasarkan Penilaian Kebijakan Bank Century	163
6.21.	Data Responden terhadap Posisi Pemberitaan TV terhadap Kasus Bank Century	164
6.22.	Data Responden dan Keberpihakan Pemberitaan Kasus Bank Century	165
6.23.	Data Responden dan Disinformasi Berita Politik Kasus Bank Century	166
6.24.	Data Responden dan Faktor Disinformasi Pemberitaan Politik Kasus Bank Century	167
6.25.	Data Responden terhadap Posisi Pemberitaan TV terhadap Kasus Cicak Versus Buaya	170

5.26	Data Responden terhadap Kejelasan Informasi Kriminalisasi KPK.....	170
5.27	Data Responden dan Kejelasan Informasi Penyalahgunaan Kewenangan.....	171
5.28	Data Responden dan Disinformasi Pemberitaan Cicak versus Buaya.....	172
5.29	Data Responden dan Faktor Kemungkinan Disinformasi Kasus Cicak versus Buaya	173
5.30	Data Responden dan Prioritas Isu Pemberitaan Kasus Susno Duadji	175
5.31	Data Responden dan Tingkat Kepercayaan terhadap TV sebagai Media Pemberitaan.....	176
5.32	Data Responden dan Diskusi Politik dalam Pemberitaan Kasus Susno Duadji.....	177
5.33	Data Responden dan Faktor Kemungkinan Disinformasi dalam Pemberitaan Kasus Cicak Buaya	178
5.34	Data Responden dan Faktor Disinformasi Pemberitaan kasus Susno Duadji	179
6.1	Unit Analisis Narasumber Rapat Pemeriksaan Bank Century	188
6.2	Unit Analisis Narasumber Rapat audiensi, angket, intern, RDPU	189
6.3	Unit Analisis Berdasarkan Narasumber Rapat Tim Kecil Bank Century	190
6.4	Unit Analisis Keperpihakan Rapat Pemeriksaan Bank Century	196
6.5	Unit Analisis Bentuk Keperpihakan Rapat audiensi, angket, interen, RDPU	197
6.6	Unit Analisis Berdasarkan Keperpihakaan Peserta Rapat Tim Kecil Bank Century	198
6.7	Unit Analisis Materi Pertanyaan Rapat Pemeriksaan Bank Century	199
6.8	Unit Analisis Materi pertanyaan Rapat audiensi, angket, interen, RDPU	200
6.9	Unit Analisis Berdasarkan Materi Pertanyaan Rapat Tim Kecil Bank Century	201
6.10	Unit Analisis Kecenderungan sidang Rapat Pemeriksaan Bank Century	204

6.11	Unit Analisis Kecenderungan sidang Rapat Pemeriksaan Bank Century	205
6.12	Unit Analisis Kecenderungan Sidang Rapat Audiensi, angket, interen, RDPU	206
6.13	Unit Analisis Berdasarkan Kecenderungan Sidang Rapat Tim Kecil Bank Century	207
6.14	Unit Analisis Bentuk Pertanyaan Rapat Pemeriksaan Bank Century	208
6.15	Unit Analisis Bentuk Pertanyaan Rapat Audiensi, Angket, Interen, RDPU.....	209
6.16	Unit Analisis Berdasarkan Narasumber Rapat Tim Kecil Bank Century	210
6.17.	Unit Analisis Subtansi Pertanyaan Rapat Pemeriksaan Bank Century	211
6.18	Unit Analisis Kecenderungan Sidang Rapat Audiensi, angket, interen, RDPU	214
6.19	Unit Analisis Berdasarkan Substansi Pertanyaan Rapat Tim Kecil Bank Century	215
7.1	Sumber-Sumber Disinformasi Dalam Pemberitaan Media	245

Daftar Gambar

3.6	Skema dan Prosedur Tahap Penelitian	91
4.1	Nomenklatur Media dan Informasi	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem politik yang demokratis, informasi mempunyai kedudukan yang penting. Sebuah pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan-jaminan politik seperti hak untuk memantau perilaku pejabat publik, hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, kebebasan berekspresi dan termasuk hak untuk memperoleh informasi (Koalisi Kebebasan Informasi, 2003:18). Bagian-bagian ini merupakan *basic human rights* yang umumnya menjadi indikator dalam menentukan sistem pemerintahan sebagai pemerintah demokratis atau tidak.

Hak kebebasan memperoleh informasi publik, telah menjadi bagian dalam demokrasi itu sendiri. Bahkan hak-hak yang berhubungan dengan kebebasan informasi telah menjadi sebuah undang-undang. Atas nama demokrasi, semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, mesti dibuka seluas-luasnya. Pada sisi lain, atas nama kepentingan dan kerahasiaan negara, informasi harus dibatasi dan disimpan. Kedua kepentingan itu, dalam berbagai sisi dan interaksi sering bersifat konfrontatif dan konflik.

James Madison, salah seorang perumus Undang-Undang Dasar Amerika Serikat misalnya, pernah menyatakan bahwa pemerintah bentukan rakyat tanpa informasi atau cara untuk mendapatkannya,

tidak lain dari pembukaan untuk sebuah lelucon atau sebuah tragedi atau kedua-duanya. Pengetahuan akan selalu menindas ketidaktahuan, dan rakyat yang ingin mengatur diri sendiri harus mempersenjatai diri dengan kekuatan yang diberikan pengetahuan (Pope, 2003: 428).

Filsafat Madison mengisyaratkan bahwa kerahasiaan menghambat pendidikan politik masyarakat yang dapat mengakibatkan pilihan-pilihan yang ada, tidak didasari informasi yang lengkap. Akibatnya peluang bagi perorangan untuk memberi reaksi atas inisiatif politik menjadi tumpul. Di samping itu, tercipta iklim politik yang menyebabkan warga negara melihat pemerintah bukan dengan tanggung jawab dan kepercayaan melainkan dengan sangkaan dan kecurigaan.

Dalam pandangan Alwi Dahlan (1997), peran informasi merupakan sesuatu yang selama ini kurang mendapat perhatian. Hal yang sering dibicarakan lebih pada peran komunikasi secara keseluruhan, dan bukan pada peran informasi secara khusus. Seperti yang dipahami bahwa fungsi komunikasi menyebarkan pesan, membangkitkan pemahaman, menimbulkan kesadaran, mengajak serta memberi motivasi. Namun semua fungsi tersebut tidak akan mempunyai arti bila tidak ada informasi di dalamnya. Informasi adalah unsur pokok yang secara implisit melekat dalam komunikasi.

Jurgen Hubermas menyajikan pandangan yang penting dan relevan tentang informasi berkaitan dengan kedudukan dan fungsinya. Menurutnya, informasi sering dibicarakan ke dalam 4 pokok. Pertama, informasi dikaitkan dengan hal yang dapat mencemarkan, kebusukan atau yang menodai. Kedua, informasi dikaitkan dengan intervensi yang digunakan untuk kepentingan tertentu baik secara personal maupun secara institusi. Ketiga, informasi merupakan paket yang digunakan untuk mempersuasi orang lain. Keempat, informasi yang telah dimanipulasi sehingga dapat dijual sebagai komoditas.

Secara konseptual, informasi merupakan fungsi derajat ketidakpastian terhadap situasi atau keadaan (Littlejohn, 2002). Semakin tidak pasti keadaan, semakin besar informasi yang

dibutuhkan. Sebaliknya, semakin pasti suatu keadaan, semakin sedikit informasi yang dibutuhkan. Tolok ukurnya bukan sedikit dan banyaknya yang tersedia, namun ketercukupan dan kemampuan dalam mengurangi ketidakpastian. Informasi sedikit dapat tidak mampu mengatasi ketidakpastian, tetapi informasi yang berlimpah pun dapat pula membingungkan.

Umumnya ketidakpastian terjadi dalam keadaan atau situasi krisis yang tidak lain merupakan pilihan persepsi sebagai pra-kondisi bagi penggunaan argumen untuk mempersuasi orang lain. Bagi kebanyakan orang, arti konflik sering dikaitkan dengan suatu hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan. Kebanyakan kita menginginkan kedamaian dan keharmonisan. Konflik umumnya dipikirkan sebagai sesuatu yang dihindari karena menghasilkan kebingungan, rumor, dan ketidakteraturan sosial serta sering memunculkan sebuah pandangan yang didasarkan pada keyakinan terhadap isu-isu yang emosional dan irasional dengan tanpa mendengarkan sebuah alasan (Tichenor, Donohue and Olien, 1984)

Lebih dari itu semua dari diri kita pernah mengalami kondisi konflik internal yang mencakup: apa yang sebenarnya dimaksud dengan ril; apa itu baik dan apa itu buruk; serta tindakan apa yang semestinya diambil atau menolaknya. Tidak satupun dari diri kita dapat membebaskan dari masalah dalam usahanya memutuskan apa yang benar dan mana yang salah dalam lingkup yang luas di mana kenyataan selalu tampak tidak pernah lengkap dan pasti.

Dalam situasi itu, informasi dibutuhkan karena satu atau lebih pihak-pihak tertentu menggunakannya untuk mengontrol situasi dalam usaha memenangkan kepercayaan publik. Dalam sudut pandang ini, retorika dan informasi memberi fungsi sebagai landasan rasional bagi praktek-praktek komunikasi baik bagi upaya untuk mempertahankan atau dipakai untuk menyerang lawan (Suparno, 2010).

Dalam pandangan Weick (1988:305), karakteristik krisis adalah probabilitas terhadap rendahnya konsekuensi peristiwa yang mengancam tujuan paling fundamental. Ia dapat menghancurkan reputasi yang telah dibangun dalam waktu yang lama, dapat

menghambat pelaksanaan visi dan misi, memperlemah daya saing dan menimbulkan ketegangan serta emosi dari dalam. Dalam konteks demikian, krisis tidak lain adalah *struggle of control* (Heath and Millar, 2004:9). Dalam arti, sebagai arena di mana informasi yang ada saling bersaing dan berkompetisi untuk memenangkan suatu kepentingan tertentu.

Seperti diketahui arena kompetisi informasi merupakan kontestasi di mana situasi kontroversi atau ketidaksepakatan muncul terhadap pokok persoalan tertentu. Setiap permasalahan atau isu mengandung tiga hal, yakni potensi, kontestasi dan akseptasi. Potensi mengandung pengertian bahwa ia memiliki segi yang dapat memicu semua pertanyaan vital yang dapat diajukan baik oleh mereka yang pro atau pun mereka yang kontra. Sisi ini melihat lingkup dan kualitas persoalan yang diperselisihkan.

Kontestasi mengandung pengertian bahwa ada pihak-pihak yang bertentangan terhadap isu sebagai "clash of argument". Di dalamnya terdapat pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap apa yang menjadi kontroversi. Sedangkan akseptasi terdapat penerimaan dari berbagai pihak terhadap pokok-pokok yang dipermasalahkan.

Kontestasi informasi memperlihatkan berbagai perspektif yang berbeda yang saling bersaing. Pertama, apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka tentang kontroversi. Bagaimana mereka memberi batasan untuk suatu muatan dan materi yang menjadi perdebatan.

Kedua, mencakup pro dan kontra, termasuk para ahli yang memberi opini. Identifikasi terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok sangat vital untuk memahami karakteristik perubahan yang ditawarkan dan dukungan terhadap argumen yang diberikan. Identifikasi ini menegaskan tentang siapa yang terlibat dalam kontroversi dan seluas apa permasalahan yang menjadi kontroversi.

Ketiga, identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi. Ini berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif terhadap

hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan. Perhatian terhadap sebab-sebab kontroversi memberi dasar apakah yang diperdebatkan berada pada soal nilai, fakta atau kebijakan.

Keempat, mencermati karakteristik dan sejarah keyakinan serta kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan seperti apa yang ditawarkan. Lazimnya, para aktor mencari dasar justifikasi atau mendistorsi sistem nilai dan sejarah yang dianggap menyimpang dan tidak sah. Penilaian terhadap keyakinan kebijakan masa lalu sering dijadikan justifikasi- dapat dicari segi kebenarannya atau sebaliknya segi kesalahannya.

Munculnya disinformasi, yakni bentuk-bentuk informasi palsu dan menyesatkan dalam suasana ketidakpastian dapat dipicu dari berbagai arah yang mencerminkan sumber-sumber informasi dan kepentingan yang berbeda. Lagi pula, setiap kejadian yang merupakan peristiwa memunculkan interpretasi terhadap isu yang menyertainya. Semua pihak yang terlibat cenderung melakukan interpretasi, mengevaluasi dan mengambil kesimpulan.

Masalah informasi dan retorika memfokuskan pada platform terhadap fakta, nilai dan kesimpulan bahkan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diumumkan secara resmi untuk mencapai restorasi, mitigasi atau penanggulangan. Jelas, kompetisi semacam ini, terjadi di dalam dan di luar organisasi/institusi yang memperluas tantangan, membentuk kebutuhan informasi dan retorika serta kompetisi yang sedikit banyaknya dapat mempengaruhi kualitas produksi informasi sekaligus membuka peluang terjadinya disinformasi.

Dari sudut perspektif ini, analisis terhadap disinformasi dapat dimulai dengan mengasumsikan bahwa setiap orang memilih diantara cerita-cerita yang saling berkompetisi yang menjelaskan kejadian tertentu. Secara umum, naratif komunikasi dikenal sebagai cara menyusun dan menyajikan pandangan terhadap realitas dunia melalui deskripsi tertentu yang mencakup karakter, tindakan, konteks dan setting (Foss, 1996:400). Ini merupakan bingkai pengalaman yang berfungsi sebagai argumen terhadap pandangan dan dapat dipakai untuk memahami dunia melalui cara tertentu. Sadar atau tidak sadar,

cara-cara semacam ini digunakan oleh berbagai pihak termasuk para jurnalis sendiri dalam menyajikan informasi sebagai materi pemberitaannya.

Realitas dan tindakan orang-orang mencerminkan sesuatu logis yang menjelaskan apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang membuat terjadi, kapan terjadi serta bagaimana seharusnya terjadi. Dari perspektif ini, disinformasi bertumpu pada dan di sekitar argumen-argumen yang dimunculkan di dalam berbagai bentuk komunikasi. Mereka membangun logika, alur, narasi, persuasi dan provokasi di dalam memenangkan kepentingan yang mereka inginkan.

Ada zona makna yang berbeda di antara individu-individu yang satu dengan individu-individu yang lain yang dihasilkan. Kekuatan retorika yang menyertai ada tidaknya disinformasi ditentukan oleh keanggotaan aktual, potensial dan kapasitas dari saluran atau instrumen komunikasi. Seberapa jauh masyarakat dapat dihasut untuk menerima atau menolak berbagai informasi yang berbaur dengan isu, ditentukan oleh kontrol ini yakni kemampuan untuk mengendalikan semua mekanisme dan proses komunikasi yang dihasilkan. Segi ini mencakup pesan, saluran, harapan, tujuan dan kekuasaan yang didefinisikanannya.

Sementara kontrol ini sendiri ditentukan oleh *referent power* yang merujuk pada kekuasaan pada orang lain (*power over person*) ketika seseorang memiliki keterkaitan dengan individu atau kelompok tersebut dan ditentukan oleh *expert power* yang merujuk pada semacam jenis kekuasaan yang memberi daya tarik dan pengaruh yang lebih disebabkan oleh penguasaan ketrampilan dan pengetahuan tertentu yang berada di dalam kepentingan orang-orang yang dipengaruhi (Suparno, 2010)

Dengan paparan itu, informasi merupakan inti dari dikursus-diskursus atau wacana-wacana sosial yang berkembang- atau dalam istilah yang direkomendasikan oleh Jurgen Habermas sebagai *public sphere* yang di dalamnya, aktor-aktor terlihat posisinya di dalam argumen yang dinyatakan secara eksplisit dan pandangan-pandangannya yang ditujukan pada publik yang lebih luas yang

dapat diakses secara penuh dan prosedural.

Gagasan *public sphere* menawarkan secara khusus visi yang kuat terhadap peran informasi di dalam masyarakat modern. Melalui premis ini, opini publik dibentuk di dalam arena debat terbuka yang secara efektif ditentukan oleh ketersediaan komunikasi informasi. Melalui pandangan ini, Jurgen Habermas menegaskan bahwa *public sphere* adalah cara berpikir tentang perubahan dalam bidang informasi, alat untuk mengevaluasi jenis informasi yang telah lampau dan bagaimana hal ini bertransformasi dan kemungkinan arah informasi itu. Di dalam praktek ini, agar tidak terjadi penyimpangan atau penguasaan seseorang atas orang lain, praktek komunikasi di dalam forum *public sphere* harus bersifat egaliter dan demokratis.

Dalam perkembangannya baik karena tuntutan teknologi dan kebutuhan ekonomi, munculnya manajemen informasi merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan *public sphere* dan nilai-nilai yang menjamin kualitas informasi. Sebab, manajemen informasi ini dapat melakukan tindakan-tindakan manipulatif dan eksploitatif yang mengaburkan kebenaran dari suatu informasi.

Tumbuhnya manajemen informasi seiringnya tumbuhnya kesadaran terhadap kekuasaan informasi dan komunikasi sehingga muncul konsultan komunikasi, petugas *public relations*, para jubah (juru bicara/spokesperson), komunikasi pemasaran dan komersial. Mereka sering bertindak lebih merupakan mewakili kepentingan institusional dan kelembagaan di mana mereka berada. Dalam hubungan dengan media massa, mereka merupakan narasumber yang tetap yang dapat mempengaruhi sudut pandang para jurnalis di dalam mengemas pemberitaan,

Jurgen Habermas, menyatakan bahwa: *“Information management.... is fundamental to administrative coherence of modern government. The reliance on communication and information has become paramount for government in their attempt to manipulative public opinion and to maintain social control.”*

Artinya, manajemen informasi umumnya digunakan untuk mengontrol arah dan tujuan informasi seperti yang diinginkan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, apa yang disampaikan dan dibuka, sering

lebih ditentukan oleh tujuan-tujuan itu sendiri sehingga di dalamnya terdapat proses seleksi, ditahan, disimpan dan disembunyikan sepanjang menurut pertimbangan mereka membahayakan atau kurang menguntungkan.

Dengan perkataan lain, seperti apa yang dikatakan oleh Joseph Stiglitz (2002) bahwa selalu terdapat asimetris di dalam penguasaan informasi sehingga dengan penguasaan itu, suatu kelompok yang satu menguasai kelompok yang lain, organisasi satu mengontrol organisasi yang lain, atau bahkan negara satu mengendalikan dengan negara lain. Asimetris informasi ini berdampak luas pada upaya-upaya pencapaian kepentingan. Asimetris informasi dapat menjadikan satu pihak menjadi lebih siap, sedangkan dipihak lain menjadi ketinggalan. Ia juga dapat menimbulkan berbagai bentuk politisasi kepentingan berdasarkan ketidakseimbangan dan kebenaran informasi yang tersedia.

Di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, informasi sangat terasa peran dan fungsinya. Dalam bidang inteligen, informasi dibutuhkan guna untuk menetapkan strategi, kebijakan dan keputusan bagi operasi tempur atau penyergapan misalnya. Di bidang politik kesenjangan informasi dapat menghambat pelaksanaan demokrasi, membuka praktek manipulatif, kebohongan publik, dan korupsi. Di bidang hukum, informasi dibutuhkan bagi penegakan keadilan guna menentukan sebuah keputusan yang adil dan bermartabat.

Selain hal itu, penguasaan terhadap informasi membuka peluang dan kesempatan, seseorang dapat memanipulasi dan mengendalikan banyak kepentingan. Kebijakan pemerintah yang akan dibuat menjadi tidak tepat sasaran dan sesuai yang diharapkan karena informasi tersebut telah diketahui dan dimanfaatkan oleh golongan lain. Siapa yang menguasai informasi, dia yang akan mengendalikan dan mendapatkan kepentingan-kepentingannya.

Begitu krusialnya soal informasi ini, beberapa waktu lalu, atas usaha keras dari berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti ICEL (*Indonesian Center for Environment Law*) AJI, LSPP, ISAI mendorong secara keras pemerintah dan DPR untuk mensahkan adanya undang-

undang kebebasan informasi yang berprinsip untuk membuka informasi seluas-luasnya bagi kepentingan publik, sedangkan di sisi lain undang-undang ini dihadap pula dengan adanya tuntutan undang-undang kerahasiaan negara yang berprinsip membatasi informasi sekecil-kecilnya.

Di negara lain, undang-undang yang mengatur informasi pertama kali adalah undang-undang tahun 1776 di Swedia. Undang-undang itu berisi prinsip-prinsip utama mengenai kebebasan mendapat informasi. Undang-undang serupa tetapi tidak seketat di Swedia diundangkan di Norwegia dan di Denmark tahun 1970. Sejak itu, konsep undang-undang kebebasan informasi mulai menyebar ke seluruh dunia (Pope,2003)

Apa yang dapat digarisbawahi dari semua penjelasan semacam itu adalah bahwa pertama, informasi mempunyai peran dan fungsi yang besar. Kedua, keterbukaan informasi akan memberi peluang bagi transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, informasi dapat dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Keempat, penyebaran informasi dapat dibatasi, ditahan, disimpan atau justru disimpangkan. Pada akhirnya kesenjangan-kesenjangan terhadap penguasaan informasi ini pada gilirannya membuka peluang bagi isu yang menyesatkan.

Dalam kasus Bank Century, kasus Cicak versus Buaya dan kasus Susno Duaji tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguasaan informasi ini. Akibat penguasaan informasi yang membatasi kejelasan persoalan tersebut, menimbulkan upaya-upaya lain yang mencoba menelusuri bagaimana sesungguhnya kebijakan bailout tentang Bank Century ini dilakukan hingga menelan Rp 6,7 triliun; pertarungan kepentingan dalam kasus Cicak versus Buaya yang mencerminkan adanya kompetisi kewenangan dan pengaruh yang terjadi antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Kepolisian Republik Indonesia serta kebenaran terhadap pengakuan-pengakuan yang dilontarkan Komisariss Jenderal Susno Duaji tentang mafia kasus di tubuh kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kehakiman. Di sisi lainnya, karena kepentingan-kepentingan tertentu pula, penguasaan informasi satu pihak terhadap

pihak lain, menjadikan persoalan ini tidak terpecahkan secara, tuntas, adil dan transparan.

Dalam posisi demikian media massa mengambil bagian penting dalam memberi penilaian dan opini. Aktivitas politik tidak dapat dipahami dengan baik tanpa media pemberitaan yang merupakan forum utama bagi komunikasi politik (Rodney, 1989). Forum ini merupakan arena di mana pemuatan berita-berita yang bernilai mencerminkan konflik-konflik politik dan berita-berita memberi referensi umum terhadap sisi-sisi yang berbeda yang menghubungkan sekuen-sekuen pikiran dan tindakan.

Isu dan informasi muncul melalui peristiwa-peristiwa. Definisi isu dan informasi adalah sebuah produk yang timbul dari orientasi utama atas perkembangan kejadian. Isu dan informasi tergantung pada bagaimana dan seberapa abstrak prinsip-prinsip yang ada, seberapa kompleks konflik yang muncul atau kondisi-kondisi yang berkelanjutan yang mengkristal menjadi bernilai. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalam proses produksinya, seperti fungsi agenda setting, hubungan antara jurnalis dengan narasumber, kepentingan pemilik modal media, dan elemen-elemen lain yang memberi tekanan pada media.

Prioritas mereka (para jurnalis) dibentuk oleh persepsi terhadap praktek-praktek kekuasaan, perkembangan kejadian yang krusial, intensitas konflik dan penilaian mereka terhadap apa yang penting bagi khalayak. Dari pengertian ini, sangat jelas tindakan pemerintah dan elit politik mempengaruhi isu dan informasi yang diberitakan.

Ini tidak berarti pemerintah atau elit politik menjaga dan menentukan peliputan yang mereka inginkan, namun yang dimaksudkan adalah bahwa aktivitas pemerintah dan elit-elit politik, pernyataan-pernyataan publik, tindakan badan legislatif, kepolisian, lembaga eksekutif dan administratif dalam kegiatan politisasi internal adalah fokus utama pelaporan dan tanda utama bagi evaluasi yang signifikan (Rodney, 1989)

Dengan demikian, isu dan informasi muncul secara publik tidak sebagai topik-topik yang otonom bagi suatu perdebatan, melainkan melekat di dalam perdebatan tersebut dan secara sekunder berada

pada pelaporan-pelaporan konflik yang menunjukkan pengaruh kekuasaan tertentu yang bekerja di dalamnya. Posisi kontroversi politik kadang-kadang mencakup oposisi yang mengadopsi perbedaan-perbedaan retorika yang tajam, semacam apologia, pengalihan perhatian, argumentasi, alasan rasional, pencitraan, atau pun kebohongan tertentu.

Ada seleksi *pervasif* di dalam pelaporan kontroversi terhadap penekanan peristiwa yang berat dan sulit; terhadap kualitas kepentingan drama manusia; penekanan pada relevansi nyata dan langsung kepada masyarakat; landasan moral dan hal-hal yang kompleks lainnya. Dengan demikian, format berita sering disajikan dalam kalimat-kalimat yang tajam, pernyataan-pernyataan pendek yang humanis, dan drama yang disesuaikan dengan pernyataan tajam dan menyerang, lebih dari sekedar dalam bentuknya sebagai eksposisi, mendiskreditkan lawan-lawan politik lebih dari sekedar argumentasi terhadap prioritas-prioritas tertentu yang dikompetisikan (Rodney, 1989).

Hendak ditegaskan bahwa publisitas meningkatkan penonjolan sebuah isu serta menstranformasikan prioritas sesuai dengan isu itu sendiri. Prioritas itu sendiri tidak lain adalah sebuah *a political battleground* yang menentukan definisi dari isu yang diperdebatkan. Inilah kedudukan penting peran jurnalis yang menjembatani proses dan interaksi komunikasi politik dari berbagai sisi. Dengan perkataan lain, pemberitaan politik yang dilakukan media mencerminkan adanya pertarungan kepentingan dari berbagai pihak yang saling bersaing.

Bila sebuah konflik politik terjadi, ada dua hal yang segera menyertai di dalam media berita (Arna and Dissanayake, 1984: 3-14). Pertama, media akan menjadi pencerita (*story teller*). Kedua, dalam aksinya sebagai pencerita, media massa akan menentukan keterlibatannya dalam tiga kemungkinan. Pertama, mempertajam konflik. Kedua, meredakan konflik. Ketiga, sebagai pihak netral atau sebagai pihak ketiga. Terhadap persoalan ini, biasanya kemudian diikuti munculnya permasalahan atas sifat kemandirian media berita atau terbebasnya organisasi media dari tekanan salah satu pihak yang berkonflik atau kepentingan media itu sendiri terhadap konflik (Nunung, 1993: 2)

Hal penting dari posisi televisi dalam konteks permasalahan ini adalah melihat hubungan antara opini dan informasi. Bagaimana opini berhubungan dengan informasi pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain opini berkaitan dengan disinformasi (penyesatan informasi). Sebuah opini dapat mengarah pada suatu bentuk kekuatan tertentu, misalnya dapat digunakan sebagai *political pressure* ataupun *social pressure*, apabila derajat opini tersebut telah sampai pada opini bersama (opini publik).

Opini pada level individu akan mempunyai derajat penekan yang berbeda dengan opini pada level publik. Dalam konteks demikian, televisi dan pada umumnya media massa sering dipandang mempunyai kekuatan untuk membentuk sebuah opini menjadi opini publik. Secara sederhana, opini dapat diartikan sebagai “*an act of expressing*” terhadap apa yang dipercayai, nilai dan evaluasi serta harapan. Ekspresi ini dapat memberi suara (*a vote*), pernyataan verbal (*verbal statements*), pernyataan tertulis atau bahkan diam sekalipun.

Proses opini terjadi karena adanya hubungan antara: 1) keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan usulan-usulan di mana individu-individu nyatakan atau ekspresikan di dalam ranah publik; dan 2) pilihan-pilihan kebijakan resmi yang dibuat untuk mengatur perilaku sosial di bawah kondisi-kondisi tertentu misalnya kondisi konflik dan politik. Proses opini ini ada tiga tahap. Pertama apa yang disebut sebagai *personal construction* yakni tahap di mana individu menjelaskan dan menginterpretasikan serta mengkonstruksi makna-makna subjektif terhadap objek-objek politik.

Tahap kedua adalah *social construction* yakni tahap ekspresi publik terhadap ekspresi-ekspresi pribadi. Pada tahap ini mencakup tiga bentuk atau cara, yakni: a) proses *take and give* terhadap pandangan-pandangan pribadi di dalam kelompok-kelompok sosial yang menghasilkan pandangan kelompok atau opini kelompok (*group opinion*); b) terjadi saat di mana individu-individu mengekspresikan opininya tidak melalui kelompok-kelompok yang terorganisasi, melainkan melalui pemberian opini yang relatif pribadi seperti dalam pemberian suara, surat kepada anggota legislatif, respon di dalam

polling yang membentuk apa yang disebut sebagai opini populer (*popular opinion*) dan ; c) opini massa (*mass opinion*) yakni tahap dimana opini tersebut telah tersebar secara umum yang sering dipandang sebagai konsensus, budaya dan apa yang para politisi sebut sebagai opini publik.

Ketika opini publik ini dihubungkan dengan berbagai aktivitas politik baik mereka yang berada di badan legislatif, yudikatif, eksekutif dengan tujuan-tujuan politik yang ingin mereka capai, maka kekuatan opini publik ini dapat menjadi cara yang dapat digunakan untuk membentuk agenda-agenda politik. Opini publik dan aktivitas politik dapat diarahkan untuk melakukan konstruksi politik (*political construction*) yang diselaraskan dengan tujuan yang ingin dicapai (Nimmo, 1978: 9-10)

Kekuatan opini publik terlihat sangat nyata ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan opini yang ada. Kekuatan opini yang bersifat mayoritas, tidak saja dapat menindas opini yang bersifat minoritas, tetapi juga menjadikan orang merasa kuatir dan cemas ketika seseorang berada di dalam situasi yang dirasa tidak ada lagi ruang yang dapat menentang pandangan mayoritas ini.

Akibatnya, seseorang cenderung menyembunyikan opini yang dimilikinya dan cenderung diam. Ada semacam resiko yang mungkin menyimpannya, ketika seseorang menentang arus opini mayoritas. Misalnya, seseorang dianggap sebagai disersi ketika ia memiliki pandangan yang berbeda dengan opini mayoritas yang berkembang di dalam sebuah institusi tertentu dan yang lebih ekstrem dinilai sebagai pengkhianat.

Masalahnya adalah tidak semua opini mencerminkan informasi yang benar. Saat dimana opini publik tidak mencerminkan informasi yang benar, langsung atau tidak, telah terjadi penyimpangan informasi di tengah dominannya opini yang ada. Sekalipun, dalam berbagai kenyataan, opini publik yang bersifat disinformatif baik sebagai akibat atau penyebab, sering tetap dipercaya sebagai kebenaran yang dipakai sebagai alat pengabsah di dalam memberi penilaian dan keputusan sesuatu.

Penyimpangan informasi baik sebagai disinformasi atau pun sebagai misinformasi dapat dikarenakan sengaja diciptakan seperti apa yang dikemukakan Jürgen Habermas di atas atau pun karena ketidakmampuan dalam melihat persoalan dan inti masalah secara jelas. Ketidamampuan itu sendiri dapat berasal karena ketersediaan informasi yang terbatas sehingga memang tidak mampu mereduksi sejumlah ketidakpastian atau karena ketidakmampuan mengaksesnya dan memahami inti persoalan.

Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan disinformasi? Istilah ini telah muncul dalam paparan-paparan dalam penjelasan penelitian ini, namun sejauh itu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan disinformasi belum terlalu jauh disinggung dan dijelaskan secara lebih terperinci. Misinformasi dapat secara sederhana didefinisikan sebagai *false, mistaken* atau *misleading information*. Sedangkan disinformasi berbuntut pada distribusi, pernyataan atau penyebaran informasi yang *false, mistaken* atau yang *misleading* dengan atau tujuan-tujuan menyesatkan, membohongi atau membingungkan. Oleh karena itu, disinformasi sering disebut sebagai *misinformation with attitude*.

Dalam berbagai bentuk tindakan disinformatif, kadang-kadang sumber disinformasi diketahui (*overt disinformation*). Tetapi kadang-kadang disinformasi ini tertutup dengan tidak ada identifikasi atau dengan memberi identifikasi yang menyesatkan (*covert disinformation*). Pada tahap ini, penelusuran terhadap sumber informasi sulit dilakukan. Kuantitas dan kualitas disinformasi sukar untuk dinilai tetapi dapat dipandang kurang lebih sebagai tindakan membohongi. Seorang individu dikatakan berkomitmen berbohong ketika: a) mereka membuat pernyataan seolah-olah benar; b) mereka mengetahui bahwa itu palsu; dan c) dengan tujuan menyesatkan. Tidak semua kasus pernyataan palsu dapat dikualifikasi sebagai kebohongan (Fetzer, 2000).

Dengan paparan tersebut, fokus penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kemampuan media massa yang dimilikinya, yang mencakup kemampuan mengumpulkan dan menyajikan informasi dan kemampuan dalam membangun dan menciptakan opini publik

yang ditujukan pada upaya-upaya nyata dalam melakukan kontruksi politik (*political construction*). Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk melihat berbagai sumber dan faktor penyebab terjadinya pemberitaan politik yang disinformatif yang dilakukan oleh media massa khususnya televisi baik sebagai kesadaran atau tidak yang terwujud dalam berbagai tarik ulur kepentingan yang terjadi.

Media massa dengan hak-hak yang dimiliki dalam sebuah sistem dan pemerintahan demokratis, mempunyai kebebasan dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyebarkan informasi. Fungsi dan peran ini dijamin oleh Undang-Undang, misalnya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam pasal 4 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 dikatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Bahkan di dalam lingkungan politik, media massa ditempatkan sebagai *the fourth estate* yang mengambil peran tidak hanya mentransmisikan informasi, melainkan juga melakukan interpretasi, evaluasi dan komentar (McNair, 2004)

Dalam ketentuan semacam itu, terdapat sisi yang semestinya menjadi perhatian bersama, yakni bagaimana hak-hak semacam itu dapat ditegakkan termasuk berbagai macam bentuk informasi yang dikumpulkan, dievaluasi dan diinterpretasikan, dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip yang akuntabel. Dalam situasi yang sangat pragmatis baik karena pertimbangan politis dan ekonomis, hak-hak tersebut dapat diarahkan pada kepentingan-kepentingan yang berbeda dan jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

Untuk tujuan ini, penelitian diarahkan dalam melihat peran yang dijalankan oleh media televisi belakangan ini dalam mengangkat dan mengemas berita-berita politik. Media televisi, sebagaimana banyak kalangan berpendapat, dikatakan sebagai media pencitraan yang sangat kuat dan mempengaruhi khalayak apalagi kalau pencitraan tersebut dilakukan dengan kontruksi realitas sosial sekalipun semu sifatnya (Bungin, 2001:136). Nicholas Abercrombie menyatakan bahwa kontrol terhadap makna dilakukan dengan pencitraan (Champion, 1998:76), sedangkan kekuatan terbesar

dengan pecitraan itu dilakukan oleh televisi.

Televisi menjadi persoalan menarik disebabkan dari beberapa dimensi yang ada di dalamnya (Suparno, 2003). Pertama, kekuatan televisi begitu nyata. Unnikrisnan dan Bajpai (1996:22) melihat kekuatan televisi dari soal visual, musik, lifestyle dan dramatisasinya. Televisi menghantarkan kita ke dalam sebuah dunia keinginan, memaksa kita untuk mempercayainya dan menggerakkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Bahkan televisi adalah aspek yang paling penting dari kebiasaan sehari-hari. Masyarakat merencanakan kegiatannya di sekitar berita-berita dan acara-acara kegemaran mereka. Melalui kombinasi penglihatan, bunyi, gerak dan warna televisi merupakan medium yang sangat dramatis. Televisi merupakan medium nomor satu yang digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan tertentu baik ekonomis atau pun politis (Suparno, 2003).

George Gerbner, pakar ilmu komunikasi, yang memberi perhatian pada televisi, menempatkan kemampuan dan kekuatan televisi ini dengan sebutan *cultivation*- yakni sebuah istilah dan sekaligus teori yang menjelaskan bahwa televisi mempunyai kemampuan untuk melakukan homogenisasi terhadap budaya masyarakat. Menurutnya, analisis kultivasi mengkaji secara total dan komprehensif pola-pola kumulatif yang dikomunikasikan oleh televisi dalam periode tertentu. Ia berpendapat:

“Television is a centralized system of story-telling. It is part and parcel of our daily lives. Its drama, commercials, news, and other programs bring a relatively coherent world of common images and messages into every home. Television cultivates from infancy the very predisposition and preferences that used to be acquired from other primary sources. Television has become the primary common sources of socialization and everyday information. The repetitive pattern of television’s mass-produced messages and images forms the mainstream of common symbolic environment (Bryant and Zillman, 1986:18)

Dengan demikian, jelas kiranya bahwa televisi telah menjadi sumber primer dalam mendapatkan informasi dan sosialisasi. Pola-pola pesan televisi yang diproduksi secara massif membentuk

lingkungan simbolik yang utama termasuk di dalam lingkungan politik.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, seperti yang telah disinggung, penelitian ini memberi perhatian terhadap berita-berita politik yang disajikan melalui media televisi, berbagai sebab secara umum yang menjelaskan kenapa media massa dapat melakukan tindakan disinformatif dalam pemberitaan-pemberitaannya khususnya pemberitaan politik.

Di samping tujuan tersebut, penelitian ini juga memberi perhatian pada tiga kasus pemberitaan, yakni kasus Bank Century, kasus Cicak versus Buaya dan kasus Komisaris Jenderal Susno Duaji yang mengungkapkan praktek-praktek mafia hukum yang dikenal sebagai mafia kasus. Ketiga kasus tersebut terdapat hubungan-hubungan simultan dan berantai yang menunjukkan adanya perubahan dan arah informasi pada persoalan-persoalan lain yang berkaitan.

Kasus Bank Century mencuat ketika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan suntikan modal ke Bank Century hingga Rp 6,7 triliun. Besarnya dana yang disuntikkan ini menggerakkan rasa keingintahuan Dewan Perwakilan Rakyat kenapa sampai sebesar itu. Padahal awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan suntikan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk menyelamatkannya.

Ada laporan yang mengungkapkan banyaknya kelemahan dan kegagalan serius di balik penyelamatan Bank Century serta dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan bantuan ke Bank Century. Akibat kegagalan temuan tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung membentuk tim kecil untuk menggulirkan hak angket guna mengkaji kasus Bank Century. Dalam perkembangannya, wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk mengusut kasus Bank Century menjadi perdebatan di DPR.

Sejarah bank ini didirikan pada tahun 1989 oleh Robert Tantular dengan nama Bank Century Interinvest Corporation (Bank CIC). Namun pada bulan Maret 1999 bank ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatuan oleh Bank Indonesia. Karena dinyatakan demikian, Bank CIC melakukan merger dengan Bank Danpac dan

Bank Pikko, yang sejak itu yakni pada tahun 2004 berdirilah Bank Century. Mantan Deputy Senior Bank Indonesia Anwar Nasution disebut-sebut ikut andil dalam berdirinya bank tersebut dan bank ini disahkan pada tanggal 6 Desember 2004 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tercatat pada bulan Juni 2005, Budi Sampoerna menjadi salah satu nasabah terbesar Bank Century cabang Kertajaya Surabaya. Bank Century mengalami masalah likuiditas ketika beberapa nasabah besarnya menarik dana yang disimpan di bank tersebut. Nasabah-nasabah besar tersebut diantaranya adalah Budi Samporna, PT Timah Tbk dan PT Jamsostek.

Budi Sampoerna sendiri, pada bulan Oktober 2008 tidak dapat menarik dananya sebesar Rp 2 triliun, justru Robert Tantular menawarkan kepadanya dan anaknya Sunaryo agar menjadi pemegang saham, karena Bank Century mengalami masalah likuiditas. Gubernur Bank Indonesia Boediono pada bulan November 2008 membenarkan bahwa Bank Century kalah kliring atau tidak bisa membayar dana permintaan nasabah yang mengakibatkan terjadinya *rush*. Pengumuman ini kemudian diikuti langkah menggelar rapat konsultasi melalui telekonferensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tengah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang G-20 di Washington Amerika Serikat.

Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Bank gagal serta perlunya penanganan lebih lanjut. Sri Mulyani selain sebagai menteri keuangan, ia juga sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan langsung menggelar rapat untuk membahas nasib Bank Century. Dalam rapat yang diselenggarakan di sekitar tanggal 20 November 2008, melalui data per 31 Oktober 2008, Bank Indonesia mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century mengalami minus hingga 3,52 persen.

Di dalam rapat itu diputuskan, untuk mengatasi kebutuhan modal dan kepentingan untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen dibutuhkan dana talangan sebesar Rp 632 milyar. Di dalam rapat juga dibahas kemungkinan dampak sistemik bila Bank Century

dilikuidasi karena itu diputuskan untuk menyerahkan Bank Century kepada lembaga penjamin.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Mantan Group Head Jakarta Network PT Bank Mandiri, Maryono kemudian diangkat menjadi Direktur Utama Bank Century menggantikan Hermanus Hasan Muslim. Upaya-upaya penyelamatan dilakukan seperti delapan pejabat Bank Century dicekal. Mereka adalah Sualiman AB sebagai Komisaris Utama, Poerwanto Kamajadi dan Rusli Prakarta yang keduanya sebagai Komisaris, Hermanus Hasan Muslim sebagai Direktur Utama, Lila K Gondokusuma sebagai Direktur Pemasaran, Edward M Situmorang sebagai Direktur Kepatuhan dan Robert Tantular sebagai pemegang saham.

Pada saat itu Lembaga Penjamin Simpanan mengucurkan dana sebesar Rp 2,776 triliun dengan pertimbangan bahwa untuk mencukup rasio kecukupan modal 8 persen dibutuhkan dana sebesar Rp 2,655 triliun dengan tambahan 10 persen sehingga mencapai Rp 2,776 triliun. Jadi, besarnya dana tersebut terdapat tambahan 10 persen seperti yang direkomendasikan Bank Indonesia. Di dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan itu sendiri terdapat ketentuan bahwa lembaga penjamin dapat menambah modal tersebut sampai 10 persen.

Sementara itu, Robert Tantular ditangkap di kantornya di Gedung Sentral Senayan II lantai 21 dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Sangkaan yang dikenakannya adalah tindakannya mempengaruhi kebijakan direksi sehingga mengakibatkan Bank Century gagal kliring. Di lain pihak Maryono mengadakan pertemuan dengan ratusan nasabah untuk menyakinkan bahwa simpanan mereka masih aman. Sampai periode November-Desember 2008, dana yang telah ditarik nasabah dari Bank Century sebesar Rp 5,67 triliun.

Dengan alasan untuk memenuhi tingkat kesehatan bank, Lembaga Penjamin kembali mengucurkan untuk kedua kalinya sebesar Rp 2,201 triliun. Belum cukup sampai di situ, lembaga ini kembali mengucurkan lagi sebesar Rp 1,55 triliun untuk menutupi kebutuhan CAR berdasarkan hasil taksiran Bank Indonesia dan atas

perhitungan direksi Bank Century.

Dalam berbagai relasi kepentingan di dalam kasus Bank Century ini, KPK menyatakan adanya keterlibatan petinggi kepolisian terkait dengan pencairan dana dari Bank Century ke nasabah. Bahkan penyidik KPK berniat melakukan penyergapan terhadap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima suap. Namun penyergapan itu urung dilakukan karena suap batal dilakukan. Ada perkiraan bahwa gagalnya penyergapan itu juga dikarenakan kabar tentang rencana tersebut telah sampai ke telinga Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Hanuri.

Sejak itu, hubungan KPK-Polri terjadi berbagai friksi. Ini terlihat misalnya, pernyataan Komisariss Jenderal Susno Duaji yang menyatakan ada lembaga yang menyadap telpon selulernya secara sewenang-wenang. Jelas, sebuah pernyataan yang diarahkan kepada KPK. Sementara KPK sendiri menyatakan melalui wakil ketua KPK Bibit Samad Riyanto, bila tidak ada yang tidak jelas tentang penyadapan agar datang ke KPK.

Kesimpangsiuran informasi mulai terlihat ketika Komisariss Jenderal Susno Duaji dan Bank Century menyatakan telah mencairkan dana bagi nasabah Budi Sampoerna, namun hal itu dibantah oleh pengacaranya. Demikian pula, apa yang dinyatakan Menteri Keuangan selaku Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan tentang dirinya telah melaporkan kepada wakil presiden Jusuf Kalla dibantah oleh Jusuf Kalla sendiri. Kalla mengetahuinya 3 hari setelah keputusan KSSK itu diambil yakni pada tanggal 25 Agustus 2008.

Sampai sejauh itu, pada akhirnya setidaknya ada 138 anggota DPR RI dari 8 fraksi mengusulkan angket atas pengusutan Bank Century. Sri Mulyani dan Boediono adalah dua tokoh yang paling dianggap bertanggung jawab terhadap membengkaknya kucuran dana bailout yang mencapai Rp 6,7 triliun yang paling sering dibicarakan dan dibingkaikan dalam pembicaraan-pembicaraan politik di dewan atau pun di media massa.

Sementara tekanan-tekanan bagi Sri Mulyani dan Boediono mulai muncul seiring dengan pemberitaan-pemberitaan yang semakin intensif dilakukan. Bahkan Aburizal Bakrie membuat pernyataan

yang membuat Sri Mulyani membalas secara terbuka bahwa dirinya tidak disukai oleh Aburizal Bakrie. Sri Mulyani pada akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya dengan menerima jabatan sebagai salah satu direktur pelaksana World Bank di Amerika Serikat. Namun hal yang patut dicatat adalah pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa ke depan jangan sampai ada lagi seorang pemimpin yang mengorbankan anak buahnya, jelas sebuah pesan politik yang mencerminkan kekecewaannya.

Dalam hubungannya dengan peran media massa, Fachri Ali mengingatkan bahwa pemberitaan yang tak berimbang terhadap kasus Bank Century bisa berdampak negatif terhadap persepsi baik saat ini atau masa mendatang. Hal yang sama diungkapkan oleh Soeyanto bahwa pemberitaan terhadap kasus Bank Century sebagai pemberitaan yang tidak seimbang dan tidak lengkap serta mengingkari fakta yang melingkupinya dan keluar dari konteks di mana keputusan tersebut diambil di mana saat krisis terjadi.

Kasus pemberitaan politik yang kedua dan menjadi perhatian di dalam penelitian ini adalah kasus Cicak Versus Buaya. Istilah ini muncul dari pernyataan Komisaris Jenderal Susno Duaji, yang mengibaratkan KPK sebagai cicak dan mengibaratkan kepolisian sebagai buaya dalam hal kecanggihan teknologi penyadapan. Istilah ini kemudian diadopsi dan menjadi pembicaraan umum di dalam menggambarkan konflik kepentingan antara KPK dan Kepolisian.

Di dalam kasus ini, terdapat berbagai informasi yang saling bertentangan yang dibangun di dalam membangun proporsisi dan argumen. Pertama, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK berdasarkan testimoni yang diberikan Antasari. Kedua, Ari Muladi adalah orang mengaku memberi suap kepada pimpinan KPK, namun kemudian pengakuan itu dicabut kembali. Ketiga, kepolisian menetapkan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka dengan dikenakan pasal penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan tetapi tidak ditahan hanya dikenakan lapor. Keempat, transkrip rekaman rekayasa kriminalisasi KPK beredar.

Isinya percakapan orang yang diduga adik buron KPK, Anggodo Widjojo dengan petinggi di Kejaksaan yang diduga suara eks Jamintel Wisnu Subroto dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Percakapan pada Juli-Agustus 2009 itu disebut-sebut merancang kriminalisasi KPK. Nama petinggi kepolisian juga disebut, dan nama SBY ikut dicatut.

Kasus pemberitaan ketiga adalah soal berbagai pernyataan Komisararis Jenderal Susno Duaji. Pernyataan Komisararis Jenderal Susno Duaji yang dipersepsikan banyak orang sebagai “blak-blakan” bila dicermati tidak dapat dilepaskan dari pertarungan informasi. Kasus ini lebih merupakan pertarungan antara opini mayoritas kelembagaan dengan opini minoritas.

Dalam konteks demikian, persoalan disinformasi pemberitaan politik di media massa merupakan hal krusial. Dengan sifat dan kedudukannya yang multifacet, media massa dapat berpeluang melakukan tindakan disinformatif di dalam menyebarkan dan menstransmisikan pesan-pesannya. Atas dasar seperti itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap berbagai relasi kekuatan media massa, aktor politik, kepentingan politik, opini publik dan struktur-struktur operatif yang bekerja di dalamnya sehingga pemahaman terhadap disinformasi berita politik ini dapat dimengerti dengan lebih baik.

Meskipun telah dijelaskan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat berbagai sebab dan faktor yang mungkin, dalam melihat kenapa media massa dapat melakukan tindakan-tindakan disinformatif dalam pemberitaannya pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain, penelitian ini juga memberikan analisis terhadap pemberitaan kasus Bank Century, Cicak versus Buaya dan kasus Susno Duaji.

Untuk tujuan-tujuan yang lebih besar penelitian ini juga melihat persoalan ini dari sisi khalayak pemirsa televisi. Jalan yang ditempuh peneliti adalah dengan melakukan survey terhadap khalayak pemirsa televisi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Survey itu sendiri mencakup segi dan pengertian yang luas di dalam upaya menggali pemahaman khalayak, perilaku konsumsi media, ekspektasi mereka terhadap pemberitaan khususnya pemberitaan politik, pandangan mereka

terhadap pemberitaan kasus Bank Century, Cicak versus Buaya dan kasus Susno Duaji.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mencermati paparan di atas, dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana disinformasi pemberitaan politik di media terjadi dalam berbagai relasi-relasi kepentingan kekuasaan ekonomi politik, politik komunikasi, komunikasi politik, dan kebijakan politik ?
- b. Bagaimana relasi praktek-praktek media dengan pemikiran-pemikiran khalayak terhadap pemberitaan politik yang bersifat disinformatif ?
- c. Bagaimana relasi pertarungan kepentingan yang mencerminkan disinformasi pemberitaan terjadi terhadap kasus bailout Bank Century, Cicak versus Buaya dan kasus Susno Duaji.

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis berbagai relasi kepentingan kekuasaan ekonomi politik, politik komunikasi, komunikasi dan kebijakan politik sehingga menimbulkan pemberitaan politik yang disinformatif
- b. Menganalisis relasi-relasi yang terjadi dalam praktek-praktek media dengan pemikiran-pemikiran khalayak tentang pemberitaan politik yang disinformatif
- c. Menganalisis relasi pertarungan kepentingan yang mencerminkan disinformasi pemberitaan terhadap kasus bailout Bank Century, Cicak versus Buaya dan kasus Susno Duaji.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Memahami berbagai relasi kepentingan kekuasaan ekonomi politik, politik komunikasi, komunikasi dan kebijakan politik

sehingga menimbulkan pemberitaan politik yang disinformatif dalam hubungannya dengan segi-segi krusial dalam konstruksi penyesatan informasi (disinformasi)

- b. Memahami relasi-relasi yang terjadi dalam praktek-praktek media dengan pemikiran-pemikiran khalayak tentang pemberitaan politik yang disinformatif
- c. Memahami relasi pertarungan kepentingan yang mencerminkan disinformasi pemberitaan terhadap kasus bail-out Bank Century, Cicak versus Buaya dan kasus Susno Duaji.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Prinsip-Prinsip Kebebasan Informasi

Secara historis, argumen yang paling teruji tentang kebebasan berpendapat atau berekspresi (*freedom of speech*) telah mendasarkan pada pentingnya sebuah diskusi terbuka untuk mendapatkan dan menemukan kebenaran. Dalam soal kebebasan berpendapat atau informasi, kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan fundamental, yang arti pentingnya dapat digunakan untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kebebasan berekspresi pada awalnya berguna dan digagas untuk kepentingan individu, karena menjabarkan pemenuhan psikologis dan intelektual. Dalam perkembangannya, kematangan dan kemerdekaan pikir individu akan membawa perubahan pada cara berpikir dan bertindak masyarakat secara umum. Dengan demikian, hubungan perkembangan intelektual dan spiritual individu dan masyarakat sangat terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut.

John Stuart Mill berpandangan bahwa kebenaran dari keyakinan-keyakinan tertentu dapat ditentukan di dalam sebuah upaya panjang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Semua kebenaran menurutnya adalah sesuatu yang relatif dan hanya dapat diputuskan di dalam sebuah kompetisi. Itulah kenapa, untuk

mengungkapkan mana yang asli dan mana yang palsu dalam sebuah kontestasi, Holmes J mensyaratkan adanya *market competition of idea* (Barendt,1985), yakni adanya ketersediaan dan keterbukaan keberagaman pandangan yang menyediakan adanya penilaian kolektif terhadap suatu kondisi tertentu yang kritis dan cermat.

Asumsi paling umum dari pandangan ini berada di balik prinsip kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) yang membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, paling tidak membedakan antara hal-hal yang baik dengan hal-hal yang jelek. Dalam pandangan Mill, semua situasi dan adanya publikasi yang menunjukkan kemungkinan-kemungkinan dari pernyataan-pernyataan serta kondisi kebenaran merupakan sesuatu yang paling tinggi bagi publik. Dalam konteks ini, kegunaan opini tidak dapat dipisahkan dari kebenaran. Opini menyediakan berbagai pandangan dan penilaian sehingga banyak orang akan memberi penilaian dan pertimbangan rasional serta kelogisannya. Mill menjelaskan aspek ini berhubungan dengan nilai kebenaran, namun pandangan ini tidak menjelaskan bahwa opini juga dapat menjauhkan dari kebenaran (Barendt,1985).

Munculnya sistem legal misalnya dapat melindungi hal-hal yang privasi dan melawan pengungkapan fakta kebenaran. Sementara pada saat bersamaan, sistem legal juga dapat memberi jaminan bagi pers dalam melakukan kebebasan yang dilawan atau dihambat dengan instrumen yang menghambat kebebasan berpendapat. Secara umum pandangan Mill diterapkan pada semua tipe ekspresi bahkan seperti mode-mode ekspresi di dalam periklanan dan pornografi. Kebenaran tidak dapat disamakan dengan kepastian dan kebenaran juga tidak dapat disamakan dengan fakta yang menjelaskan bahwa ada sesuatu yang lebih baik dan argumen yang lebih buruk di dalam wacana politik dan moral.

Pandangan lain dalam soal kebebasan berpendapat menyatakan bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi atau informasi harus dilihat sebagai aspek integral dari hak tiap individu untuk pengembangan diri dan pemenuhan diri secara individual. Larangan terhadap apa yang diperbolehkan, yakni hak untuk mengatakan, hak untuk menulis, hak untuk mendengar atau membaca jelas akan

menghambat perkembangan dan pertumbuhan kepribadian seseorang. Masyarakat dengan demikian, yang terbentuk dari adanya *joint action* (Blummer, 1969) sebagai proses aktif dalam interaksi simbolik dan sosial, tidak dapat mengembangkan diri secara intelektual dan spiritual kecuali mereka dapat bebas memformulasikan keyakinan-keyakinan dan sikap-sikapnya melalui diskusi-diskusi publik dan dalam upaya mereka melakukan respon terhadap kritik-kritik yang diarahkan pihak lain kepada mereka.

Teori ini menghubungkan antara kebebasan berekspresi dengan penemuan kebenaran atau untuk memelihat kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) yang menjadi titik tolak bangunan sistem demokrasi. Di sini rasanya sangat sulit untuk menjustifikasi penerapan kebebasan berpendapat pada pengungkapan informasi (*disclosure of information*) bila dihadapkan dengan hambatan dan kontradiksi tentang penyebaran gagasan dan opini.

Dalam hubungan dan kedudukan dengan negara, jelas kekuasaan negara dibatasi oleh warga negaranya sebagai pemegang mandat dan kedaulatan sehingga kekuasaan yang dijalankan merupakan kekuasaan yang sah. Dalam kekuasaan yang demokratis, seharusnya setiap individu dapat mengenali kedudukannya sebagai warga negara yang setara dan merupakan individu yang otonom. Individu hanya dapat otonom bila ia memiliki kebebasan dan menimbang dirinya dalam berargumen atau berpendapat terhadap berbagai wacana tindakan yang orang lain yang ditujukan kepada dirinya.

Hubungan-hubungan dilematik antara kebebasan individu dan negara oleh para pendahulu dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dipikirkan dan telah menjadi perdebatan panjang yang melelahkan. Dalam sidang BPUPKI misalnya Soepomo secara jelas tidak menghendaki antara kebebasan individu dan negara dipertentangkan. Ia mengatakan bahwa:

“Kita tidak perlu menjamin hak-hak asasi dan kebebasan pribadi terhadap negara, karena individu merupakan bagian organik dari sebuah negara dengan kedudukan dan tanggung jawab untuk memwujudkan kebebasan negara, juga karena negara bukanlah satu pusat kekuasaan atau

raksasa politik yang berdiri di luar cakupan kebebasan dan kemerdekaan individu (Feith and Castles, 1970:191)

Berbeda dengan Soepomo, Muhammad Yamin menegaskan perlunya jaminan yang menyertakan perlindungan atas kebebasan untuk menyatakan diri, hidup, bergerak, berbicara, menulis dan berpikir serta hak berserikat dan berkumpul (Hanazaki, 1998: 39). Senada dengan Muhammad Yamin, Muhammad Hatta menyatakan bahwa ia takut bila di dalam konstitusi negara Indonesia tidak ada penegasan dan jaminan pada rakyat tentang hak mereka untuk berpendapat. Lebih jauh Hatta menyatakan bahwa kita ingin mewujudkan negara pengurus dan mewujudkan satu masyarakat berdasarkan gotong-royong. Namun bagaimanapun, menurutnya, kekuasaan tidak boleh menjadi tidak terbatas (Hanazaki, 1998:38)

Mungkin pertama dapat dikatakan bahwa masyarakat semestinya mengenali prinsip kebebasan berpendapat dan menerima batas-batas hak mayoritas, karena hanya dengan diskusi terbuka terhadap bentuk-bentuk gagasan pemerintah dan politik akan menghasilkan kelembagaan yang lebih baik, legislasi yang lebih baik dan administrasi yang lebih baik. Di dalam teori demokrasi dikatakan bahwa terdapat hak-hak yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses-proses pemerintahan. Kebebasan ini betul-betul diyakini akan membawa pada kebenaran politik. Barendt (1985: 20-21) menyatakan:

“They believed that freedom to think as you will and to speak as you think are means indispensable to the discovery and spread of political truth... the greatest menace to freedom is an inert people that public discussion is a political duty; and that this should be fundamental principle...”.

Kebebasan berpendapat dapat dilihat dari perspektif pembicara (komunikator), khalayak atau penerima dan akhirnya dari kepentingan publik. Kepentingan komunikator dalam hal memiliki hak berpendapat adalah terkait dengan hak dasar untuk *self-fulfilment* dan perkembangan spirit intelektual. Komunikator sebagai partisipator dalam proses politik mempunyai kepentingan di dalam pemerintahan demokrasi. Kepentingannya terletak pada kemampuan

membawa gagasan dan proporsisi untuk mendapatkan perhatian pada khalayak yang luas.

Kajian terhadap motif komunikator dan tujuannya digunakan untuk memastikan apakah kepentingannya layak atau sepenuhnya digunakan untuk menjelaskan di dalam memutuskan larangan atau perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai sesuatu yang tepat. Jika hak kebebasan berpendapat dipandang sebagai sesuatu yang primer sebagai hak komunikator, berkaitan dengan gagasan tentang *human dignity* dan *self fulfilment*, sulit untuk melihat justifikasi bagi larangan terhadap kebebasan berpendapat. Sementara pada sisi lain, seseorang dapat mempublikasikan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan komersial, untuk memperluas sudut pandang yang dimiliki atau untuk menyumbangkan pada diskusi sosial atau pun politik.

Hambatan terhadap kebebasan arus informasi politik dicurigai karena mereka dapat menjajah kepentingan publik di dalam memiliki kecukupan materi informasi. Kepentingan publik harus dipertimbangkan di dalam bingkai dan penerapan aturan kebebasan berpendapat. Komunikasi massa tidak ditujukan pada kelompok orang tertentu yang dapat dipisahkan dari publik secara umum. Dalam konteks demokrasi, persoalan ini dapat dilihat dari hak individu untuk mendapatkan informasi dan pandangan mereka terhadap pilihan politik atau dalam hubungannya dengan kepentingan publik secara umum di dalam mengungkapkan informasi.

Umumnya konstitusi menunjuk pengertian *freedom of press* dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam pemerintahan yang demokratis, pers seharusnya diberi kedudukan khusus dan hak khusus di dalam pandangannya sebagai tanggung jawab dalam menjaga informasi bagi publik. Kebebasan pers bisa saja tidak hanya kebebasan media massa mempublikasikan informasi dan opini tetapi bisa juga kebebasan tertentu dalam melakukan investigasi dan hak untuk mendapatkan akses informasi publik di dalam lembaga-lembaga publik.

Pers yang bebas dalam masyarakat demokratis merupakan sebuah dogma yang tidak terbantahkan-sebagai sesuatu yang

esensial. Hal ini dipertimbangkan sebagai bagian dari otonomi individu dan ekspresi diri serta merupakan elemen yang tidak dapat digantikan di dalam demokrasi- yang menyertakan kebenaran. Media massa di dalam masyarakat modern, tidak saja ia mempunyai kemampuan menyebarkan dan memperluas gagasan dan informasi, tetapi media massa juga mampu menghambat dan membatasinya. Tidak ada jaminan semua gagasan, informasi yang bernilai dan semua sudut pandang akan menemukan bentuk ekspresi dalam forum publik. (Judith Lichtenberg, 1990: 103)

Pertarungan untuk mendapatkan informasi terjadi antara publik dengan yang menginginkannya dan orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan serta rakyat yang menginginkan mendapat informasi. Pertarungan itu mengisyaratkan bahwa kerahasiaan menghambat pendidikan politik sebuah masyarakat sehingga pilihan-pilihan yang ada tidak didasarkan pada informasi yang lengkap. Kedua, peluang bagi setiap individu untuk memberi reaksi terhadap inisiasi politik menjadi tumpul. Ketiga, tercipta iklim politik yang menyebabkan warga negara melihat pemerintah bukan dari sisi tanggung jawab dan kepercayaan, namun lebih pada kecurigaan dan ketidakpercayaan (Pope, 2003:429)

Hak mendapatkan informasi terkait erat dengan pertanggung jawaban dan gugat, yang merupakan tujuan utama sistem pemerintahan yang demokratis. Pengawasan, tinjauan dan penilaian publik, yang dilakukan oleh parlemen atau lembaga legislatif serta pers akan sulit diwujudkan atau bahkan tidak mungkin jika kegiatan-kegiatan politik dirahasiakan dan tertutup. Bila kegiatan ini dilakukan secara rahasia, ini akan menutup bagi tinjauan ulang dan tumpulnya pemikiran kritis berdasarkan pada perdebatan publik yang dilandasi oleh ketersediaan informasi.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1975 Swedia, yang antara lain disebutkan bersumber dari undang-undang tahun 1776 Swedia yang mengatur tentang informasi pertama di dunia, menjelaskan tentang kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan mendirikan himpunan dan kebebasan menjalankan

agama. Semua itu disebutkan dalam satu nafas sebagai hak-hak dasar manusia. Tentu saja, lingkup undang-undang kebebasan berpendapat sangat berbeda-beda dan perlu ditentukan sesuai dengan struktur pemerintahan dari masing-masing negara.

Selandia Baru misalnya mengambil jalan lain sepanjang menyangkut undang-undang kebebasan berpendapat dan informasi, yakni memberikan informasi, bukan memberikan dokumen, catatan atau data. Keputusan untuk tidak membatasi definisi informasi dengan demikian sangat memperluas lingkup dan maksud dari kebebasan informasi tersebut. Seorang Ombudsman di sana pernah menyatakan bahwa semua ingatan bisa salah dan akan timbul masalah bila pemeriksaan didasarkan pada ingatan (Pope, 2003: 434). Sementara di Indonesia, setelah berlarut-larut, akhirnya dihasilkan sebuah undang-undang yang mengatur kebebasan informasi publik. Undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik.

Hak mendapatkan informasi ini sering dikaitkan dengan hak pers untuk mendapatkannya, hak untuk mendatangi pertemuan dan peristiwa-peristiwa publik guna mengumpulkan informasi. Sekali dokumen dan informasi masuk ke dalam domain kepentingan publik, setiap orang di dalam pandangan ini adalah bebas menggunakan dan mengomentarkannya. Judith Lichtenberg (1990: 107) mengungkapkan: *Freedom of press should be contingent on the degree to which it promotes certain values at the core of our interest in freedom of expression generally. Freedom of press* dengan demikian adalah sebuah alat yang baik. Baik dalam arti kata untuk memastikan segala sesuatunya dan tidak baik apabila digunakan untuk menjustifikasi proteksi-proteksi tertentu.

Dalam soal *freedom of speech* dan *freedom of press* terdapat ketegangan antara kepentingan individu versus kepentingan publik. Dua persoalan itu, satu sisi dapat berhubungan dengan nilai-nilai intelektual seperti kebenaran, sedangkan sisi lain dapat berkaitan dengan politik, demokrasi politik atau yang semisal. Kepentingan yang satu berhubungan dengan mempromosikan nilai-nilai yang baik, sedangkan sisi yang lain berhubungan dengan masyarakat secara luas.

Ada pertanyaan penting yang dapat dikemukakan tentang *freedom of speech* lebih jauh. Apa yang diinginkan ketika suatu masyarakat atau sistem politik menginginkan kebebasan berekspresi. Jawabannya terletak pada dua tujuan pokok, yakni pertama, orang dapat berkomunikasi tanpa diintervensi. Kedua, ada banyak orang berkomunikasi atau paling tidak ada gagasan dan sudut pandang yang berbeda terhadap apa yang dikomunikasikan.

Faktor pertama, berhubungan dengan prinsip *censorship* (*noninterference*). Seseorang seharusnya tidak dicegah atau dihambat di dalam berpikir, berbicara, membaca, menulis atau mendengarkan. Sedangkan prinsip kedua, merupakan faktor *multiplicity of voices principle*. Hubungan keduanya sering menimbulkan konflik. Satu pihak yang memperjuangkan prinsip *noninterference*, sedangkan dipihak lain ada yang memperjuangkan *multiplicity of voices principle*. Sebab *freedom of speech* juga semestinya tidak ditujukan untuk menghambat atau mencegah adanya *multiplicity of voices principle*.

Alexander Meiklejohn berpendapat bahwa karena demokrasi berarti kedaulatan rakyat, maka warga negara di dalam demokrasi sebagai pembuat keputusan yang terakhir, perlu informasi penuh untuk membuat pilihan-pilihan politik yang cerdas. Ia membedakan dua fungsi utama dari *freedom of speech* dan *freedom of press*. Pertama, fungsi informatif- *free speech* memungkinkan arus informasi yang diperlukan bagi warga negara untuk membuat keputusan-keputusan dan untuk menghubungkan pemimpin-pemimpin dengan konstituennya. *Free press* secara khusus memastikan kemandirian kritik dan evaluasi terhadap kekuasaan pemerintah. Pandangan ini sangat terbatas. Sebab, di dalam demokrasi tidak hanya bagaimana orang-orang secara kolektif mampu memerintah diri sendiri, tetapi juga mereka setara di dalam banyak hal-hal yang penting.

Freedom of speech itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kebenaran (*truth*). Menurut David Kelley dan Roger Donway (1990: 67) *freedom of speech* bukan merupakan sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen untuk mencapai nilai-nilai tertentu seperti kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ada keyakinan bahwa setiap orang dapat memberi kontribusi yang bernilai untuk mencari

kebenaran. Ini dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada cara di dalam hal bagaimana gagasan baik itu berasal. Sumbangan yang berharga tentang kebenaran dapat datang dalam berbagai bentuk. Sumbangan seseorang yang bernilai itu dapat dilihat pada “market place of ideas” di dalam perannya merangsang orang lain untuk mempertahankan gagasannya, atau menolak atau merumuskan kembali.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebebasan pers. Satu diantaranya adalah soal *mass media-space time*. Ada banyak berita, editorial dan analisis yang disajikan atau ditayangkan. Namun, apa yang disajikan tersebut sangat tergantung pada struktur ekonomi dan politik serta konteks insititusi media itu sendiri. Sering di dalam organisasi media, apa yang mesti diliput dan disajikan lebih dipengaruhi oleh mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan di dalamnya.

Kedua, organisasi media digerakkan oleh faktor ekonomi untuk mendapatkan khalayak yang lebih luas dan besar- peliputan, penayangan atau penyajian begitu kontroversial, begitu “demanding” dan begitu mengganggu. Ketiga, media begitu mudah dimanipulasi oleh pemerintah atau badan-badan resmi baik melalui pernyataan-pernyataan resmi, *press release* yang seringkali tanpa filter dan seleksi.

Keempat, media itu sendiri menghambat atau mempengaruhi peliputan misalnya televisi membiarkan diri pada orientasi tindakan, peristiwa yang tidak diteliti lagi yang dapat mendistorsi makna dan arti pentingnya. Kiranya, sangat masuk akal apabila ada salah satu jurnalis BBC Fergal Keane mengatakan tugas fundamental seorang jurnalis adalah untuk kebenaran. Namun pada saat bersamaan terdapat pendapat seorang wartawan Amerika Serikat James Reston yang mengatakan bahwa berita-berita bisa benar, tetapi semua itu bukan kebenaran. Sedangkan wartawan, reporter dan petugas-petugas media yang lain jarang melihat sesuatunya dalam cara yang sama (Allan, 2004: 46)

Pernyataan dua wartawan tersebut bila dicermati mengandung implikasi-implikasi serius bagi para jurnalis. Pertama, argumen

tersebut menunjukkan adanya komitmen pekerjaan dan profesi jurnalis untuk mengabdikan pada kebenaran. Oleh karena itu, para jurnalis seharusnya tidak pernah terhasut atau terprovokasi untuk mengungkapkan dan menyajikan kebohongan, kedustaan, dan misrepresentasi apalagi tanpa mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensinya.

Implikasi kedua adalah persoalan kebenaran merupakan persoalan yang dapat menimbulkan perdebatan lebih jauh dan kompleks. Misalnya, siapa yang mempunyai hak dalam mendefinisikan kebenaran. Pertanyaan semacam ini, mengarah pada perdebatan lebih dalam lagi, yakni apakah berita dan pemberitaan mencerminkan realitas sosial atau hanya merupakan perluasan yang dilakukan jurnalis yang dapat memproduksi sebuah penjelasan berita yang benar (Allan, 2004: 47)

Pers sering dideskripsikan sebagai fungsi anjing penyalak (anjing penjaga) atau mendapat posisi sebagai kekuatan keempat di dalam pemerintahan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa *freedom of press* merupakan tambahan di dalam *freedom of speech*. Dalam pandangan Immanuel Kant *freedom of press* dengan argumen-argumen secara umum digunakan untuk kemanfaatan bagi kebebasan berpikir dan berdiskusi. Pers diperlakukan sebagai *voice* sekalipun lebih kuat (*powerful*) dibandingkan dengan suara individu itu sendiri.

Dengan demikian itu, *freedom of speech* dan *freedom of press* dua hal yang sangat bertalian. Sedangkan pada sisi lain, kedua aspek tersebut menjamin ketersediaan dan keberagaman informasi di dalam masyarakat. Apa yang ingin dikatakan di sini adalah bahwa *freedom of speech* dan *freedom of press* mempunyai hubungan kausalitas yang krusial dengan ketersediaan informasi dan keberagaman informasi. Sementara adanya ketersediaan dan keberagaman informasi, karena digerakkan oleh berbagai kepentingan tertentu terjadi pertarungan-pertarungan kepentingan.

Memang benar, bahwa keberagaman dan ketersediaan informasi dapat bermanfaat bagi penilaian-penilaian kritis dan konstruktif. Namun, pada sisi lain keberagaman dan ketersediaan informasi yang menimbulkan pertarungan gagasan dan pikiran, juga dapat

menimbulkan kesesatan dan penyimpangan berpikir dan kejernihan. Ini merupakan persimpangan penting antara *freedom of speech, freedom of press*, ketersediaan informasi, keterbukaan informasi, pertarungan informasi dan disinformasi.

2.2. Konsep Informasi dan Disinformasi

Kajian informasi dan disinformasi di dalam penelitian ini berkaitan dengan *media content* yakni isi atau kandungan dalam media massa. Sekalipun dalam konteks semacam itu, konsep informasi dan disinformasi sendiri akan menjelaskan substansi isi media, antara lain menerangkan kenapa dan mengapa isi media tersebut dikatakan sebagai informasi dan kenapa serta mengapa isi media dikatakan disinformatif.

Bila merujuk pada pandangan Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996) apa yang disebut sebagai isi media (*media content*) merupakan informasi visual dan verbal baik kuantitatif atau kualitatif yang didistribusikan oleh media massa. Kuantitas informasi dalam pengertian ini mencakup isi media yang dapat diukur dan dihitung, misalnya jumlah detik dalam program acara televisi, jumlah kolom dalam surat kabar, atau jumlah berita yang disajikan.

Kuantitas isi media ini memberi informasi yang penting tentang jumlah peliputan tetapi tidak dapat memberikan segi kualitas seperti apa peliputan dilakukan. Oleh karena itu, isi media massa sering dihubungkan dengan realitas media, yakni sejauh mana kebenaran dan akurasi yang disajikan media merepresentasikan realitas sosial. Dengan demikian, antara realitas media dan realitas sosial merupakan sesuatu yang berbeda. Kesenjangan terjadi ketika di dalam masyarakat menawarkan begitu banyak sumber informasi. Realitas sosial begitu kompleks sehingga sulit untuk digambarkan secara akurat dan objektif oleh media massa yang memiliki banyak keterbatasan.

Menurut Shoemaker dan Reese (1996), isi media merupakan dasar bagi dampak media. Pembicaraan dan kajian tentang dampak media tidak akan mencukupi bila tidak memahami karakteristik isi media. Melalui isi media tersebut, terdapat banyak indikator yang

menjelaskan adanya kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi bagaimana isi media diproduksi.

Paparan ringkas di atas menjelaskan bahwa informasi jelas diperoleh melalui kegiatan komunikasi- dalam konteks penelitian ini adalah kegiatan komunikasi massa. Namun apakah kegiatan komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa tersebut menjadi bermakna atau tidak, yang menentukan adalah informasi yang dibawanya (Dahlan, 1997: 2). Banyak kegiatan komunikasi yang mubazir dan sia-sia karena pesan yang disampaikan tidak mengandung informasi yang berguna. Berapa pun besarnya kuantitas dan frekuensi yang muncul, komunikasi tidak akan memberi sumbangan apa-apa bagi pembentukan budaya politik demokratis misalnya, bila tidak mengandung informasi. Dengan perkataan lain, tolok ukur keberhasilan kegiatan komunikasi sangat ditentukan oleh informasi.

Dalam perkembangan dan kajian komunikasi, tolok ukur komunikasi ini telah diperbincangkan dan diteliti sudah sangat lama. Pada sekitar dekade tahun 1940-an, tokoh Claude E. Shannon telah memikirkan tolok ukur ini. Dalam pandangannya, tolok ukur komunikasi ditentukan oleh keberhasilan teknis, yakni apakah informasi yang dikirimkan dapat diterima secara persis sama seperti yang dikirimkan semula, sekalipun di dalam proses ini terdapat berbagai hambatan dan gangguan (*noise*). Warren Weaver kemudian menambahkan 2 tolok ukur komunikasi. Pertama, apakah pengertian informasi yang dimaksudkan dari komunikator dapat dimaknai sama oleh penerima informasi. Tolok ukur semacam ini disebut sebagai tolok ukur semantik. Kedua, apakah informasi yang disampaikan mempengaruhi perilaku penerima. Ini merupakan tolok ukur efek (Shannon and Warren, 1949; Rogers, 1994).

Tiga tolok ukur memperlihatkan dimensi-dimensi penting dalam komunikasi. Pertama, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh tingkat akurasi dan ketepatan teknis yakni apakah semua pesan yang disampaikan telah diterima seperti yang disampaikan oleh komunikator. Problem teknis dapat mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak lengkap dan membingungkan. Masalah teknis

umumnya terjadi ketika misalnya suara yang disampaikan tidak jelas, tulisannya tidak jelas atau kabur, ada kata-kata yang hilang, dan seterusnya. Masalah teknis dapat membingungkan bagi khalayak di dalam menerima kualitas pesan yang disampaikan.

Kedua, lebih merupakan problem semantik, yakni mencakup makna. Secara ideal, komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang dimaksudkan komunikator ditangkap dan diterima dengan makna yang sama oleh penerima. Ini tidak terletak pada data fisik dari pesan komunikasi, apakah karena suara, tulisan, gambar atau bentuk ekspresi lainnya, melainkan bagaimana pesan-pesan tadi dapat dimaknai seperti apa yang dimaksudkan oleh komunikator. Sedangkan dimensi ketiga, lebih melihat efek komunikasi yang melihat pengaruhnya pada perilaku tertentu.

Dalam banyak kepentingan, dimensi-dimensi semacam itu tidak dilakukan secara alamiah sehingga kejujuran, ketepatan, objektivitas, kesamaan, dan tujuan memang dibangun dan dikembangkan untuk mencapai kebaikan dan kepentingan bersama. Dalam kenyataannya banyak kepentingan-kepentingan tertentu yang secara sengaja dan sadar justru menghendaki kejujuran, ketepatan, dan obyektivitas informasi tersebut menjadi melenceng dan jauh dari kebenaran. Informasi sering disampaikan tidak lengkap dan dengan makna yang bersifat ambigu, sesat dan menyimpang. Tujuan-tujuan yang disampaikan sering tidak mencerminkan kondisi nyata seperti tampak apa yang dinyatakan, melainkan adanya agenda-agenda tersendiri.

Secara esensial, definisi informasi merupakan fungsi dari derajat ketidakpastian. Informasi merupakan tolok ukur dari derajat ketidakpastian. Semua dimensi komunikasi, apakah menyangkut masalah teknis, semantik dan efek, tolok ukur keberhasilannya ditentukan sejauh mana ketiganya dapat mengatasi ketidakpastian. Teori informasi menjelaskan bahwa semakin tinggi derajat ketidakpastian terhadap sebuah situasi, semakin besar informasi yang diperlukan. Sebaliknya, jika sebuah keadaan merupakan situasi yang sempurna dan dapat diprediksikan (pasti secara absolut), dalam situasi demikian, informasi tidak diperlukan (Littlejohn, 2002). Dengan demikian, tujuan dan prinsip informasi adalah menutup

ketidakpastian, mengisi celah yang tidak pasti dan hal-hal yang tidak dapat diprediksikan. Jadi, pada dasarnya informasi bersifat meredakan, menurunkan ketegangan-ketegangan yang terjadi serta kecemasan-kecemasan tertentu.

Dalam situasi yang sangat kompleks, informasi dapat dipandang sebagai sejumlah pilihan atau alternatif yang memungkinkan seseorang dapat memprediksikan situasi tersebut. Dengan perkataan lain, seseorang membutuhkan informasi yang lebih banyak untuk memprediksikan situasi yang sangat kompleks. Menurut Littlejohn (2002: 42) karena informasi merupakan sebuah fungsi sejumlah alternatif dan pilihan, maka informasi merupakan derajat kebebasan di dalam membuat pilihan di dalam sebuah situasi.

Sementara menurut Lusiano Floridi mengatakan bahwa penjelasan standar tentang informasi adalah “*meaningful of data*”. Penjelasan ini dianggap kurang memadai. Sebab “*meaningful of data*” kemungkinannya informasi tersebut dapat benar dan dapat pula salah. Karena kelemahan ini, Floridi menawarkan definisi teori informasi dengan mencakup segi kebenaran. Menurutnya, *information encapsulates truth*.

Penjelasan semacam ini tetap menyisakan persoalan lainnya. Ketersediaan informasi bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Sumber informasi dapat berasal dari peristiwa yang ada di masyarakat, dapat berupa pernyataan dari individu, dokumen atau data yang tercatat atau tersimpan, keputusan-keputusan, atau kebijakan-kebijakan. Artinya, ada proses produksi dan reproduksi terhadap ketersediaan informasi dan itu dapat berasal dari sumber-sumber informasi yang sangat beragam.

Semua sumber informasi, dapat menjadi informasi yang bersifat terbatas (privat dan tertutup), dan informasi yang bersifat terbuka di mana masyarakat dengan mudah mengetahuinya. Nilai informasi terletak pada kemampuannya mereduksi ketidakpastian. Karena itu, informasi dapat berasal dari sumber masa lalu atau yang terjadi pada saat sekarang atau pengetahuan baru. Sementara, dengan karakteristik seperti itu, distribusi informasi dari berbagai sumber informasi yang tidak merata dapat menimbulkan senjangan informasi.

Keberagaman sumber informasi, termasuk yang berasal dari media, integrasi antara media dan teknologi komunikasi adalah bagian daripadanya.

Di dalam pengelolaan dan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi tersebut, seringkali apa yang diperoleh tidak meredakan ketidakpastian, justru menjadikan situasi lebih bingung dan tidak pasti. Menurut Dahlan (2010) untuk setiap isu, berkembang pula dinamika informasi yang cepat berganti-ganti, yang tidak jelas apa yang sebenarnya menjadi fokus pokok, apa makna dan implikasinya bagi masyarakat. Dalam dinamika keadaan seperti itu, tidak jelas lagi mana soal yang lebih utama dari yang lainnya. Dalam bidang kehidupan publik pun isu yang lebih substantif dapat terpinggirkan oleh kesalahan informasi yang superfisial.

Di bidang manapun juga, kesenjangan informasi dapat mengakibatkan kesenjangan hasil-hasil pembangunan. Di bidang politik, kesenjangan informasi dapat menghambat pelaksanaan demokrasi, mengembangkan kecurigaan antar golongan, membuka peluang bagi isu yang menyesatkan atau menutup saluran pendapat dan aspirasi. Bahkan kesenjangan informasi dapat mendorong pada pembangkangan seperti kerusuhan (Dahlan, 1997: 5-6).

Dalam masyarakat informasi seperti yang dirasakan sekarang, peran informasi tidak dapat dihindarkan. Hampir semua bidang profesi, tidak ada yang tidak bersinggungan dengan informasi. Bahkan begitu pentingnya informasi sehingga keberadaan bidang-bidang tersebut sangat ditentukan oleh informasi. Politisi mengandalkan informasi untuk mempengaruhi kebijakan dan mendapatkan kekuasaan. Akademisi mengandalkan informasi untuk mengembangkan kemampuan akademis, perkuliahan, seminar, ceramah, pidato ataupun penelitian. Ekonom mengandalkan informasi untuk melihat pertumbuhan dan peningkatan kemampuan perekonomian bangsa dan negara.

Konsep masyarakat informasi bila ditelusuri bermula dari suatu hipotesis yang dikemukakan oleh Fritz Maclup (1962) dalam karyanya yang berjudul: *The Production and Distribution of Knowledge in the United States*. Di dalam karya tersebut, ia melakukan kajian dan melihat

adanya pergeseran struktur ekonomi masyarakat Amerika Serikat (AS) dari masyarakat industri ke sektor informasi. Argumennya yang paling penting adalah adanya kenyataan bahwa lapangan kerja dan sumbangan terhadap pendapatan nasional dari sektor industri mengalami penurunan, sedangkan lapangan kerja baru dengan sumbangan pendapatan yang lebih tinggi meningkat dengan cepat melalui jasa dan bidang informasi. Pergeseran semacam ini menegaskan bahwa informasi tidak saja merupakan sebuah kekuatan bagi perubahan masyarakat, namun juga menegaskan bahwa informasi telah menjadi industri baru dalam struktur sosial, ekonomi dan politis.

Produksi informasi secara massif yang menandai lahirnya sebuah masyarakat informasi mengakibatkan banjirnya informasi (*information overload*). Menurut Dahlan (1997) kecuali produksi informasi ilmiah, dunia juga dibanjiri oleh produksi informasi dari jaringan komunikasi massa global, regional dan nasional yang menghasilkan dan menyebarkan informasi hiburan yang jauh lebih banyak setiap harinya misalnya siaran tv yang sehari penuh dari puluhan ribu stasiun televisi. Industri hiburan misalnya televisi, radio, film, musik, fashion, adalah contoh-contoh industri mengandalkan pada informasi. Dalam bidang politik, munculnya konsultan-konsultan politik, lembaga riset politik seperti lembaga polling juga merupakan industri yang mendasarkan pada informasi.

Dalam posisi demikian, banyak yang melihat hal ini sebagai hal yang lebih banyak *mudharat* dari pada manfaatnya. Seorang redaktur Future Survey Michael Marien mengatakan bahwa dalam banjir informasi, pengetahuan atau informasi yang benar-benar dapat memberi arah kepada masyarakat justru semakin berkurang jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah informasi hiburan dan komersial.

Harold A Innis (dalam Melody, 1990:28) juga mengamati bahwa peningkatan yang luar biasa di dalam bidang informasi dan komunikasi telah membuat pemahaman menjadi lebih sulit. Kesempatan-kesempatan komunikasi telah meningkatkan kapasitas organisasi dan individu. Volume dan keberagaman informasi

meningkat secara dramatik. Namun peningkatan semacam ini juga telah menyumbang peningkatan kompleksitas ekonomi dan relasi-relasi sosial, mengenalkan elemen-elemen baru dalam ketidakpastian, dan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat, meningkatnya disparitas sosial yang disebabkan adanya kesenjangan dan banjir informasi.

Daniel Bell mengatakan bahwa informasi adalah sebuah komoditas. Bahkan menurut William H. Melody (1990:16) kebijakan komunikasi di dalam informasi ekonomi global telah mengaburkan kepentingan publik. Menurutnya perkembangan informasi dan komunikasi cenderung mengerosi kebijakan publik dan meningkatkan kemungkinan implikasi yang tersembunyi yang muncul di bidang kebijakan tersebut. Betapa banyak persoalan serius yang menyangkut kepentingan umum dikacaukan oleh berbagai sampah informasi yang menyesatkan.

Perubahan dan perkembangan semacam ini jelas memerlukan interpretasi ulang terhadap berbagai jenis dan tipologi informasi tersebut. Misalnya upaya untuk melakukan kategori informasi publik antara lain berita-berita, kepustakaan, laporan pemerintah dan data-data statistik. Selain hal itu misalnya tipe informasi yang bersifat privat seperti rencana strategis perusahaan dan pribadi yang menyangkut personalitas dan individu. Interpretasi ulang semacam ini diperlukan untuk menjernihkan kualitas informasi dan melihat relevansi informasi itu sendiri, yang terlihat pada kemana kepentingan dan dedikasi informasi itu diarahkan. Disinformasi dan misinformasi dalam situasi berbagai situasi dan kondisi sangat mungkin terjadi.

Misinformasi itu sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai *false, mistaken* atau *misleading information*. Sedangkan disinformasi berbuntut pada distribusi, pernyataan atau penyebaran informasi yang *false, mistaken* atau yang *misleading* dengan tujuan-tujuan menyesatkan, membohongi atau membingungkan. Oleh karena itu, disinformasi sering disebut sebagai *misinformation with attitude* (Fretzer, jurnal)

Kadang-kadang sumber disinformasi diketahui (*overt disinformation*). Tetapi kadang-kadang disinformasi ini tertutup

dengan tidak ada identifikasi atau dengan memberi identifikasi yang menyesatkan (*covert disinformation*). Kuantitas dan kualitas disinformasi sukar untuk dinilai tetapi dapat dipandang kurang lebih sebagai tindakan membohongi (Fretzer, jurnal). Penjelasan ini kembali menegaskan bahwa sumber informasi dapat berasal dari siapa dan apa saja bahkan sumber tersebut dapat jelas atau tersembunyi. Seorang individu dikatakan berkomitmen berbohong ketika: a) mereka membuat pernyataan seolah-olah mereka benar; b) mereka mengetahui bahwa itu palsu; dan c) dengan tujuan menyesatkan. Tidak semua kasus pernyataan palsu dapat dikualifikasi sebagai kebohongan.

Ada tipe yang berbeda atau derajat disinformasi yang mungkin berguna dalam memberi ilustrasi beberapa tipe disinformasi. Misalnya ketidaklengkapan, ketidakakuratan atau pernyataan palsu tidak dikategorikan sebagai disinformasi bila tidak ada unsur tujuan. Namun semua bentuk ketidakakuratan, ketidaklengkapan atau pernyataan palsu yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu dapat dikatakan sebagai disinformasi. Derajat disinformasi terjadi ketika sumber menyajikan informasi yang dipilih untuk menyesatkan, mendistorsi, atau menyalahgunakan target dengan tujuan menyesatkan.

Dalam pandangan Fretzer, hanya dengan mengutip satu sisi bukti yang diperlukan seolah-olah tidak ada bukti yang berlawanan-dikenal sebagai *special pleading* sudah dianggap disinformatif. Oleh karena itu, bisa saja terjadi bahwa bukti yang ada tidak mendukung sudut pandang yang ada, mengabaikannya, atau membuyarkannya. Dari sini aspek penting di dalamnya adalah kebenaran (*truth*).

Tipe lain yang dapat dikelompokkan sebagai upaya melakukan disinformatif adalah ketika seseorang menciptakan kesan bias yang tinggi terhadap kasus spesifik dengan mengabaikan faktor yang penting hal-hal yang signifikan dan relevan untuk menyesatkan orang lain terhadap informasi tersebut. Disinformasi juga dapat dilakukan dengan melakukan *abusing man (the ad hominem)* dengan menyerang individu tertentu (pelaku) dengan informasi-informasi yang tidak relevan sehingga menempatkan seseorang itu tidak pada yang semestinya.

Dengan kategori semacam itu, rumusan tentang disinformasi disebutkan sebagai: “ *carefully contrived misinformation prepared by an*

intelligence service for purpose of misleading, deluding, disrupting or undermining confidence in individuals, organizations or governments (Carl, 1990: 110). Definisi lain ditawarkan Cf.J White, (2001a) antara lain disebutkan bahwa disinformasi adalah: *the deliberate dissemination of false information by person who may or may not receive compensation but who have a specific agenda to counter truth. To call someone "an agent of disinformation" implicates both them and their agenda.*

Dengan kembali mencermati premis-premis di atas, disinformasi sejauh itu dapat terjadi melalui berbagai cara dan sumber. Disinformasi dapat dilakukan baik secara personal maupun secara kelembagaan. Tokoh politik sampai negara dapat melakukan disinformasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Mantan Presiden AS George W Bush misalnya, setelah peringatan Hari Buruh, berbicara di depan Patung Liberty dengan mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan perang melawan Irak dan Diktator Sadam Hussein. Bush mengatakan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massa dan menciptakan ancaman permanen bagi AS.

Ketika sejumlah keraguan dan pertanyaan muncul dari kalangan Partai Demokrat serta menanyakan secara detil persoalan ini sebelum betul-betul mengambil langkah perang terhadap Irak, Bush menuduh mereka sebagai orang-orang yang tidak peduli terhadap keamanan negara. Dengan cara yang sama misalnya Bush mengatakan bahwa sumber-sumber intelijen telah menemukan bahwa Irak mempunyai 30.000 amunisi yang dapat dikirim oleh agen-agen kimia, memiliki 500 ton senjata kimia, 25.000 liter antrax dan 38.000 liter racun botulisme serta menjelaskan bahwa Irak merupakan sel dari jaringan Al-Qaeda (Bagdikian, 2004: 75-76).

Cara-cara disinformasi ini dipakai untuk menakutkan dunia bahwa memang Irak merupakan negara yang berbahaya dan mempunyai kekuatan nyata sebagai ancaman keamanan bagi AS. Lebih jauh Bush menyatakan bahwa ia kehilangan kesabaran untuk menyerang Irak tanpa harus menunggu inspeksi yang dilakukan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) ataupun IAEC (*International Atomic Energy Commission*). Jauh setelah rezim Sadam Hussein jatuh dan dieksekusi, apa yang dinyatakan oleh AS tentang senjata pemusnah

massal, dan senjata kimia yang dimiliki Irak tidak pernah terbukti. Namun penduduk dunia telah mengafirmasi dan membiarkan AS melakukan tindakan penyerangan dengan dasar informasi palsu yang dikonstruksikannya.

Disinformasi juga dapat dilakukan oleh sumber komunikasi massa yakni media massa. Dengan fungsi dan kedudukannya yang luas dan strategis yang dapat melakukan proses seleksi, penonjolan, dan pengarusutamaan suatu isu-isu, media massa mampu membangun opini yang mencitrakan sesuatu sebagai yang benar atau yang salah serta mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Apalagi perannya di dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam pandangan John C Merrill (1991) media mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi, dan mempunyai kemampuan untuk menghapus stereotipe. Namun demikian, media juga mampu menciptakan kecemasan, ketegangan-ketegangan, dan membangun kecurigaan.

Pertarungan yang terjadi antara anggota legislatif dan para pejabat pemerintah seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono dalam kasus *bailout* Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun adalah kasus yang kurang lebih sama mencerminkan adanya pertarungan informasi yang menempatkan keterlibatan media massa di dalamnya. Demikian pula yang terjadi antara antara KPK dan kepolisian dalam soal Kriminalisasi KPK versus Penyalahgunaan kewenangan KPK sarat dengan pertarungan informasi yang sedikit banyak di dalamnya terdapat proses distortif informasi dan misinformatif.

2.3. Media Massa, Demokrasi dan Kebebasan Informasi

Media massa khususnya pers selalu mempunyai peran penting di dalam proses politik. Peran ini di atas segalanya, merupakan alasan utama bagi kebebasan pers karena dipertimbangkan untuk menjaga masyarakat demokratis. Namun demikian, meningkatnya peran pers di bidang politik, meningkatkan pula ambiguitas di dalamnya. Misalnya ambiguitas pers yang ideal atau pers yang netral terhadap

kejadian-kejadian politik. Dalam banyak kejadian, pers seringkali menjadi bagian dari politik itu sendiri, tetapi seringkali pula, pers berada di luar arena proses politik yang ada. Hubungan antara pers, pemerintah dan kepentingan publik, dalam konteks di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika dan fluktuasinya.

Pers dapat menjadi bagian dari proses politik sebagai aktor dalam politik yang mampu membuat isu-isu politik yang cair. Namun pada bagian yang lain, ia hanya menjadi pengamat yang terasa kurang begitu cerdas dan terlibat. Nunung Prajarto misalnya mengelompokkannya ke dalam tiga fungsi: yakni fungsi *intensifier*, fungsi *diminisher* dan fungsi *third party*. Dalam berbagai isu yang dihadapi pers, kemungkinannya, media massa justru dapat meningkatkan ketegangan dari suatu isu, menjadikannya tidak pasti dan tidak jernih, tetapi juga media massa dapat bertindak sebagai jalan menuju pemecahan masalah.

Dalam kondisi tertentu, banyak yang berpandangan bahwa pers merupakan agen-agen di dalam proses politik yang terjadi. Karena pentingnya kedudukan pers dalam menjaga sistem politik yang demokratis, dalam amandemen pertama Konstitusi AS, menyebutkan bahwa tidak ada pembatasan bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kebebasan dengan demikian jelas merupakan sebuah kondisi daripada sebuah kriteria. Ini merupakan kondisi yang menjamin adanya kebebasan berekspresi dan kebebasan membentuk opini. Kebebasan pers atau kebebasan berkomunikasi mengandung dua aspek. Pertama, menawarkan rentang suara atau pandangan dan kedua merupakan respon terhadap permintaan atau kebutuhan.

Denis McQuail (1998: 141) berpendapat bahwa kebebasan pers atau kebebasan komunikasi semestinya menggambarkan kondisi-kondisi tertentu sehingga keterbukaan dan ketersediaan informasi tersebut terjamin. Apa yang disebut sebagai kebebasan seharusnya mencakup status kemandirian, akses terhadap saluran-saluran dan keberagaman ketersediaan informasi. Status kemandirian pada gilirannya akan menentukan tingkat kepercayaan, orisinalitas dan sikap kritis. Sedangkan akses terhadap saluran-saluran dan keberagaman terhadap ketersediaan informasi, akan menentukan

pilihan dan alasan-alasan rasional dalam pilihan.

Kekuatan pers, tampaknya diyakini ada dan nyata. Jika kita tidak menyakini pers memiliki kekuatan potensial di dunia, mungkin kita tidak akan berpikir untuk memelihara kebebasan yang dimilikinya. Catatan-catatan akademik menunjukkan begitu jelas bahwa pengaruh media massa telah menjadi perdebatan panjang dalam kajian bidang komunikasi massa bahkan dalam masa 60 sampai 75 tahun. Pandangan dominan menyatakan bahwa media massa mempunyai kemampuan membentuk sikap dan perilaku masyarakat.

Pandangan ini juga dipengaruhi oleh munculnya radio, televisi, dan film sedangkan di sisi lain cara-cara gerakan politik seperti gerakan fasis, sering menggunakan media massa sebagai instrumen propaganda yang langsung atau tidak langsung turut membentuk keyakinan bahwa media massa memang mempunyai kekuatan yang ampuh. Media massa tidak hanya memberi informasi tetapi juga memberi kerangka kerja konseptual di dalam informasi dan opini, tidak hanya fakta-fakta tetapi juga sebuah pandangan dunia (*a worldview*). Seperti pula yang dikatakan oleh Perse (2001) yang paling penting dari kajian komunikasi massa adalah adanya asumsi bahwa media dan isinya mempunyai efek yang signifikan dan substansial (Bryant and Zillman, 2009:13)

Ada lima area penting bagaimana efek media massa ini bekerja pada individu. Pertama, perilaku (*behavioral*) yakni efek yang dihasilkan ketika sebuah pesan media mempengaruhi tindakan. Kedua, sikap (*attitudinal*) yang terjadi ketika media membentuk opini, keyakinan dan nilai-nilai tersebut. Ketiga area kognitif ketika media mengubah apa yang khalayak tahu. Keempat, area emosional yang terjadi ketika media menghasilkan perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, empati, kecemasan dan seterusnya. Kelima, area psikologis yang terjadi ketika media mampu membangkitkan dari dalam hasrat atau reaksi-reaksi tertentu.

Namun pada sisi lain, Jeffrey Abramson mengingatkan bahwa pers tidak hanya menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam membentuk dan mempengaruhi sikap serta perilaku. Ia

mengingatkan bahwa disamping pers itu adalah *powerful*, pers sebenarnya menunjukkan kelemahannya dan penuh manipulasi. Kontroversi yang menyatakan bahwa media massa merupakan sebuah instrumen yang *powerful* dan mereka yang menyatakan lemah dan penuh manipulasi sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Gurevitch dan Jay Blumler misalnya telah berusaha menguraikan fungsi esensial media massa dalam masyarakat demokratis yang mereka bedakan dengan komunikasi yang menstruktur dan yang dijalankan untuk kepentingan-kepentingan selain politik dan publik misalnya kepentingan ekonomi dan bisnis. Dengan perkataan lain, naik turunnya tingkat demokrasi sangat banyak tergantung pada struktur dan ciri sistem komunikasi termasuk komunikasi massa.

Sebuah negara, organisasi atau institusi baru dinamakan demokratis bila memungkinkan terjadinya komunikasi tanpa hambatan. Tolok ukur demokrasi adalah kriteria komunikasi, yaitu adanya wacana publik, pertukaran pendapat, gagasan dan perbedaan secara terbuka, arus informasi yang tidak dibatasi antara lain kebebasan pers serta hak dan kebebasan memilih. Setiap perubahan pada unsur komunikasi ini akan mempengaruhi pelaksanaan demokrasi (Dahlan, 1991). Kontrol terhadap media dapat bersumber dari beberapa arah. Menurut McQuail (1998: 25), kontrol terhadap media dapat terjadi karena alasan-alasan politik; alasan moral dan budaya; alasan infrastruktur dan teknik dan; alasan-alasan ekonomi.

Brian McNair (2003:21) dalam konteks komunikasi politik, media dan demokrasi melihat lima fungsi utama dari media komunikasi di dalam tipe ideal masyarakat demokratis. Lima fungsi tersebut, pertama media harus menginformasikan kepada warganegara terhadap apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Fungsi ini sering disebut sebagai fungsi monitoring dan fungsi pengawasan (*surveillance*).

Kedua, media harus mendidik khususnya melihat makna dan signifikansi fakta. Fungsi ini menjelaskan keseriusan jurnalis dalam melindungi objektivitas mereka, nilai-nilai sebagai pendidik dan pemisahan profesional dari isu yang dianalisis. Ketiga, media harus

memberi *platform* bagi wacana politik publik, memfasilitasi formasi pembentukan opini publik dan mengumpangkan opini kembali kepada publik. Fungsi ini juga harus mencakup pemberian ruang bagi ekspresi perbedaan.

Keempat, media harus memberi publisitas kepada pemerintahan dan kelembagaan politik, yakni memberi derajat keterbukaan di sekitar kegiatan-kegiatan kelas-kelas politik jika opini publik bergerak pada pengambilan keputusan. Kelima, media harus memberi saluran bagi advokasi politik bagi pandangan-pandangan politik yang ada. Dengan semua fungsi itu, media dengan demikian telah menjalan dan menciptakan kondisi *public sphere*, yakni suatu kondisi di mana arus dan sumber informasi berlangsung secara demokratis.

2.3.1. Fungsi Media Massa

Pengertian media massa sering mengacu pada seperangkat organisasi dan aktivitasnya beserta aturan-aturannya baik formal atau pun informal yang menyebarkan pesan simbol kepada khalayak yang heterogen. Kegiatan pokok institusi media adalah produksi dan distribusi pesan komunikasi yang bekerja di dalam ranah publik. Menurut Ashadi Siregar (2010) keberadaan media dapat dilihat dari kebijakan dan manajemen media yang menjadi landasan operasi produksi dan distribusi/penyiaran. Muatan media itu sendiri berupa informasi faktual, informasi fiksional dan informasi komersial.

Dengan kategori ini, Siregar menjabarkan sifat informasi dari suatu media terdiri dari informasi jurnalisme, informasi hiburan dan informasi komersial. Tampaknya klasifikasi demikian dilakukan berdasarkan pada tipe isi media itu sendiri yang memang umumnya terdiri dari isi media yang merupakan kerja jurnalisme, isi yang bersifat hiburan dan isi yang diperuntukan untuk periklanan dan pemasaran. Ini sekaligus menunjukkan bahwa media merupakan entitas bisnis, institusi sosial dan media hiburan.

Fungsi penting media massa dalam politik adalah menjalankan fungsi *agenda setting* (McCombs and Shaw, 1984). Menurut keduanya, pilihan-pilihan politik dibuat di dalam arena kompetisi dalam gagasan dan isu-isu. Publisitas paling tidak mempunyai kekuatan potensial.

Daniel Boorstin pernah mengungkapkan ada kemungkinan seseorang menjadi terkenal luas karena hanya tampil di stasiun televisi. Dengan perkataan lain, kita menjadi sangat peduli terhadap surat kabar atau media harian di dalam membawakan berita-berita informasi. Melalui pemberitaan pers, komentar, iklan, informasi tentang isu-isu dan personalitas menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Di dalam arena politik, banyak politisi menghabiskan banyak dana untuk membangun citra.

Tidak seperti pers dalam sistem totalitarian, media massa di dalam sistem yang demokratis seperti di AS berfungsi sebagai *watch-dog* terhadap pemerintah, mencermati aktivitas-aktivitasnya di dalam usahanya menjaga kewenangan yang dikuasainya. Peran pers dalam hubungannya dengan pemerintah dari negara satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Tetapi semua kasus hubungan yang terjadi antara pers dan pemerintah bersifat simbiotik dan tergantung pada ideologi politik yang dianut pemerintahnya. Di AS misalnya jurnalis dan pejabat publik melihat fungsi media massa agak berbeda. Reporter menurut sejumlah kajian seperti yang dilakukan Nimmo (1964 dan 1969); Sigal (1973) melihatnya peran pokoknya adalah mengumpulkan dan menyajikan informasi secara obyektif. Namun kemudian banyak ahli yang tidak lagi percaya bahwa reporter dapat menulis kejadian atau peristiwa secara obyektif. Terlalu banyak faktor yang dapat dicermati dan diidentifikasi bahwa kemungkinan tulisan atau penyajian bersifat subyektif memiliki peluang yang sangat besar.

Peran pers yang lain adalah melakukan interpretasi terhadap berita-berita kepada para pembacanya sehingga mereka yang tidak akrab dengan kerja pemerintah dapat memahami relevansi fakta yang mereka baca atau saksikan. Jurnalisme advokasi sering mendefinisikan diri sebagai sebuah bentuk interpretasi sekalipun beberapa kalangan mereka membedakan antara advokasi dan interpretasi. Dalam konteks ini, seorang jurnalis dapat melakukan interpretasi terhadap fakta tanpa harus melakukan advokasi terhadap sudut pandang tertentu atau kelompok kepentingan tertentu.

Di samping peran tersebut, pers dan para jurnalis sering dibebankan kepada mereka untuk memiliki tanggung jawab terhadap

demokrasi dengan merepresentasikan kepentingan publik berhadapan dengan pemerintah. Peran ini jelas melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Melalui peran ini, seringkali media massa melakukan penuntutan yang lebih terhadap keterbukaan dan akses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Atas nama demokrasi informasi, media massa sering menilai dirinya berhak untuk mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan publik.

Fungsi keempat yang diusulkan Nimmo (1964) adalah bertanggung jawab untuk menentukan opini publik dan menginformasikan kepada publik serta pemerintah tentang iklim opini yang ada. Dalam pandangan Nimmo, seorang *reproter* adalah isi inti dari proses demokrasi. Fungsi secara khusus dari media massa adalah menciptakan dan membangun masyarakat massa- yang menjadi publik yang terikat oleh atau di dalam sistem sosial melalui pengetahuan yang sama (Martin, 1981:446-447). Pada akhirnya, seorang reporter atau jurnalis dapat dilihat sebagai partisipan di dalam proses-proses politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, merekalah yang memfokuskan perhatian yang sama dan utama terhadap suatu isu-isu tertentu. Pers sering secara berhasil mempengaruhi kebijakan dengan menampilkan fakta-fakta tertentu baik dari tokoh-tokoh utama atau lawan-lawan utama.

Pandangan pejabat publik dan masyarakat terhadap peran media massa sendiri penting dalam menentukan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan media massa. Di dalam negara demokratis seperti AS, para pejabat pemerintah dan publik, menurut beberapa studi yang telah dilakukan menyetujui kalau peran media massa mencakup menginformasikan, melakukan interpretasi dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan pejabat negara. Sementara publiknya, juga memandang peran media massa, khususnya pers, didapatkan bahwa hampir setiap orang menyetujui kalau media massa sangat penting di dalam kehidupan mereka dalam mendapatkan informasi dan memahami apa-apa yang terjadi di sekitar mereka (Martin, 1981: 448).

Untuk itu, hubungan-hubungan yang terjadi di seputar media dan pemerintah, lebih menunjukkan kekuatan dan fungsi yang

dijalankan media massa serta pemahaman tentang pemanfaatannya bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Sebuah cara yang dilakukan biro-biro pemerintah dan politisi mengontrol kegiatan pers misalnya adalah dengan memberikan atau menahan akses berita dan akses terhadap sumber berita. Dalam kasus di AS, departemen sekretariat negara misalnya, ada yang memang ditugaskan untuk berbicara secara bebas kepada pers, tetapi ada pula yang tidak seorangpun dapat berbicara kepadanya.

Sebagai sumber informasi dari pemerintah, para jurnalis dalam mendapatkan informasi dihadapkan pada berbagai kondisi. Para jurnalis dapat menuliskan kembali *press release* yang diberikan oleh sumber-sumber resmi pemerintah. Atau mereka dapat menindaklanjuti *press release* tersebut dengan melakukan wawancara. Tindaklanjut ini umumnya dilakukan kepada pejabat resmi pemerintah yang memang dapat diakses. Sebab dalam kenyataannya, tidak semua pejabat pemerintah, politisi atau aparat penegak hukum misalnya dapat segera dan pada saat itu juga diwawancarai.

Studi yang menunjukkan bagaimana para jurnalis memanfaatkan *press release* dari sumber-sumber pemerintah dan politisi menunjukkan keadaan yang berbeda-beda. Studi yang dilakukan Glick (1966:53) menunjukkan bahwa ketergantungan para jurnalis pada *press release* lebih besar dari apa yang mereka klaim. Studi yang dilakukan Kaid (1976) menemukan 8 persen *press release* dari kandidat senat di Amerika Serikat dipublikasikan. Ia juga menemukan bahwa semua *press release* yang berkaitan dengan pengumuman kampanye dipublikasikan. Nimmo dalam melakukan studi tentang hal ini menunjukkan bahwa 41 persen *press release* digunakan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hubungan-hubungan yang terjadi antara para jurnalis dan pemerintah, menunjukkan kondisi-kondisi yang berbeda. Seperti telah menjadi konsensus, bila para jurnalis merupakan pihak-pihak yang mencari dan memburu informasi dari sumber-sumber informasi pemerintah, sedangkan pihak pemerintah, politisi, atau profesional merupakan pihak yang bila memerlukan pers, melakukan kontak dengan mereka dan

mengadakan *press conference*. Secara keseluruhan mereka adalah sumber-sumber informasi yang dicari.

Dalam hubungan-hubungan semacam itu, seringkali ketidaklengkapan dan ketidakakuratan terjadi. Untuk berbagai kepentingan dan alasan, sumber-sumber informasi politik yang berasal dari sejumlah politisi pemerintah atau dari partai politik sering berusaha mempengaruhi peliputan, yang bila perlu melakukan kontrol dan pengelolaan terhadap *output* atau akses pers. Belum lagi hal ini dihadapkan pada pemimpin redaksi yang melakukan pengeditan. Berita pada akhirnya dikelola oleh editor yang memutuskan seberapa banyak hal itu dicetak atau disiarkan kapan dan di mana, apa *headline* yang diberikan dan *lead* seperti apa yang ditampilkan dalam paragraf-paragraf penting. Pemberitaan dalam pengertian demikian sering dicurigai tidak dapat berlaku obyektif.

Studi yang dilakukan Morgan (1978) misalnya mengungkapkan bahwa kebanyakan legislator dan pegawai negeri menilai bahwa pers telah melakukan bias terhadap peliputan dan penanganan terhadap berita. Legislator kebanyakan mengatakan bahwa bias disebabkan karena umumnya media terlalu konsentrasi pada individu-individu tertentu.

Hubungan antara media massa dengan sumber informasi memang bersifat problematik. Berita semata-mata tidak berakar di dalam proses organisasional dan norma-norma profesional tetapi juga di dalam tindakan, tidak dalam tindakan dan pembicaraan elit yang merupakan sumber dan subyek dari kepentingan-kepentingan politik. Dalam pandangan Gan (1979), tidak ada penjelasan sederhana dan tunggal terhadap berita.

Persoalan hubungan media massa dan sumber informasi itu sendiri dapat pula dipandang dari sebuah fungsi sosiologis dari komunikasi massa. Dalam salah satu paradigma di dalam komunikasi massa dijelaskan bahwa media massa bahkan untuk mereka yang menyatakan diri sebagai media massa yang independen dan netral sekalipun, sebenarnya secara esensial adalah subordinat dari pemegang kekuasaan yang dominan. Dalam pandangan Stuart Hall, Connel dan Curti, media secara akurat mencerminkan dan

merepresentasikan struktur kekuasaan masyarakat yang ada. Media massa itu sendiri adalah benteng-benteng kekuasaan, yang mendefinisikan realitas, dan merupakan tempat kultur profesional. Dalam kaitannya ini, dikatakan bahwa media massa merupakan sumber kontrol dan manajemen informasi. Di dalam pengertian kontrol dan manajemen informasi itu, media terlibat secara langsung atau tidak langsung mengontrol dan memanipulasi media (Blumler and Gurevitch, 1981: 468). Begitu problematikanya hubungan yang terjadi antara media massa dan sumber informasi ini, Nimmo (1978) mengungkapkannya sebagai berikut:

Journalist do not gather news like a child plucking pansies from the meadow. Political news is the joint creation of the journalists who assemble and report events and other political communicators- politicians, professionals and spokespersons-who promote them

Jadi, proses di mana konstruksi media terhadap isu-isu politik dibentuk dan dihasilkan merupakan proses yang kompleks dan rumit. Proses ini mencakup interaksi antara mereka yang menyuarakan isu-isu politik dan kaum profesional media yang tidak selalu terbuka, lurus dan jujur.

2.3.2. Media Massa dan Kepentingan Publik

Kedudukan media massa sejak awal memang diharapkan untuk melayani kepentingan publik atau kesejahteraan secara umum. Dalam pandangan ini, media massa tidak dapat disamakan dengan entitas bisnis atau industri yang lain, karena kedudukannya sering dipandang dapat menyuarakan dan menyumbang pandangan-pandangan bagi kebaikan masyarakat. Sebab salah satu pandangan mengatakan bahwa kepentingan publik sebenarnya lahir dari proses demokratis, yakni proses pengambilan keputusan dan perdebatan.

Dalam konteks ini, pertanyaan pentingnya terletak pada seberapa banyak pengetahuan tentang pemerintah, kebijakan-kebijakan dan kepentingan-kepentingan publik yang bisa diperoleh masyarakat melalui pers atau media massa. Atas pertanyaan ini, masyarakat dapat mendapatkan informasi publik selain dari media massa. Misalnya, dari pengalaman individu, teman atau melalui

tetangga. Namun, cara ini sangat terbatas. Interaksi yang terjadi secara personal umumnya terjadi sangat sedikit dan terbatas bila dibandingkan dengan memperolehnya dari media massa.

Peran media dan kepentingan publik serta kebijakan politik, terletak pada posisi media dalam berpartisipasi di dalam proses-proses kebijakan baik untuk kepentingan yang spesifik atau aktif sebagai penghubung di dalam arus kebijakan komunikasi secara umum (Cobb and Elder, 1981:391). Media massa menstruktur proses kebijakan dan menjalankan sejumlah fungsi penghubung yang penting.

Pertama, media menjalankan fungsi *input* dasar terhadap proses kebijakan. Dengan melakukan seleksi, media dapat mengarahkan langsung terhadap aspek penting dan kondisi lingkungan yang ada. Media tidak hanya merespon permintaan, tetapi secara aktif sebagai agen yang merangsang, menyaring dan menstruktur *input* di dalam proses-proses kebijakan. Dengan demikian sangat jelas, media mendefinisikan dari dua arah yakni mendefinisikan agenda-agenda masyarakat secara sistematis, sedangkan di sisi lain mendefinisikan agenda-agenda pemerintah sebagai agenda formal.

Kedua, bila dicermati media berhubungan dengan dinamika internal dari aspek formal proses pembuatan keputusan. Di sini media memberi saluran-saluran penting bagi komunikasi diantara pembuat keputusan-keputusan dan bertindak sebagai sumber yang siap dipakai- yang menentukan informasi yang relevan terhadap kebijakan. Peran ini dapat mempersingkat rute dan jalannya informasi sehingga jalur-jalur formal yang penuh hambatan dapat dipersingkat dan diperpendek.

Ketiga, media menghubungkan *output* dari proses kebijakan. Media dalam hal ini menyampaikan dan sebagai penerjemah terhadap catatan-catatan publik yang ada. Banyak informasi yang dihasilkan di dalam proses-proses kebijakan secara nominal merupakan masalah rekaman-rekaman publik.

Dalam konteks tersebut, kaidah kerja media massa khususnya kerja jurnalistik dalam kaitannya dengan kepentingan publik bertujuan pada obyektivitas dan kebenaran fakta. Hukum besi dalam epistemologi jurnalisme terhadap kepentingan publik adalah jurnalis

tidak ditoleransi menciptakan fakta (Siregar, 2010). Fakta sepenuhnya berasal dari dunia obyektif yang berada di luar dunia subyektifitas jurnalis. Menurut Siregar bahwa fakta ini dapat berada pada seseorang yang terlibat atau mengalami peristiwa, dapat pula kasus atau fenomena, yang berada pada suatu tempat atau keadaan tertentu. Subyektifitas di dalam fakta dapat bias, karena itu para jurnalis perlu mewaspadai subyektifitas dari individu-individu sebagai sumber fakta atau informasi tersebut khususnya mereka yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan.

Bagi media dan jurnalis, fakta merupakan dunia obyektif yang direkonstruksikan yang diperoleh melalui berbagai cara dalam prinsip-prinsip penggalian informasi dan data yang dilakukan jurnalis. Bila dicermati sebagian besar atau mungkin seluruhnya berita merupakan hasil konstruksi ulang yang dilakukan para jurnalis melalui proses *gate keeping* pemberitaan.

Apa yang dijelaskan di atas tersebut merupakan bentuk pengulangan paparan yang menegaskan pada fungsi dan kedudukan media massa dalam menjalankan fungsi *agenda setting* khususnya tentang agenda media. Sedangkan sisi lain dari *agenda setting* yakni tentang agenda kebijakan atau publik, belum dijabarkan sepenuhnya. Dalam terminologi politik, apa yang dimaksud dengan agenda kebijakan yang menjadi kepentingan publik terjadi melalui proses di mana kelompok-kelompok kepentingan melakukan elevasi (meningkatkan daya tekan dan sebar) terhadap isu-isu dan melakukan penolakan-penolakan terhadap isu-isu yang lain (Birkland, 2001: 105).

Agenda kebijakan dan kepentingan publik ini merupakan proses di mana masalah-masalah dan pemecahan alternatif diperoleh atau lepas dari perhatian publik atau lepas dari perhatian elit politik. Kompetisi kelompok kepentingan untuk memastikan agenda kebijakan dan kepentingannya terjadi sangat tajam dan keras. Sebab tidak ada masyarakat atau sistem politik manapun di dunia yang mempunyai kapasitas institusional yang mengarahkan semua alternatif-alternatif yang ada kepada semua masalah yang muncul. Kelompok kepentingan, elit politik atau aktor politik harus bertarung untuk menempatkan isu-isu mereka di antara isu-isu yang lain.

Bahkan ketika isu-isu tersebut telah mendapatkan perhatian publik, mereka masih harus berjuang untuk memastikan bahwa gambaran mereka terhadap isu yang mereka perjuangkan masih tetap berada di jajaran depan di antara isu-isu yang lain. Alasannya sangat jelas sebagaimana dinyatakan oleh Schattschneider bahwa kelompok, elit politik atau aktor politik yang sukses mendeskripsikan masalah mereka adalah orang-orang yang akan menentukan pemecahannya dan karena itu mereka yang akan mendominasi perdebatan dalam proses pengambilan keputusan (Birkland, 2001: 106).

Pengertian agenda dan kebijakan publik merupakan kumpulan masalah, pemahaman terhadap sebab-sebab, simbol-simbol, pemecahan-pemecahan dan elemen-elemen lain dari masalah-masalah publik yang mendapat perhatian publik dan pejabat resmi pemerintah. Dengan demikian agenda kebijakan dan kepentingan publik dapat sangat konkret seperti daftar rancangan undang-undang, atau dapat juga mencakup sejumlah keyakinan-keyakinan yang ada terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Dengan demikian agenda kebijakan dan kepentingan publik ini berada pada semua level pemerintahan. Setiap komunitas dan setiap organ pemerintah, seperti parlemen, eksekutif, yudikatif, komisi negara dan seterusnya mempunyai sejumlah isu yang ada bagi perdebatan, diskusi atau pun disposisi. Semua isu dapat dikategorisasikan berdasarkan perluasan yang dilakukan institusi yang dipersiapkan untuk membuat keputusan supaya dijalankan dan diimplementasikan atau untuk menolak kebijakan-kebijakan tertentu.

Karena agenda kebijakan dan kepentingan publik ini sangat luas, penting artinya di dalam paparan ini untuk melihat level agenda yang ada di dalam sistem politik pada umumnya. Level yang paling luas dan besar disebut sebagai agenda universal (*universe agenda*) yang memuat semua gagasan yang mungkin didiskusikan di masyarakat atau di dalam sistem politik. Di dalam negara demokrasi, semua gagasan cenderung tidak dihambat atau dibatasi. Namun dalam tingkatan kepentingan tertentu, tetap terdapat isu-isu yang dibatasi. Misalnya di AS, isu-isu rasis dan seks yang ekstrem dan vulgar

cenderung tidak ditoleransi menjadi sebuah wacana publik. Di Jerman, tulisan yang memuji Nazisme dan yang menolak *holocaust* terjadi, dipandang sebagai sesuatu yang ilegal. Di Kanada terdapat larangan bagi pidato dan ekspresi kebencian. Jadi, agenda kebijakan dan kepentingan publik yang sangat luas tersebut tidak semuanya dapat diterima. Hanya agenda yang sistematis saja yang kurang lebihnya dapat diterima.

Menurut Cobb dan Elder (dalam Birkland, 2001: 107) agenda kebijakan dan kepentingan publik yang dapat diterima tersebut merupakan agenda sistemik, yang mereka artikan sebagai semua isu yang umumnya dipersepsikan oleh anggota-anggota komunitas politik sebagai perhatian publik yang memberi manfaat dan di dalamnya terdapat masalah yurisdiksi yang sah dari kewenangan kekuasaan pemerintah. Dalam pandangan Birkland (2001) bila gagasan dalam agenda sistemik ini berhasil dielevasikan, maka agenda ini bergerak menjadi agenda institusional yang menjadi pertimbangan serius bagi para pengambil keputusan di dalam kekuasaan pemerintahan. Dalam kenyataannya, hanya sedikit isu yang akan mencapai agenda keputusan (*decision agenda*). Tidak semua agenda-agenda kelembagaan menjadi agenda keputusan. Umumnya, agenda keputusan merupakan abstraksi atau saripati dari agenda-agenda kelembagaan.

Dari semua proses tersebut, media massa dan para jurnalis dapat masuk ke dalam level-level agenda kebijakan dan kepentingan publik tersebut, sebelum pada akhirnya mencapai agenda keputusan. Posisi krusial media massa dan para jurnalis adalah sejauh mana keterlibatan mereka di dalam mengambil keputusan untuk membingkai isu-isu yang bertarung tersebut sehingga menjadi isu publik dan isu kebijakan. Intervensi langsung mereka sebenarnya sangat terbatas, namun pengaruh besarnya justru terletak pada bagaimana media massa dan para jurnalis melihat kepentingan-kepentingan itu secara luas baik bagi masyarakat atau bagi kepentingan mereka sendiri.

Dugaan-dugaan yang sukar diprediksikan adalah adanya kenyataan bahwa kemampuan kelompok kepentingan, aktor politik atau pun elit politik di dalam memperjuangkan isu agar menjadi

agenda kepentingan bukan merupakan sebuah fungsi sederhana. Seringkali dalam upaya demikian, kelompok satu dengan kelompok yang lain berkoalisi, satu kelompok satu lebih kuat dari kelompok yang lain. Atas kondisi demikian itu, media massa sering terseret pada pengarusutamaan terhadap kekuatan dominan atau mengambil posisi dengan mendukung yang lemah. Semua posisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan orientasi yang dimiliki oleh media dan para jurnalis itu sendiri.

Peringatan penting terhadap kondisi ini dapat dicermati dari pandangan E.E Schattschneider (dalam Birkland, 2001: 111) yang menyatakan bahwa semua bentuk organisasi politik mempunyai bias yang berusaha mengeksploitasi sejumlah jenis konflik dan tekanan terhadap yang lain dikarenakan organisasi politik tidak lain adalah mobilisasi terhadap bias. Sejumlah isu diorganisasikan ke dalam politik, sedangkan sejumlah yang lain diorganisasikan untuk disingkirkan.

Apa yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa media pemberitaan merupakan aktor penting di dalam proses kebijakan. Kebebasan pers yang mencakup media televisi, radio, internet dan surat kabar telah menjalankan fungsi sebagai *watchdog* bagi jalannya pemerintahan. Para jurnalis dan akademisi telah menguatkan keyakinan-keyakinan bahwa media pemberitaan memainkan peran yang penting dalam menginformasikan warga negara tentang isu-isu dan apa yang pemerintah telah lakukan bagi mereka. Di dalam istilah ilmu politik, dapat dikatakan bahwa semakin besar level peliputan pemberitaan sangat berkaitan dengan semakin besar level perhatian institusional terhadap masalah-masalah publik. Pengaruh media pemberitaan berada di antara kemampuannya menekan para pembuat kebijakan untuk memberi perhatian pada masalah-masalah publik.

Dalam proses ini, media pemberitaan bukan aktor pasif di dalam mengambil keputusan untuk meliput cerita-cerita berita tertentu. Interaksi dan interrelasi, memungkinkan kegiatannya dapat dipengaruhi beberapa kondisi. Pertama, kelompok kepentingan sering berusaha membangkitkan atau memprovokasi media pemberitaan

untuk mengarahkan perhatian yang lebih besar pada suatu isu atau masalah tertentu. Kedua, media pemberitaan sering digerakkan oleh pertimbangan bisnis dan keputusan terhadap cerita apa yang diliput yang dapat mempunyai konsekuensi ekonomis. Faktor ini seringkali menggoda media pemberitaan untuk menghampiri sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber kekuasaan yang akan memberi konsensi dan kompensasi yang besar.

2.3.3. Media Massa dalam Political Environment

Dapat dikatakan bahwa keberadaan media massa di dalam lingkungan politik ada di mana-mana. Media pemberitaan dapat hadir dan ada di dalam lembaga pemerintahan-eksekutif. Media pemberitaan juga dapat ada dan hadir dalam peliputan kegiatan-kegiatan parlemen, peradilan, kepolisian, kedutaan, kepresidenan dan seterusnya. Hubungan-hubungan yang terjadi mencerminkan berbagai kepentingan-kepentingan tertentu.

Tulisan dari Susan Heilman Miller (1984) misalnya, menunjukkan bahwa antara para jurnalis dan anggota parlemen (kongres) hidup dalam hubungan simbiosis. Tulisan David Altheide (1984) juga menjelaskan persoalan berita-berita televisi di AS dihadapkan dengan pemberitaan televisi Iran. Tulisan Mary Russel (1984) mengungkapkan peran pers di dalam sistem komite politik di AS dan tulisan-tulisan lain yang menunjukkan kedudukan media massa dalam lingkungan politik.

Pertautan penting media massa dan lingkungan politik, tidak lain membicarakan struktur-struktur politik (*political environment*) yang ada dengan lingkungan media (*media environment*). Pada satu sisi, politik dijalankan di dalam sebuah sistem yang menempati lingkungan, sedangkan di sisi lain media beroperasi di dalam sistem yang menempati lingkungan tertentu pula. Bahkan hubungan ini telah sampai pada tingkat integral seperti yang dikemukakan oleh Colin Seymour-Ure.

Menurutnya, dengan keberadaan televisi yang melakukan ekspansi yang begitu besar sejak tahun 1950-an di AS, televisi telah

menjadi bagian integral dalam lingkungan di mana kehidupan politik terjadi. Survey menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat luas mempercayakan media dalam merepresentasikan sumber utama mereka dalam mendapatkan informasi politik.

Dalam konstelasi yang terjadi di dalam struktur media dan struktur politik tersebut, media acapkan berperan sebagai aktor politik penting. Media tidak hanya menstransmisikan pesan-pesan politik dari struktur-struktur politik baik mereka yang berada di dalam infrastruktur atau pun suprastruktur, tetapi media juga menstransformasikan mereka ke dalam berbagai proses-proses pembuatan berita dan proses interpretasi.

Apa yang politisi ingin katakan tidak selalu harus dan perlu dilaporkan media. Media mempunyai hak tersendiri untuk melaporkan atau untuk tidak melaporkan baik dalam bentuknya sebagai komentar, editorial, atau pun dalam bentuk wawancara. Pernyataan-pernyataan tersebut mempunyai dampak signifikan pada lingkungan politik yang lebih luas. Hubungan antara media dan proses politik merupakan proses yang bersifat dialektik, yang mencakup aksi dan reaksi. Media melaporkan dan menganalisis kegiatan politik, tetapi mereka juga merupakan bagian di dalamnya, sebagai sebuah sumber bagi aktor-aktor politik dan bagi para penasehat-penasehatnya.

Edmund Burke lebih jauh menjelaskan bahwa media merepresentasikan sumber pengetahuan yang independen, tidak hanya menginformasikan masyarakat terhadap politik, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan (McNair, 2003: 48). Media menyumbang pada diskusi-diskusi kebijakan dan resolusi, tidak hanya menyajikan agenda-agenda publik atau memberi *platform* bagi para politisi untuk menampilkan sudut pandang mereka agar terkenal dan diketahui masyarakat, tetapi juga memutuskan dan membuat penilaian serta mengkritik beragam sirkulasi pandangan-pandangan politik.

Kedudukan media di dalam lingkungan politik yang paling nyata sebagai aktor adalah kemampuannya melakukan definisi terhadap realitas. Media mempunyai kemampuan dan keahlian dalam

mendefinisikan realitas politik. Melalui proses-proses pengumpulan berita dan proses produksi, khalayak pada akhirnya disuguhi dengan artikulasi jadi terhadap realitas di dalam masalah-masalah politik. Dengan perkataan lain, para jurnalis mengkomunikasikan kepada khalayak tentang makna politik.

Kemampuan para jurnalis ini terlihat ketika mereka memasukkan kejadian-kejadian dalam kehidupan politik ke dalam kerangka kerja naratif yang memungkinkan mereka untuk menceritakkannya dalam bentuk cerita berita. Kerja ini sepenuhnya merupakan hasil dari pena jurnalis yang dikembangkan melalui interaksi dan kompetisi antara media-media pemberitaan yang berbeda, antara aktor-aktor politik yang berbeda dan sumber-sumber berita yang berbeda.

2.4. Opini Publik dan Media Massa

Sejarah panjang tentang opini publik sering dipandang sebagai produk pada jaman Renaissance (*enlightment*/ pencerahan). Gagasan ini terkait dengan filsafat politik liberal pada akhir abad 17 dan 18 serta secara khusus berkembang pada abad 19 terkait tentang teori demokrasi. Banyak penulis yang memberi perhatian opini publik dengan mempertanyakan secara dasar, yakni apa sebenarnya yang dimaksud dengan opini publik. Davison (1968) misalnya, menyatakan bahwa tidak ada definisi yang secara umum diterima. Sekalipun begitu, upaya untuk menjernihkan konsep ini sudah banyak dilakukan baik dari para filosof, hakim, sejarawan, pakar politik dan jurnalis.

Bahkan dalam filsafat Yunani Kuno, Plato memandang opini publik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik yang demokratis. Menurut Aristoteles, sentimen kolektif dari rakyat yang dikatakannya sebagai demos akan dan dapat memberi sumbangan pada semacam kepekaan terhadap persoalan-persoalan politik (Price, 1992: 5). Kombinasi antara opini dan publik menjadi sebuah istilah majemuk yang pada gilirannya mempunyai akar dan kaitannya dengan filsafat-filsafat demokrasi dan kebebasan.

Istilah opini itu sendiri, setidaknya mengandung dua pengertian pokok. Pertama, pengertian secara epistemologis yang secara esensial

membedakan dua hal, yakni persoalan penilaian (*a matter of judgement*) dengan persoalan fakta (*a matter of fact*). Dalam pengertian ini, opini lebih cenderung sebagai “*a matter of opinion*” dari pada “*a point of view*”.

Kedua, pengertian yang lebih mengacu pada konsep yang lebih modern, yang menyamakan opini dengan sikap-sikap, moral-moral dan kebiasaan-kebiasaan (Noelle-Neumann, 1984). Dalam pengertian ini, tekanannya pada peran opini populer yang dapat diartikan sebagai kontrol sosial dan tekanan sosial informal. Pada saat bersamaan dengan demikian, opini dapat disamakan dengan reputasi, harga diri dan pandangan umum orang lain. Pengertian ini mudah untuk dipahami, bahwa pandangan umum akan menentukan kredibilitas seseorang atau lembaga tertentu. Dengan demikian, baik buruknya kredibilitas itu langsung atau tidak langsung dipengaruhi atau ditentukan oleh opini publik yang berkembang.

Sementara kata publik itu sendiri sebagai konsep dan penerapannya kemudian mengalami perkembangan dan pergeseran. Istilah publik mempunyai beberapa arti dan makna. Kata publik berasal dari kata *publicus* yang diperkirakan berasal dari akar kata *poplicus* atau *populus* yang berarti orang-orang. Dalam pengertian yang semacam itu, publik mempunyai pengertian pada sesuatu yang dapat diakses sebagai “*public place*”. Esensi pengertian ini terletak pada dua unsur penting di dalamnya, yakni ketersediaan dan keterbukaan. Pengertian awal ini bahkan hingga sekarang masih banyak digunakan. Kata mempublikasikan misalnya, mempunyai pengertian bahwa ini merupakan proses yang menjadikan sesuatu ada di mana-mana dan menjadi sesuatu yang terbuka (Price, 1992: 7). Fungsi dan peran pers mempublikasikan berarti menjadikan suatu isu atau kebijakan diketahui di mana-mana dan menjadi sesuatu yang lebih terbuka.

Pengertian publik yang lain merujuk pada kepentingan umum yang sering dikontradiksi dengan kata privat. Dalam perkembangan kemudian Habermas (1989:11) menyatakan bahwa yang disebut sebagai publik merujuk pada: “*an entity having an objective existence over and against the person of the ruler.*” Seringkali kata

publik dibedakan dan dibandingkan dengan kata *crowd* dan *mass*. Sekalipun ketiga kata tersebut merujuk pada sekumpulan orang-orang, namun ketiga istilah tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda.

Istilah *crowd* sebagai sekumpulan orang-orang diikat oleh kesatuan emosi dan perasaan. Di dalam *crowd* ini yang dibutuhkan adalah kemampuan berempati. Sementara istilah *mass*, merupakan kumpulan orang-orang yang diikat oleh fokus perhatian yang sama. Sedangkan istilah publik diikat oleh wacana rasional. Karena itu yang diperlukan di dalam publik adalah kemampuan berpikir rasional dan kemampuan berargumentasi karena mereka terlibat dalam praktek-praktek wacana tentang suatu isu tertentu (Price, 1992:25).

Dari sudut pandang bahwa publik merupakan kumpulan orang-orang yang diikat oleh wacana rasional di dalam praktek-praktek wacana politik, maka keberadaan opini publik dapat dianalisis dari setidaknya-tidaknya dua pendekatan. Sebagai kelompok sosial, kajian opini publik dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan bila kajian difokuskan pada persepsi dan pandangan individu, lebih merupakan kajian psikologis.

Dalam perkembangannya, opini publik lebih merupakan persoalan politik dibandingkan sebagai persoalan sosial. Littlejohn (2002:315) melihat topik kajian dalam opini publik mencakup tiga wilayah besar. Pertama, opini publik sebagai konsep yang merepresentasikan opini yang diekspresikan secara publik. Kedua, opini publik sebagai konsep yang melihat opini berkaitan dengan persoalan-persoalan publik. Ketiga, opini publik sebagai konsep opini publik secara umum.

Habermas mengatakan bahwa terdapat karakteristik rasional dan egalitarian di dalam opini publik. Menurutnya, opini publik meningkatkan percakapan dan perdebatan menjadi wacana rasional. Debat menjadi sebuah debat publik ketika perdebatan itu ditujukan untuk menentukan keinginan umum atau kebaikan umum dan bukan semata-mata merupakan benturan kepentingan individu. Debat itu sendiri harus bersifat terbuka.

Meskipun Habermas mensyaratkan demikian, pertanyaan-pertanyaan krusial tentang akurasi interpretasi di dalam upayanya memberi pandangan dan pendapat secara terbuka, egaliter dan rasional tetap dipertanyakan. Pertanyaan ini didorong oleh banyak kenyataan bahwa nilai-nilai tentang egalitarian, pikiran rasional dan keterbukaan seringkali bersifat ambivalen, apalagi dihadapkan pada kontestasi di dalam politik. Intinya adalah di dalam opini publik bukannya tidak mungkin terdapat ambiguitas makna. Karena itu, Price (1992) berpandangan bahwa opini publik seharusnya menstransendensikan opini individu dan mencerminkan sebuah abstraksi kepentingan umum dari pada diarahkan hanya merupakan sebuah kompromi dari kepentingan-kepentingan individu.

Masalah lainnya terletak adanya aspek bahaya di dalam melihat kekuatan opini publik sebagai opini mayoritas. Terdapat kemungkinan besar di dalam opini publik yang tercipta sebagai opini yang dominan, sehingga pandangan yang lebih rendah dan minor menjadi kelompok yang tertinggal, sendirian dan tidak terlindungi. Noelle-Neumann (1984) menyebut hal ini sebagai *spiral of silence*. Ada dua premis utama yang dapat dicermati dari pandangannya tersebut. Pertama menurutnya, orang-orang mengetahui yang mana opini-opini yang merupakan prevalensi dan mana yang bukan. Kedua, orang-orang menyesuaikan ekspresi opininya dengan persepsi-persepsi tersebut. Umumnya kebisuan terjadi ketika seseorang menyadari bahwa opininya merupakan opini minoritas. Kecenderungan yang terjadi, orang itu ingin menghindari dan takut berkonfrontasi terhadap opini publik sebagai opini mayoritas.

Bahkan Bryce berpendapat bahwa opini publik yang berlangsung lama telah menjadi kekuatan yang berkuasa. Absolut yang lebih besar adalah kewenangan mayoritas. Dalam pengertian yang demikian, publik adalah sebuah konstruk utama ideologis dan politik yang memberi sebuah sistem baru bagi kewenangan di mana pemerintah dan kritik-kritiknya harus diarahkan bagi penilaian untuk memelihara tujuan utamanya. Situasi ini senada dengan apa yang digambarkan oleh Dan Nimmo (1978) bahwa opini publik dapat menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan konstruksi politik (*po-*

litical construction) yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Hal yang sama dalam konteks yang agak berbeda juga diungkapkan Habermas. Menurutnya, dengan melakukan pengelolaan informasi dapat diandalkan untuk melakukan konstruksi politik.

Information management... is fundamental to administrative coherence of modern government. The reliance on communication and information has become paramount for government in their attempt to manipulative public opinion and to maintain social control.

Walter Lippman juga memperingatkan bahwa di dalam sistem pemerintahan yang demokratis, diperlukan peran masyarakat yang luas, aktif dan berkembang. Namun, menurutnya, mereka tidak dapat diharapkan berperilaku seperti seorang legislator yang seharusnya aktif dan terlibat dalam berbagai isu-isu penting di dalam kehidupan politik. Sebagai masalah, menurut Lippman, sebenarnya masyarakat mengalami ketidakperhatian terhadap kebijakan-kebijakan umum serta kurang peduli terhadap persoalan-persoalan politik. Sementara dunia politik, sebenarnya merupakan ranah kehidupan yang jauh dari jangkauan (*out of reach*), jauh dari kejelasan (*out of sight*) dan jauh dari pikiran (*out of mind*). Jadi, keberadaan informasi dalam konteks demikian sangat penting. Informasi merupakan inti dari *public sphere* yang di dalamnya, aktor-aktor secara jelas terlihat jelas posisinya di dalam argumen yang dinyatakan secara eksplisit dan pandangan-pandangannya juga ditujukan pada publik yang lebih luas yang dapat diakses secara penuh dan prosedural.

Di sini, menurut Lippman, pers dipandang penting sebagai instrumen bagi pendidikan dan pengembangan publik. Meskipun peran dan kedudukan ini tidak mencakup semua persoalan publik, tetapi tetap diperlukan kekuatan-kekuatan yang mengorganisasikan opini publik oleh pers baik dalam interaksi dengan mereka yang ahli di bidang organisasi, ilmuwan politik, pejabat politik, aktivis atau pun kaum profesional lainnya.

Dengan perkataan lain, pers tidak mungkin menstranslasikan keseluruhan kehidupan publik dari umat manusia (Price, 1992: 17),

tetapi dapat melakukan seleksi terhadap isu-isu penting yang menjadi perhatian publik. Dengan pers atau media massa, demokrasi dapat dikoreksi, bukan pada persoalan bagaimana semua kehidupan publik disajikan, melainkan media massa menjembatani persoalan pada bagaimana metode dan kondisi perdebatan, diskusi dan persuasi berlangsung. Bahkan dikatakan bahwa masyarakat dapat bertahan dan *survive* di dalam dunia modern dengan belajar terhadap apa yang mereka butuhkan dan terhadap apa yang mereka butuhkan untuk mengetahui.

Argumen semacam itu juga dibangun oleh Lang and Lang (McComb and Shaw, 1991: 18) yang menyatakan bahwa kekuatan media massa memberi kepastian terhadap isu-isu. Media massa membangun dan menciptakan pencitraan-pencitraan publik terhadap figur-figur politik. Media massa secara konstan menyajikan sesuatu, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, dan obyek-obyek yang menyarankan agar individu-individu berpikir apa, mengetahui tentang apa dan mempunyai rasa yang seperti apa.

Apa yang dilakukan para jurnalis melalui media massa di mana mereka bekerja dan keputusan yang mereka buat dalam kesehariannya, terutama dalam melakukan seleksi dan penyajian cerita-cerita pemberitaan mempengaruhi persepsi publik terhadap isu apa yang dianggap penting. Pengaruh pemberitaan media terhadap isu-isu yang menonjol dari isu-isu kunci politik telah banyak dikaji. Para ilmuwan komunikasi, khususnya komunikasi massa telah menempatkan kajian ini sebagai fungsi dari *agenda setting* media massa. Dengan demikian, persepsi publik dari bentuk komunikasi massa tidak lain kecuali kreasi seleksi yang ditonjolkan oleh media massa, sekaligus merupakan produk dari praktek para jurnalis yang membentuk pemilihan dan pemilahan terhadap isu-isu tertentu.

Konsep *agenda setting* media massa itu sendiri merupakan konsep yang menyatakan bahwa khalayak belajar terhadap isu-isu penting dari prioritas yang dilakukan oleh media massa. Artinya, agenda setting mencerminkan suatu konsep yang menghubungkan isu-isu apa yang diangkat media pada satu sisi, sedangkan di sisi lain isu-isu yang disajikan tersebut berhubungan dengan persepsi

khalayak. Oleh karena itu, dengan menempatkan isu atau topik pada agenda publik, media massa umumnya dipandang yang menjadikan isu atau topik tersebut sebagai fokus dari perhatian publik, sebagai pemikiran, perdebatan, diskusi atau pun menjadi wacana rasional.

Dalam pandangan McComb dan Shaw (1991), kemampuan media massa memfokuskan suatu isu atau topik menjadi fokus perhatian publik merupakan fase awal dalam proses pembentukan opini publik. Menurut keduanya, opini publik biasanya memfokuskan pada distribusi pandangan-pandangan yang pro dan yang kontra suatu isu, sebelum hal tersebut menjadi publik. *Agenda setting* mengarahkan pada perhatian sebagai tahap awal proses opini publik, yakni tahap di mana suatu isu muncul dan berkembang. Bernard Cohen (1963:13) berpandangan:

The press is significantly more than a purveyor of information and opinion. It may not be succesful much of time in telling people what to think, but it is stuningly succesful in telling its reader what to think about

Media massa dengan demikian memiliki kemampuan membawa isu menjadi lebih besar dan luas sehingga isu tidak lagi menjadi pandangan individu, melainkan menjadi isu yang bersifat publik sehingga sulit untuk membedakan lagi isu tersebut bersumber dari siapa dan kapan. Fase-fase pembentukan opini publik itu sendiri memang mencakup beberapa tahapan. Sebuah isu dapat mengalami perkembangan dan perubahan baik dari ukuran, komposisi, pihak-pihak yang terlibat, karakteristik perdebatan dan bahkan bagaimana isu tersebut dipecahkan (Price, 1992: 30).

Demikian pula publik juga mengalami perkembangan dan perubahan yang mencakup ukuran, komposisi dan keterlibatan yang ada. Oleh karena itu, publik secara mendasar terdiri dari dua level, yakni mereka yang aktif dan mereka yang pasif. Secara teoritik, publik yang aktif merupakan aktor yang berusaha mempengaruhi terbentuknya isu, arah isu, dan tujuan-tujuan dari isu itu sendiri. Sedangkan level kedua adalah khalayak yang mengikuti perkembangan isu. Dalam bentuk-bentuk komunikasi politik yang sukses, hubungan antara mereka yang berusaha mempengaruhi

terbentuknya isu, arah isu dan tujuan-tujuan isu itu sendiri dengan mereka yang mengikuti perkembangan itu, merupakan hal yang sangat penting. Utamanya hubungan ini digunakan untuk mempengaruhi dan memberi tekanan politik bagi tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Namun dalam tahap-tahap di mana suatu isu menjadi isu publik, media massa merupakan bagian penting yang mampu menyebarkannya dan memperluas magnitudo.

Bagi media televisi, kemampuan ini lebih besar lagi. Bourdiue menunjukkan adanya paradoksal antara apa yang disajikan dengan apa yang disembunyikan (*show and hide*). Bourdiue menyatakan bahwa televisi menyembunyikan sesuatu dengan menunjukkan sesuatu dari apa yang seharusnya ditunjukkan. Televisi melakukan seleksi terhadap aspek yang sangat spesifik terhadap kategori-kategori yang tertentu sebagai sebuah cara mereka melihat sesuatu. Kategori-kategori ini dapat merupakan produk dari pendidikan, sejarah dan seterusnya.

Namun hal yang penting dari pandangannya adalah bahwa prinsip determinasi terhadap seleksi ini adalah dalam rangka mencari sensasi dan spektakuler. Televisi mencari dramatisasi dalam dua hal. Pertama, meletakkan kejadian pada panggung. Kedua, menempatkannya pada suatu *image*/citra tertentu. Dengan dua hal tersebut, suatu kejadian dapat menjadi serius, dramatik bahkan tragis. Televisi mempunyai kapasitas khusus untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai *reality effect* yakni menunjukkan sesuatu dan menjadikan orang-orang percaya terhadap apa yang ditontonkan. Kekuatan pada tontonan ini adalah kekuatan untuk memobilisasi. Televisi dapat memberi kehidupan suatu gagasan atau cita-cita. Kehidupan sosial primer dideskripsikan dan dipresikripsikan oleh televisi.

Televisi adalah sebuah instrumen komunikasi dengan otonomi yang sangat kecil, sebagai subyek penuh dengan tekanan yang muncul dari relasi-relasi sosial antara berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Hubungan ini mencakup dua hal yakni hubungan kompetisi (*relations of competition*) dan hubungan terhadap benturan kepentingan (*relations of collusion*). Ini merupakan fungsi yang menempatkan posisi jurnalis televisi pada produksi simbolik dan saling berbagi

pengetahuan, persepsi dan struktur-struktur evaluatif. Sekarang ini, televisi telah membawa pada kondisi ekstrem, sebuah kontradiksi yang menghantui setiap ruang produksi budaya. Misalnya kontradiksi antara kondisi ekonomi dan kondisi sosial menghasilkan tipe kerja tertentu dan kondisi-kondisi sosial tertentu bagi transmisi produk televisi yang dihasilkan dari keadaan-keadaan tersebut. Televisi juga membawa kontradiksi yang esktrm melalui rating-rating audience terhadap lingkungan budaya produksi, yang hal ini mencerminkan adanya tekanan-tekanan pasar.

Peran yang dimainkan jurnalis melalui media massa di mana mereka bekerja dapat dicermati dari tindakan-tindakan mereka dalam melakukan peliputan terhadap peristiwa-peristiwa, termasuk peristiwa politik yang menjadi domain penelitian ini. Mereka juga melakukan kegiatan monitoring terhadap aktivitas-aktivitas dari aktor-aktor politik, yang menggerakkan masyarakat untuk memberi perhatian publik di sekitar persoalan-persoalan elit politik.

Dalam posisi demikian, media massa menjalankan sejumlah fungsi fundamental. Fungsi pengawasan (*surveillance*) merupakan fungsi yang paling sering diklaim oleh media massa dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Melalui fungsi tersebut, media massa mencoba memperingatkan atau memberi kewaspadaan publik terhadap masalah-masalah yang ada. Mereka berusaha memberitakan bentuk-bentuk perilaku elit politik, tindakan-tindakan mereka, motif tindakan mereka dan konflik internal yang terjadi sebagai bentuk perhatian yang ditujukan buat publik.

Jadi, media massa memberi semacam mekanisme dan prinsip yang memungkinkan terciptanya perhatian publik yang digunakan untuk memonitor lingkungan politik. Dengan perkataan lain, media massa membawa fungsi korelasi bagi perhatian publik dengan membantu mengkoordinasikan respon-respon internal itu sendiri terhadap lingkungan politik. Media pemberitaan dalam konteks demikian itu melakukan perbandingan pemikiran dan pandangan di dalam perhatian publik, melaporkan kepada anggota-anggotanya terhadap apa yang dipikirkan dan membantu mengorganisasikan tindakan-tindakan kolektif. Secara teoritik, fungsi ini disebut sebagai

poll-taking media. Media tidak hanya dipakai melalui polling opini tetapi juga terlihat pada editorial, wawancara, dan karakteristik informal lainnya dalam opini publik.

Bagi aktor politik, karakteristik media terhadap opini di dalam perhatian publik pada gilirannya digunakan oleh elit politik untuk memonitor reaksi-reaksi publik. Aktor politik dengan demikian, memberi perhatian terhadap berita-berita untuk melihat seberapa besar tindakan atau reaksi publik sesuai yang diharapkan. Berita dengan begitu menjadi sebuah arena pertarungan kepentingan setidaknya merupakan arena yang dipakai untuk belajar, memahami dan bereaksi satu sama lainnya. Elit politik menggunakan media tidak hanya berkomunikasi dengan pendukungnya dan lawan-lawan politiknya di dalam perhatian publik, tetapi juga berbicara diantara mereka sendiri. Pernyataan-pernyataan yang mereka isukan kepada publik secara umum sering dimaksudkan sebagai pesan kepada elit politik yang lain (Price, 1992: 81-82).

Bagaimanapun mekanisme proses informasi berhubungan dengan isi dan format pesan yang dibingkai ke dalam pikiran seseorang yang digerakkan oleh pesan-pesan yang dihasilkan di dalam bidang dan ranah komunikasi. Upaya untuk menciptakan kekuatan dalam konteks ini sebenarnya tidak lain dari pemahaman terhadap bagaimana cerita-cerita berita diproduksi di dalam media dan bagaimana cerita-cerita berita itu diseleksi dan diinterpretasikan (Castells, 2009: 155). Dengan perkataan lain, pembingkaiian terhadap pikiran publik secara luas dapat dilakukan di dalam proses-proses yang terjadi di dalam media.

Studi yang dilakukan Graber (2007) misalnya melihat berita-berita televisi yang merupakan sumber utama informasi politik menata topik-topik khusus sebagai agenda mereka dengan melaporkan cerita-cerita berita secara berulang-ulang, menempatkannya sebagai *headline* penyiaran, meningkatkan durasi peliputan dan penayangan, menyatakan pentingnya cerita tersebut, menyeleksi kata dan gambar-gambar yang merepresentasikan cerita serta menayangkannya sebelum waktu tayang sesungguhnya.

Dalam banyak peluang dan kepentingan, apa yang dilakukan media massa dalam menjalankan fungsinya memberi perhatian publik, seringkali bertindak tidak berimbang (bias). Secara teknis, media massa dihadapkan pada persoalan keterbatasan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemandirian media massa. Satu diantaranya adalah soal *mass media-space time*. Ada banyak berita, editorial dan analisis yang disajikan atau ditayangkan. Namun, apa-apa yang disajikan tersebut sangat tergantung pada struktur ekonomi dan politik serta konteks insititusi media itu sendiri. Seringkali di dalam organisasi media seperti sekarang ini, apa yang mesti diliput dan disajikan lebih dipengaruhi oleh mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan di dalamnya. Kedua, organisasi media digerakkan oleh faktor ekonomi untuk mendapatkan khalayak yang lebih luas dan besar- peliputan, penayangan atau penyajian begitu kontroversial, begitu "*demanding*" dan begitu mengganggu. Ketiga, media begitu mudah dimanipulasi oleh pemerintah atau badan-badan resmi baik melalui pernyataan-pernyataan resmi, *press release* yang seringkali tanpa filter dan seleksi. Keempat, media itu sendiri menghambat atau mempengaruhi peliputan, misalnya televisi membiarkan diri pada orientasi tindakan, peristiwa yang tidak diteliti lagi yang dapat mendistorsi makna dan arti pentingnya (Fowler, 1991).

Dengan demikian, disinformasi berita politik, dapat terjadi karena adanya kesadaran-kesadaran tertentu yang melihat kemampuan media massa dalam melakukan penyebaran informasi pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain saat bersamaan, media massa dapat melakukan bias. Dalam pengertian ini, bias menunjuk pada suatu kondisi adanya kecenderungan yang konsisten untuk melepaskan diri dari kebenaran obyektif dengan menyimpangkan apakah lebih berat ke kanan atau ke kiri (Shoemaker and Reese, 1996).

Penyimpangan informasi dalam pemberitaan politik dapat terjadi melalui berbagai cara dan metode. Secara teknis, media massa dihadapkan pada keterbatasan ruang dan waktu. Lippman (1991) mengatakan bahwa semua reporter di dunia yang bekerja sepanjang waktu, pada kenyataannya tidak dapat menyaksikan semua peristiwa

di dunia. Tidak banyak reporter yang hebat dan tak satupun dari mereka yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menjadi lebih banyak sehingga mereka dapat berada lebih dari satu peristiwa dan keadaan pada suatu waktu.

Sementara pada sisi lain, praktek-praktek media massa keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mengelilinginya. Apa yang disebut sebagai berita, pada hakikatnya merupakan produk dari berbagai kepentingan dan sudut pandang. Dari level individu, rutin media, organisasi media, sampai pada kepentingan ideologi-ideologi tertentu, mengakibatkan media massa menjadi sebuah keniscayaan, bila dikatakan keberadaannya dapat netral dan berimbang (Shoemaker and Reese, 1996).

Peristiwa-peristiwa nyata merupakan subyek proses-proses konvensional terhadap seleksi. Kita mengetahui bahwa surat kabar yang berbeda melaporkan hal-hal yang berbeda baik dari isi atau cara penyajiannya. Setiap proses seleksi disertai oleh transformasi, perlakuan yang berbeda, sesuai dengan faktor-faktor ekonomi, sosial atau pun politik. Ada pandangan yang menyatakan bahwa bias terjadi karena ini adalah negara yang bebas, dengan sebuah pilihan, pemerintahan yang representatif, dan kita mempunyai kebebasan pers yang menempatkan berbagai sudut pandang dan pikiran.

Berita adalah sebuah produk akhir dari sebuah proses yang kompleks yang bermula dari pemilihan yang sistematis, seleksi terhadap peristiwa atau kejadian dan topik-topik sesuai dengan kategori-kategori yang dikonstruksikan. Pers bukan sesuatu yang *self-defining*. Berita tidak ditemukan atau dikumpulkan. Ini merupakan kreasi dari proses jurnalistik, sebuah artifak, bahkan sebuah komoditas (Fowler, 1991: 13)

2.5. Media Massa dan Disinformasi

Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait dengan penelitian ini adalah bagaimana media massa dapat melakukan atau terjadi disinformasi dalam pemberitaannya. Dari paparan-paparan sebelumnya, di sana sini telah diuraikan bahwa terdapat hambatan-hambatan tertentu yang menjadikan apa yang disampaikan oleh para

jurnalis menjadi informasi yang sesat dan disinformatif. Sekalipun secara normatif, keberadaan media massa sejak awal tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan disinformatif, namun disinformatif tidak dapat dihindarkan sepenuhnya. Justru pemikiran-pemikiran yang ada menunjukkan bahwa adanya jaminan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, dimaksudkan untuk mencapai dan mengungkap kebenaran dan tidak dimaksudkan sebaliknya yakni menyembunyikannya.

Dalam konteks fungsi dan kedudukannya sebagai pengawas dan monitoring terhadap jalannya kekuasaan pun, tujuannya tidak dimaksudkan untuk mendukung penyalahgunaan kekuasaan. Media ditujukan untuk melindungi penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan esensi perlindungan tersebut terletak pada pengungkapan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jelas, dengan begitu, media tidak ditujukan untuk menyesatkan informasi atau pun membohongi publik.

Keberadaan media massa itu sendiri dihadapkan pada kondisi-kondisi yang bersifat *multifacet*-yang serba muka dan serba kepentingan. Pada sisi lain kemampuan yang dimilikinya, tidak hanya menjadi kesadaran yang dipahami oleh para jurnalis atau pekerja media itu sendiri, melainkan pihak-pihak lain, seperti kelompok kepentingan, aktor politik, parlemen, politisi, aparat penegak hukum dan seterusnya, - karena itu mereka berusaha untuk menguasainya. Paling tidak dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan media yang ditempuhnya.

Segi lain sebagai instrumen, media massa dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan yang sukar dihindari dan sepertinya tidak terpecahkan. Media massa merupakan media yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Surat kabar dibatasi oleh jumlah halaman dan kolom. Televisi dibatasi oleh jam tayang dan siaran. Tidak mungkin semua peristiwa yang terjadi di masyarakat disajikan oleh media. Media menyampaikan kebenaran, tetapi tidak semua kebenaran dapat disampaikan media.

Dengan kenyataan ini, para jurnalis memperlakukan sumber-sumber kejadian, peristiwa, permasalahan, aktor-aktor berdasarkan

prioritas dan seleksi. Akibatnya, media mengarahkan perhatian yang satu pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain mengabaikan perhatian yang lain. Proporsi yang tidak mungkin sepenuhnya berimbang dalam seleksi dan penyajian seringkali menjadi jalan masuk bagi terjadinya penyimpangan informasi.

Di dalam praktek-praktek yang dijalankan media massa itu sendiri, terdapat level-level yang berbeda, yang setiap level memungkinkan menyumbang terjadinya disinformasi. Pada level individu dari para jurnalis, terdapat banyak faktor yang akan menentukan karakteristik isi dari media atau karakteristik isi pemberitaan. Faktor intrinsik individu para jurnalis memiliki pengaruh terhadap karakteristik isi media pemberitaan.

Dari level individu ini, latar belakang dari para jurnalis menjadi sangat penting. Pada level ini yang dapat dicermati mencakup karakteristik dan latar belakang personal para jurnalis dan pengalaman-pengalamannya; latar belakang profesional dan pengalaman-pengalamannya; sikap, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan personal; peran profesional dan etika para jurnalis; dan kekuasaan yang dimiliki para jurnalis dalam organisasi media di mana mereka bekerja (Shoemaker and Reese, 1996).

Secara lebih operatif, penjelasan di atas menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan, orientasi agama, orientasi politik, orientasi seksual, gender, pendidikan, kedudukan di dalam organisasi kewartawan, dan kedudukan di dalam perusahaan media massa di mana mereka bekerja akan menentukan karakteristik isi pemberitaan. Elemen-elemen personal ini sekaligus menentukan corak dan karakteristik cara mereka bekerja di dalam mengumpulkan berita, menyajikan dan merepresentasikan berita dan menyiarkan berita.

Belum lagi, mereka sendiri memiliki cara pandang dan kepentingan-kepentingan tersendiri yang terkadang terpisah dari kepentingan secara organisatoris di mana mereka berada. Pemahaman terhadap hal ini mengarahkan pada akar dan sebab-sebab bagaimana proses produksi dan diseminasi informasi dilakukan, sekaligus melihat bagaimana kemungkinan proses disinformatif terjadi.

Level kedua adalah apa yang disebut sebagai rutinitas-rutinitas yang dilakukan media. Pengertian rutinitas media adalah pola-pola yang berulang-ulang yang dikerjakan dan seringkali menjadi standar baku. Pola yang berulang ini tidak hanya terjadi pada bentuk dan isi media di dalam pemberitaan, melainkan dalam berbagai bentuk isi media seperti drama, komedi situasi, infotainment dan termasuk dalam pemberitaan. Pola rutinitas di dalam pemberitaan terjadi dalam cakupan yang luas dan beragam. Menurut Daniel Hallin (1992), sampai pada tingkatan tertentu, rutinitas media ini telah menjadi semacam struktur birokratis dalam ruang redaksi pemberitaan yang diterima oleh para jurnalis.

Dalam suatu studi yang dilakukan Paul Hirsch (1977), ia mengatakan bahwa media massa dapat saja menyajikan fungsi-fungsi yang berbeda, tetapi sebenarnya mereka berbagi penghayatan yang sama dalam hal kesamaan organisasinya. Di dalam organisasi media massa mereka mempunyai kesamaan seperti wartawan, penulis, editor, pemimpin perusahaan, redaktur dan seterusnya. Pekerjaan mereka di dalam pola-pola rutin tersebut adalah menyampaikan informasi di dalam ruang dan waktu yang terbatas. Karena itu, kebanyakan media massa sebagai perusahaan yang mencari keuntungan berusaha keras untuk menghasilkan produk. Dengan rutinitas kerja semacam itu, mereka dihadapkan persoalan: a) informasi yang seperti apa yang diterima oleh khalayak; b) bagaimana organisasi media memprosesnya; dan c) bagaimana bahan informasi tersedia diperoleh yang berasal dari sumber-sumber informasi di luar organisasi mereka.

Dengan pola rutinitas semacam itu, apa yang disebut sebagai nilai berita sebenarnya bukan sesuatu yang sulit diperkirakan. Padahal esensi dari informasi adalah kemampuannya meredakan ketidakpastian. Bila nilai berita sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan, sebenarnya yang terjadi, apa yang disajikan di dalam isi media bukan sesuatu yang baru dan tidak menambah pengetahuan apa-apa di masyarakat.

Rutinitas juga terjadi terhadap pola hubungan antara jurnalis dan sumber-sumber berita. Dalam proses produksi isi media, ia menggantungkan pada persediaan eksternal apakah dalam

bentuknya sebagai pidato, wawancara, laporan atau dalam bentuk *public hearing* yang dilakukan badan-badan pemerintah. Sumber-sumber ini disamping para jurnalis dapat mempengaruhi mereka, namun kondisi sebaliknya dapat terjadi, yakni sumber-sumber informasi tersebut justru mempengaruhi para jurnalis. Dengan perkataan lain, terjadinya gejala yakni bagaimana sumber-sumber informasi yang telah menjadi sumber rutin justru mendikte para jurnalis. Karena itu, seringkali para jurnalis hanya mengandalkan bahan press release, handout yang mereka peroleh, bahan kopian yang memang telah disediakan. Studi yang dilakukan oleh Michael Schudson (1978) dan studi yang dilakukan Martin dan Singletary (1981) menunjukkan kondisi demikian.

Sumber-sumber rutin dalam mendapatkan informasi ini mencakup saluran resmi dan tidak resmi. Saluran-saluran resmi yang telah menjadi rutin mencakup: a) bahan resmi proseding seperti di pengadilan, parlemen atau *public hearing* dari badan-badan pemerintah; b) *press release*; c) *press conference*; d) *event-event* yang tidak spontan yang berbentuk pidato atau acara seremonial. Saluran-saluran rutin yang tidak resmi mencakup: a) bahan proseding non pemerintah; b) *briefing*; c) bocoran-bocoran; d) laporan dari organisasi berita lain. Pada sisi lain, para jurnalis dapat melakukan wawancara dengan inisiatif sendiri, menyaksikan kejadian langsung, melakukan riset dan analisis dan kesimpulan yang dilakukan jurnalis.

Semua sumber-sumber informasi tersebut penting karena akan mempengaruhi potret realitas yang disajikan media massa. Namun terkait dengan konteks penelitian ini, proses distortif informasi dan *misleading* informasi, dapat terjadi karena pola-pola hubungan yang terjadi antara saluran-saluran sumber-sumber informasi dengan para jurnalis. Belum kenyataan lain, bahwa banyak sumber-sumber informasi di dalam pemerintah dan badan-badan yang terkait menggunakan strategi dan manajemen informasi yang sama. Strategi ini mencakup kontrol atau pengendalian informasi bagi agen-agen pemerintah dengan mengatur dan membentuk arus informasi yang menjadikan para jurnalis tidak berdaya kecuali menerima informasi ini melalui pusat-pusat sumber informasi yang telah terseleksi dan

terencanakan (Shoemaker and Reese, 1996: 132).

Tekanan ini bersamaan dapat dirasakan ketika isu-isu yang menjadi agenda kebijakan dan kepentingan publik di seputar arena politik itu sendiri saling berkompetisi dan bertarung. Masing-masing pihak, guna mendapatkan perhatian publik, berusaha memperjuangkan isu-isu yang diperjuangkan agar menjadi agenda kebijakan yang mengurucut menjadi agenda keputusan. Para jurnalis dalam kondisi demikian dihadapkan pada pilihan dan keputusan tersendiri untuk turut menonjolkan dan menyajikan informasi yang menjadi pertarungan kepentingan.

Level ketiga adalah datang berasal dari pengaruh kelembagaan organisasi media massa terhadap isi media (informasi). Pembicaraan ini melihat bagaimana soal struktur organisasi, kewenangan, hirarki organisasi perusahaan mempengaruhi isi media massa. Menurut Hirsch (1977) perspektif ini menekankan pada perbedaan peran organisasi, struktur internal, tujuan, teknologi dan pasar. Setiap kedudukan dan posisi di dalam organisasi mempengaruhi karakteristik isi media.

Misalnya, dalam pandangan Gan (1979) menyebutkan bahwa posisi redaktur lebih dekat dan berorientasi pada khalayak, sedangkan posisi wartawan atau reporter lebih dekat dan lebih berorientasi pada sumber-sumber informasi. Posisi yang lebih tinggi dapat memerintah pada posisi yang lebih rendah. Atau posisi yang lebih tinggi dapat memutuskan untuk meliput atau tidak meliput, menyajikan atau tidak menyajikan tergantung pertimbangan dan kepentingan apa yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Pengaruh kekuatan ini terasa pada level makro bila dibandingkan pada level individu atau pada level rutinitas media di atas.

Pengaruh ini dapat dilihat pada empat pertanyaan krusial yang kemudian dapat ditentukan apakah para jurnalis memiliki otonomi di dalam mengumpulkan, menulis dan menyajikan. Setiap level di dalam kerja media massa, memang saling bertalian dan berkaitan. Demikian pula level organisasional ini terkait secara keseluruhan dengan kerja-kerja jurnalistik baik secara individual atau pun secara rutinitas media.

Pertama, peran-peran seperti apa yang ada di dalam organisasi media massa. Pertanyaan ini menjawab siapa melakukan apa di dalam struktur dan kedudukan yang ditempati. Kedua, bagaimana organisasi massa distrukturkan. Kompleksitas struktur organisasi menunjukkan seberapa besar kewenangan dan kekuasaan didistribusikan ke dalam jalinan-jalinan organisasi. Ketiga, bagaimana kebijakan diimplementasikan. Terakhir, bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut ditegakkan. Seringkali persoalan organisasi media massa ditunjukkan dengan penjelasan semangat kapitalisme. Konsep komodifikasi dan strukturasi media massa merupakan penjabaran kapitalisme di dalam media massa. Kerja-kerja jurnalisisme dan kerja-kerja media massa merupakan kerja ekonomi yang berskala besar. Dengan demikian, pengaruh pemilik media menentukan corak dan karakteristik isi media. Lagi pula, proses pembuatan berita merupakan sebuah proses organisasional (Shoemaker and Reese, 1996:155).

Dalam konteks demikian, kontrol menjadi masalah yang bersifat problematik di dalam dunia pemberitaan ketika para jurnalis sering menyatakan otonomi mereka berhadapan dengan apa yang mereka sebut sebagai intervensi manajemen di dalam kerja profesional mereka. Pada kenyataannya, dalam taraf-taraf tertentu, pemimpin-pemimpin dan para pemilik perusahaan dapat mampu mendiktekan kepentingan mereka di dalam isi media baik sebagai kebijakan eksplisit atau pun implisit. Dengan demikian, bentuk-bentuk penyimpangan informasi dapat terjadi melalui celah-celah dan intervensi yang dilakukan oleh pihak pemimpin atau pemilik perusahaan yang juga mempunyai orientasi-orientasi sendiri di dalam menjalankan prinsip-prinsip kerja jurnalistik.

Level lain yang juga mempengaruhi isi media dan memungkinkan menjadi jalan terjadinya disinformasi adalah organisasi-organisasi dan kekuatan-kekuatan di luar media. Organisasi media menempati suatu lingkungan tertentu dan berada di dalam tarik ulur berbagai kepentingan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif yang menafsirkan berbagai data yang diperoleh dari beragam sumber data penelitian yang berbeda-beda. Dalam pendekatan ini realitas bersifat multifaset dan hadir dalam pikiran dan tindakan seseorang serta di dalam data yang merupakan produk dari tindakan-tindakan. Dalam tradisi ini, tujuan penelitian tidak mencari hukum dan regularitas terhadap obyek yang diteliti seperti di dalam pendekatan positivistik, melainkan melakukan pemahaman (*verstehen/understanding*) terhadap realitas yang diteliti. Sebuah realitas bisa mempunyai makna yang berbeda-beda dan bersifat multitafsir. Realitas dapat dipahami dari berbagai perspektif melalui pikiran individu-individu yang terlibat dan artifak-artifak yang dihasilkan. Dengan demikian, kebenaran penelitian interpretatif terletak pada kebenaran intersubyektif yang melihat makna dari realitas yang berasal dari pengalaman empiris yang ada.

Peneliti melakukan prosedur fleksibel yang memungkinkan bergerak dan berubah dari satu garis penelitian terhadap garis penelitian yang lain, mengambil sudut pandang baru dalam observasi sesuai dengan perkembangan penelitian yang telah dicapai. Bergerak pada arah-arrah baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mengubah

identifikasi terhadap data apa yang relevan seperti yang peneliti dapatkan dari informasi yang diperoleh dan dari pemahaman yang lebih baik. Fleksibilitas tidak berarti penelitian tidak mempunyai arah, namun fleksibilitas berarti fokus penelitian adalah luas dan secara progresif dipertajam ketika dan selama penelitian berlangsung (Blumer, 1969).

Dalam pandangan Blumer (1969), langkah ini berbeda dengan prosedur yang dilakukan di bawah model penelitian yang bersifat protokoler. Pendekatan ini membuka bagi peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap area kehidupan manusia. Oleh karena itu, peneliti dapat terlibat dalam pengamatan langsung, melakukan wawancara, mendengarkan percakapan-percakapan, meneliti keterangan-keterangan mengenai *life-history*, memeriksa surat-surat dan catatan harian, memeriksa bahan-bahan publikasi, dan melakukan diskusi kelompok (Blumer, 1969:41).

Prosedur penelitian merupakan prosedur yang dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi dan dituntun oleh penilaian yang layak dan penuh nilai. Sasaran utama metode interpretif adalah mengembangkan dan mengisi agar gambaran terhadap obyek yang dikaji menjadi tajam dan komprehensif. Menurut Blumer (1969:42), gambaran itu seharusnya menggerakkan peneliti untuk membicarakan hasil penelitian dari basis fakta dan tidak dari spekulasi. Pengujian langsung terhadap dunia sosial empiris tidak terbatas pada konstruksi terhadap penjelasan-penjelasan yang komprehensif terhadap apa yang terjadi, melainkan mencakup analisis terhadap penjelasan-penjelasan tersebut.

Seorang peneliti dengan demikian dapat memperlakukan obyek empiris sebagai bagian dari elemen analitik dari konteks yang berbeda-beda. Melihat dari posisi yang berbeda. Mempertanyakan dengan mempertimbangkan karakter generik mereka, melakukan pengecekan dan pengecekan kembali. Membandingkan satu dengan yang lain.

Kelebihan penelitian kualitatif interpretatif adalah bisa tetap dekat pada domain empirik. Hubungan antara realitas dan peneliti adalah dekat. Hal ini penting dalam ilmu sosial. Peneliti dapat memahami dan menangkap adanya formasi dan *sphere of life* terhadap

domain empiris yang berbeda. Domain empiris sebagai realitas membentuk dan merepresentasikan kehidupan sosial orang-orang, aktivitas mereka, hubungan-hubungan mereka dan institusi-institusi mereka (Blumler, 1969:46).

Para pemikir dalam pendekatan ini percaya bahwa untuk memahami makna realitas sosial, peneliti harus melakukan interpretasi. Peneliti harus menjelaskan proses konstruksi makna dan menjelaskan apa serta bagaimana makna terbentuk dalam bahasa dan tindakan aktor-aktor sosial. Untuk melakukan hal ini, menurut Schwandt (1994:118), peneliti mengkonstruksi data terkait dengan makna. Pendekatan ini menawarkan upaya peneliti untuk mengkonstruksikan dari konstruksi-konstruksi tindakan aktor-aktor sosial.

Di dalam perspektif interpretatif, pengetahuan dan kebenaran bukan ditemukan, melainkan diciptakan. Ini menekankan pada pluralistik dan plastis. Pluralistik dalam arti bahwa realitas dapat diekspresikan dalam berbagai sistem bahasa dan simbol. Sedangkan plastis memiliki arti bahwa realitas dikembangkan dan dibentuk oleh tindakan-tindakan manusia sebagai aktor sosial yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian konteks mempunyai peran dan posisi penting di dalam penelitian dengan pendekatan interpretatif ini.

Atas hal ini, Fuss (1989:3) mengatakan bahwa pokok pangkal dari konstruksionis adalah sistem-sistem representasi, praktek-praktek material dan sosial, hukum-hukum wacana dan efek-efek ideologis. Pendek kata, pendekatan ini sangat memberikan perhatian pada semua produksi dan organisasi yang berbeda dan menolak gagasan bahwa esensi atau kondisi natural sebagai sesuatu yang ada, tanpa adanya proses determinasi secara sosial. Jelas pandangan ini, menghubungkan antara lingkungan dan tindakan manusia.

Untuk memperoleh gambaran detil dan hati-hati, kompleks dan terhadap makna dari kehidupan sosial, dapat dicapai dengan sejumlah metode. Misalnya wawancara mendalam, observasi, penggunaan arsip riset, bahan rekaman, dokumen, bahan publikasi dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat bertanya, mendengar, melihat, memperhatikan dan menganalisis sumber data

yang digunakan untuk mengkonstruksi tindakan aktor-aktor sosial yang diteliti.

Dengan pendekatan penelitian interpretatif, metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang berusaha menguraikan dan menganalisis Disinformasi Berita Politik Dalam Media Massa. Upaya pokok peneliti adalah mendeskripsikan dan melihat relasi-relasi yang terjadi di berbagai praktek sosial yang terkait dengan pemberitaan politik dan disinformasi berita politik. Deskripsi dan relasi kekuasaan dalam praktek media massa melibatkan berbagai kepentingan yang krusial dan rumit. Pertama, hubungan-hubungan ini dapat dilihat dari fungsi dan kedudukan dari media massa itu sendiri. Pandangan dan kepentingan yang beragam yang mendudukkan posisi media massa, memperlihatkan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain saling bersaing. Mereka yang menempatkan media sebagai entitas bisnis dan industri akan berbeda dengan mereka yang menempatkan media massa sebagai lembaga yang mempunyai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Demikian pula mereka yang memandang bahwa media massa dapat digunakan untuk membangun pencitraan tertentu, akan berbeda dengan mereka yang melihat media mempunyai fungsi *agenda setting* serta pembentukan opini publik.

Hubungan-hubungan dari berbagai kepentingan itu, dalam asumsi penelitian telah dinyatakan sebagai faktor-faktor yang memiliki sebab dan akibat terjadinya disinformasi berita politik dalam media massa. Dengan begitu, deskripsi yang bersifat analitik terhadap hubungan-hubungan tersebut, menjadi domain penting dalam penelitian dengan pendekatan interpretatif yang sekaligus dengan metode penelitian deskriptif analitik.

3.2. Sumber Data Penelitian

Pada dasarnya, sumber data dalam penelitian kualitatif interpretatif dan umumnya penelitian kualitatif (*naturalistic inquiry*) terdiri dari dua bentuk yakni: *human* dan *nonhuman* (Lincoln and Guba, 1985:267). Untuk melihat Disinformasi Berita Politik di Media Massa, sumber data utama penelitian adalah data-data rekaman berita politik yang ditayangkan

televisi, individu-individu yang terlibat dalam *mode of discourse* dalam berita politik, para pengambil kebijakan seperti KPI, para jurnalis, risalah-risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pers. Seperti yang ditegaskan Blumer (1969) bahwa untuk mengidentifikasi obyek penelitian sebagai pusat perhatian itu, seorang peneliti harus mempunyai sasaran yang tepat pada sebuah observasi yang relevan.

Jika peneliti ingin melihat persoalan ini di dalam risetnya, ia perlu melihat bagaimana individu melakukan interpretasi dan indikasi terhadap obyek sosialnya. Peneliti harus melihat dari sudut pandang individu itu sendiri dan tidak dari sudut pandang peneliti sebagai orang yang berada di luar dari realitas yang dipertanyakan. Terkait dengan hal ini, seorang peneliti perlu mengidentifikasi pusat perhatian atau obyek sentral sebagai sasaran pengamatan yang relevan.

Ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan deskriptif dari individu atau kelompok yang diteliti yang digunakan untuk mengungkap bagaimana mereka menginterpretasikan obyek sosial, bagaimana mereka melakukan tindakan terhadap obyek tersebut di berbagai situasi, dan bagaimana mereka merujuk obyek tersebut dalam pembicaraan-pembicaraan mereka (Blumer, 1969:51-52).

Identifikasi terhadap individu-individu tersebut dilakukan dengan melakukan konstruksi terhadap pemberitaan, tulisan, pernyataan, pemikiran, diskusi yang merefleksikan the *opinion climate* atau *mode of discourse* dari masing-masing individu dalam melihat proses terjadinya disinformasi berita politik di media massa. Konstruksi terhadap pemikiran, pemberitaan, tulisan dan pernyataan dari masing-masing individu sebagai jalan peneliti untuk menentukan individu-individu dalam melakukan interpretasi dan definisi terhadap Disinformasi Berita Politik di Media Massa.

Ada keterbatasan-keterbatasan yang diprediksi akan menghampiri penelitian ini, jika dalam menentukan individu-individu sebagai fokus penelitian sepenuhnya berdasarkan lintasan yang terekam dalam media massa tersebut, tanpa diseleksi lebih jauh dan pada kriteria-kriteria tertentu. Ini dilakukan untuk membatasi jumlah informan yang diteliti termasuk kemampuan peneliti dalam memperoleh akses untuk melakukan penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berhubungan dengan sumber data penelitian yang digunakan. Seperti dijelaskan, bahwa tipe sumber data penelitian mencakup dua bentuk, yakni *human* dan *nonhuman*. Sumber data dengan tipe *human* sering disebut sebagai informan, sedangkan data *nonhuman* dapat berupa dokumen, bahan rekaman, bahan publikasi, jejak-jejak tertentu, peristiwa atau kejadian yang berlangsung, tempat atau lokasi dan seterusnya.

Beragamnya data yang dipakai di dalam penelitian ini menunjukkan luasnya spektrum informasi yang ingin digali untuk melihat disinformasi berita politik di media massa. Berbagai sudut pandang dan data diperlukan untuk mengkonstruksikan pemahaman terhadap terjadinya disinformasi berita politik di media massa. Ini dilakukan bahwa mekanisme dan proses komunikasi massa itu sendiri merupakan persoalan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak serta kepentingan. Sedangkan proses disinformatif itu sendiri dapat terjadi karena berbagai sebab dan alasan, yakni dapat karena persoalan teknis ataupun substansial yang memang direncanakan dan disengaja. Seperti yang sudah dijelaskan, data penelitian ini diperoleh dari berbagai cara yang berbeda-beda. Ada data yang diperoleh dari pihak lain berupa dokumen-dokumen, risalah-risalah, bahan rekaman, bahan publikasi, keterangan langsung, pengamatan dan seterusnya.

Masing-masing sumber data, digali dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, berpijak dari sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data penelitian ini meliputi:

3.3.1. Wawancara

Lewis A Dekster (1970) mengatakan bahwa wawancara merupakan bercakap-cakap dengan tujuan (*a conversation with a purpose*). Wawancara dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan yang dipakai untuk mengkonstruksi pandangan-pandangan tentang disinformasi berita politik di media massa. Metode ini dikembangkan untuk memperoleh konstruksi "here and now" dan

“back and forth” terhadap narasumber/informan, terkait dengan peristiwa, kejadian, kegiatan, institusi, perasaan-perasaan, motivasi, klaim, perhatian dan pemikiran-pemikiran tertentu tentang segala hal yang berhubungan dengan disinformasi berita politik di media massa (Lincoln and Guba, 1982:268). Wawancara juga bertujuan melakukan rekonstruksi terhadap kejadian, pernyataan-pernyataan, motif dan pemikiran tertentu pada masa lalu dan sekaligus melakukan proyeksi terhadap entitas-entitas yang diharapkan pada masa yang akan datang. Kualitas wawancara ini, ditentukan oleh struktur berwawancara, derajat keterbukaan dan kualitas hubungan antara peneliti dengan narasumber.

Dalam bentuknya, wawancara mempunyai variasi dan memiliki kegunaan yang bersifat multiplisitas. Umumnya wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara individual dan bersifat *face to face*. Namun, wawancara juga dapat mengambil bentuknya dalam bentuk kelompok (*focus group discussion*), melalui surat (*mailed*) atau menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan melalui prosedur administratif, dan melalui telpon (Fotana and Frey, 1994:361)

3.3.2. Observasi

Observasi dalam pengertian ini, bukan pada pengertian sebagai partisipan dalam kejadian-kejadian masa lalu yang dilakukan oleh para narasumber dalam menentukan disinformasi berita politik. Observasi dilakukan terhadap narasumber, misalnya pada saat dan konteks wawancara dilakukan, mencermati dan memaksimalkan peneliti untuk menangkap motif-motif narasumber, latarbelakang kejadian atau aktivitas, kepentingan-kepentingan tertentu, minat, orientasi pemikiran, kekecewaan, harapan dan seterusnya. Menurut Lincoln dan Guba (1981:193) observasi memungkinkan bagi peneliti menangkap perasaan dan emosi seseorang atas kejadian tertentu.

3.3.3. Analisis Isi

Analisis ini digunakan bukan dipakai sebagai metode penelitian, melainkan sebagai metode pengumpulan data. Jika informan digali informasinya melalui wawancara, kejadian atau peristiwa tertentu digali informasinya melalui observasi, maka sumber data seperti

bahan-bahan rekaman, bahan publikasi, dokumen, catatan-catatan tertentu, tulisan-tulisan, berkas dan semisal, digali informasinya melalui analisis isi. Analisis isi sebagai metode pengumpulan data, tidak berdasarkan pada prosedur penelitian kuantitatif, melainkan analisis isi kualitatif. Bukan pada masalah jumlah dan frekuensi yang dipentingkan di dalam pengumpulan data ini, melainkan konteks, tafsir dan interpretasi terhadap kandungan yang ada di dalamnya. Bagaimana setiap isi yang ada di dalam bahan-bahan seperti yang disebutkan, memberikan dasar penjelasan bagi tujuan penelitian ini.

Sumber data ini mencakup catatan-catatan risalah rapat anggota DPR RI yang membicarakan mengenai isu-isu politik pemerintahan, tayangan berita politik dari beberapa stasiun televisi, dokumen-dokumen dan transkripsi-transkripsi yang diperoleh baik dari pengumpulan dari sumber data primer atau pun sekunder.

Analisis isi telah didefinisikan ke dalam berbagai cara dan penggunaan dilakukan untuk berbagai tujuan (Hofstetter, 1981). Teknik ini sering dihubungkan dengan teknik yang berkaitan dengan indikator dari elemen-elemen komunikasi utamanya dari unsur pesan komunikasi. Analisis isi dalam riset komunikasi politik kebanyakan diarahkan pada produk *oral* atau *visual* media massa. Beberapa diantaranya dijadikan dasar untuk melihat pesan yang disampaikan melalui komunikasi interpersonal. Analisis ini juga menggunakan sejumlah unit analisis yang umumnya mencakup empat unit penting, yakni unit *sampling* (*sampling units*), unit rekaman (*recording units*), unit konteks (*context units*) dan *definition units*.

Sampling units mendefinisikan dasar bagi seleksi bahan (Krippendorff, 1980: 72-80) dan ditentukan oleh keputusan tentang bahan yang dikaji yang dikelompokkan bagi tujuan-tujuan generalisasi. Dalam kajian berita televisi, *news story* umumnya dipilih sebagai *sampling unit* penelitian yang umumnya menampilkan kualitas isi pesan itu sendiri. Sedangkan *recording units* di dalam riset komunikasi politik dapat berupa simbol, kata, frase, kalimat, paragraf. Sementara *context units* diartikan sebagai sebuah porsi bahan yang diuji untuk menentukan lokasi dari *recording units*. Adapun *definition units* menjelaskan hubungan analisis pernyataan-evaluasi, yang

merupakan bentuk analisis yang didasarkan pada aktor, obyek dan tindakan.

3.3.4. Focus Group Discussion

Penggunaan FGD (*Focus Group Discussion*) dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, FGD dilakukan tidak dengan mengganti narasumber yang ada, tetapi ini lebih merupakan opsi yang diperlukan untuk melihat level pengumpulan data atau perspektif yang dicari. Pandangan individu mungkin akan bergerak berbeda ketika dilakukan secara interaktif dan kolektif. Semula FGD ini sering dilakukan dengan riset pemasaran yang mencari opini konsumen pada karakteristik produk tertentu, tema-tema periklanan. Namun format ini kemudian dipakai dalam riset-riset politik terutama untuk melihat reaksi para pemilih terhadap isu-isu politik dan kebijakan (Fontana and Frey, 1994:364). Atas dasar pertimbangan tersebut, FGD digunakan untuk melihat berbagai sudut pandang yang berbeda yang digali secara interaktif dan bersama-sama dalam sebuah diskusi yang dipandu oleh fasilitator.

Kedua, FGD memang dilakukan kepada kelompok-kelompok yang menjadi tujuan penelitian. Terhadap kelompok ini, FGD dibentuk berdasarkan pada topik-topik yang ingin digali menyangkut Disinformasi Berita Politik di Media Massa. FGD dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yang dibedakan pada topik. Topik pertama menyangkut Disinformasi Berita Politik dari Tinjauan Politik Komunikasi dan Komunikasi Politik. Kelompok kedua menyangkut Disinformasi Berita Politik dari Tinjauan Ekonomi Politik Media. Sedangkan kelompok ketiga menyangkut Disinformasi Berita Politik dari sisi Tinjauan Kebijakan Politik. Masing-masing kelompok topik, terdiri dari berbagai narasumber yang berbeda, tetapi memiliki relevansi dengan topik yang dibicarakan. Kepada mereka ditanyakan berbagai pertanyaan sehingga jawaban-jawaban yang diperoleh secara simultan mendapat tanggapan dari satu dengan yang lain. Proses ini menghasilkan pemahaman yang konstruktif dari masing-masing topik dan disintesis antara topik satu dengan topik yang lain.

3.4. Keandalan dan Keabsahan Data

Semua prosedur dalam tahap penelitian seperti melakukan wawancara, mengumpulkan data-data dokumen, bahan-bahan rekaman, materi publikasi dan seterusnya, perlu diuji lebih jauh. Membangun kredibilitas dan kepercayaan di dalam penelitian adalah hal yang esensi, baik dalam pendekatan interpretatif seperti dalam penelitian ini atau pun dalam pendekatan yang lain. Hanya saja, terdapat cara-cara tersendiri dalam membangun sebuah penelitian menjadi penelitian yang handal dan terpercaya.

Lincoln dan Guba (1985:281-287) memberikan rambu-rambu dalam meningkatkan derajat kredibilitas dan kepercayaan dalam penelitian kualitatif (*naturalistic inquiry*). Ada tujuh langkah yang direkomendasikan, namun tujuh langkah tersebut hanya akan ditunjukkan beberapa, yang merupakan upaya langsung yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, peneliti mengakumulasi berbagai informasi dalam bentuk catatan-catatan, baik yang diperoleh saat wawancara, observasi atau pun pada saat melakukan analisis terhadap dokumen, bahan-bahan rekaman, bahan publikasi dan sebagainya. Catatan ini terdiri dari tiga bentuk, yakni catatan yang menggambarkan aktivitas harian penelitian (*a log of a day to day activities*), catatan harian reflektif dan introspektif tentang *state of mind* narasumber dalam hubungannya terhadap apa yang terjadi di lapangan (*a personal log*) dan catatan tentang semua keputusan-keputusan metodologis yang dibuat berdasarkan desain yang muncul (*methodological log*).

Kedua, peneliti akan mewaspadaikan sejumlah kemungkinan terjadinya distorsi. Upaya menjaga agar tidak terjadi distorsi penelitian mencakup langkah-langkah: a) mewaspadaikan distorsi yang muncul dari keberadaan peneliti dalam sebuah tempat, misalnya situasi wawancara yang tidak tepat, terlalu banyak noisy, situasi mempengaruhi kondisi wawancara sehingga berlangsung secara tidak wajar atau keberadaan peneliti yang tidak tepat; b) mewaspadaikan distorsi yang muncul dari peneliti atau pun dari narasumber- keduanya bisa menimbulkan distorsi dalam menggali data penelitian yang diperlukan; c) mewaspadaikan distorsi yang muncul karena keterlibatan

yang terjadi antara peneliti dan narasumber; d) mewaspadai distorsi yang muncul dari metode pengumpulan data.

Ketiga, peneliti melakukan triangulasi data-data yang diperoleh. Triangulasi menempati posisi krusial dalam penelitian kualitatif. Melalui triangulasi, validasi terhadap data penelitian dapat dilakukan dengan baik. Dalam triangulasi, satu data dihadapkan dengan data lain, satu metode dengan metode yang lain, teori dengan teori lain dan peneliti dengan peneliti yang lain. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan terhadap data, metode dan teori.

Keempat, peneliti melakukan pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen tambahan. Ini dilakukan untuk mempertajam interpretasi terhadap data-data pokok yang diperoleh (*gathering referential adequacy materials*). Menurut Lincoln dan Guba (1985), terkait dengan validitas penelitian, mereka mengatakan bahwa validitas mengambil dua bentuk, yakni validitas terhadap bukti-bukti yang harus dibandingkan dengan bukti-bukti lain dan kedua validitas kontekstual yang merupakan evaluasi terhadap sumber dari bukti-bukti dengan mengumpulkan jenis-jenis sumber lain untuk melokasikan pola karakteristik distorsi sumber.

3.5. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian

Pada bagian ini apa yang dimaksud dengan Pengolahan Data dan Analisis Data Penelitian lebih merupakan *Data Management*- yakni bagaimana melakukan pengumpulan data, penyimpanan data, dan menggunakannya kembali di dalam proses penelitian. Pengolahan data semacam ini digunakan untuk: a) menentukan kualitas pada saat mengakses data; b) kualitas dokumentasi terhadap data yang sudah dikumpulkan; dan c) keperluan analisis data ketika penelitian telah dilakukan. Sedangkan analisis data mencakup tiga subproses, yakni reduksi data, penyajian data dan penggambaran kesimpulan/ atau verifikasi penelitian. Proses-proses ini dapat terjadi sebelum pengumpulan data, selama penyusunan desain penelitian, pada awal penelitian dilakukan; atau setelah data dikumpulkan sebagai produk final penelitian dilakukan. Semua dilakukan secara simultan dalam semua tahap dan proses penelitian dikerjakan.

Apa yang disebut sebagai reduksi data adalah data dipilah, diseleksi dan dikelompok berdasarkan pada kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual ini dibangun berdasarkan pertanyaan penelitian, kasus-kasus yang diteliti dan instrumen-instrumen penelitian lain yang dikembangkan. Sementara apa yang disebut sebagai penyajian data merupakan data-data yang telah direduksi di atas perlu diorganisasikan, dikembangkan dan ditata. Penyajian data lebih merupakan pemadatan informasi yang mengarahkan pada kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dan penyajian merupakan dasar atau basis berpikir tentang makna apa yang dapat diinterpretasikan di dalamnya.

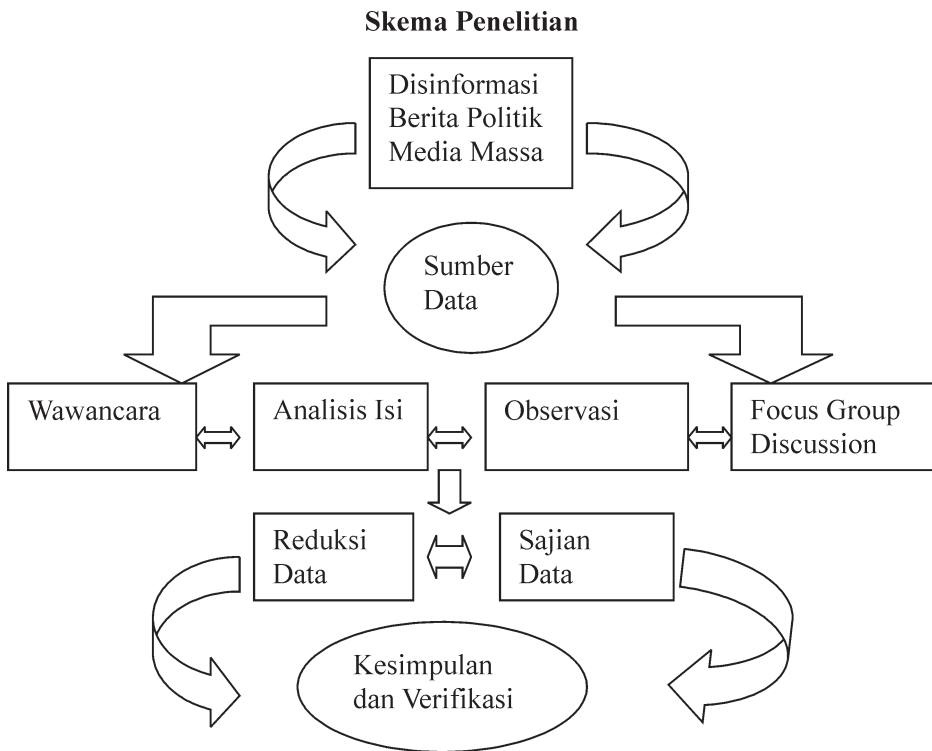
Adapun pengambilan kesimpulan dan verifikasi penelitian mencakup upaya peneliti melakukan interpretasi, yakni bagaimana peneliti menggambarkan makna dari data-data yang disajikan. Cara yang dapat dipakai dalam melakukan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan beberapa cara yang umumnya digunakan. Peneliti dapat melakukan komparasi antara sajian data, mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema, menggunakan metafora, menguji hasil dengan narasumber dan seterusnya.

Semua prosedur tersebut didukung dan dikembangkan melalui manajemen data, terutama penyimpanan data dan pengambilan data kembali. Tanpa skema kerja yang jelas, data dapat diartikan secara salah, baik dalam melakukan koding, keterkaitan yang keliru dan salah arah. Untuk itu, cara penyimpanan data dan pengambilan data yang sudah direduksi dan dikelompokkan, di dalam penelitian ini dikembangkan mekanisme ketersediaan data yang bersifat fleksible dan mudah, penggunaan data yang handal yang melibatkan beberapa tim. Misalnya, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan *focus group discussion*, terdapat anggota peneliti yang bertanggung jawab.

Demikian pula data yang diperoleh dari sebaran kuesioner dan kodingnya ada anggota peneliti yang bertanggung jawab. Semua anggota peneliti memiliki tanggung jawab di dalam pengolahan, penyimpanan dan pengambilan data yang telah dikumpulkan. Masing-masing anggota peneliti membentuk tim kerja kecil yang

bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan penyajiannya. Semua data yang ditangani pada akhirnya diintegrasikan yang disesuaikan dengan rumusan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

3.6. Skema dan Prosedur Tahap Penelitian



BAB IV

PERSPEKTIF DISINFORMASI POLITIK DALAM PERTARUNGAN KEPENTINGAN

4.1. Landasan Data dan Deskripsi

Paparan dalam bab ini berdasarkan data penelitian yang dilakukan dua cara. Pertama, pengumpulan data melalui *workshop* pada tanggal 20 Juli 2010 di Yogyakarta, menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. M. Alwi Dahlan Ph.D, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia yang memberi paparan tentang Disinformasi dalam perspektif politik komunikasi dan komunikasi politik; Drs. Ashadi Siregar, Direktur LP3Y yang memaparkan Disinformasi dalam perspektif ekonomi politik media; dan Prof. Dr. Purwo Santoso, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada yang menajamkan persoalan disinformasi dari perspektif politik-kebijakan politik.

Kedua, pengumpulan data dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) dengan narasumber berbagai latar belakang profesi. jurnalis, praktisi media, organisasi wartawan, partai politik, lembaga pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. FGD dilakukan untuk penggalan data terhadap suatu topik tertentu, ditempuh dengan cara mendiskusikan secara simultan dari para

peserta dengan berbagai latar belakang dan profesi. Kegiatan ini dilakukan sehari setelah *workshop*, 21 Juli 2010 di Yogyakarta.

Data ini merupakan bentuk lanjut dari penggalian data yang dilakukan dalam kegiatan *workshop* sebelumnya. FGD ini dijadikan tiga kelompok besar. Kelompok pertama, mendiskusikan persoalan disinformasi dari tinjauan politik komunikasi dan komunikasi politik; kelompok kedua membahas disinformasi dari tinjauan politik-kebijakan politik; dan kelompok ketiga membahas disinformasi dari tinjauan ekonomi politik media.

Dalam bab ini menggambarkan secara mendasar pemikiran-pemikiran utama dan fundamental, melihat persoalan disinformasi secara umum dan disinformasi media massa secara khusus. Berbagai pandangan tentang kedua persoalan ini muncul, mencerminkan sudut pandang masing-masing narasumber ahli dan narasumber yang berasal dari latar belakang profesi, pendidikan, pengalaman politik dan organisasi yang berbeda. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran tersebut memetakan berbagai pertanyaan-pertanyaan krusial tentang disinformasi dan disinformasi media massa.

4.2. Disinformasi: Politik Komunikasi dan Komunikasi Politik

Dinamika perkembangan komunikasi publik Indonesia telah semakin kompleks. Seiring dengan semakin berkembangnya kompleksitas isu dan perhatian publik atas media massa. Alwi Dahlan (2010) menyatakan banyak sekali isu dan peristiwa yang sekarang saling berebut, beradu perhatian melalui media massa untuk memperoleh dukungan politik masyarakat, berubah dari waktu ke waktu tapi tidak dapat diikuti dengan jernih.

Dahlan menguraikan isu tersebut berkembang pada media informasi silih berganti tidak jelas lagi apa yang menjadi fokus isu. Tidak jelas pula apa makna dan implikasi masalah itu bagi masyarakat banyak, kepentingan siapa yang diangkat, dan sebagainya. Untuk setiap isu, berkembang pula dinamika informasi yang cepat berganti-ganti. Adanya kerancuan pengertian, konsep, istilah dan argumen yang dilontarkan sehingga menjadi tidak jelas mana soal yang lebih

utama dan lainnya. Kondisi ini oleh Dahlan disebut dengan “karut marut informasi publik”.

Menurut Dahlan, carut marut informasi publik dan kerancuan komunikasi politik juga dirasakan dalam berbagai kasus besar yang selama ini menyita waktu serta perhatian masyarakat. Kasus Susno Duadji (yang mulanya dihujat kemudian diangkat dan sekarang hanya diamati dan dilihat-lihat), tuduhan terhadap Bibit-Chandra yang dibolak-dibalik menjadi kasus Anggodo, kasus *bailout* Bank Century, rekening petinggi Polri, mafia kasus pajak. Semua tidak dapat memberikan suatu gambaran yang jernih walaupun berulang-ulang muncul.

Lebih jauh diungkapkan Dahlan, banyak potong-potongan informasi yang hanya muncul sebentar kemudian menghilang dari wacana publik. Seperti pemecahan jumlah rekening besar atas ratusan tabungan kecil supaya bisa memperoleh jaminan bank, tidak tahu lagi ujung pangkalnya. Pengetahuan publik dan sikap masyarakat berpecahan. Hal ini dapat berubah menjadi apatisme terhadap proses pemerintahan yang baik dan transparan.

Kesimpangsiuran informasi ini tidak hanya terjadi apabila ada perbedaan posisi antara keanekaragaman kelompok kepentingan, tetapi juga karena ketidakjelasan tujuan yang tidak pernah dirumuskan dengan kesadaran bersama. Meski, menurut Nurhadi Pemimpin Redaksi Harian Merapi, kesimpangsiuran informasi sebenarnya dapat menjadikan masyarakat lebih cerdas, dikarenakan adanya dinamika dan pilihan informasi. Publik kemudian mengadakan proses seleksi pemahaman dan perhatian, sehingga publik dapat melihat persoalan sebagai sesuatu yang tidak terelakan. Namun Dahlan menyatakan hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena dianggap tidak dapat membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga dapat melunturkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media dan praktisinya itu sendiri.

Ketika informasi menjadi simpang siur, apakah hal ini merupakan kesengajaan ataukah memang untuk memenuhi keinginan rasa penasaran khalayak, penting artinya untuk memahami apa yang dimaksud dengan disinformasi. Menurut Dahlan, apa yang

dimaksud disinformasi adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk mengubah persepsi orang lain sehingga mengambil kesimpulan yang tidak benar dan melahirkan tindakan yang menguntungkan bagi penyebar.

Dahlan berkesimpulan, disinformasi tujuannya adalah desepsi atau penyesatan pihak lain dengan berbagai cara termasuk melalui media massa, perjanjian palsu, rekayasa data statistik. Konsep ini, menurut Dahlan lahir dari ilmu perang dan intelijen yang bertujuan untuk misinformasi, yakni semacam kesalahan persepsi mengenai keadaan yang sebenarnya, agar lawan melakukan tindakan yang tidak tepat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap secara sengaja kepada pihak lawan sehingga menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran. Selanjutnya berdampak pada kesalahan tindakan yang membuatnya kalah. Dengan demikian, istilah disinformasi sejak semula mempunyai pengertian adanya pertarungan atau peperangan informasi untuk memperlemah kekuatan komunikasi lawan.

Dalam konteks media massa, Nurhadi sepakat dengan Dahlan bahwa disinformasi tidak terkait semata-mata dengan komunikasi media massa. Dia menjelaskan seringkali media massa dianggap memiliki potensi tinggi di mata masyarakat sehingga dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu.

Menurutnya, kerancuan informasi yang diperoleh publik menjadi lebih rumit pada masalah yang memang terkait dengan kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas dan serius. Informasi yang beredar tentang masalah seperti ini biasanya cukup banyak dan terkesan lengkap. Diperoleh dengan berbagai cara : liputan berita, wawancara, data penunjang yang terkesan lengkap, perdebatan langsung antarpihak di televisi, diskusi ahli, acuan hukum, dsb. Namun tetap saja dirasakan masyarakat tidak utuh, menyembunyikan sesuatu yang masih dicurigai untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam pandangan Nurhadi, terdapat tiga hal yang harus dilakukan media. Pertama, media harus tunduk pada kepentingan publik untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi yang benar.

Kedua, tugas media melakukan pencerdasan publik melalui pemuatan berita yang mampu membuat publik memahami berita tersebut. Ketiga, media bekerja berdasarkan etika profesi sehingga kedua hal sebelumnya dapat senantiasa terjaga dan tertanam baik bagi pihak pengelola maupun pemilik media. Namun demikian, dalam perjalanannya media seringkali ditimpali kepentingan tertentu dalam memberikan informasi kepada publik yang dapat mengarah pada terjadinya disinformasi.

Pada sisi lain Dahlan menyebutkan bahwa media dapat melakukan disinformasi terkait dengan adanya persaingan antarmedia. Diilustrasikannya melalui kebebasan menahan informasi untuk mendapatkan eksklusifitas atas pemberitaan isu tertentu. Dalam posisi demikian seringkali suatu media cenderung menahan informasi yang diperolehnya dan memberikan kesan kepada media lain seolah-olah tidak memperhatikan suatu isu. Namun sebenarnya tertarik, bahkan menjadi yang pertama mengekspose isu tersebut.

Dalam titik pertemuan itulah, menurut Dahlan, antara rahasia dan kebebasan informasi itu kait-berkait, dimana kebebasan itu dapat digunakan untuk merahasiakan informasi. Berdasarkan kebebasan, pihak-pihak tertentu dapat merahasiakan informasi tertentu untuk kepentingan tertentu. Persaingan ini dimaksudkan untuk meraih perhatian khalayak yang diukur dengan *rating* misalnya kalau di dalam media televisi. Oleh karena itu eksklusifitas sebagaimana yang dikatakan Alwi Dahlan, menjadi ciri utama yang sering dilakukan oleh media massa.

Melalui penguasaan informasi atas suatu isu, penyebaran rumor yang dapat memberikan rasa penasaran kepada publik dan mengalihkan perhatian media lain dimaksudkan bukan untuk menghancurkan informasi tetapi cenderung menyembunyikan melalui pengaburan informasi. Dalam konteks kepentingan semacam itu, media tersebut tidak tersaingi oleh media lain untuk dapat meraih akses atas informasi yang *valid* atas suatu isu.

Selanjutnya, dari data diketahui adanya pandangan yang mengemukakan bahwa persoalan disinformasi pada media massa terkait sangat erat dengan *political concern* dari media itu sendiri.

Sudah bukan rahasia lagi bila media juga memiliki kecenderungan melakukan afiliasi dengan elit politik (pemerintah atau partai politik tertentu). Baik terbuka maupun tersamar. Banyak kalangan yang mengakui pandangan ini. Menurut Nurhadi, praktik ini sangat nyata terjadi pada era Orde Baru di mana peran pemerintah dan elit politik sangat besar dalam melakukan kontrol atas informasi yang diberikan kepada publik. Bahkan pada saat itu, berdasarkan pengalaman Nurhadi menyatakan bahwa hampir semua wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di masa itu memiliki Kartu tanda Anggota, seperti keanggotaan Golongan Karya (Golkar) yang waktu itu sebagai penguasa.

Selain itu, negara juga melakukan penguasaan atas media, sebagaimana yang diungkapkan oleh Saktiono Wahyudi (praktisi televisi). Di era Orde Baru, TVRI lebih merupakan corong negara dalam menyebarkan informasi kepada publik, sehingga bentuk dan isi informasi disesuaikan dengan kepentingan negara seperti pemberitaan mengenai hasil-hasil pembangunan. Dibandingkan dengan era Reformasi, hal ini sudah jauh berkurang. Menurut Wahyudi, TVRI sudah lebih terbuka pada aspirasi publik walaupun keberpihakan pada negara tidak bisa dikatakan hilang. Hal tersebut menjadi bagian sejarah, bahkan masih melekat dalam budaya kerja personilnya.

Pada era reformasi, terdapat pergeseran kepentingan yang cukup signifikan. Ketika terdapat kesadaran akan semakin pentingnya peran media terutama dalam hal menciptakan opini publik, maka kendali informasi yang dahulu dilakukan oleh negara dan elit politik, sekarang pemilik modal sebagai aktor yang berperan besar dalam menentukan kandungan dan isi informasi yang akan disebarkan kepada publik.

Menurut Nurhadi, pemilik media terlibat terlalu jauh dalam manajemen redaksional. Menguatnya peran pemilik media (pemodal), tidak lepas dari adanya industrialisasi pers dan kebebasan berpendapat dimana aspek kapital menjadi penentu bentuk dan arah informasi yang disebarkan kepada publik. Kepentingan pasar seringkali dijadikan landasan dalam penentuan berita yang akan dimuat sehingga media melakukan fokus pada pasar ketika menyajikan

informasi kepada publik. Demikian pula ketika media massa yang dikuasai oleh partai politik, tentunya akan cenderung menampilkan citra positif akan partai politik tersebut. Oleh karena itu, seharusnya yang lebih ditekankan adalah bagaimana media dapat memberikan kontribusi untuk pencerdasan kepada publik sebagaimana kasus *bail-out* Bank Century.

Terkait dengan kasus *bailout* Bank Century, menurut Dahlan seharusnya media lebih *concern* kepada pembahasan mengenai apa sebenarnya *bailout*, bagaimana proses terjadinya *bailout* dan apakah proses tersebut adalah salah atau benar. Menurut Dahlan, sebenarnya di setiap posisi ada yang diuntungkan ada yang dirugikan, serta ada yang kena dampak. Dahlan menegaskan untuk memenangkan posisi, strategi informasi menjadi makin menentukan. Strategi komunikasi ini menunjukkan bahwa perspektif yang diambil sebuah media didukung lagi oleh informasi teknis dan ilmiah yang kadang sangat unik, melalui debat publik atau dialog dengan pakar.

Saat ini potensi disinformasi pada media massa akan menjadi masalah yang semakin besar dengan kemajuan teknologi digital. Dahlan mengingatkan bahwa Disinformasi akan menjadi masalah yang makin besar dengan kemajuan teknologi digital dewasa ini. Dengan keterkaitan antara sumber dan media di seluruh dunia, jumlah media yang sangat beranekaragam, *blogs* dan jaringan komunikasi sosial yang mempunyai anggota di seluruh dunia (*Facebook, Twitter* dan sebagainya), informasi yang tidak jelas nilainya akan dapat dengan mudah menyusup ke dalam media massa apabila dikemas dengan menarik dan layak berita

Menurut Dahlan kecepatan berita, persaingan antarmedia, kemudahan memperoleh informasi melalui internet, merupakan godaan besar bagi wartawan dan praktisi media untuk melupakan kehati-hatian profesional. Dalam keadaan yang serba terbatas (dana, staf, waktu dsb.), banyak praktisi yang melupakan etika dan persyaratan profesional sehingga tidak jarang media menayangkan peristiwa rekayasa atau diperan-ulang. Untuk itu, disinformasi akan menjadi masalah yang makin besar dengan kemajuan teknologi digital dewasa ini.

Alwi Dahlan menengarai, sekarang media tidak lagi mengandalkan sumber-sumber informasi kepada sumber-sumber yang jelas tetapi juga pada sumber-sumber yang tercepat. Dengan jelas Alwi Dahlan mengatakan:

Kalau Anda memperoleh informasi dari internet bukan hanya beritanya, dukungan faktanya ada yang pakai foto, videonya ada, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita tidak akan tergoda untuk mempercayainya dan membuatnya untuk disebarakan lebih lanjut ke dalam media.” (Workshop, 20 Juli 2010)

Agus Triyanto (praktisi *broadcast*) melihat adanya kecenderungan melakukan pemberitaan yang berlebihan atas suatu isu juga merupakan salah satu bentuk disinformasi, di mana suatu isu *diblow-up* sedemikian rupa pada aspek tertentu yang sebenarnya tidak penting, seperti hal-hal mistis, besaran uang kampanye kandidat pilkada sehingga justru mengaburkan esensi yang akan disajikan. Hal ini ditambahkan Alwi Dahlan yang menyatakan bahwa penayangan peristiwa rekayasa/reka ulang seolah-olah adalah fakta, dapat dikatakan disinformasi.

Dengan demikian, disinformasi termasuk di dalamnya dilakukan dengan cara melebih-lebihkan informasi sehingga ujungnya adalah pemberitaan yang tidak sesuai fakta. Agar dapat memahami persoalan mengapa media dapat melakukan praktik disinformasi, penting melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor dan aktor-aktor yang dapat melakukan hal tersebut.

Pengidentifikasian ini untuk memberikan solusi agar disinformasi dapat dihindari khususnya yang dilakukan oleh media massa. Berbicara mengenai aktor dan pemilik modal, Nurhadi berpendirian bahwa pemilik modal memiliki peran besar dalam melakukan disinformasi. Melalui kekuatan finansial dan kendali usaha atas media, pemilik media seringkali turut campur menentukan kebijakan redaksional dengan menekan/memaksa redaktur untuk melakukan pemihakan atas suatu isu dan menafikkan fakta-fakta lain yang tidak sesuai dengan kehendaknya.

Redaktur selaku pengambil kebijakan operasional akan isi media, misalnya dengan alasan keterbatasan *space* dan *time* tidak jarang

mendapat tekanan dari pemilik media, sehingga redaktur melakukan proses pilihan "*angle*" berita yang akan di *blow up* atau melakukan pemihakan atas isu-isu tertentu. Dalam hal ini Nurhadi, menggarisbawahi bahwa potensi terbesar terjadinya disinformasi ketika munculnya campurtangan pemilik modal dalam penentuan kebijakan redaksional, yang digambarkannya sebagai sesuatu yang sulit ditolak meskipun hal ini bisa disiasati pada teknik jurnalisme yang *cover both sides*.

Wartawan selaku ujung tombak pemberitaan, sebagai pihak yang bertugas mencari berita, dituntut senantiasa dapat memperoleh sumber berita dan mampu menangkap fakta secara jernih. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, wartawan seringkali melakukan disinformasi. Hal ini menurut Alwi Dahlan lebih dikarenakan aspek keterbatasan, seperti keterbatasan waktu dan bahan sehingga memaksa wartawan untuk melakukan jalan pintas dengan tanpa melakukan *cover both sides*. Dahlan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan media adalah kebenaran, tetapi tidak semua kebenaran dapat disampaikan media.

Pandangan menarik muncul dari pemikiran Agus Triyanto bahwa keterbatasan ekonomi memaksa wartawan untuk melakukan pemberitaan sesuai pesanan bukan dan bukan berdasarkan fakta. Hal ini dikarenakan masih banyak yang belum mendapatkan kompensasi yang memadai atau bekerja pada media yang tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai. Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa ketika bertugas sebagai Panwaslu dia seringkali berhadapan dengan wartawan seperti ini.

Kemampuan jurnalistik wartawan itu sendiri yang masih terbatas, sehingga tidak mampu menangkap fakta atau pesan yang diberikan oleh narasumber untuk dimunculkan dalam sebuah berita. Menurut Alwi Dahlan, wartawan dalam melakukan pemberitaan kepada publik memerlukan ketrampilan memilah dan memilah informasi, selanjutnya diangkat menjadi berita yang berguna untuk menjaga menjaga keutuhan berita.

Aktor berikutnya adalah narasumber, yang menurut Agus Triyantono dapat berperan melakukan disinformasi. Triyantono

mengungkapkan bahwa narasumber dapat secara “sengaja” memberikan informasi yang salah sehingga informasi yang disajikan media juga akan salah. Hal ini tidak lepas dari kepentingan narasumber terkait dengan pencitraan diri, keuntungan posisi atau upaya untuk mengarahkan pada pihak/isu tertentu. Dalam menghadapi situasi seperti ini, menurut Nurhadi diperlukan kemahiran tersendiri dalam menghadapi berbagai latar belakang narasumber yang bisa berstatus pejabat, pengusaha atau masyarakat awam. Nurhadi mengatakan: “Seorang jurnalis tidak hanya mahir untuk menulis berita saja, tapi juga menangkap berita (*Focus Group Discussion*, 21 Juli 2010).

Kemungkinan dan tataran berikut di mana faktor penyebab disinformasi terjadi adalah media itu sendiri. Dalam hal ini praktik disinformasi dapat dikarenakan adanya kepentingan yang memaksa sebuah media untuk melakukan hal-hal tersebut. Menurut Nurhadi sulit untuk memisahkan antara pers pemilik dan kepentingan yang melingkupinya seperti politik. Dalam kenyataannya, meskipun masing-masing secara pribadi tidak punya keterkaitan, namun dalam prakteknya hal ini saling mempengaruhi. Nurhadi menggarisbawahi bahwa kecenderungan pemihakan tersebut lebih berada dalam level aktor yang kemudian aktor tersebut mendominasi media.

Terkait dengan faktor-faktor bagaimana disinformasi terjadi pada media, Alwi Dahlan menyatakan bahwa tantangan bagi media adalah bagaimana caranya supaya tetap profesional, jeli dan sensitif serta dapat menyaring semua informasi. Ditambah lagi, di dalam media sendiri terdapat persaingan informasi dan kepentingan antar pemilik, di mana sekarang makin banyak pemilik media yang makin meningkat.

Dalam hal ini Alwi Dahlan memberikan tiga bentuk solusi, pertama membangun kesadaran akan tanggungjawab dan etik profesional. Hal ini menurut Nurhadi dapat diterjemahkan dengan bagaimana pers itu memiliki tanggungjawab untuk memelihara ketentraman publik dengan melakukan pemberitaan yang *cover both sides* dan tidak melakukan provokasi untuk memperuncing masalah yang dapat memicu konflik sosial. Kedua, perlunya peningkatan

kemampuan dalam menghadapi perubahan. Hal ini dapat dilakukan dalam dua tataran, yaitu pada level wartawan dan media. Bagi wartawan, persoalan kemampuan jurnalisme terletak pada kemampuan mengungkapkan bahwa kemahiran di bidang jurnalistik merupakan suatu hal yang utama bagi seorang wartawan, yang mencakup tidak hanya teknik penulisan berita tapi juga kemampuan dalam hal menangkap berita.

Berkaitan dengan hal tersebut Muhammad Nadjib (profesional), sebagaimana dikuatkan oleh Saktiono menekankan pentingnya menjadikan wartawan menjadi profesi yang ditunjukkan dengan penerbitan sertifikasi bagi wartawan oleh organisasi profesi seperti PWI. Perlu adanya pelatihan berjenjang bagi wartawan, supaya dapat dibedakan kualifikasi antara reporter dengan redaktur. Lebih jauh menurutnya belum ada tolok ukur yang jelas, dengan mengingat selama ini seorang reporter dapat menjadi redaktur hanya berdasarkan pengalamannya.

Agus Triyanto menyatakan bahwa wartawan yang handal akan menentukan kualitas hasil tulisannya. Bagi media, kemampuan untuk menghadapi perubahan adalah lebih banyak terkait dengan aspek keberlanjutan media yang ditentukan oleh kemampuan finansial yang memadai agar dapat menghadapi perubahan. Namun selain aspek finansial, keberlanjutan media ini harus ditunjang dengan pembinaan awak redaksional secara rutin.

Ketiga, menurut Alwi Dahlan, adanya tanggungjawab profesional wartawan yang fokus pada kepentingan orang banyak dan khalayak yang memerlukan berita. Saran Alwi Dahlan itu, menurut Agus Triyanto dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi yang layak kepada wartawan. Agus menyatakan bahwa apabila media ingin independen, ia harus dilihat dari integritas dan keamanan, termasuk wartawannya.

Nadjib juga mencermati pentingnya penegakan kode etik profesi, karena hal ini terkait dengan standarisasi profesi dan kapabilitas wartawan serta menunjukkan tingkat profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Standarisasi ini berarti bahwa setiap pelanggaran atas kode etik, harus dilakukan pemeriksaan dan

pemberian sanksi yang tegas, agar profesi wartawan tidak disalahgunakan dan tidak semua orang mengaku menjadi wartawan. Di sisi lain juga dipikirkan mengenai kode etik bagi pemilik modal, untuk membatasi campur tangan pemilik dalam penentuan kebijakan redaksional, yang secara normatif biasanya ditempuh dengan cara regulasi.

4.3. Disinformasi: Ekonomi Politik Media

Perspektif pemikiran disinformasi dalam tinjauan ekonomi politik berangkat dari pemikiran Ashadi Siregar sebagai narasumber ahli di dalam penelitian ini menjadi materi diskusi oleh kelompok, yang menitikberatkan pada nomenklatur media, yakni semacam struktur dan posisi media dihadapkan dengan lingkup yang menjadi ranah di mana media bekerja. Dalam penjelasannya Siregar menyatakan bahwa ranah informasi media, mencakup tiga posisi penting, yakni informasi yang bersifat fakta, informasi yang bersifat fiksi dan informasi yang bersifat bisnis- komersial ekonomis.

Fakta itu sendiri terdiri fakta yang bersifat publik, privat dan fakta *human interest*. Dari tiga klasifikasi itu, hanya fakta publik yang menjadi fokus dan perhatian dari informasi bagi kegiatan yang bersifat jurnalistik. Lebih jauh, Siregar menjabarkan bahwa ranah di mana media massa bekerja dengan sendirinya ditentukan oleh tiga arena, yakni ranah masyarakat sipil, kekuatan pasar dan negara.

Siregar memerinci persoalan fakta yang menjadi kepentingan langsung media. Dalam pandangannya, fakta politik dapat dilihat pada dua persoalan pokok, yakni fakta politik yang bersifat kelembagaan dan fakta politik yang bersifat aktor politik. Sementara fakta secara umum dan fakta politik, keberadaannya dipengaruhi berbagai kepentingan seperti kepentingan bisnis komersial, kepentingan eksternal dan orientasi para jurnalis sendiri.

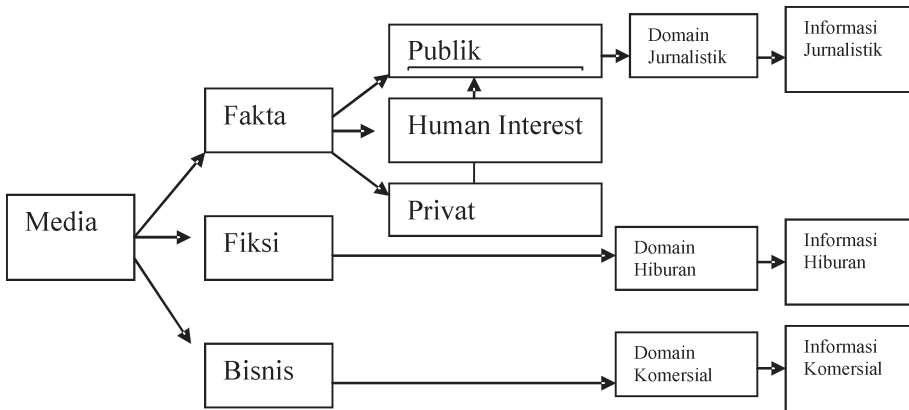
Sebagai fakta politik yang ada di masyarakat hingga sampai sebagai realitas media, proses ini terjadi melalui berbagai pematangan dan kebijakan di dalam ruang redaksi (*newsroom*). Tidak semua fakta politik yang ada, dapat sampai menjadi realitas media. Sebab, media menjalankan proses seleksi dan penonjolan yang dijalankan

berdasarkan sejumlah kepentingan-kepentingan tertentu.

Siregar mengingatkan bahwa nomenklatur media adalah hal yang mendasar. Dalam pandangannya, bila wartawan atau para jurnalis tidak memahami nomenklatur media dan memahami di mana yang menjadi domain jurnalisme, praktek-praktek jurnalisme dan informasi yang dihasilkan dapat menjadi rancu serta menjadi silang sengkabut. Sebab pemahaman terhadap nomenklatur media akan melatih para jurnalis untuk membedakan fakta privat, publik dan fakta komersial atau fakta hiburan serta sekaligus mendudukan di mana duduk persoalan dan domain dari jurnalisme.

Nomenklatur itu sendiri akan menuntun dan mengingatkan pada domain mana kerja para jurnalis tersebut dilakukan. Dengan demikian, hal ini dapat berfungsi sebagai *self-regulation* yang mengendalikan kerja profesional para jurnalis untuk peka dan konsisten pada domain yang seharusnya mereka berada.

Bagan 4.1
Nomenklatur Media dan Informasi



Sumber: Ashadi Siregar, 2010

Secara keseluruhan, apa yang disajikan Ashadi Siregar mencerminkan ada tarik ulur di dalam mendudukan posisi media itu sendiri. Pada satu sisi, media diletakkan pada tugas dan fungsi

memberi informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat serta kepentingan publik, pada sisi lain media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan ekonomi- kapitalis. Dengan demikian, peluang dan kemungkinan untuk terjadinya disinformasi terhadap berita politik, dikarenakan adanya kerancuan dalam mendudukan domain media itu di dalam melihat fakta, serta pertarungan kepentingan antara domain ekonomi, domain pasar dan domain masyarakat sipil.

Ini menjelaskan implikasi kerancuan ketika para jurnalis menentukan cara di dalam meletakkan domain media untuk melihat fakta ini, memunculkan kompetisi dan pertarungan kepentingan. Ini terjadi pada level-level yang berbeda dari level individu di antara para jurnalis itu sendiri, level rutinitas media, level organisasional sampai pada level ideologis. Sementara kemasan pemberitaan dihadapkan pada segi teknikalitas dan syarat-syarat lain yang sering menjadi standar bagaimana para jurnalis itu bekerja.

Sama dengan media cetak, program televisi pun memiliki proses seleksi melalui *newscast*, yakni program siaran berita yang terjadi diputuskan dan diolah di dalam *newsroom*. Di dalam *newsroom* ini terjadi persaingan atau kompetisi kepentingan baik pemilik memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, adanya kepentingan eksternal, kepentingan korporasi yang campur aduk. Pendek kata di sana kepentingan politik maupun ekonomi mempengaruhi proses dan keputusan kerja di *news room*. Oleh karena itu, Ashadi Siregar menegaskan wartawan harus dilatih betul menangkap karakteristik fakta termasuk misalnya fakta privat – dan apa yang dimaknakan sebagai *human interest story* serta fiksi.

Ini asumsi yang secara konseptual menerangkan bahwa ada wilayah yang dipertahankan memiliki otonomi dan independensi dalam pengertian *freedom for* dan *independent from* yang bertolak dari standar etika maupun perilaku. Seluruhnya akan berinteraksi dengan publik yang memiliki nuansa kritisisme.

Seleksi materi pemberitaan pada media yang akan menentukan agenda media pun menjadi bagian yang sering dikritik. Seleksi materi atas fakta yang ada menjadi satu hal yang penting lainnya lagi. Kalau

di dalam fakta politik tentang aktor dan kelembagaan selalu memiliki sisi tertentu, di sinilah media di dalam melakukan fungsi agenda media dalam memilih materi selalu didasarkan pada argumen dan alasan tertentu. Pilihan-pilihan semacam itu tentu mempunyai kriteria. Pilihan-pilihan pertama tentunya yang memiliki nilai berita sebagai standar khusus media yang bersangkutan. Kedua, dipilih karena ia sesuai dengan nilai berita yang dianut oleh media secara umum. Ketiga, standar nilai berita terkait dengan situasi dan kondisi dimana harus ada aspek yang ditonjolkan dan direpresentasikan. Pada aspek ketiga ini terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih kompleks.

Media dapat merencanakan sendiri isu-isu untuk diluncurkan secara berkala dengan tujuan tertentu dan membentuk apa yang disebut agenda publik, yaitu alam pikiran publik yang berkesesuaian dengan apa yang dibentuk oleh media tersebut. Pada tujuan ideal, agenda media dilakukan suatu organisasi untuk menghadapi kebijakan-kebijakan publik yang tidak ideal dan menawarkan kebijakan-kebijakan kepentingan publik yang ideal.

Lebih jauh di dalam workshop ini terungkap apa sebenarnya kepentingan objektif itu sendiri, baik dalam konteks kepentingan media dan kepentingan publik. Dalam hal ini menurut Ashadi Siregar, kepentingan objektif adalah kepentingan publik atau kepentingan umum-secara legal memenuhi hak populasi yang terbanyak dan harus dipenuhi secara legalistik maupun humanitarian. Menurutnya hal ini harus ditekankan pada para jurnalis. Itu hak yang biasa disebut sebagai hak sipil dan politik. Totalitas manusia disebut sebagai publik dengan hak-haknya yang bersifat asasi dalam konteks sipil dan politik itu. Otomatis setiap wartawan perlu menghayati apa yang disebut hak sipil dan politik warga pada saat dia akan meliput fakta politik.

Kaidah fundamental dalam kerja jurnalisisme dalam pandangan Siregar bertujuan untuk obyektivitas dan kebenaran ontologis atas fakta. Dalam kaidah ini, hukum besi dalam epistemologi jurnalisisme adalah: Reporter tidak boleh menciptakan fakta. Fakta berasal dari dunia obyektif, sepenuhnya berada di luar dunia subyektif jurnalis. Secara sederhana fakta adalah seseorang / person (*Who*) yang

mengalami atau terlibat dalam peristiwa, kasus atau fenomena (*What*) dalam ruang/tempat (*Where*) dan waktu (*When*) yang teruji kebenarannya (secara ontologis).

Di sini reporter juga perlu mewaspadaikan subyektivitas dari pihak-pihak dalam fakta yang memiliki peluang untuk terjadinya bias dan disinformasi. Subyektivitas dapat muncul dari setiap person yang menjadi narasumber. Dalam praktiknya, media menyiarkan berita yang diolah dari bahan/materi dari varian fakta.

Pertama, fakta sebagai dunia obyektif yang dapat direkonstruksi oleh jurnalis atas dasar tangkapan inderawinya. Fakta semacam ini dihadapi secara langsung oleh jurnalis melalui observasi. Dalam merekonstruksikan fakta, jurnalis harus dapat menyisihkan dan meminggirkan emosi dan preferensinya yang mungkin ada dalam menghadapi fakta tersebut. Kedua, fakta adalah dunia obyektif yang direkonstruksi atas dasar bantuan keterangan pihak yang mengalaminya. Hampir semua berita fakta sosial merupakan hasil rekonstruksi semacam ini.

Kebenaran atas suatu fakta mutlak harus teruji melalui segiempat: WHAT- WHO-WHERE-WHEN, yang dapat diyakini adanya. Prinsip ontologis metodologi jurnalisisme adalah untuk memperoleh pembuktian bahwa faktor segiempat ini memang ada secara empiris sekaligus sebagai dan menjadi yang menjadi fakta keras (*hard fact*) dalam pemberitaan. Kebebasan jurnalis untuk merekonstruksikan fakta keras dalam konteks untuk kepentingan publik (*pro bono publico*) merupakan bagian dalam kebebasan pers (*freedom of the press*). Namun tanggungjawab atas hasil rekonstruksi tersebut berada pada jurnalis, dan bukan pada narasumber. Dengan tetap meletakkan tanggung jawab tersebut sebenarnya secara implisit, penyajian tersebut dapat saja salah atau misrepresentasi. Sekalipun, kesalahan dan penyimpangan itu sendiri dapat terjadi, tidak selalu harus dimulai dari para jurnalis yang ada di lapangan langsung.

Ketiga, fakta buatan yakni adanya seseorang menyatakan komentar, pendapat, sikap, atau perasaan atas fakta keras. Dengan kata lain, fakta ini merupakan *who* yang menyatakan (*stated, expressed*) suatu. Kebebasan warga untuk menyatakan alam pikiran ini

merupakan bagian dalam kebebasan ekspresi (*freedom of the expression*). Suatu pendapat sebagai alam pikiran tidak dapat menjadi fakta, sebab yang menjadi fakta adalah adanya seseorang berpendapat. Tanggungjawab atas alam pikiran tersebut pada orang bersangkutan, kecuali sebagai narasumber, ia menganggap jurnalis salah dalam mengutip ekspresinya. Selain itu varian fakta buatan dapat pula berupa peristiwa yang direncanakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan subyektif, ataupun kepentingan sosial untuk pencitraan bersangkutan. Biasanya wartawan diundang untuk meliput. Nilai berita tidak terdapat dalam peristiwa, tetapi dari substansi permasalahan yang dinyatakan pada peristiwa.

Keempat, adalah bahan berita seolah-olah suatu fakta tetapi tidak dibuktikan secara empiris (*to state as fact without proof*), merupakan sinyalemen, dugaan, kabar burung yang tidak dibuktikan. Jurnalis tidak akan memberitakan bahan berita semacam ini. Kalaupun ada bahan semacam ini, jurnalis akan menginvestigasi guna mendapatkan fakta bersifat empiris. Dengan demikian suatu dugaan akan menjadi titik tolak dalam investigasi. Proses kerja jurnalis pada dasarnya berkaitan dengan jurnalis mendapatkan fakta. Untuk itu berlangsung hubungan JURNALIS – FAKTA–NARASUMBER.

Disini faktor narasumber sangat penting, sebab hanya melalui narasumber jurnalis dapat memperoleh fakta. Setiap teks hasil kerja jurnalis dapat dinilai dari sifat fakta, apakah berupa pengalaman empiris atau pendapat narasumber. Pada tingkat dasar penilaian teks adalah atas keakuratan deskripsi fakta, dan pada tingkat lanjutnya ditentukan oleh muatan kepentingan subyektif dalam teks.

Hak jawab yang sangat dihormati dalam etika jurnalis bertolak penghormatan terhadap posisi narasumber sebagai sumber fakta, dan sikap rendah hati jurnalis dengan kemungkinan adanya kelemahan dalam deskripsi pengalaman empiris atau pendapat narasumber. Tetapi adanya muatan kepentingan subyektif dari narasumber atau pihak lain dalam teks, tidak tercakup dalam etika tersebut. Dengan kata lain, faktor-faktor non-jurnalis yang mempengaruhi proses manajemen di *newsroom*, sering diabaikan, sebab narasumber sendiri dengan kepentingannya berupaya untuk

merekayasa teks.

Dengan penjelasan-penjelasan semacam ini sangat jelas, peluang dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyesatan terhadap informasi, dalam perspektif yang dikemukakan Ashadi Siregar, terletak di dalam cara bagaimana para jurnalis melihat fakta dan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi. Relasi antara jurnalis dengan fakta pada satu sisi, dan proses kerja selektif dan reduktif di dalam *newsroom* memungkinkan penyimpangan dan penyesatan informasi terjadi di dalam praktek dan kerja media. Seperti pula sebab akibat ini dapat terjadi media televisi. Apalagi menurut Siregar, ciri khas audio visual media televisi sering menempatkan media televisi lebih sebagai media hiburan ketimbang sebagai media informasi. Televisi lebih ditujukan untuk memenuhi kaidah dramatik, klimak dan antiklimak yang diupayakan sedemikian rupa. Prinsip lain dari dunia tontonan adalah protagonis dan antagonis. Konflik dua sisi berseberangan. Seharusnya prinsip ini hanya untuk fiksi. Akan tetapi karena televisi harus dipertontonkan, maka jurnalisisme televisi pun menjadi mengikuti prinsip atau pola 'tontonan'.

Paparan di atas sedikit banyak telah menggambarkan posisi dan struktur media yang meletakkan di mana domain informasi publik. Hanya kemudian, berbagai pertanyaan timbul di dalam rangkaian yang menjelaskan domain media massa sebagai nomenklatur tersebut. Pertanyaan yang diajukan Wiyanto (praktisi televisi) misalnya, penyimpangan dan penyesatan informasi, lebih disebabkan adanya dramatisasi yang dilakukan media televisi. Dalam pandangannya, dramatisasi merupakan sesuatu yang disengaja yang sebenarnya merupakan sesuatu yang mudah dan sederhana di dalam pemecahannya, namun oleh media secara sengaja didramatisir.

Sementara Masduki (akademisi) menyatakan bahwa dinamika menarik di dalam kerja jurnalisisme dapat dilihat dari dimensi isi dan dinamika di dalam *newsroom*. Namun demikian, bagaimana akar permasalahan terjadinya pemberitaan yang manipualtif dan disinformatif yang terjadi di media, yakni apakah sejauh itu perlu dilakukan pengkambinghitaman. Menurutnya, kekacauan berita politik sesungguhnya akan mengarah pada pola konsumsi masyarakat

terhadap informasi. Dengan demikian, di sana perlu penjelasan, bila terjadi manipulasi dan disinformasi terjadi di dalam pemberitaan, maka pada level mana sebenarnya hal tersebut terjadi.

Menurut Siregar, persoalannya apakah isu tersebut bisa diasumsikan sebagai ekspektasi jurnalisme. Di sini kita bisa melihat bahwa seorang wartawan seharusnya mampu merepresentasikan fakta menjadi narasi dan audio-visual yang baik. Menurutnya, dalam penyajian tidak boleh ada sensasi. Padahal banyak sensasi yang acap kali sulit dinalar. Misal, banyak media mewawancarai seorang kyai tentang kesebelasan yang akan menang sekalipun kyai sama sekali bukan pakar sepak bola.

Pada titik tertentu, media menjadi naif sehingga nama (*who*) menjadi tidak penting – yang penting adalah nilai atraksi. Budi (praktisi media) melihat berita yang ditayangkan tidak lepas dari kebijakan redaksional yang bersinggungan dengan kepentingan pemilik modal. Dalam hal ini Budi mencontohkan Metro TV pun kalau yang memberitakan yang bersinggungan dengan kepentingan Surya Paloh, ada kebijakan lain. Demikian pula di TV One, segala yang bersinggungan dengan Abu Rizal Bakri terutama terkait lumpur Lapindo pasti ada pertimbangan khusus.

Padahal dalam keberagaman (karakter dan latar belakang narasumber) akan muncul gagasan-gagasan, persoalan-persoalan, logika-logika yang tujuannya memperjelas persoalan. Dalam dunia komunikasi, dapat saja unsur kesengajaan agar gagasan dan persoalan beralih. Dengan demikian, posisi media massa menurut Ashadi Siregar benar-benar harus kokoh dalam hal prinsip.

Ada aspek lain yang disorot adalah tentang kompetensi wartawan yang juga dapat menjadi celah untuk terjadinya disinformasi. Sihono (praktisi media) menggulirkan persoalan kompetensi wartawan dan hubungannya dengan disinformasi pemberitaan di media. Dalam diskusi ini terungkap tiga unsur penting yang melihat kompetensi wartawan. Pertama, kesadaran yang terkait dengan kesadaran etika dan hukum. Kedua, pengetahuan yang mencakup pengetahuan umum dan khusus. Ketiga, ketrampilan yang mencakup ketrampilan riset, identifikasi dan peliputan. Dalam

pandangan Ashadi Siregar, kelemahan wartawan dari ketiganya menyebabkan terjadinya carut marut informasi.

Lebih jauh Ashadi menjelaskan terdapat persoalan hubungan yang sifatnya perenial, antara struktur dan aktor yang dapat menjabarkan lebih jauh kualitas dan kerja *newsroom* di dalam media televisi. Hubungan struktur dan aktor ini juga menentukan bagaimana pemberitaan berkualitas atau tidak. Kualitas struktur-struktur di mana media bekerja pada gilirannya akan menentukan kualitas hasil karya jurnalis dari pada aktornya (para jurnalis). Di lain segi, disinformasi terjadi berkaitan dengan upaya-upaya pencitraan yang dilakukan media.

Rizki dari (praktisi media) melihat bahwa disinformasi berawal dari dua masalah pertama media sedangkan persoalan kedua berasal narasumber. Disinformasi berasal dimana-mana, media sebagai perpanjangan tangan atau corong untuk penyampai informasi dari narasumber. Terkadang narasumber tidak transparan terhadap suatu masalah yang dibahas dengan jurnalis. Inilah yang menjadi pangkal disinformasi, namun tidak diketahui/dipahami masyarakat.

Ashadi Siregar, kembali menegaskan untuk kembali pada kaidah kompetensi masing-masing wartawan dan redaksi sebagai pengelola *news room*. Kembali patuh pada rambu struktur *newsroom*. Sebab semua inilah yang akan menentukan karakter tayangan. Serta mungkin atau tidak mungkin terjadinya disinformasi.

Simpul-simpul penting dalam melihat disinformasi berita politik di media massa ini mengerucut pada aspek-aspek berikut:

- a. Berita politik merupakan fakta publik sehingga masuk dalam domain jurnalistik sebagai informasi jurnalistik. Dengan demikian, sudah selayaknya bila pemberitaan politik, apa yang menjadi kepentingan masyarakat atau publik lebih diutamakan, bukan kepentingan sensasional hiburan, pencitraan tokoh atau kepentingan bisnis. Semua itu merupakan akar terjadinya disinformasi di dalam pemberitaan politik.
- b. Terjadinya disinformasi tidak hanya datang dari internal media (wartawan/jajaran redaksi, manajemen/direksi,

pemilik modal/*owner*) tetapi juga dari eksternal media (politisi, tokoh masyarakat, pejabat negara, LSM). Akar permasalahan terletak pada kompetensi dan kesejahteraan wartawan

- c. Diperlukan pemahaman terhadap kinerja media massa, termasuk pemilik modal, pejabat negara, politisi dan masyarakat umum. Untuk itu diperlukan edukasi terhadap pihak-pihak yang terkait proses pencarian, pengolahan, dan penyajian berita politik

4.4. Disinformasi: Perspektif Politik-Kebijakan Politik

Pembicaraan tentang disinformasi berita politik dari perspektif politik- kebijakan politik, mengacu pada pembicaraan yang dipaparkan oleh Dr. Purwo Santoso (akademisi) yang melihat persoalan ini dari sudut pandang politik, kelembagaan, aktor politik dan kebijakan politik. Dalam pandangannya, disinformasi politik, dapat terjadi lebih karena sebab yang bersumber pada tindakan dan pilihan, namun tidak jarang hal ini terjadi sebagai akibat dari situasi dan kondisi.

Purwo menyatakan, disinformasi berita politik dapat dilakukan bukan hanya oleh pejabat dan politisi, melainkan juga kalangan media massa. Bahkan, disinformasi bisa terjadi akibat adanya perselingkuhan antara politisi dengan institusi media. Perselingkuhan itu terjadi manakala media massa tidak dikelola secara profesional dan membiarkan diri diintervensi kekuatan politik tertentu, sehingga kehilangan independensinya. Pemberitaan media massa dalam konteks ini- yakni konteks disinformasi politik esensinya sama dengan kegaduhan yang nyaring bunyinya tetapi tidak jelas pesannya.

Dalam konteks disinformasi yang dilakukan pejabat dan politisi, Purwosantoso, tak jarang hal itu justru terjadi di luar kontrol mereka. Meski demikian, bukan berarti Purwo menafikan motif “tidak baik sejumlah politisi maupun pejabat publik Bahwa kecenderungan-kecenderungan semacam itu tetap ada dan mungkin. Sebab, menurutnya, di luar motif jahat para politisi, disinformasi berita tidak jarang

dihasilkan oleh kesimpangsiuran aturan main atau kisruhnya pelaksanaan aturan main yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Purwo menegaskan bahwa disinformasi adalah keniscayaan dalam praktik politik, khususnya dalam komunikasi antarberbagai pihak yang terlibat dalam proses politik. Bahkan ia menyebut politik sebagai pertarungan.

Dengan pemahaman tersebut, para praktisi politik harus mengambil langkah yang mungkin tidak menguntungkan dirinya dan juga tidak menguntungkan publik. Namun hal itu terjadi dalam kondisi di mana tatanan politik belum mapan sistem akuntabilitas publiknya. Dalam situasi demikian, mereka akhirnya justru ikut bermain dalam disinformasi tersebut. Bila para jurnalis menginginkan untuk meminimalisasi terjadinya disinformasi- setidaknya mereka dapat melakukannya untuk memantapkan tingkat akuntabilitas. Artinya, mereka perlu membeberkan kesimpangsiuran ketentuan kelembagaan kepada publik terlebih dulu sebelum memfokuskan pada aktor politik sebagai komunikator politik.

Disinformasi ini bisa pula merupakan pilihan dari politisi atau pejabat itu sendiri. Sebagaimana disampaikan Susilastuti (akademisi), cakupan politisi ini dapat diperluas, yakni meliputi lembaga politik, birokrasi maupun lembaga terkait lainnya. Pertanyaannya kemudian mengapa media memilih mereka menjadi narasumber? Atas pertanyaan tersebut bahasan ini menyajikan pemikiran yang mencoba untuk menemukan akar masalah mengapa narasumber bisa menjadi faktor terjadinya disinformasi. Dalam konteks ini, narasumber itu sendiri tidak dapat dilepaskan sebagai aktor politik sekaligus sebagai komunikator politik. Termasuk posisi media sendiri yang memungkinkan sebagai pelaku atau aktor dan komunikator politik sekaligus. Disinformasi dalam pengertian ini, bisa dipahami sebagai hal negatif, bisa pula positif.

Aspek positif maupun negatif sebenarnya tak perlu diperdebatkan karena sudut pandangnya berbeda. Semua akhirnya bermuara pada kepentingan, yakni kepentingan siapa. Dalam kaitan itu, Sri Johar Winarli (akademisi), mengingatkan, bicara disinformasi berita politik, tentu akan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan.

Setiap disinformasi berita politik selalu terkait dengan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Dalam kenyataannya, semua kebijakan pemerintah maupun kebijakan negara juga tak lepas dari kepentingan politik sehingga informasi terhadap kebijakan negara tidak sepenuhnya dibuka secara vulgar. Perdebatannya adalah apakah ketika kebijakan tersebut tak semuanya disampaikan secara vulgar dan terbuka kepada publik, akan muncul kesan disinformasi. Padahal, menurutnya, tidaklah mungkin seluruh kebijakan yang berkaitan dengan politik dibuka secara vulgar, karena ada kepentingan-kepentingan politik yang tak bisa disampaikan kepada publik. Apalagi kebijakan politik negara tersebut menyangkut kerahasiaan negara.

Dalam kesempatan itu Djoharwinarlien memberi contoh mengenai kebijakan penurunan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Menurutnya, kesan terhadap kebijakan tersebut hanya terkait dengan persoalan uang, tetapi sesungguhnya kebijakan tersebut terkait dengan politik. Kepentingan politik itulah yang tidak dibuka secara vulgar, misalnya kebijakan untuk menurunkan harga BBM sesungguhnya dilakukan untuk kepentingan siapa. Dalam prakteknya, informasi politik tak bisa dibuka 100 persen. Padahal, idealnya kebijakan politik, terutama oleh negara harus dibuka semuanya sepanjang menyentuh kepentingan publik.

Di dunia ini, tidak ada satu pun negara yang tidak berpolitik, jadi tidak hanya parpol saja yang berpolitik. Kebijakan yang dikeluarkan negara pun tidak ada yang tidak beraspek politik. Negara mempraktekkan politik selalu dikaitkan dengan kekuasaan atau kepentingan negara. Bicara tentang kekuasaan, juga akan terkait dengan bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan politik praktis, maka disinformasi akan bersinggungan dengan kepentingan, yakni kepentingan kelompok/ golongan atau individu.

Namun secara keseluruhan, dimensi-dimensi pembicaraan tentang disinformasi politik ini, mencakup enam persoalan pokok. Pertama, dari sisi narasumber pemberitaan. Ketidakmampuan narasumber menyampaikan pesan kepada masyarakat dapat menjadi sebab disinformasi. Sekilas juga telah disebutkan bahwa motif jahat

dari narasumber yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu secara sengaja dapat membelokkan informasi yang benar.

Kedua, dari aspek media dan para jurnalisnya. Ketidakmampuan para jurnalis di dalam memahami konteks apa yang dibicarakan narasumber sering mengakibatkan informasi yang disajikan menjadi menyimpang dan menyesatkan. Kompetensi dari para jurnalis menjadi faktor penyebab disinformasi terjadi.

Ketiga, persoalan akuntabilitas politik. Dalam persoalan ini, disinformasi terjadi karena terjadinya kesimpangsiuran terhadap aturan main dan aturan yang saling bertentangan. Masing-masing mengacu pada aturan main dan aturan yang berbeda-beda serta bertentangan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Ketidakjelasan pesan informasi disebabkan karena ketidakmapanaan adanya akuntabilitas politik yang jernih.

Keempat, terdapat persoalan serius bahwa yang menjadi korban dari disinformasi pemberitaan politik bermuara pada masyarakat. Masyarakat atau konsumen media pada akhirnya berada dalam posisi dirugikan atas terjadinya disinformasi, karena mereka tidak mendapatkan informasi secara benar.

Dua tambahan dari aspek-aspek krusial tersebut adalah soal pendidikan dan etika politik. Dua segi ini, yakni pendidikan dan etika politik ini, lebih merupakan tawaran pemecahan terhadap rumitnya dan kompleksitas yang terjadi bagaimana disinformasi pemberitaan politik terjadi. Bila dicermati, sumber terjadinya disinformasi pemberitaan politik, tidak semata-mata berasal dari media.

Hal yang paling dkuatirkan adalah bila sumber-sumber disinformasi tersebut justru saling berinteraksi dan berkoordinasi satu sama lain. Pada tingkatan tertentu, siapa memanfaatkan siapa, menjadi bagian kerumitan tersendiri di dalam mengidentifikasi terjadinya disinformasi pemberitaan politik. Pengaruh ini dapat terjadi dari mana saja, apakah dari para jurnalis terkait ketidakmampuan dan sikap kritis, dari narasumber karena motif jahat, dari persoalan silang sekarut, carut marut atau kesimpangsiuran terhadap aturan main yang saling bertolak belakang serta kepentingan-kepentingan ekonomi politik yang membelitnya.

4.4.1. Aspek Narasumber

Diakui bahwa ketidakmampuan narasumber menyampaikan pesan kepada masyarakat juga menjadi penyebab disinformasi. Setiap pejabat atau politisi menyampaikan informasi tentang suatu kebijakan, tak pernah dipaparkan dua sisi sekaligus, yakni baik dan buruk, melainkan hanya satu sisi saja, yakni sisi baik. Padahal, seperti dikatakan Rizky (praktisi media), setiap orang berhak mengetahui sisi buruk suatu kebijakan.

Dalam kaitan itu, menurut Rizky, media harus mengorek di balik pernyataan narasumber tersebut. Sebab, tidak jarang pejabat membuat misteri atau menyimpan rahasia. Adalah tugas media untuk mencari tahu apa sesungguhnya kepentingan pejabat tersebut, termasuk kepentingan parpol. Kepentingan semacam itulah yang kemungkinan menyebabkan disinformasi.

Contohnya, soal konversi minyak tanah ke gas elpiji. Pejabat menyampaikan dari sisi baiknya. Namun ketika terjadi ledakan elpiji secara bertubi-tubi, semua pihak yang terlibat saling lempar tanggung jawab. Bencana itu terjadi karena narasumber (pejabat) tidak menyampaikan informasi secara lengkap dan berimbang. Ketika narasumber tidak menyampaikan secara terbuka, kemudian terjadi malapetaka, pihak yang paling disalahkan atau dijadikan kambing hitam adalah media. M Sobirin (praktisi media) mengakui, berita yang telah di-*publish* acap kali di-*counter* karena dianggap tidak jelas, membingungkan dan tidak memuaskan pembaca. Karenanya, media yang *notabene* berpihak kepada pembaca harus melakukan penyaringan ketat terhadap informasi, terutama yang terkait dengan kebijakan-kebijakan politik agar tidak membingungkan masyarakat.

Budi (praktisi media) memperkuat pendapat tersebut, bahwa media massa, baik cetak maupun elektronik sering tidak melihat informasi yang akan disiarkan itu sesungguhnya telah dikemas sedemikian rupa demi kepentingan birokrasi atau organisasi politik itu sendiri. Akibatnya, masyarakat menerima informasi yang bias.

Untuk menguji informasi, seperti penuturan Dr Purwosantoso, informasi itu diadudomba (pro-kontra) sebagaimana biasa dilakukan oleh pengadilan dan diakui seluruh dunia. Sedang dalam dunia

jurnalistik, ruang pengadu-domba itu melalui kaedah *cover both (all) sides*. Dengan mengadu informasi dari banyak pihak akan diperoleh fakta yang relative jernih. Pandangan ini tidak terjauh dari pandangan John Stuart Mill, yang menyatakan bahwa untuk mengungkapkan kebenaran informasi, maka informasi itu harus berkompetisi sehingga mana argumen dan pemikiran yang lemah dan tidak berdasar dapat terbuka dan terkuak.

Sulit dipungkiri bahwa politik menjadi sumber disinformasi. Ironisnya, disinformasi itu justru dijadikan semacam barang dagangan. Primaswolo Sudjono (praktisi media) mengamati, fakta yang terlihat selama ini, disinformasi jadi alat bagi politisi untuk mencapai tujuan. Tidak hanya bagi politisi, bagi pemerintah, bahkan juga jurnalis sendiri, disinformasi juga digunakan sebagai alat.

Bagi politisi misalnya, disinformasi sangat dibutuhkan demi mencapai tujuan tertentu. Dalam kasus *Bailout Century*, disinformasi benar-benar dikembangkan untuk mencapai tujuan politik tertentu, antara lain untuk menggeser salah satu kekuatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Setelah menteri berhasil digeser, target selanjutnya Wapres.

Contoh lain, adanya pernyataan soal rapor merah sejumlah kementerian. Walaupun itu baru dalam tahap peringatan, media televisi telah mengembangkan ke arah wacana *reshuffle* kabinet. Topik baru ini pun menarik perhatian publik. Media TV bukannya mengurangi disinformasi, melainkan justru terus mengembangkan sedemikian rupa hingga akhirnya ternyata tak ada *reshuffle*. Belakangan, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjelaskan bahwa rapor merah terjadi karena anggaran untuk pembenahan Lembaga Pemasarakatan (LP) belum turun.

Disinformasi dari sisi kepentingan pemerintah tergambar jelas dalam *release* terhadap berbagai kebijakan misalnya soal kemiskinan. Primaswolo menilai kemiskinan mencerminkan buruknya kinerja pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga punya kepentingan tertentu. Dalam banyak kasus misalnya, Pemerintah Daerah tetap memelihara tingkat kemiskinan dengan harapan tetap mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Tingkat kemiskinan di DIY

misalnya, tetap dipelihara sehingga BLT (bantuan langsung tunai) atau sejenisnya akan tetap masuk ke Pemda. Kondisi seperti ini juga diakui kalangan legislatif di DIY.

Pendapat Primaswolo mendapat dukungan penuh dari politisi Partai Golkar DIY, Yulianto, yang juga peserta FGD. Dengan mengacu pada pernyataan Purwosantoso bahwa disinformasi politik adalah keniscayaan, maka menurutnya, disinformasi memang perlu, bahkan mengandung nilai positif. Menurut Yulianto, nilai positifnya adalah untuk menjaga stabilitas nasional, yakni meringkai jangan sampai masalah kecil '*ngombro-ombro*' (melebar dan tak jelas arahnya), padahal masalah itu belum tentu benar/salah. Stabilitas ini diperlukan untuk pencitraan institusi agar tidak jatuh di mata masyarakat.

Dalam hal ini ia mencontohkan soal rekening gendut sejumlah perwira tinggi Polri. Kapolri ketika ditanya wartawan tidak menjawab sebagaimana adanya. Kapolri sengaja mendisinformasi agar masyarakat tenang dan institusi Polri tidak jatuh di mata masyarakat. Sedang menyangkut masalah kemiskinan, di Sleman misalnya, birokrat setempat menyatakan meningkatnya angka kemiskinan karena ada pengalihan dari metodologi lama ke metodologi baru, sehingga angkanya akan lebih besar walaupun sasarannya tetap. Ini adalah argumen birokrat yang bersifat positif, yakni agar nama institusi tetap terjaga di mata masyarakat.

Peserta FGD tak ada yang membantah adanya kesengajaan pejabat publik melakukan disinformasi. Hal ini sejalan dengan paparan Purwosantoso yang tidak menafikan niat jahat dari politisi maupun pejabat publik untuk mendisinformasi. Di sisi lain, ada pula pejabat publik yang memang tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan kebijakan itu kepada publik. Dalam pandangan Ketua KPID DIY, Rahmat Arifin, banyak pejabat publik yang mengalami problem komunikasi yakni tentang bagaimana menyampaikan kebijakan publik yang hendak disampaikan ke masyarakat.

Soal faktor kesengajaan dari pejabat untuk melakukan disinformasi, Rahmat memandang bahwa tidak semua pejabat publik punya etika yang cukup untuk menyampaikan informasi kebijakan

publik secara benar. Sekadar contoh, di beberapa negara demokrasi, setiap kebijakan publik selalu disampaikan dengan jelas dan jernih tanpa kalimat bersayap. Sedang di Indonesia, pesan sering disampaikan dengan kalimat bersayap, sehingga menimbulkan interpretasi berlebihan. Kadang ada pejabat publik yang mempolitisir semua hal sehingga ketika sampai ke masyarakat lewat jurnalis, tidak sesuai yang diinginkan.

4.4.2. Aspek Media dan Jurnalis

Selain berasal dari nasasumber, disinformasi berita politik juga bersumber dari media atau jurnalisnya sendiri. Budi (praktisi media) melihat media massa, baik cetak maupun elektronik terkadang tidak melihat apakah informasi yang akan disiarkan itu sengaja dikemas sedemikian rupa oleh birokrasi atau organisasi politik demi kepentingan mereka, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi bias. Media massa seharusnya mengembangkan *corporate culture* yang baik agar mereka bisa berpikir jernih. Media harus menyadari bahwa apa yang hendak disampaikan itu akan diserap masyarakat sehingga jangan sampai bias.

Dalam konteks ini Rahmat Arifin berpendapat bahwa disinformasi akarnya juga bisa dari wartawan. Berdasar pengalamannya, yang pernah diwawancari wartawan soal kasus Radio Bantul FM. Berita yang muncul kemudian “Bantul FM Disemprit KPID”. Kata “disemprit” di situ memunculkan disinformasi luar biasa, karena kesannya sudah ditegur, diperingatkan, diberi surat resmi, sanksi dan sebagainya.

Praktisi media, Arie Giyarto (praktisi), pun mengakui kelemahan tersebut. Kadang-kadang wartawan punya keinginan meng-*counter* dua masalah atau pendapat agar beritanya menjadi ramai, namun yang terjadi malah menimbulkan masalah baru dan membingungkan masyarakat. Tayangan salah satu stasiun televisi swasta yang membenturkan pendapat dari tokoh-tokoh, justru membuat masyarakat bingung, masalahnya menjadi ‘*ngombro-ombro*’, tak terkontrol, dan justru tidak menyelesaikan akar persoalan.

Laporan langsung penggrebekan teroris di Temanggung yang ditayangkan TV swasta beberapa waktu lalu, sungguh memalukan. Saat itu reporter secara detil menerangkan bahwa yang ditembak adalah gembong teroris Noordin M Top, karena sebelum ditembak yang bersangkutan mengaku sebagai Noordin M Top. Setelah itu terkuak ternyata yang ditembak Densus 88 bukan Noordin sebagaimana diterangkan secara detail oleh reporter.

Profesionalisme wartawan dan profesionalisme pengelolaan media menjadi jawaban atas problem disinformasi yang dilakukan media maupun wartawannya. Purwosantoso berpandangan, profesionalisme pengelolaan media perlu ditegakkan sehingga setiap kegagalan yang terjadi karena disinformasi bisa dilacak lebih lanjut dan memiliki nilai berita yang tinggi. Namun di sisi lain, independensi media juga tidak boleh terganggu oleh tekanan politik dan sisi manapun.

Setidaknya, menurut Purwo, ada tiga upaya yang bisa dilakukan media guna memperkuat independensinya, sehingga bisa menjadi benteng kepentingan publik. Pertama, sebagai *business enterprises*, media dituntut mengembangkan kultur organisasi yang sehat yang tanpa beban sanggup menegakkan kode etik jurnalistik. Perusahaan juga harus sanggup memecat 'wartawan amplop', namun implikasinya perusahaan harus menjamin kesejahteraan wartawannya.

Kedua, media massa tidak berafiliasi, apalagi menjadi senjata politik kepartaian dan tokoh-tokohnya. Politik yang dimainkan adalah pembelaan kepada nasib publik dan hal itu bersifat impersonal. Reputasinya sebagai lembaga yang berpihak pada publik inilah yang justru menjadikan perannya disegani. Ketiga, atas dasar *track record*-nya, media justru bisa mengeruk keuntungan besar dengan meneguhkan diri sebagai *market leader* di bidang pemberitaan yang berkualitas.

Namun untuk mewujudkan hal yang diidealkan Purwo, bukan pekerjaan mudah. Sebab, seringkali narasumber justru bersinergi dengan media untuk mencapai kepentingan politiknya. Seperti diingatkan praktisi media M Fauzi, kini tinggal bagaimana pintar-

pintarnya narasumber memanfaatkan media. Bila keduanya bisa bersinergi tentu akan memudahkan pencapaian tujuan politik. Namun bila hanya satu pihak, mungkin tak cukup efektif. Secara ideal, media mestinya menyampaikan informasi secara tuntas, terutama terkait masalah politik.

Dalam pengamatan Fauzi, selama ini informasi didominasi dari pusat. Bahkan, terkadang, para politikus di bawah tidak tahu menahu. Misalnya saja soal Ujian Nasional, banyak aparat di level bawah tidak tahu, sehingga menimbulkan gejolak di sana-sini. Begitu pula soal konversi dari minyak tanah ke gas elpiji, juga menggejolak karena di level bawah banyak yang tidak tahu mengapa kebijakan itu dikeluarkan.

Ungkapan senada dipaparkan Adi Prabowo (praktisi media) bahwa alur pemberitaan politik terpusat pada segelintir orang. Bagi media di daerah (apalagi yang tak punya kontributor di pusat) akan kesulitan mengonfirmasi apakah berita tersebut benar atau tidak. Kalau ada berita politik, sepertinya hal itu sudah direncanakan seseorang atau suatu kelompok yang menginginkan perubahan. Misalnya perubahan di kabinet yakni isu *reshuffle* yang terus bergulir, namun ternyata tak sungguh-sungguh terjadi justru yang ada adalah *bargaining* politik. Media sepertinya menjadi sarana mereka untuk melakukan *bargaining* politik. Adi mengamati, ada suatu sistem lembaga yang memiliki kepentingan untuk mengorganisir apa yang seharusnya terjadi.

Idealnya, media punya informasi yang valid ketika akan menurunkan berita politik, baik menyangkut latar belakang putusan politik maupun aktornya. Mungkin hanya beberapa media yang mampu, karena memiliki sumber daya yang memadai serta punya orang-orang di pusat lingkaran. Sedang media di daerah umumnya berkuat pada isu-isu lokal. Bahkan, isu soal RUU (Rancangan Undang-Undang) Keistimewaan DIY saja, mungkin kita tidak tahu karena sesungguhnya itu permainan orang pusat.

Kini masalah yang harus diantisipasi adalah bagaimana agar media massa tidak terjebak dalam persoalan disinformasi. Dalam teori komunikasi politik, media massa menjadi pencerita terhadap suatu

peristiwa politik, dan selalu terjebak dalam suatu konflik politik. Keterlibatan media massa ketika bercerita atau mendongeng kepada masyarakat, yang didongengkan adalah fakta politik, yang bisa mempertajam, meredakan, atau netral. Netralitas sering jadi pilihan media, namun itu sulit. Di negara maju seperti Amerika Serikat saja tidak ada yang 100 persen netral, 80 persen saja sudah bagus. Misalnya soal kasus terorisme, tidak bisa netral 100 persen karena terkait dengan kepentingan negaranya.

Merespon persoalan tersebut, M Sobirin menekankan agar insan pers kembali kepada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman aturan main-walaupun terkadang informasinya kurang lengkap, bahkan terkadang terjebak disinformasi. Pers harus bersikap terbuka. Ketika ada pemberitaan yang salah, kurang akurat, ia harus memberi kesempatan hak jawab kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Usulan lain disampaikan Primaswolo yang menekankan pada aspek SDM (Sumber Daya Manusia) jurnalis. Untuk menghindari atau meminimalisir disinformasi, perlu diupayakan pelatihan para jurnalis agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Rekrutmen jurnalis juga harus diperketat. Kemapanan media juga berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya disinformasi, apalagi terkait dengan bisnis media yang makin ketat.

Faktor kejujuran sangatlah penting bagi jurnalis. Seorang jurnalis harus berpikir jernih ketika hendak menulis suatu berita, termasuk berita politik. Jurnalis harus jujur menyampaikan apa yang dikatakan narasumber dan tidak memelintir. Selain itu, sebagaimana diungkapkan Adi Prabowo, jurnalis harus memiliki jarak yang sama dengan berbagai pihak (narasumber), misalnya dengan partai A, B dan seterusnya. Ini penting mengingat di belakangnya adalah masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Menyangkut ajakan Purwosantoso agar media tidak berafiliasi ke partai politik, tak sepenuhnya bisa dijalankan. Apalagi, kalau bicara soal ekologi media di Indonesia, seperti disampaikan Rahmat Arifin, tampak lebih rumit karena pemilik media juga aktor politik. Telah menjadi rahasia umum bahwa aktor politik ternyata menggunakan

mediannya untuk menyerang lawan politik yang juga pemilik media. Memang idealnya, pemilik media tidak berpolitik, namun hal itu susah dilakukan. Kalau di bidang penyiaran sebenarnya telah ada pembatasan kepemilikan silang, namun di media cetak nampaknya belum ada. Hal itu juga terkait dengan UU Perseroan Terbatas.

Meski disinformasi merupakan keniscayaan, namun setidaknya bisa dieliminir sekecil mungkin. Menurut Purwosantoso, karena batas antasa privat dan publik, antara negara-rakyat tidak pernah jelas maka pencampuradukan selalu tak terhindarkan. Sementara, *policy makers* tidak mungkin mengetahui semua *variable* dan konsekuensi dari pilihan-pilihannya.

Sehubungan hal itu, Purwo mengusulkan perlunya penguatan jejaring antara wartawan dengan sumber-sumber informasi. Luasnya akses terhadap informasi yang ditopang dengan jejaring yang kuat, memungkinkan wartawan melakukan *cross check* dan disinformasi pemberitaan bisa diminimalisir. Hanya saja, langkah ini bisa menjadikan wartawan terlalu dekat dengan narasumber dan akan menjadi kendala dalam penulisan berita.

Tidak kalah penting dari itu, jurnalis harus mampu melakukan penelanjangan wacana di balik berita. Jurnalis dengan leluasa membingkai berita dalam suatu alur pewacanaan tertentu, sebaliknya sumber berita bisa memberikan informasi dengan bingkai tertentu. Keterampilan menelanjangan wacana ini, menurut Purwo, bisa memoderasi disinformasi yang bisa terjadi. Jadi, yang diperlukan bukan sekadar *cover both (all) sides*, melainkan juga menyediakan *counter-frame* bagi berita yang tendensius.

Disinformasi adalah realitas politik yang harus direspons secara realistis. Respons politik jurnalis terhadap persoalan tidak cukup pada level individual ataupun komunitas kuli tinta sendiri. Purwo berpandangan, respons yang bermakna menuntut dukungan dari bisnis media dan kepiawaian menjalin hubungan dengan pemerintah/politisi.

Terhadap pandangan tersebut, Rudi Wibowo (akademisi) mengakui *pressure* yang dilakukan teman-teman wartawan secara individual memang kurang efektif, sehingga perlu komunitas yang

bisa menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan wartawan. Ini sebagai salah satu respons dari representasi masyarakat ke arah kejujuran publik.

4.4.3. Akuntabilitas Publik

Penting untuk disadari bahwa disinformasi berita tidak jarang dihasilkan oleh kesimpangsiuran aturan main atau kisruhnya aturan main yang saling bertentangan satu sama lain. Dalam kaitan itu, pemetaan persoalan secara berimbang sangatlah penting sebagaimana diajarkan dalam kode etik jurnalistik. Namun tidak kalah pentingnya adalah pemetaan persoalan secara menyeluruh. Pertanyaannya, apakah dari kalangan wartawan bisa digalang menjadi komunitas aktivis untuk mengembangkan akuntabilitas publik? Dan, tidaklah realistis mengharapkan para politisi mengorbankan pertarungan dan karir politiknya 'sekadar' demi akuntabilitasnya kepada publik.

Sebagai komponen strategis dari publik, jurnalis sebenarnya punya kesempatan besar untuk lari dari tanggung jawab untuk mengembangkan komunikasi yang terbebas dari distorsi. Kalaulah distorsi yang digiring atau dipicu oleh langkah taktis para pejabat dan politisi disoroti, politik wacana yang dimainkan kalangan pers juga harus disoroti. Media massa seharusnya sanggup mengambil manfaat dari keperluan untuk mengembangkan akuntabilitas publik. Media juga dituntut mampu mengelola paradoks dalam kepentingan publik.

Terkait ketimpangan aturan main sebagaimana diungkap Purwosantoso, Hudono (praktisi media) mengingatkan soal berbahayanya bila disinformasi itu terlegitimasi dalam produk peraturan perundang-undangan. Apalagi masyarakat tidak bisa mengikuti secara detail proses politik dan *deal* yang dilakukan pemerintah dengan DPR untuk menghasilkan undang-undang tersebut. Sebagai contoh, dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan efektif belum lama ini, ternyata masih mengundang kontroversi. Misalnya menyangkut hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan.

Dalam Pasal 17 UU KIP ada pengecualian hal-hal apa saja yang tidak boleh dipublikasikan, misalnya yang terkait dengan proses penegakan hukum, antara lain hal-hal yang dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. Dikhawatirkan pengecualian ini justru digunakan aparat penegak hukum, bahkan oleh negara, untuk mendistorsi atau mendisinformasi fakta. Fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial pun menjadi terhambat dengan adanya pembatasan undang-undang tersebut. Sangatlah berbahaya bila disinformasi itu justru dilakukan secara kelembagaan, dalam hal ini negara.

Belum lagi dengan akan dibuatnya UU tentang Kerahasiaan Negara yang boleh jadi akan tumpang tindih dengan UU lainnya, seperti UU Pers, UU Penyiaran dan sebagainya. Aturan main semacam ini, sebagaimana juga disinggung Purwosantoso, juga harus dibenahi agar tidak tumpang tindih.

Tantangan seperti itulah yang kini dihadapi jurnalis, yakni bagaimana menyajikan berita yang terbebas dari disinformasi. Wartawan juga ditantang untuk melakukan investigasi untuk mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi di bawah permukaan. Saat ini, investigasi sepertinya menjadi barang yang sangat mahal bagi wartawan. Sebab, dalam kenyataannya, yang diterapkan di perusahaan-perusahaan media maupun organisasi pers, untuk menjadi wartawan tidak harus melakukan investigasi. Inilah perlunya memperbaiki sistem rekrutmen jurnalis di perusahaan pers.

Pentingnya wartawan melakukan investigasi ini diingatkan juga oleh Purwosantoso. Purwo secara spesifik menunjuk contoh kasus *bailout* Bank Century. Kasus tersebut seharusnya masuk kerja investigasi wartawan. Kalau wartawan tidak bisa melakukan investigasi kasus tersebut, tentu tak bisa mempublikasikan jantung persoalan Century. Bahkan, dari sekian banyak kasus (tidak hanya Century), patut dipertanyakan apakah wartawan telah cukup melakukan investigasi terhadap para politisi.

Sehubungan dengan kasus semacam itu, Century dan sebagainya, Purwo sangat yakin ada kesepakatan-kesepakatan tingkat tinggi di antara para pemain yang dikeluarkan secara informal. Dari situ, muncul percakapan-percakapan, mana yang boleh dan tidak

boleh dilakukan dan sebagainya. Ini sebenarnya informasi yang sangat fatal yang terkadang tidak tertangkap oleh media. Seharusnya jurnalis mengembangkan kemampuan riset-investigasi, mampu mengaitkan satu data dengan data lain. Sehingga kalau terjadi disinformasi berita, bisa diketahui sumbernya.

Wartawan profesional tidak akan takut meng*counter* disinformasi. Kalau komunitas wartawan bermaksud meminimalisasi disinformasi, maka, menurut Purwosantoso, berbagai kesimpangsiuran ketentuan kelembagaan yang ada harus terlebih dahulu diberikan ke publik. Para pejabat dan politisi senantiasa terjepit oleh dilema ketika mereka menetapkan keputusan kebijakan. Kalau dilema yang melilitnya tidak diberikan secara proporsional, maka wartawan justru berada dalam posisi menciptakan disinformasi.

Kondisi saat ini, banyak media hanya menjual sensasi, sedikit media yang benar-benar mengawal kepentingan publik. Sekadar contoh, dua televisi nasional (Metro TV dan TV One) terlibat konflik politik (konflik internal), namun seolah-olah mereka mewakili publik, padahal konflik terjadi di kandang sendiri.

4.4.4. Masyarakat Jadi Korban.

Masyarakat atau konsumen media pada akhirnya berada dalam posisi dirugikan atas terjadinya disinformasi, karena mereka tidak mendapatkan informasi secara benar. Dalam banyak kasus, mereka secara tak sadar malah menikmati dan seolah-olah telah menerima informasi secara benar.

Susilastuti (akademisi) mengeksplorasi bagaimana masyarakat secara tidak sadar mengkonsumsi berita-berita politik yang sesungguhnya telah terdisinformasi. Media justru menjadi jembatan yang bisa menyebabkan terjadinya disinformasi. Namun menjadi ironis ketika pelaku media tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Wartawan tinggal mengetik apa yang dikatakan narasumber tanpa mencoba melakukan investigasi lebih jauh. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas media, khususnya televisi yang tidak mampu menyampaikan persoalan-persoalan kepada masyarakat sehingga membingungkan.

Muara dari disinformasi, selalu masyarakat sebagai korban. Misalnya mengapa pemerintah perlu membuat kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji yang pada akhirnya menelan korban, karena terjadi ledakan. Informasi seputar kebijakan tersebut tak pernah diberikan secara jelas, atau sengaja ditutup-tutupi.

Diakui, selama ini masih terjadi pro-kontra kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan publik. Budi (praktisi media) menyoroti, pemerintah berusaha menyampaikan argumentasi yang dianggap relevan dan memenuhi aspek logika masyarakat. Hal itu dilakukan pemerintah melalui berbagai saluran informasi di media. Dengan demikian, apa yang dilakukan pemerintah yang semula banyak ditentang masyarakat, seolah-olah menjadi benar secara logika. Misalnya, soal kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang sebenarnya sangat membebani masyarakat. Pemerintah juga ingin dipahami oleh media. Apakah media telah merespons ini dengan benar? Itu persoalannya.

Press conference atau *release* dari pemerintah sebenarnya melegitimasi agar teman-teman wartawan mengikuti logika yang dibangun pemerintah. Seharusnya, mereka yang mengikuti *press conference* bersikap kritis, tidak hanya menjadi corong, melainkan harus menggali dari sisi lain, untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah menguntungkan masyarakat atau tidak.

Meskipun birokrasi/ pemerintah tidak lepas dari kepentingan, namun masyarakatpun dapat memperoleh manfaat. Misalnya, dalam program Keluarga Berencana (KB) yang sewaktu zaman Orde Baru didoktrinkan kepada masyarakat. Itu tergantung bagaimana birokrat dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat secara berjenjang sehingga sesuai yang diharapkan. Arie Giyarto yang pernah aktif dalam pensuksesan Program KB, menilai hal itu positif, baik dari sisi kepentingan negara maupun masyarakat. Dari aspek kepentingan negara, jumlah penduduk menjadi terkendali, sedang dari aspek kepentingan masyarakat, arahnya tercipta keluarga yang sejahtera.

Tapi di sisi lain, ada pula kebijakan pemerintah yang tidak jujur dan transparan, bahkan ada disinformasi. Contohnya dalam program

transmigrasi di luar Jawa. Departemen Transmigrasi saat itu menyosialisasikan bahwa lokasi transmigrasi serba enak, tanah subur sehingga dapat bercocok tanam apa saja. Namun kenyataan di lapangan tidak seindah yang di kampanyekan. Akibatnya tidak sedikit para transmigran kembali ke kampung asal.

Dari contoh tersebut, birokrat perlu menyampaikan informasi kepada publik bahwa kebijakan yang diambil pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah, tapi juga kepentingan masyarakat. Diharapkan penyampaian informasi tersebut dipahami masyarakat secara berjenjang. Namun semua harus dilandasi dengan kejujuran.

4.4.5. Pendidikan Politik

Kapabilitas politisi menjadi bagian sangat penting dalam memberi kontribusi terjadinya disinformasi. Karena itu, partai politik (parpol) harus lebih ketat dalam merekrut anggotanya. Jangan sampai ketika kader telah duduk di DPR, ternyata tidak memiliki kapasitas untuk mewakili rakyat.

Dalam pandangan Purwosantoso, ketika hendak menentukan langkah-langkahnya, para politisi senantiasa disandera oleh keadaan yang melingkupinya. Ketidakpedulian publik terhadap situasi yang menyanderanya, menjadikan pejabat dan politisi sebagai kambing hitam dan ketidakberesan sistem politik/pemerintahan. Sedangkan jabatan politik menjadi lokus untuk saling melempar kesalahan, setara dengan tempat pembuangan sampah.

Dalam konteks ini, pemberitaan media massa yang menjelek-jelekkan pejabat dan politisi, esensinya sama dengan kegaduhan (*noise*). Pemberitaan bersifat sensasional (nyaring bunyinya), tapi tidak jelas pesannya. Sebaiknya, menurut Purwo, ada sejumlah ketidaksengajaan dari kalangan media yang ujung-ujungnya memberi keuntungan lebih ataupun merugikan para pejabat dan politisi.

Purwosantoso memaparkan, demokratisasi, lebih khususnya pengembangan tatanan politik yang akuntabel mensyaratkan adanya perilaku publik yang bijak. Namun, membebaskan seluruh persoalan kepada politisi adalah sikap yang tidak bijak. Sikap bijak terhadap

perpolitikan akan bisa dikembangkan kalau kita bersedia menanggalkan lensa pandang normative. Sebagai gantinya, kita perlu mengembangkan bingkai yang lebih jernih, yang sanggup memilah problema aktor dari problema kelembagaan. Keduanya saling terkait, namun perubahan mendasar hanya bisa dilakukan jika *set up* kelembagaan yang mendasari perpolitikan, secara radikal diubah.

Perubahan itu bisa dimulai dengan memperbaiki pola rekrutmen yang dilakukan parpol. Saat ini ada asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa lembaga seperti DPR dan DPRD ibaratnya seperti lamaran kerja. Seperti pengamatan Budi (praktisi media), para pelamar itu datang dari berbagai strata sosial dan pendidikan yang bervariasi. Kapabilitas seperti tidak penting, karena yang dilihat adalah siapa yang punya uang untuk duduk di legislatif.

Jika sistem rekrutmennya seperti ini, bagaimana mungkin bisa mengandalkan mereka agar mampu memahami kebijakan publik/politik. Kerja mereka menjadi tidak fokus, sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat jadi bias. Ketidakmampuan mereka juga terlihat dalam forum rapat-rapat di DPR, yakni tidak menguasai substansi masalah.

Fenomena yang memprihatinkan ini tentu menuntut tanggung jawab parpol sebagai institusi yang menggembleng para kader. Selain perlu memperketat rekrutmen anggota, parpol juga dituntut memiliki kesadaran untuk menciptakan kader-kader yang berkualifikasi bagus.

Menggarisbawahi pandangan tersebut, Rudi (akademisi) mengakui, tidak sedikit calon yang masuk kader bukan karena faktor kualitas, melainkan karena kapasitas keuangan. Berdasar penelitian yang dilakukannya, seorang calon mendapat dukungan kuat dari konstituen karena memiliki kapasitas keuangan yang memadai.

Pendidikan politik kepada calon atau kader tentu sangat penting, demikian pula pola rekrutmen yang ketat. Tapi tidak kalah pentingnya adalah memunculkan lembaga independen semacam ombudsman atau lainnya yang bisa mengontrol kerja eksekutif maupun legislatif. Persoalannya yang dibutuhkan adalah bagaimana fungsi legislatif itu berjalan, bagaimana legislatif bisa bekerja sama dengan lembaga independen yang bisa mengontrol, sehingga

disinformasi itu bisa betul-betul menjadi sebuah informasi. Diharapkan, sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Negara benar-benar membawa manfaat kepada rakyat.

Yulianto (politisi) juga sepakat soal perbaikan pola rekrutmen. Perbaikan itu tidak hanya diarahkan kepada kader yang hendak duduk di kursi legislatif, tapi juga eksekutif seperti kepala daerah dan sebagainya. Pendidikan politik yang memadai akan sangat membantu, setidaknya meminimalisir terjadinya disinformasi.

Disinformasi itu sendiri, kalau mau dibilang sebagai penyesatan, menurut Purwosantoso, tidak ditanggulangi melalui pendidikan pro-kontra, namun bagaimana merespons pro-kontra ini sendiri secara tegas. Walaupun daya tangkap masyarakat merespons pro-kontra itu terbatas, maka menjadi tugas parpol untuk mendewasakannya. Tugas partai lama yang tidak pernah dilakukan adalah pendidikan politik di mana politik juga mengobservasi para elite dan para kandidat.

Sayangnya, pendidikan di Indonesia, menurut Purwo, tidak melatih orang untuk berpendapat, padahal itu pekerjaan serius sehingga kalau ingin membuat pemerintahan yang akuntabel dan mau meminimalisir disinformasi, harus mendidik orang untuk berpendapat dan berargumentasi.

Purwo punya pengalaman sulitnya mendidik mahasiswa yang sejak duduk di bangku SMP maupun SMA telah terbiasa membebek. Akibatnya, ketika duduk di bangku kuliah, ketika diajari membangun argumentasi sangat sulit. Kemampuan berargumentasi itulah yang harus dikembangkan untuk mempersempit ruang disinformasi. Persoalannya, mungkinkah mengajak parpol dan media massa melakukan pendidikan politik ke arah itu

Ada orang kampus, orang partai dan orang media massa yang menyamakan akal sehat untuk berpendapat, itu jauh lebih penting daripada mencegah perdebatan. Sebab, mencegah perdebatan sama saja dengan menyediakan otak untuk didoktrinasi orang lain.

Terhadap perlunya pendidikan politik sebagaimana dikatakan Purwo, M Nadjib (professional) berpendapat, peran itu sesungguhnya tidak hanya dimainkan oleh parpol saja, tapi juga media. Nadjib melihat, dalam konteks pemilu misalnya, peran yang kurang

dimainkan media adalah peran untuk menginformasikan kepada publik tentang berbagai hal, misalnya prosedur pemilu, tekniknya seperti apa dan kinerja kelembagaannya seperti apa.

Faktanya, media justru menyampaikan hal-hal yang tidak terlalu penting, misalnya soal Jupe yang menjadi calon kepala daerah di Pacitan. Padahal, saat itu soal Jupe jadi calon, tidak ada masalah karena tidak ada larangan bagi siapapun warganegara Indonesia, meski tinggal di Jakarta dan tidak pernah di Pacitan. Standarnya tetap mengacu pada UU tentang pemerintahan daerah, antara lain calon minimal berpendidikan SLTA dan sebagainya. Menjadi ramai karena Jupe seorang artis.

Padahal, kalau mau bicara kualifikasi, banyak calon bupati/walikota yang kualifikasinya sama dengan Jupe. Namun mengapa tidak jadi masalah atau dimasalahkan? Menurut Nadjib, ini merupakan pilihan isu media yang dianggap menarik karena Jupe *public figure*.

Namun diingatkan Purwo, wartawan tidak akan menulis sesuatu yang tidak ada ada nilai beritanya. Dengan keterbatasan tempat atau space, wartawan akan memilih menulis sesuatu yang nilai beritanya tinggi. Bahwa kemudian KPU akan merancang pendidikan politik yang memiliki nilai berita tinggi, tentu itu menjadi 'PR' berikutnya.

Soal sosialisasi pemilu seperti yang dikatakan Nadjib, sejak awal sebenarnya orang sudah mengantisipasi. Sosialisasi itu sebenarnya tanggung jawab KPU. Bila hendak dikaitkan dengan nilai berita, Purwo mengusulkan dengan cara mengumpulkan kasus-kasus unik pemilu yang di situ juga ada nilai hiburan, pesan dan pendidikan yang dikemas menjadi menarik.

Tidak hanya politisi, pendidikan politik bagi pemilik media juga penting dikedepankan. Budi dari (praktisi media) menggarisbawahi pendapat bahwa berita yang dilansir media tidak bisa dilepaskan dari kebijakan redaksional yang *notabene* bersinggungan dengan kepentingan pemilik modal. Kenyataannya, tidak banyak pemilik modal yang memiliki pengetahuan memadai tentang media massa. Pemilik modal harus dididik sehingga mau berkompromi dengan kebijakan redaksi, misalnya terkait dengan berita-berita politik yang

disampaikan kepada publik. Selain perlu ada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bagi pemilik pemodal, juga perlu ada semacam konsultan media yang kabapel. Celaknya bila kepentingan pemilik modal terlalu kuat sehingga mengabaikan aspek kepentingan publik.

Ide pendidikan bagi pemilik modal memang terasa penting dan menjadi tantangan menarik, begitu pula soal kehadiran konsultan. Dalam berbagai kesempatan, Purwosantoso mengingatkan, yang dilihat pertama dalam pendidikan politik bukan pada publiknya, tapi elitnya terlebih dahulu. Mengingat efeknya yang sistemik dan ini lebih menantang.

Purwo menggambarkan bagaimana materi pendidikan itu masuk dalam rasionalitas pemilik modal. Kalau yang dididik politisi, tentu harus masuk kalkulasi politik. Kalau yang dididik pemodal, ia harus masuk dalam kalkulasi penambahan modal. Dengan demikian, misi pendidikan untuk elite harus masuk dalam rasionalitas mereka, bukan hanya sekadar menambah informasi. Dalam kaitan itulah perlu keterampilan *framing-analysis*. DPRD saja diberi pendidikan politik tidak mau, apalagi pemilik modal.

Selain pemilik pemodal, SDM di media juga harus dibenahi kualitasnya. Hal itu bisa dilakukan melalui organisasi pers seperti PWI, AJI dan lainnya. Selanjutnya, seperti diusulkan Arie Giyarto, masyarakat juga perlu mendapat pendidikan agar mereka tidak bingung saat menangkap informasi.

Pendidikan kepada masyarakat ini mendapat dukungan dari seluruh peserta FGD. M Fauzi, salah seorang di antaranya, sepatutnya perlunya edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak hanya diam, namun bersikap kritis ketika menerima informasi. Sebab, selama ini mereka cenderung diam karena tidak tahu atau mungkin sudah muak dengan kebijakan pemerintah yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat sendiri.

Terkait hal tersebut, Adi Prabowo mengingatkan selama ini masyarakat tidak mengetahui bahwa tayangan televisi yang mereka tonton sebenarnya banyak yang akal-akalan, mengada-ada dan tidak riil. Padahal, mestinya media punya tanggung jawab moral,

bagaimana agar masyarakat menerima informasi secara benar. Mendapatkan informasi secara benar adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang.

Adi mencontohkan, ketika konversi minyak tanah ke elpiji dikatakan aman dan kemudian dipublikasikan, media tentu harus ikut bertanggung jawab, yakni dengan menginformasikan sedetail-detailnya berbagai aspek yang terkait keamanan misalnya kualitas tabung, standardisasi dan sebagainya. Dengan memberi pemahaman kepada audience diharapkan menumbuhkan masyarakat yang cerdas dan kritis.

4.4.6. Etika Politik

Narasumber bukan hanya meliputi politisi dan birokrat, tapi juga kalangan akademisi sebagaimana juga disinggung Purwosantoso. Susilastuti (akademisi) menyebut kalangan akademisi dalam komunikasi politik ini sebagai politikus ideologi. Artinya, dia bicara politik, tapi mengarahkan mengapa peristiwa itu terjadi, jadi sifatnya bukan ndompleng.

Masyarakat begitu percaya bahwa akademisi akan mampu mengarahkan keruwetan yang ada di tingkat pusat dan daerah. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat misalnya. Di negara tersebut, akademisi tak mau berkecimpung dalam politik, ini bedanya dengan Negara kita. Di Indonesia, begitu akademisi masuk ke politik praktis, mereka kehilangan independensinya. Sederet contoh bisa disebut misalnya, Anggito Abimanyu, Saefullah Fatah, Andi Mallarangeng, Denny Indrayana dan sebagainya. Idealnya, kalau memang ingin mengambil akademisi, jangan berpolitik praktis. Sebaliknya, kalau mau terjun ke politik praktis, tanggalkan atribut akademisi agar tidak bias.

Susilastuti menggambarkan hubungan antara politisi dengan akademisi yang saling menguntungkan dengan anatomi kepala dan leher. Simbol kepala dimaknai sebagai politikus yang terus tampil di public. Agar kepala bisa tegak, tentu harus dilengkapi dengan leher untuk menyambung. Namun leher ini tidak boleh kelihatan. Leher inilah yang diisi oleh dosen-dosen. Sehingga kini muncul joke: siapa

di antara kita yang mau jadi lehernya. Dia ada di mana-mana, tapi tidak boleh nongol. Jadi yang nongol hanya kepalanya saja.

Mengapa bisa demikian ? Yulianto (politisi) mengaitkan hal itu dengan etika. Apa yang dilakukan para akademisi yang terjun ke birokrasi maupun politik praktis, semuanya masuk ranah etika. Ketika Denny Indrayana masuk dalam lingkaran pemerintahan, dia baru menyadari bahwa kalau hendak mengambil suatu kebijakan, butuh proses yang luar biasa dan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan.

Yulianto sangat percaya akademisi dari UGM punya kompetensi dan netralitas yang tinggi, namun ketika ditarik ke Jakarta, menjadi menteri, memimpin departemen atau jadi konsultan politik misalnya, netralitasnya luntur. Bahkan, kadang-kadang ia larut dengan kebijakan yang sebenarnya tidak populis. Melihat problematika yang demikian kompleks, peserta FGD menyepakati perlunya memasukan etika politik di semua level yang menjadi sumber informasi politik



BAB V

MEDIA TELEVISI: PEMIRSA DAN ORIENTASI PEMBERITAAN POLITIK

5.1. Khalayak dan Media Televisi

Dalam pandangan Gerbner, Gross, Morgan dan Signorielli (1984), televisi merupakan sistem sentral pencerita (*storytelling*) yang memberi narasi dan pembingkai-pembingkai tertentu. Program-program yang ada di dalamnya seperti drama, iklan, berita dan program-program lainnya secara relatif telah membawa pencitraan kuat dan pesan ke setiap pemirsa di rumah mereka masing-masing. Masyarakat hidup dalam lingkungan simbolik yang diciptakan televisi dan hidup dalam pola-pola yang berulang melalui program-program siaran secara terus menerus yang disiarkannya. Mereka menyesuaikan jadwal kegiatannya dengan jadwal program-program televisi yang ada. Mereka mengkonsumsi media televisi dengan menyesuaikan dengan kegiatan sehari-hari mereka. Hal itu terlihat dari pola konsumsi media mereka.

Di dalam teori kultivasi misalnya, disebutkan bahwa media televisi mempunyai kemampuan mengolah dan mengarahkan sebagai predisposisi yang mempengaruhi seleksi-seleksi kultural dan penggunaan-penggunaannya. Dengan perkataan lain, televisi telah

menjadi sumber primer yang umum di dalam dan cara kehidupan sehari-hari. Studi-studi yang ada menunjukkan bahwa pemirsa televisi dengan kategori penonton berat (*heavy viewer*) mempunyai dampak yang berbeda dengan penonton yang ringan (*light viewer*). Studi-studi tersebut juga menunjukkan bahwa orientasi kepentingan termasuk orientasi kepentingan politik khalayak dibentuk dan diciptakan melalui isu-isu yang direpresentasikan oleh media televisi.

Dengan demikian, bagaimana kebiasaan masyarakat di dalam menggunakan media khususnya media televisi. Penelitian tentang hal itu untuk melihat orientasi yang muncul dan diharapkan dari masyarakat yang akan tercermin dari *media habit* mereka, yakni apa yang menjadi preferensi mereka di dalam menggunakan media, program dan isi media. Untuk itu, bab ini secara khusus digunakan untuk memaparkan karakteristik penggunaan media televisi di dalam mengikuti dan menilai pemberitaan-pemberitaan yang ada di dalam memperoleh informasi politik.

Semua data yang disajikan mencerminkan karakteristik penggunaan media di dalam memperoleh berita politik yang diperoleh melalui survey di Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalnya data demografi mereka, kebiasaan dan pola konsumsi media, harapan yang mereka inginkan terhadap pemberitaan yang dilakukan media televisi serta berbagai pandangan mereka tentang kemungkinan media televisi melakukan tindakan disinformatif di dalam menyajikan dan merepresentasikan informasi yang disajikannya. Data penelitian ini juga menggambarkan pandangan-pandangan mereka tentang pemberitaan politik terkait dengan tiga kasus sekaligus, yakni kasus pemberitaan bailout Bank Century, kasus pemberitaan Cicak versus Buaya dan kasus pemberitaan Susno Duaji.

Deskripsi ini sangat penting untuk melihat relasi yang terjadi antara kekuasaan dan kekuatan media massa khususnya media televisi dengan otonomi khalayak di dalam menerima dan menginterpretasikan semua pesan komunikasi yang diperoleh melalui media televisi. Pada sisi lain, data ini juga dimaksudkan untuk melihat persepsi-persepsi yang ada tentang disinformasi berita politik yang dilakukan televisi. Hubungan antara pola konsumsi media massa

dengan kekuatan media khususnya media televisi sedikit banyak akan menjelaskan bagaimana proses dan tahap-tahap pembentukan opini publik terjadi.

Paparan ini juga memiliki keterkaitan substansial dan taktis dengan bab sebelumnya yang membahas landasan-landasan konseptual yang diperoleh dari hasil *focus group discussion* dan *workshop*. Paparan sebelumnya telah menjelaskan pandangan-pandangan substansial kenapa dan mengapa, terjadinya disinformasi pemberitaan politik. Tinjauan-tinjauan tersebut dilakukan berdasarkan tiga perspektif sekaligus, yakni tinjauan dari politik komunikasi dan komunikasi politik; tinjauan dari ekonomi politik media; dan tinjauan dari kebijakan politik.

Titik berat penjelasan di dalam bab sebelumnya menjabarkan tataran-tataran teoritik dan konseptual yang memperlihatkan berbagai perspektif tentang kemungkinan terjadinya disinformasi pemberitaan politik yang didukung oleh data-data empiris yang pernah dialami oleh masing-masing narasumber baik dalam *Focus Group Discussion* atau pun di dalam *workshops*. Oleh karena itu, bab ini secara khusus dimaksudkan untuk menjabarkan pandangan masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta dalam melihat dan memahami pemberitaan politik dan melihat disinformasi pemberitaan politik secara khusus.

Adapun jumlah khalayak pemirsa yang disurvei untuk kepentingan ini adalah sebanyak 450 responden. Sementara kuesioner dikembangkan, berdasarkan empat aspek pokok, yakni tentang identitas dan karakteristik khalayak pemirsa televisi; pola menonton televisi; persepsi khalayak terhadap berita politik; dan pandangan mereka terhadap pemberitaan politik untuk tiga kasus pemberitaan politik, yaitu kasus bailout Bank Century; Cicak versus Buaya dan kasus Komjen Susno Duaji.

5.2. Karakteristik Pemirsa Media Televisi

Secara umum, karakteristik pemirsa televisi di dalam penelitian ini menggambarkan data demografis dan lazim, yakni menyangkut data identitas responden, seperti nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan dan pekerjaan. Bagi stasiun televisi, data tersebut sangat

diperlukan, karena dipakai untuk menentukan siapa yang menjadi pemirsa dari stasiun televisi, program apa yang ditonton, kapan mereka menonton, bagaimana status sosial ekonomi mereka dan dengan siapa mereka menonton.

Data semacam ini selain penting untuk digunakan mendapatkan pemasang iklan, juga dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Setiap karakteristik program siaran dan karakteristik pemirsa seringkali disesuaikan untuk kepentingan tujuan-tujuan ekonomi politik media. Khalayak sering ditempatkan sebagai pasar yang dijual kepada industri manufaktur karena dibutuhkan untuk kepentingan iklan, sedangkan program siaran dikemas sedemikian rupa sebagai komoditas yang sering mengeksploitas hal-hal yang sensasional, dramatisme dan kekerasan. Khalayak pemirsa seringkali dipilah dan direduksi berdasarkan status sosial ekonomi mereka. Hal itu tidak lain dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan pasar.

Namun untuk tujuan penelitian ini, data tersebut diperlukan untuk menggambarkan karakteristik pemirsa televisi secara keseluruhan dan orientasi mereka di dalam mencari, mendapatkan dan menginterpretasikan berita-berita politik yang ada di lingkungan mereka. Pandangan mereka sangat penting dan menjadi lebih berarti bila karakteristik mereka secara demografis dan psikografis termasuk orientasi-orientasi politis mereka diketahui dan dipahami. Jadi, hubungan-hubungan antara program televisi khususnya pemberitaan politik dengan orientasi kebutuhan informasi politik khalayak pemirsanya menjadi sangat krusial untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagaimana telah dirumuskan di dalam penelitian ini, yakni tahap-tahap terbentuknya opini media, kekuatan opini publik, pertarungan isu dan disinformasi pemberitaan politik.

Data lain yang dikembangkan di dalam kuesioner selain mencakup identitas dan karakteristik pemirsa televisi, juga menyangkut penjabaran lebih jauh tentang karakteristik pendidikan dan pekerjaan. Dua segi pendidikan dan pekerjaan, seringkali dijadikan indikator untuk menakar kualitas suatu program televisi.

Pekerjaan dan kualifikasi pendidikan tertentu mensyaratkan jenis dan kebutuhan informasi tertentu. Oleh karena itu, berbagai cara yang berupaya menjangkau kompleksitas dan heterogenitas tingkat pendidikan dan pekerjaan mereka, dijabarkan seluas mungkin sehingga karakteristik pendidikan dan pekerjaan ini dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di dalam masyarakat.

5.2.1. Identitas Khalayak Pemirsa

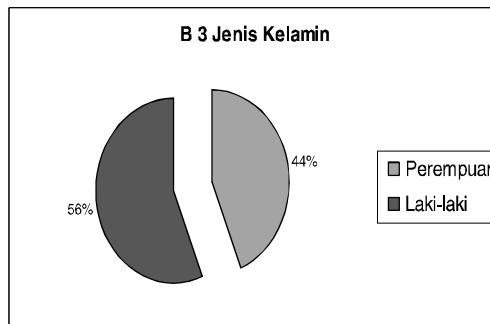
Dari 450 responden yang disurvei, 56 persen adalah laki-laki sedangkan sisanya (44 persen) adalah perempuan. Sebaran pendidikan mereka, berada pada tingkatan yang merata. Artinya, jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar sampai pada tingkat pendidikan perguruan tinggi, tercakup di dalamnya. Meskipun secara keseluruhan, komposisi ini tetap didominasi oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan tinggi, tetapi keberadaan mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan cukup mewakili pandangan mereka tentang berita politik dan disinformasi berita politik.

Ini menandakan bahwa kebutuhan informasi dan berita politik, tidak hanya menjadi monopoli bagi mereka yang memiliki jenjang pendidikan tinggi, tetapi mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan memiliki pandangan-pandangan tersendiri di dalam memperoleh dan mengomentari berita-berita politik. Tampaknya kenyataan ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang pernah menyatakan bahwa pada prinsipnya manusia sebagai *zoon politicoon* yang dengan demikian, secara alamiah dan natural memiliki kepekaan-kepekaan terhadap kebutuhan informasi politik. Jenjang pendidikan dengan begitu hanyalah penajaman dari insting yang dimiliki manusia terhadap kedudukannya sebagai makhluk politik. Data yang diperoleh juga menegaskan kondisi dan situasi sosial, budaya, ekonomi dan kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri di dalam melihat perkembangan politik dan kebutuhan terhadap berita-berita politik serta dihadapkan dengan perkembangan saluran-saluran komunikasi politik khususnya media televisi.

Tabel 5.1

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi
Perempuan	181
Laki-Laki	232
Jumlah	413



5.2.2. Pendidikan Khalayak Pemirsa

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa sebaran jenjang pendidikan responden yang diteliti, sebenarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar, yakni mereka yang berpendidikan dasar dan lanjutan dengan mereka yang pernah atau tamat mengenyam pendidikan tinggi. Komposisi terbesar, yakni mereka yang masih berstatus mahasiswa, yakni sebanyak 161 responden. Komposisi kedua ditempati responden yang telah menamatkan jenjang pendidikan strata 1.

Dengan kenyataan semacam ini, simpulan-simpulan penting dapat diajukan di dalamnya. Pertama, cara bagaimana data diambil dari responden telah menggunakan proses *multistage random sampling*, sehingga setiap responden mempunyai peluang yang sama untuk dipilih berdasarkan level atau jenjang daerah atau wilayah yang diteliti. Dengan demikian, data ini mencerminkan kondisi populasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan.

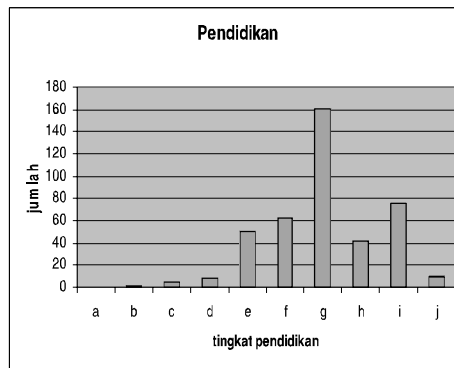
Kedua, data tersebut menggambarkan keadaan populasi di mana level pendidikan populasi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta,

cukup merata dan bahkan dapat dikatakan tinggi. Sebab dari 450 responden yang diteliti, hanya ada satu responden berpendidikan tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak ada satu orang pun yang tidak berpendidikan sama sekali.

Tabel 5.2

Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi
a. Tidak pernah sekolah	0
b. Tidak Tamat SD	1
c. Tamat SD	5
d. Tidak Tamat SLTP	8
e. Tidak Tamat SLTA	50
f. Tidak Tamat PT	63
g. Masih Mahasiswa	161
h. Tamat D3/Diploma	42
i. Tamat S1	76
j. Lebih tinggi dari S1	10



5.2.3. Pekerjaan Khalayak Pemirsa

Tipe pekerjaan khalayak pemirsa yang merupakan karakteristik umum mencakup tiga bagian besar, yakni kelompok pekerja atau pegawai yang dibayar, bekerja sendiri dan tidak bekerja. Kelompok responden yang bekerja adalah mereka yang bekerja pada suatu lembaga tertentu, yakni dapat lembaga pemerintah atau pun swasta dan menerima gaji yang secara periodik tertentu, mereka terimakan.

Kelompok kedua adalah mereka yang bekerja sendiri. Dalam kelompok kedua ini adalah mereka yang mempunyai usaha dan kegiatan ekonomi yang mereka usahakan sendiri, tidak terikat oleh sebuah lembaga atau institusi dan karena itu mereka tidak mendapat penghasilan atau gaji yang secara periodik tetap mereka terimakan. Sedangkan kelompok ketiga adalah mereka yang tidak bekerja. Kelompok ini secara ril tidak bekerja sekalipun ada diantaranya yang mendapatkan penghasilan yang bersumber dari pensiunan atau dana dari orang tua. Mereka yang masuk dalam kelompok ini adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan dan mereka yang tidak bekerja.

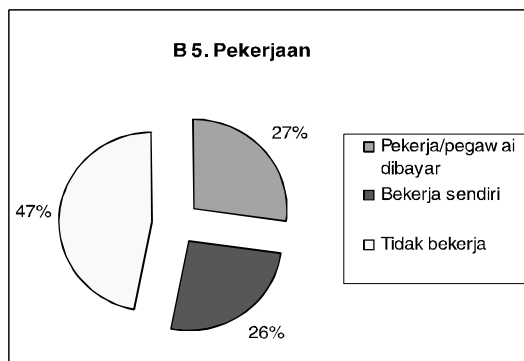
5.2.3.1. Karakteristik Umum

Berdasarkan pekerjaan khalayak pemirsa, mereka yang berada di dalam kelompok pegawai atau pekerja sebanyak 27 persen atau sebanyak 128 orang. Mereka yang berada di dalam kelompok bekerja sendiri sebanyak 26 persen atau sebanyak 123 orang. Sisanya yakni sebanyak 221 orang berada di dalam kelompok tidak bekerja atau sebesar 47 persen.

Tabel 5.3

Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerja/Pegawai dibayar	128
Bekerja sendiri	123
Tidak bekerja	221



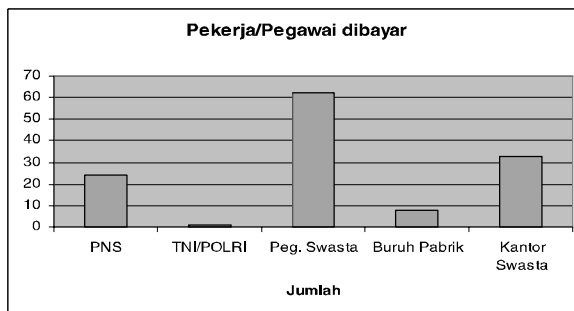
5.2.3.2. Pekerjaan yang Dibayar

Seperti telah disinggung bahwa kelompok pekerjaan yang dibayar ini diperinci ke dalam tipe-tipe pekerjaan lebih lanjut. Di dalam kelompok ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam jenis pekerjaan seperti Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pegawai Swasta dan Buruh Pabrik. Dari 128 orang yang berada di dalam kelompok ini, jenis pekerjaan yang dominan adalah bekerja di instansi swasta yang diikuti oleh mereka yang berstatus pegawai negeri sipil. Dari kalangan TNI atau Polri hanya ada satu orang. Pekerjaan sebagai buruh pabrik hanya ada 8 orang. Komposisi data responden berdasarkan pekerjaan yang dibayar dapat dicermati pada tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4

Data Responden Berdasarkan Pekerjaan Dibayar

Jenis Pekerjaan	Frekuensi
PNS	24
TNI/POLRI	1
Peg. Swasta	95
Buruh Pabrik	8



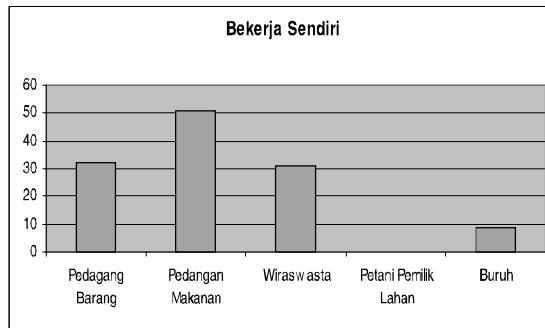
5.2.3.3. Bekerja Sendiri

Demikian pula untuk kelompok responden yang bekerja sendiri. Di dalam kelompok ini, dijabarkan ke dalam berbagai jenis pekerjaan, seperti pedagang barang, pedagang makanan, wiraswasta, petani pemilik lahan, dan buruh. Buruh dalam pengertian ini tidak bekerja di lembaga swasta tetapi hanya mengandalkan tenaga untuk

mendapatkan penghasilan seperti buruh bangunan atau menjadi tukang atau menjadi buruh tani. Dari tabel 5.5 terlihat bahwa kebanyakan responden di dalam penelitian ini mempunyai pekerjaan sendiri yakni berdagang khususnya berdagang makanan. Mereka yang mempunyai lahan pertanian sendiri tidak ditemukan di dalam data penelitian ini.

Tabel 5.5
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan Sendiri

Jenis Pekerjaan	Frekuensi
Pedagang Barang	32
Pedagang Makanan	51
Wiraswasta	31
Petani Pemilik Lahan	0
Buruh	9



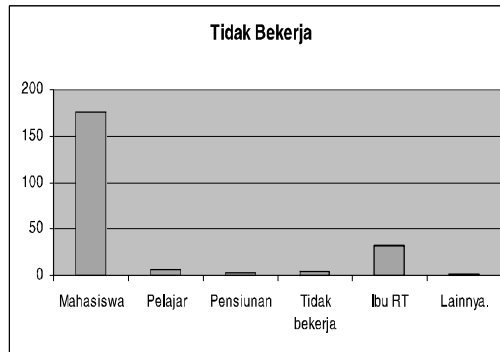
5.2.3.4. Tidak Bekerja

Dalam kelompok responden yang tidak bekerja, dari tabel 5.6 kelompok ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, pensiunan, ibu rumah tangga dan memang tidak bekerja. Dengan paparan keseluruhan tentang karakteristik responden berdasarkan pekerjaan ini, terilustrasikan bahwa pandangan-pandangan responden terhadap berita politik yang disajikan di media televisi berasal dari kelompok-kelompok pekerjaan yang luas dan berbeda-beda yang bekerja sebagai pegawai swasta, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, TNI/Polri, buruh, pedagang dan wiraswasta.

Heterogenitas jenis pekerjaan ini mempunyai relevansi penting dalam melihat pola-pola konsumsi media yang mereka lakukan serta orientasi mereka terhadap kebutuhan informasi politik

Tabel 5.6
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan Tidak Bekerja

Jenis Pekerjaan	Frekuensi
Mahasiswa	175
Pelajar	6
Pensiunan	3
Ibu Rumah Tangga	32
Tidak Bekerja	4
Lainnya	1



5.3. Pemirsa dan *Media Habit*

Keberadaan televisi sebagai lembaga penyiaran bila mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdiri dari tiga pelaku, yakni Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Swasta atau komersial. Dalam konteks penelitian ini, pola konsumsi media televisi khalayak, lebih dimaksudkan dan dilihat dari cara mereka memperolehnya. Pertama, dengan cara membayar dan dalam kenyataannya terdapat lembaga-lembaga penyiaran yang menyediakan jasa program siaran di mana para khalayak pemirsa harus membayar. Di dalam masyarakat kita, lembaga penyiaran ini sering disebut sebagai TV Berlangganan (Pay TV). Jenis TV Berlangganan ini cukup banyak,

seperti Telkom Vision, Indovision, Astro, Oke Vision sebagainya. Ciri umum dari Pay TV adalah adanya pilihan-pilihan program yang ditawarkan, baik saluran program yang diproduksi di dalam negeri atau saluran program televisi asing atau luar negeri serta relatif bersifat privasi bila dibandingkan dengan televisi bebas siar.

Kedua, apa yang disebut sebagai FTA (Free to Air), yakni lembaga penyiaran yang disiarkan secara bebas di mana khalayak tidak dipungut biaya apapun dalam menikmati dan mengonsumsi program-program siaran yang dipancarkannya. Inilah pola-pola konsumsi yang paling besar dan luas dari cara bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan informasi dan hiburan melalui media televisi.

Jumlah stasiun televisi dengan tipe semacam ini sangat banyak dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Nama-nama lembaga penyiaran seperti Global TV, RCTI, SCTV, TPI, Trans TV, Trans 7, TV One, Metro TV, ANTV, TVRI merupakan jenis lembaga penyiaran yang menyiarkan program siarannya secara bebas. Belum lembaga-lembaga penyiaran lokal yang masing-masing daerah berusaha mendirikan dan mendapatkan ijin untuk beroperasi. Seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta saja ada antara lain Jogja TV, ADI TV, RB TV merupakan lembaga-lembaga penyiarannya yang siaran mereka dapat dinikmati dan disaksikan oleh masyarakat Yogyakarta. Di Jakarta terdapat Jak-TV, O-Channel, Banten TV dll.

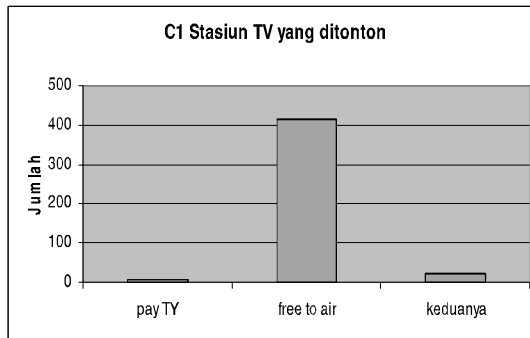
Media habit menggambarkan bagaimana kebiasaan dan pola perilaku masyarakat mengonsumsi media khususnya dalam penelitian ini adalah pola perilaku dan konsumsi terhadap media televisi. Dengan sendirinya, *media habit* ini mencakup preferensi yakni pilihan-pilihan yang mereka putuskan di dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Pilihan-pilihan ini sendiri mencakup dimensi dan aspek yang luas seperti stasiun televisinya sendiri sebagai lembaga penyiaran, program siaran yang ada, dan kebiasaan menonton terhadap media atau program yang menjadi pilihannya.

5.3.1. Media TV dan Pemirsa

Dari tabel 5.7, terlihat bahwa jumlah responden yang hanya mengandalkan pilihan media televisi dengan televisi berlangganan sangat kecil. Seperti yang telah dijelaskan bahwa umumnya penggunaan media televisi bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah menggunakan televisi bebas siar.

Tabel 5.7
Data Responden Berdasarkan Pilihan Media Televisi

Pilihan Media TV	Frekuensi
Pay TV	6
Free to Air	414
Keduanya	23

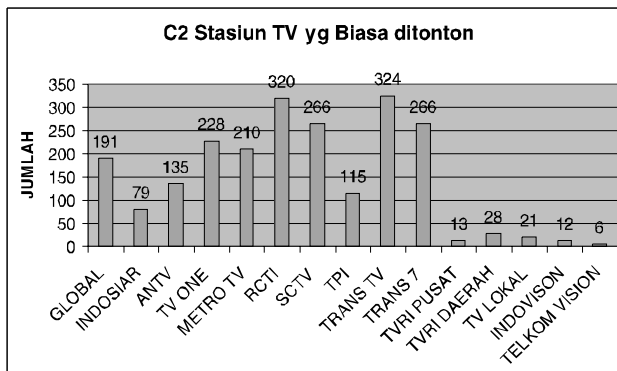


5.3.2. Pemirsa dan Preferensi Stasiun Televisi

Dalam hal menyangkut pilihan stasiun televisi, yang biasa disaksikan khalayak pemirsa di dalam penelitian ini, dari data penelitian ini terdapat lima besar stasiun televisi yang menjadi pilihan utama, yakni Trans TV, RCTI, SCTV, Trans 7 dan TV One. Dari lima besar sebagai pilihan utama responden dalam penelitian ini, hanya ada satu stasiun televisi yang di dalam program-programnya mengkhususkan berita terutama berita-berita politik yakni TV One. Posisi TV One lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya yakni Metro TV sekalipun tidak terlalu terpaut jauh. Selebihnya, Trans TV,

Trans 7, RCTI dan SCTV merupakan stasiun-stasiun televisi yang di dalam program-programnya lebih diisi dengan program-program hiburan seperti infotainment, musik, komedi situasi, sinetron, reality show, olah raga dan film. Proporsi program berita untuk keempat stasiun televisi tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan TV One atau Metro TV yang memang secara spesifik mengkhususkan pada program-program berita dan hal-hal yang serius.

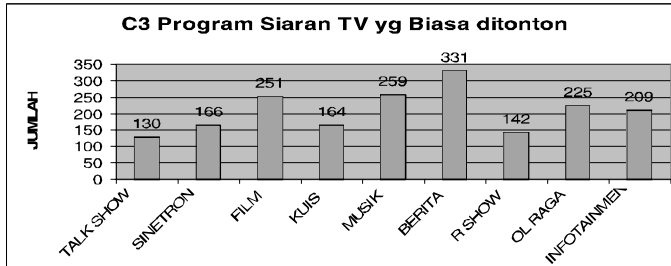
Tabel 5.8
Data Responden Berdasarkan Pilihan Stasiun Televisi



5.3.3. Pemirsa dan Preferensi Program Televisi

Namun yang menarik adalah sekalipun pilihan stasiun televisi khalayak pemirsa di dalam penelitian ini cenderung ditujukan kepada stasiun-stasiun televisi yang tidak secara spesifik pada program-program berita dan siaran-siaran yang serius, justru dari program acara siaran yang paling mereka minati adalah pada program siaran berita yang kemudian disusul dengan program siaran musik dan program siaran film. Program siaran yang tidak paling diminati adalah program *talk show* dan *reality show*. Program siaran olah raga dan infotainment berada kurang lebih pada level yang sama yang lebih baik dibandingkan program siaran *talkshow* dan *reality show*.

Tabel 5.9
Data Responden Berdasarkan Pilihan Program Siaran



5.3.4. Waktu Siaran dan Pola Menonton

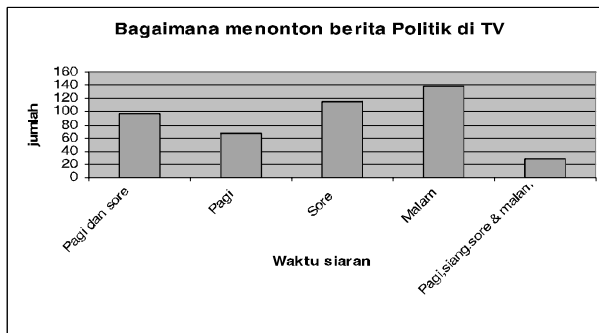
Pertanyaan penting lain terkait dengan pola-pola konsumsi media televisi sebagai perilaku khalayak pemirsa di dalam memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan melalui media televisi adalah kapan mereka pada umumnya menonton stasiun televisi yang menjadi pilihan mereka. Secara konseptual, kapan saat mereka menyaksikan program-program siaran televisi, umumnya disesuaikan dengan rutinitas kegiatan mereka sehari-hari.

Rutinitas pegawai negeri tentu akan berbeda dengan mereka yang pekerjaannya sebagai pedagang, berbeda pula dengan mereka yang pegawai swasta, ibu rumah tangga, pensiunan, mahasiswa atau pun pelajar. Secara teoritik pula, pola konsumsi media televisi sering dihubungkan dengan konsep *leisure time* yakni waktu luang atau senggang yang dipakai dan dihabiskan untuk mendapatkan hiburan atau informasi karena telah lelah dan penat bekerja seharian sehingga waktu senggang tersebut diisi dengan kebutuhan informasi yang ringan dan rileks.

Khusus terhadap berita, pola menonton dan program siaran, terlihat bahwa kebanyakan responden menonton pada waktu malam hari dibandingkan dengan pagi atau pun sore. Tentu saja, pola-pola konsumsi media dan waktu menonton itu, cukup merata yakni mereka yang menonton pada pagi dan sore, ada yang mereka menonton pada pagi atau sore serta bahkan ada yang menonton dari pagi, siang, sore dan malam.

Tabel 5.10
Data Responden Berdasarkan Pola Menonton

Pagi dan sore	Pagi	Sore	Malam	Pagi,siang.sore & malam
97	66	115	139	28



Sekali lagi sebaran pola menonton khalayak pemirsa semacam itu sedikit banyak ditentukan oleh rutinitas kegiatannya di seputar kehidupan serta pekerjaannya. Seberapa banyak waktu luang yang dimiliki dan seberapa banyak waktu luang yang dimiliki itu digunakan untuk mengkonsumsi dan menyaksikan media televisi sangat ditentukan kesibukan, pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan keseharian mereka. Seringkali fakta semacam ini dikaitkan dengan dampak dan implikasinya bagi mereka yang penonton berat (*heavy viewer*) dan penonton ringan (*light viewer*). Di dalam teori kultivasi dijelaskan bahwa dampak kumulatif dari tayangan televisi mampu mengkonstruksikan realitas kultural masyarakat dan mempercayai realitas televisi sebagai sebuah cara pandang yang dapat diterima dan lumrah. Dengan demikian, mereka yang mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap tayangan-tayangan televisi dan cenderung melihat realitas sosial seperti cara pandang bagaimana televisi melihatnya.

5.4. Pemirsa, Kebutuhan dan Orientasi Berita Politik

Kajian lebih lanjut dan mendalam adalah melihat persoalan bagaimana khalayak pemirsa mendudukan dan memfungsikan berita-berita politik yang disiarkan oleh stasiun televisi. Setelah melihat pola-pola menonton khalayak yang kebanyakan menggunakan waktunya pada malam hari di dalam mendapatkan informasi dan berita politik, maka aspek krusial selanjutnya adalah apa orientasi mendasar dan fundamental mereka di dalam mendapatkan informasi dan berita politik tersebut.

Orientasi ini juga terkait dengan relevansi aktivitas rutin khalayak pemirsa itu. Khalayak pemirsa memiliki otonomi di dalam memilih dan memenuhi kebutuhan yang ditentukan oleh tingkat kepuasan yang dicarinya yang selalu dievaluasi berdasarkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan serta harapan-harapan yang dimilikinya. Ini menjadi bagian dari tujuan yang ingin dicapai di dalam penggalan data terhadap kebutuhan dan orientasi berita politik yang turut menjelaskan pola konsumsi dan perilaku penggunaan media televisi secara keseluruhan.

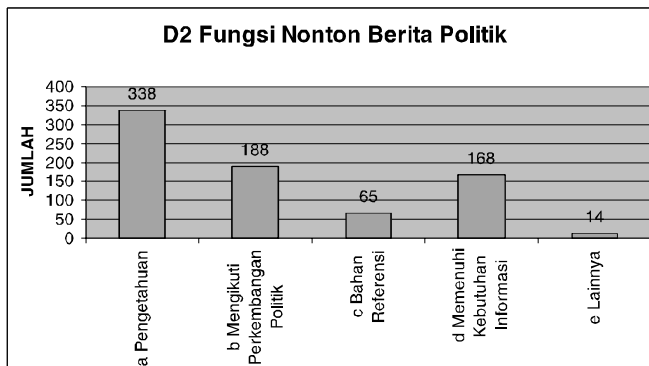
5.4.1. Fungsi dan Kedudukan Berita Politik

Dari pilihan yang disediakan di dalam pertanyaan penelitian ini, yakni orientasi mendapatkan pengetahuan, mengikuti perkembangan politik, bahan referensi dan memenuhi kebutuhan informasi, serta pola konsumsi informasi dan berita politik, lebih digerakkan oleh motif mendapat pengetahuan yang kemudian disusul dengan orientasi untuk mengikuti perkembangan politik yang terjadi di sekitar mereka. Bila diperhatikan orientasi-orientasi tersebut memiliki gradasi kepentingan dan relevansi yang tidak sama, serta segi aplikatif yang berbeda pula. Orientasi yang hanya menginginkan persoalan pengetahuan, jauh lebih elementer dibandingkan mereka yang berorientasi pada keinginan untuk mengikuti perkembangan politik yang lebih pragmatis dan situasional. Artinya kepentingan untuk mengikuti perkembangan dan kejadian politik yang ada lebih

terukur dibandingkan dengan keinginan secara kognitif yang hanya bersifat pengetahuan.

Tabel 5.11
Data Responden Berdasarkan Fungsi Berita Politik

a Pengetahuan	b Mengikuti Perkembangan Politik	c Bahan Referensi	d Memenuhi Kebutuhan Informasi	e Lainnya
338	188	65	168	14

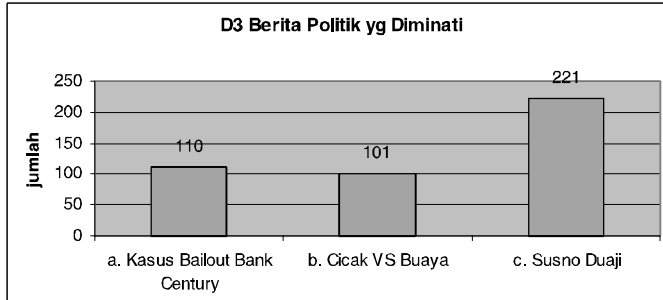


5.4.2. Preferensi Berita Politik

Dihadapkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang berkembang yang diwarnai dengan pro dan kontra di dalam pemberitaan politik kasus bailout Bank Century yang menelan biaya sampai Rp 6,7 triliun, pemberitaan politik kasus Cicak versus Buaya dan pemberitaan kasus Susno Duaji, yang paling diminati khalayak pemirsa di dalam penelitian ini adalah pemberitaan Komjen Susno Duaji terkait isu mafia kasus serta pernyataan kontroversial yang disampaikannya.

Data ini akan dijelaskan lebih jauh dengan memasukkan penilaian-penilaian yang lebih spesifik dari khalayak pemirsa terhadap kasus-kasus tersebut antara lain alasan-alasan penilaian mereka terhadap pemberitaan politik tersebut. Termasuk apakah pemberitaan yang dilakukan media televisi telah memberi kejelasan serta kemungkinan pemberitaan tersebut terjadi disinformasi.

Tabel 5.12
Data Responden Berdasarkan Minat Berita Politik



5.4.3. Preferensi Program Pemberitaan dan Stasiun Televisi

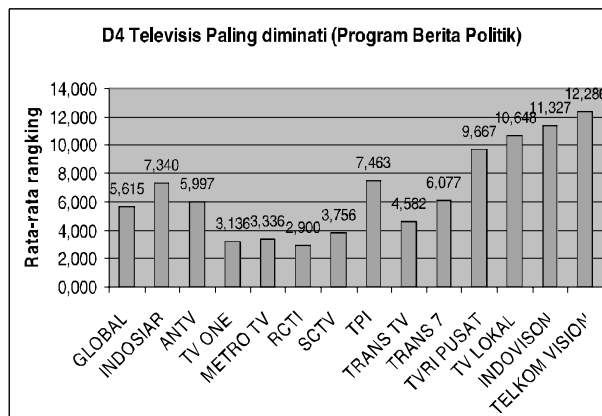
Segi relevansi lain yang signifikan di dalam penelitian ini adalah mengenai pilihan-pilihan khalayak pemirsa terhadap pemberitaan politik itu dihubungkan media televisi sebagai media pemberitaan. Bila pada tabel 5.9 telah disebutkan bahwa pilihan program siaran khalayak terbesar pada program berita, maka pada tabel 5.13 ini, lebih dikhususkan lagi, pada pilihan berita politik, yakni media televisi mana yang menjadi pilihannya di dalam mendapatkan informasi dan berita politik. Dalam pengertian ini, fokus lebih ditujukan pada saluran media televisi mana yang lebih diperhatikan dan mana yang kurang diperhatikan.

Hasilnya cukup mengejutkan, karena anggapan-anggapan umum bahwa TV One dan Metro TV yang dikenal sebagai media televisi pemberitaan dan memberi perhatian yang besar bagi kasus-kasus politik, ternyata bukan pilihan utama dari khalayak pemirsa. Justru pilihan utama dari khalayak pemirsa terhadap berita-berita politik jatuh pada stasiun televisi RCTI yang memang bersaing secara ketat dengan TV One dan Metro TV serta SCTV. Telkom Vision dan Indovision sebagai stasiun televisi berbayar bukan merupakan pilihan dari khalayak pemirsa di dalam menentukan pilihan saluran informasi dan berita politik.

Ini berarti tingkat kepercayaan khalayak pemirsa di dalam penelitian ini yang menyangkut pemberitaan politik berkisar di antara empat stasiun televisi yang penting, yakni RCTI, TV One, Metro TV dan SCTV. Sementara pada level kedua lebih ditempati Trans TV, Trans 7, TPI, ANTV dan Global TV. Data ini sekaligus menunjukkan level kompetisi masing-masing media televisi di dalam pemberitaan politik, yang tentu saja akan memperoleh hasil yang berbeda bila hal ini menyangkut berita yang lain, misalnya berita olah raga atau kriminal.

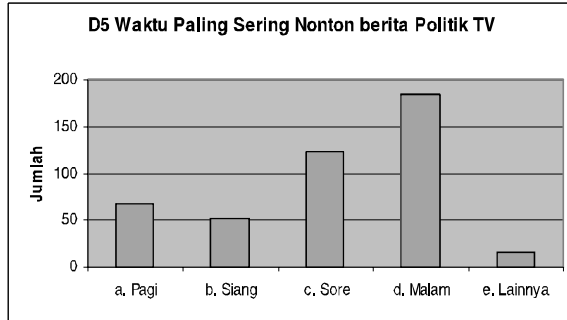
Tabel 5.13

Data Responden, Media Televisi dan Minat Berita Politik



Seperti kecenderungan yang ditampilkan pada tabel 5.10, pola menonton program-program siaran televisi yang dilakukan khalayak pemirsa pada umumnya dilakukan pada malam hari. Demikian pula, pola menonton khalayak pemirsa di dalam mendapatkan berita-berita politik umumnya dilakukan pada malam dan sore hari. Prosentasenya kecil saja bila dibandingkan dengan waktu-waktu lain khususnya sore dan malam. Khalayak pemirsa yang menonton berita politik pada siang hari hanya sekitar 9 persen. Lagi-lagi, penafsiran terhadap data ini mesti dikaitkan dengan karakteristik rutinitas, kegiatan sehari-hari khalayak pemirsa dan waktu luang yang dimiliki serta pemanfaatan dari waktu luang tersebut.

Tabel 5.14
Data Responden dan Waktu Menonton Berita Politik



5.4.4. Preferensi Diskusi dan Berita Politik

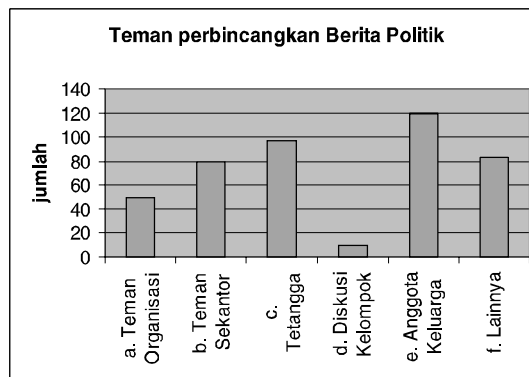
Ketika khalayak pemirsa telah mengambil keputusan dalam menentukan pilihannya, yakni media televisi mana yang menjadi sumber informasi dan berita politik, perkembangan informasi dan berita politik itu sendiri, mempunyai nilai sosial ketika mereka sendiri berinteraksi dengan orang lain. Pertukaran pikiran dan pendapat terjadi di dalam banyak forum-forum sosial masyarakat. Ini pula menjadi determinan di dalam proses-proses dan tahapan pembentukan opini publik. Penonjolan dan seleksi isu yang dilakukan media, pada gilirannya telah menjadi agenda pembicaraan di dalam masyarakat. Nilai sosial ini karena menyangkut pemerataan informasi, dapat beralih fungsi menjadi kekuatan politik ketika digunakan untuk memberi tekanan-tekanan tertentu bagi penyelenggara pemerintah.

Hal yang menarik adalah temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembicaraan-pembicaraan informasi dan berita politik sebagai mitra perbincangan justru kembali kepada anggota keluarga dan tetangga. Perbincangan-perbincangan informasi dan berita politik justru sangat rendah dilakukan di dalam kelompok-kelompok diskusi atau pun dilakukan dengan teman sekantor atau teman organisasi. Temuan ini jelas mensahkan bahwa media televisi berbeda dengan media informasi yang lain seperti surat kabar atau majalah. Pola-pola konsumsi media televisi sering dilakukan secara

kolektif bersama-sama dengan anggota keluarga yang sering diwarnai perbincangan spontan dan komentar terhadap isu-isu yang disiarkan pada saat itu juga. Artinya, kebiasaan dan perilaku menonton televisi seringkali bernilai sosial di dalam suasana keluarga sehingga keberadaan perangkat televisi pun sering ditempatkan di dalam ruang keluarga bersama.

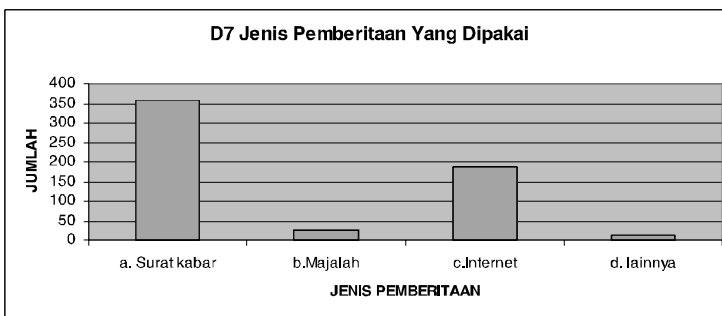
Tabel 5.15

Data Responden Berdasarkan Teman Berbincang Berita Politik



Tabel 5.16

Data Responden Berdasarkan Penggunaan Jenis Media



Meskipun demikian, penggunaan media televisi sebagai saluran di dalam mendapatkan dan memperoleh informasi dan berita politik bukan satu-satunya saluran komunikasi politik yang digunakan.

Dalam era di mana perkembangan teknologi dan informasi sedemikian cepat, kebanyakan masyarakat tidak mengandalkan satu media atau saluran di dalam memenuhi kebutuhan informasi dan berita politik mereka. Selain media televisi sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan informasi dan berita politik, khalayak pemirsa dalam penelitian ini ternyata juga menggunakan surat kabar dan internet sebagai pilihan lain yang cukup dominan.

5.5. Pemirsa dan Pemberitaan Politik: Kasus Bailout Bank Century

Dalam kasus bailout Bank Century, orientasi khalayak pemirsa dilihat dari segi-segi motif mereka untuk mengikuti pemberitaan yang dilakukan televisi. Atas dasar pertimbangan ini, pandangan khalayak pemirsa terhadap pemberitaan politik kasus Bailout Bank Century mencakup penggalian data di seputar prioritas informasi, apakah pemberitaan yang dilakukan media televisi telah memberi kecukupan dan kejelasan informasi yang diperlukan dan bagaimana pandangan khalayak terhadap posisi media televisi itu sendiri terhadap kasus tersebut.

5.5.1. Orientasi Kebutuhan Informasi Politik

Dari tabel 5.17, menunjukkan bahwa orientasi kebutuhan informasi politik khalayak pemirsa terhadap kasus bailout Bank Century memiliki variasi yang cukup luas. Prioritas dari masing-masing khalayak juga menunjukkan perbedaan yang jelas. Prioritas kebutuhan dan orientasi informasi politik terhadap kasus ini mencakup: a) tokoh-tokoh yang terlibat; b) pokok-pokok permasalahan di dalam kasus bailout Bank Century; c) siapa yang pro dan kontra terhadap kebijakan bailout Bank Century; d) opini yang dominan versus opini yang lemah; e) kejelasan permasalahan; f) kejelasan pembentukan pansus dan g) siapa yang benar dan siapa yang salah.

Dari lingkup kebutuhan dan orientasi terhadap informasi dan berita politik kasus bailout Bank Century seperti itu, ternyata khalayak pemirsa melihat pokok-pokok masalah sebagai sesuatu yang paling

utama dan penting, tokoh-tokoh yang terlibat dan kejelasan keputusan bailout Bank Century. Tiga isu tersebut merupakan komponen elementer yang diperlukan di dalam upaya memahami apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kasus tersebut. Sedangkan persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah serta bagaimana opini yang dominan atau opini yang minoritas, bukan menjadi prioritas utama bagaimana khalayak pemirsa

Tabel 5.17

Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4	Berita 5	Berita 6	Berita 7
2,8466	2,725	4,175	4,648	3,038	4,111	4,574

Informasi Berita Politik Bank Century	Ranking
Tokoh-tokoh politik yang terlibat	2
Pokok-pokok masalah	1
Siapa yang pro dan siapa yang kontra	5
Opini yang dominan dan yang terpinggirkan	7
Kejelasan keputusan Bailout Bank Century	3
Kejelasan tujuan pembentukan Pansus DPR	4
Siapa yang benar dan siapa yang salah	6

5.5.2. Berita Politik, Kecukupan dan Kejelasan Informasi

Dari sisi kejelasan dan kecukupan informasi di dalam berita politik yang dilakukan media televisi, ada tiga hal yang terungkap di dalam penelitian ini. Pertama, kejelasan terhadap pokok-pokok permasalahan dalam kasus bailout Bank Century. Perdebatan-perdebatan yang disajikan media televisi, dengan demikian seharusnya diarahkan untuk memberi kejelasan dan kecukupan

informasi tentang apa permasalahan pokok yang sebenarnya terjadi di dalam kasus tersebut.

Kedua, persoalan pembentukan Pansus bailout Bank Century. Karena berbagai kepentingan yang ada di dalam pembentukan Pansus tersebut, media televisi dalam menyiarkan kegiatan politik tersebut, sedikit banyaknya berada di dalam pertarungan kepentingan itu sendiri. Sementara diketahui, para pemilik media televisi itu, merupakan orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan dan kepentingan-kepentingan politis. Untuk itu, pandangan khalayak pemirsa terhadap fungsi dan kedudukannya sebagai pengawas dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan politik itu, yakni apakah mampu memberi kejelasan dan kecukupan informasi di dalam pemberitaannya mengapa dan kepentingan apa Pansus tersebut dibentuk sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati lebih mendalam.

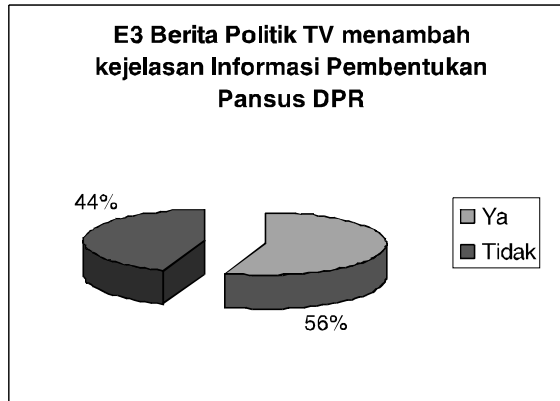
Tabel 5.18
Data Responden terhadap Kejelasan Informasi
Kasus Bank Century



Dari tabel 5.18 di dalam pandangan khalayak pemirsa terhadap kejelasan informasi pemberitaan politik yang dilakukan media televisi, sebagian besar yakni 64 persen menilai bahwa media televisi menambah kejelasan informasi terhadap masalah bailout Bank Century. Demikian pula berdasarkan tabel 5.19, khalayak pemirsa menilai bahwa media televisi juga telah memberikan kejelasan

informasi terhadap arah dan tujuan pembentukan Pansus yang bersifat politis. Perkembangan isu ini bahkan sampai pada munculnya pemikiran pamkzulan politik, meskipun pada akhirnya pembentukan Pansus itu berkembang pada “*political construction*” dengan mencari “kambing hitam” terhadap berbagai kebijakan penanganan Bank Century yang dinilai penuh penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dengan tidak diarahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono secara langsung.

Tabel 5.19
Data Responden Berdasarkan Kejelasan Informasi
Arah dan Tujuan Pansus Bailout Bank Century



5.5.3. Posisi Media Televisi dan Kasus Bailout Bank Century

Dengan perkembangan isu-isu politik semacam itu yang terjadi dalam kasus Bank Century tersebut, adalah soal pbingkaiian politis, yang dilakukan oleh elit-elit politik di dalam partai politik di parlemen. Namun untuk kepentingan penelitian ini, tujuannya adalah melihat bagaimana posisi media khususnya media televisi di dalam menempatkan diri pada konstelasi dan pertarungan kepentingan tersebut. Ada tiga hal yang dicermati di dalam penelitian ini. Pertama soal, bagaimana media televisi menempatkan posisi mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono di dalam kasus

tersebut dengan status dan posisinya masing-masing. Kedua, bagaimana posisi media televisi itu sendiri terhadap kasus bailout Bank Century secara keseluruhan. Ketiga, bagaimana kemungkinan keberpihakan yang dilakukan media televisi terhadap kasus ini.

Semua pertanyaan-pertanyaan krusial tersebut diajukan kepada khalayak pemirsa media televisi. Mereka yang memberi penilaian terhadap keberadaan media televisi dalam relasi-relasi yang terjadi antara khalayak dan kekuatan media televisi itu. Masing-masing permasalahan tersebut memberi gambaran yang berkaitan dan memberi prediksi penting bagi hubungan-hubungan antara kekuatan media dan pandangan khalayak. Hasilnya berdasarkan pada tabel 5.20 memperlihatkan sebesar 54 persen khalayak permisa menyatakan sangat setuju bila Sri Mulyani dan Boediono bersalah di dalam menangani dan mengambil kebijakan bailout Bank Century. Sisanya, yakni sebesar 46 persen yang menyatakan sangat tidak setuju bila Sri Mulyani dan Boediono bila dinyatakan bersalah dalam mengambil kebijakan bailout Bank Century.

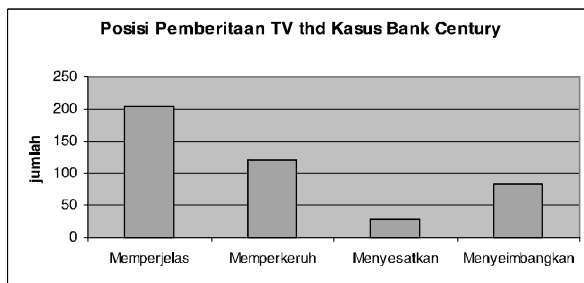
Tabel 5.20
Data Responden Berdasarkan Penilaian
Kebijakan Bank Century



Implikasi dari temuan semacam itu menjelaskan bahwa media televisi berkontribusi dalam membentuk dan membangun pencitraan yang menempatkan Sri Mulyani dan Boediono berada dalam posisi yang bersalah ketika melakukan kebijakan dan penyelamatan terhadap Bank Century.

Pertanyaannya kemudian, apakah dengan demikian media televisi telah menyiarkan informasi yang tidak objektif dan memperkeruh situasi ? Atas pertanyaan semacam ini, pandangan khalayak pemirsa justru sebaliknya. Media televisi dalam pandangan khalayak pemirsa telah memperjelas posisi pemberitaan terhadap kasus Bank century. Sebanyak 46 persen yang menyatakan bahwa media televisi memperjelas pemberitaan terhadap kasus Bank Century. Sebesar 27 persen yang menyatakan kalau media televisi memperkeruh pemberitaan kasus Bank Century. Sebesar 19 persen yang menyatakan kalau media televisi menyimbangkan pemberitaan kasus Bank Century. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa media televisi melakukan penyesatan pemberitaan terhadap kasus Bank Century hanya 6 persen saja.

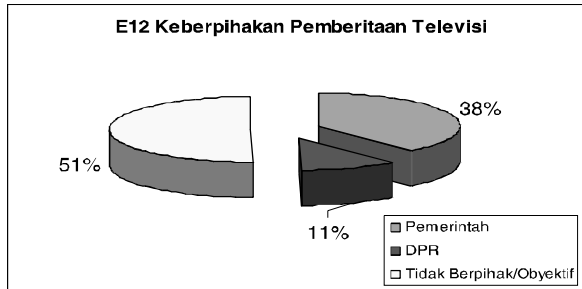
Tabel 5.21
Data Responden terhadap Posisi
Pemberitaan TV terhadap Kasus Bank Century



Data tersebut diperjelas dengan kenyataan hasil data lain, ketika dihadapkan pada kesangsian apakah media televisi dalam melakukan pemberitaan terhadap kasus Bank Century melakukan keberpihakan. Pandangan yang menyatakan adanya keberpihakan tersebut tetap ada. Namun, dari tabel 5.22 memperlihatkan bahwa 51 persen khalayak pemirsa menyatakan bahwa media televisi dalam melakukan pemberitaan cenderung objektif atau tidak berpihak. Sedangkan perbandingan pandangan yang menyatakan bahwa terdapat keberpihakan, antara keberpihakan media televisi kepada DPR dan

Pemerintah, justru data menunjukkan bahwa keberpihakan tersebut lebih besar mengarah kepada pemerintah dibandingkan kepada DPR.

Tabel 5.22
Data Responden dan Keberpihakan Pemberitaan
Kasus Bank Century



5.5.4. Media Televisi dan Disinformasi Politik

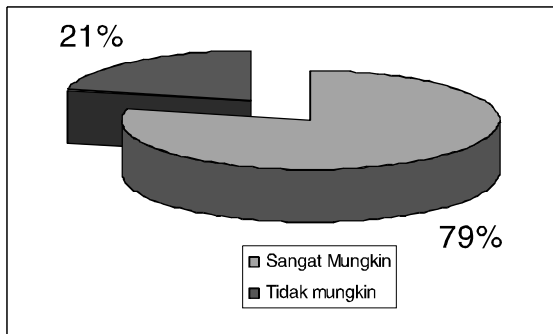
Secara teoritik, penyimpangan dan penyesatan informasi dapat terjadi di dalam pemberitaan yang dilakukan media massa termasuk media televisi. Seperti yang telah dijelaskan pada paparan-paparan sebelumnya, penyimpangan dan disinformasi pemberitaan politik dapat terjadi pada media massa melalui berbagai sebab. Faktor-faktor ini dapat muncul dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada level individu, rutinitas media, keterbatasan dan kemampuan media, ketergantungan pada narasumber yang tetap dan rutin, kepentingan ekonomis dan sampai pada kepentingan politis serta ideologis. Persoalan antara objektivitas pemberitaan dan disinformasi pemberitaan dengan demikian menjadi suatu ketegangan kepentingan di dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik itu.

Data yang diperlihatkan pada tabel 5.23 menunjukkan keyakinan-keyakinan khalayak pemirsa terhadap kemungkinan dan kemampuan yang dimiliki media massa khususnya media televisi dalam melakukan penyimpangan dan disinformasi di dalam menjalankan dan menyajikan berita-berita politik. Keyakinan-keyakinan semacam ini penting artinya untuk menunjukkan bahwa pada batas-batas tertentu khalayak sebenarnya mempunyai tingkat

kesadaran akan kemampuan media melakukan tindakan-tindakan misinformatif dan disinformatif terhadap kasus-kasus politik. Pada sisi lain, tindakan-tindakan misinformatif dan disinformatif tersebut disebabkan atau dipengaruhi oleh berbagai benturan kepentingan dan orientasi-orientasi tertentu.

Dari tabel 5.23 jelas terlihat bahwa khalayak pemirsa media televisi menyatakan keyakinan yang begitu besar, bila media televisi memiliki kemungkinan untuk melakukan penyesatan dan penyimpangan informasi tentang kejadian-kejadian politik. Dari data terlihat bahwa sebesar 79 persen khalayak pemirsa responden penelitian menyatakan keyakinannya bahwa adanya kemungkinan media televisi melakukan penyimpangan dan penyesatan terhadap informasi-informasi politik khususnya di dalam kasus bailout Bank Century.

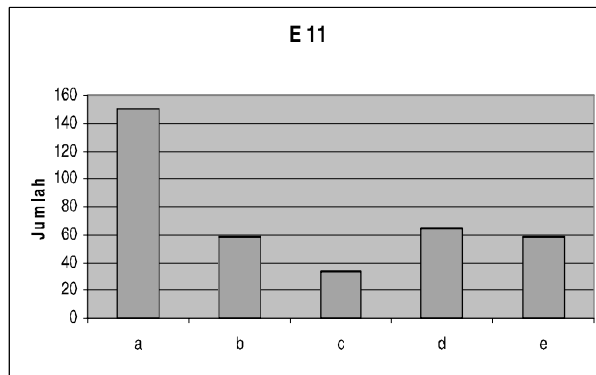
Tabel 5.23
Data Responden dan Disinformasi Berita Politik
Kasus Bank Century



Sejauh yang dapat dicermati, terdapat pilihan-pilihan alasan kenapa penyimpangan dan penyesatan informasi terhadap pemberitaan politik terjadi di dalam pandangan khalayak pemirsa. Dari pilihan-pilihan yang ada, alasan terjadinya disinformasi politik, terkonsentrasi pada adanya kenyataan bahwa televisi mempunyai

kepentingan politis dan dikontrol oleh negara. Selebihnya, penyimpangan dan penyesatan informasi karena media televisi terjebak pada rutinitas dan kepentingan ekonomi sehingga kepekaan untuk menggali informasi secara mendalam dan mendetil tidak dilakukan. Rutinitas menjadi penyebab sikap kurang peka terhadap akurasi dan kelengkapan sebuah informasi yang tersedia. Jika rutinitas-rutinitas sumber pemberitaan dilihat pada kebiasaan-kebiasaan yang digunakan media, hal ini umumnya mencakup rutinitas pada orang-orang yang dihubungi, informasi didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, pidato, *press release* dan *press conference* yang didasarkan pada *paper* atau *handout*. Ketajaman pemberitaan dan kelengkapan informasi politik seringkali ditundukkan oleh kepentingan ekonomi sebagai penjabaran kebijakan pemilik perusahaan.

Tabel 5.24
Data Responden dan Faktor Disinformasi
Pemberitaan Politik Kasus Bank Century



Keterangan

- a. Televisi mempunyai kepentingan politik
- b. Televisi terjebak rutinitas
- c. Televisi tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai
- d. Dikontrol penguasa
- e. Dikontrol kepentingan ekonomi

Kebanyakan khalayak pemirsa tidak mempercayai kalau disinformasi pemberitaan politik terjadi disebabkan media televisi tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai dalam menggali akurasi dan kelengkapan data. Dengan perkataan lain, khalayak pemirsa percaya bahwa media televisi mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan informasi secara lengkap dan mereduksi ketidakpastian yang terjadi. Ketidakmampuan dan kemandirian media televisi secara ekonomi dan politis seringkali menjadikan media televisi secara sadar atau tidak sadar melakukan penyimpangan dan penyesatan informasi di dalam menyajikan pemberitaan-pemberitaannya.

5.6. Media Televisi dan Pemberitaan Kasus Cicak Versus Buaya

Pemberitaan media televisi terhadap kasus Cicak versus Buaya, merupakan istilah yang digunakan Komjen Susno Duaji tentang kemampuan penyadapan yang dimiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kepolisian (POLRI) dalam melakukan tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam keterangan tersebut, Susno mengibaratkan kemampuan yang dimiliki KPK sebagai cicak, sedangkan kemampuan penyadapan yang dimiliki kepolisian diibaratkan sebagai buaya. Cicak versus Buaya lebih dari sekedar soal penyadapan, melainkan menyangkut persoalan perseteruan yang terjadi antara KPK dan Kepolisian serta indikasi keterlibatan para penegak hukum dalam sejumlah tindakan korupsi.

Namun lebih dari itu, terdapat pertarungan wacana dan komunikasi di antara kedua lembaga negara tersebut, yakni pada satu pihak menyuarakan pandangan tentang kriminalisasi KPK, sedangkan pihak lain menyuarakan pandangan tentang penyalahgunaan kewenangan. Lalu lalang informasi tentang kasus ini sering memunculkan spekulasi-spekulasi tentang adanya masalah-masalah internal di dalam tubuh kepolisian dan di dalam tubuh KPK. Oleh karena itu, masing-masing pihak berusaha menghentikan langkah-langkah yang dilakukan, yakni KPK ingin melakukan pengusutan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi melakukan

tindakan korupsi di pihak kepolisian, sedangkan pihak kepolisian berusaha menghentikan langkah KPK dengan menyatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

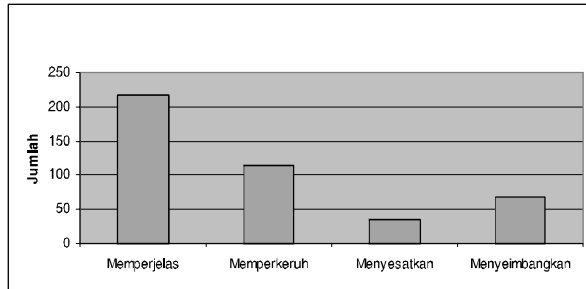
Di tengah pertarungan wacana dan informasi tersebut, peran media massa mengambil posisi krusial di dalam menjelaskan, menginterpretasikan dan menyediakan ketercukupan informasi serta kemungkinan-kemungkinan pembingkaiannya yang menyudutkan atau membela pihak-pihak tertentu. Media massa dapat hanya menjembatani lalu lalang informasi yang bergulir, tetapi pada sisi lain media massa dapat bertindak sebagai bagian dari kepentingan perseteruan dari dua lembaga tersebut.

Dalam konteks dan relevansi yang tidak jauh berbeda dengan pemberitaan terhadap kasus bailout Bank Century yang telah diuraikan sebelumnya, pandangan-pandangan khalayak pemirsa media televisi terhadap ini memberi gambaran penting tentang opini masyarakat terhadap peran dan kedudukan media massa khususnya media televisi di dalam kasus Cicak versus Buaya yang kontroversial tersebut.

5.6.1 Kejelasan dan Kecukupan Informasi

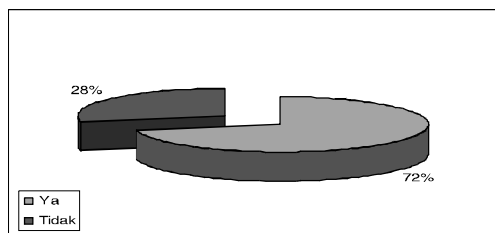
Secara umum hasil survey yang dilakukan telah menunjukkan bahwa pemberitaan terhadap kasus Cicak versus Buaya, posisi media televisi dinilai memperjelas kasus ini. Kejelasan kasus ini terletak pada siapa yang pro dan siapa yang kontra, pokok-pokok permasalahan dan persoalan mafia kasus. Komposisi pandangan khalayak pemirsa terhadap kejelasan dan kejernihan informasi, antara memperjelas, memperkeruh, menyesatkan dan menyeimbangkan hampir mirip dengan komposisi pandangan dalam pemberitaan kasus bailout Bank Century. Komposisi ini dapat dibandingkan dengan tabel 5.21 dengan tabel 5.25 di bawah ini. Dari tabel 5.25 tampak, khalayak pemirsa memberi penilaian bahwa media televisi secara keseluruhan memperjelas permasalahan tersebut di dalam kasus Cicak versus Buaya.

Tabel 5.25
Data Responden terhadap Posisi
Pemberitaan TV terhadap Kasus Cicak Versus Buaya



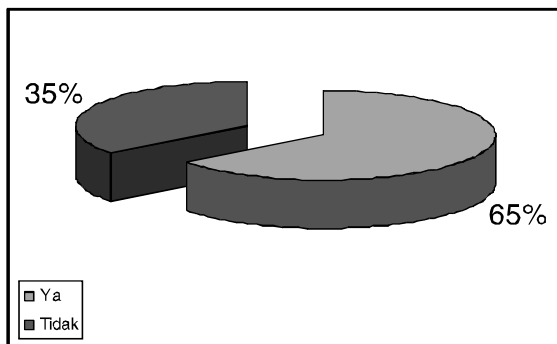
Khalayak pemirsa juga menilai jika media televisi telah memperjelas maksud dan pengertian dari kriminalisasi KPK. Dari tabel 5.26 terlihat bahwa sebesar 72 persen khalayak pemirsa menilai bahwa media televisi telah menjelaskan pengertian dan maksud dari istilah kriminalisasi KPK, sedangkan yang menyatakan tidak memberi kejelasan hanya 28 persen saja. Bila dicermati istilah itu sendiri merupakan istilah yang mengkristal dari pertarungan wacana yang terjadi, yakni pihak-pihak yang mendukung KPK dan pihak-pihak yang mendukung kepolisian. Cara dan langkah-langkah pihak kepolisian untuk menghentikan apa yang sudah dilakukan KPK dalam upayanya melakukan pemberantasan korupsi, sebagai cara kriminalisasi KPK. Cara yang dilakukan KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penyesatan disebut oleh pihak kepolisian sebagai upaya penyalahgunaan kewenangan

Tabel 5.26
Data Responden dan Kejelasan Informasi
Kriminalisasi KPK



Dari tabel 5.27 terlihat, khalayak pemirsa menilai kalau media televisi juga memberi kejelasan tentang apa yang disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan KPK. Ini berarti media televisi, memberi tempat bagi penjelasan dan kejelasan terhadap isu-isu yang bertarung di dalam konflik yang terjadi antara KPK dan pihak kepolisian. Dari tabel 5.27 terlihat sebesar 65 persen khalayak pemirsa yang menjadi responden penelitian ini menyatakan bahwa media televisi telah memberi kejelasan tentang pengertian dan permasalahan penyalahgunaan kewenangan.

Tabel 5.27
Data Responden dan Kejelasan Informasi
Penyalahgunaan Kewenangan



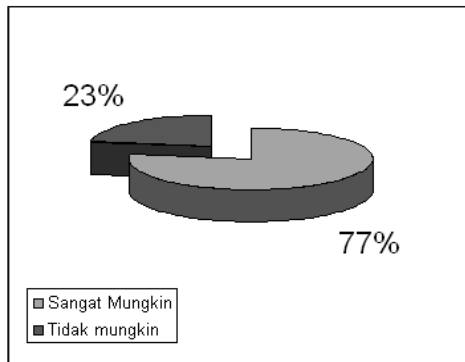
5.6.2. Disinformasi Berita Politik: Cicak Versus Buaya

Seperti pada hasil dan data pada kasus bailout Bank Century yang sudah dijelaskan, terhadap pemberitaan kasus Cicak versus Buaya, khalayak pemirsa menyakini bahwa penyimpangan dan penyesatan informasi dapat terjadi di dalam pemberitaan yang dilakukan media televisi. Sekalipun, terdapat keterpautan hasil dalam prosentase antara keyakinan khalayak pemirsa tentang kemungkinan penyimpangan dan penyesatan informasi pada kasus pemberitaan bailout dengan kasus Cicak versus Buaya, sebagian besar menyakini adanya kemungkinan penyimpangan dan penyesatan di dalam

pemberitaan tersebut. Bila di dalam kasus bailout Bank Century sebesar 79 persen khalayak pemirsa menyatakan keyakinannya, sedangkan pada kasus Cicak versus Buaya sebesar 77 persen menyakininya.

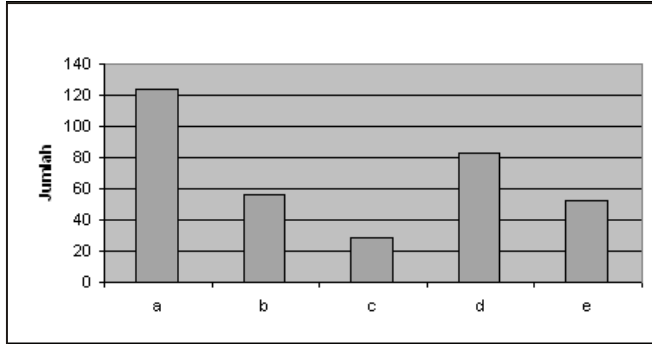
Dalam faktor-faktor apa yang menjadikan media televisi berkemungkinan melakukan penyimpangan dan penyesatan informasi terhadap kasus Cicak versus Buaya ini, pandangan khalayak pemirsa juga cenderung linear dengan hasil yang ditunjukkan pada pemberitaan kasus bailout Bank Century

Tabel 5.28
Data Responden dan Disinformasi
Pemberitaan Cicak Versus Buaya



Faktor media televisi mempunyai kepentingan politik di dalam pemberitaan tersebut merupakan faktor yang paling dominan yang menjelaskan adanya keyakinan khalayak pemirsa tentang kemungkinan media televisi melakukan disinformasi pemberitaan politik. Faktor kedua, yang diyakini sebagai penyebab terjadinya disinformasi di dalam pemberitaan dalam kasus Cicak versus Buaya adalah adanya kontrol negara. Secara teoritik ini, kontrol negara dapat mencakup pengertian yang luas. Semua cara yang dapat ditempuh oleh negara untuk menguasai, mendiktekan, mengarahkan dan memberi informasi yang memang sengaja disimpangkan adalah bentuk-bentuk dan kontrol yang dapat dilakukan negara.

Tabel 5.29
Data Responden dan Faktor
Kemungkinan Disinformasi Berita Kasus Cicak Versus Buaya



Keterangan

- a. Televisi mempunyai kepentingan politik
- b. Televisi terjebak rutinitas
- c. Televisi tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai
- d. Dikontrol penguasa
- e. Dikontrol kepentingan ekonomi

5.7. Televisi dan Pemberitaan Kasus Susno Duaji

Data yang disajikan dalam pembahasan di dalam sub bab ini, mencerminkan unsur-unsur yang juga ditanyakan pada pemberitaan politik yang dilakukan media televisi untuk kasus bailout Bank Century dan Cicak versus Buaya sebelumnya. Misalnya, tentang prioritas isu, penilaian mereka tentang apakah yang disajikan media televisi merupakan penyajian dengan informasi yang dapat dipercaya, kemungkinan terjadinya penyimpangan informasi, kepada siapa dan apa pemberitaan tentang Susno Duaji dibicarakan, serta faktor-faktor apa yang menjadikan media pemberitaan seperti televisi dapat melakukan penyimpangan dan penyesatan informasi.

Pertanyaan mengenai prioritas yang mencakup isu apa yang paling penting bagi khalayak pemirsa, dimaksudkan bahwa di dalam agenda publik/masyarakat, isu-isu yang ada pun saling bersaing dan berebut perhatian. Tidak semua isu yang ada di sekitar mereka mendapat perhatian. Bahkan bila isu itu mendapat perhatian, maka isu-isu yang ada tidak mendapat perhatian yang sama. Dengan

catatan-catatan semacam itu, paparan ini mengikuti struktur dan pola sajian sebagaimana dalam pemberitaan kasus bailout Bank Century dan Cicak versus Buaya.

5.7.1. Prioritas Isu-Isu Dalam Pemberitaan Susno Duaji

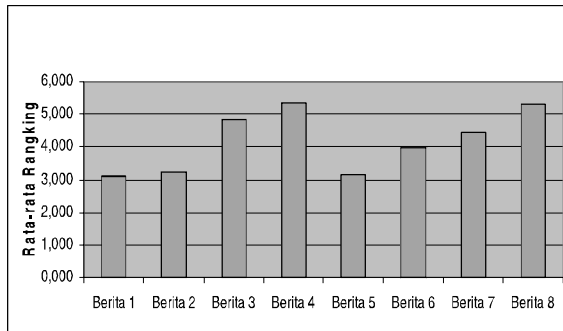
Kandungan di dalam pemberitaan politik yang dilakukan media televisi terdiri dari spektrum dan isu yang luas. Media televisi sendiri menjalankan fungsi agenda setting, yakni melakukan proses seleksi dan penonjolan terhadap isu-isu yang menjadi kontroversi di dalam kasus Susno Duaji ini. Pada sisi lain, khalayak pemirsa pun memiliki tingkat dan prioritas kebutuhan informasi yang berbeda-beda sehingga dari apa yang disajikan media televisi, khalayak pemirsa akan mempunyai pilihan dari isu-isu tersebut, yakni mana yang dinilai paling penting menurut ukuran dan kebutuhan mereka, dan mana yang paling tidak penting dari berbagai isu yang melekat di dalam kasus Susno Duaji tersebut.

Dari delapan isu penting yang diajukan sebagai pertanyaan dasar kepada khalayak pemirsa, dan meminta mereka untuk menentukan ranking atau urutan ternyata, pemberitaan tentang tokoh-tokoh politik yang terlibat di dalam kasus Susno Duaji merupakan isu pemberitaan yang mendapat prioritas tertinggi. Urutan kedua adalah isi pemberitaan mengenai mafia kasus. Isu mafia kasus sebenarnya persoalan lama yang telah menjadi endapan alam bawah sadar masyarakat terkait seringnya muncul pernyataan secara temporal dan sporadis. Persoalan ini menjadi perhatian dan perbincangan di masyarakat secara luas ketika Komjen Susno Duaji secara terbuka membeberkan persoalan tersebut.

Isu-isu lain seperti pokok-pokok permasalahan di dalam kasus tersebut; posisi Komjen Susno Duaji sendiri di dalam berbagai kasus yang ada; hubungan Susno Duaji dengan POLRI; siapa yang pro dan kontra; opini yang dominan dan minoritas dan siapa yang salah dan siapa yang benar, adalah isu-isu yang tetap mendapat perhatian dari khalayak pemirsa, namun tingkat dan arti pentingnya tidak sebesar dua isu tentang tokoh-tokoh yang terlibat dan mafia kasus.

Tabel 5.30
Data Responden dan Prioritas Isu
Pemberitaan Kasus Susno Duaji

Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4	Berita 5	Berita 6	Berita 7	Berita 8
3.092	3.244	4.847	5.366	3.161	3.957	4.439	5.295



Keterangan:

Berita 1: Tokoh-tokoh politik yang terlibat

Berita 2: Pokok-pokok masalah

Berita 3: Siapa yang pro dan siapa yang kontra

Berita 4: Opini yang dominan dan yang terpinggirkan

Berita 5: Persoalan mafia kasus

Berita 6: Posisi Susno Duaji dalam berbagai kasus

Berita 7: Hubungan Susno Duaji dengan Polri

Berita 8: Siapa yang benar dan siapa yang salah

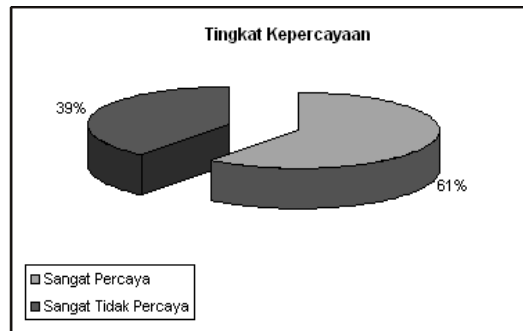
Lingkup semacam ini, sedikit banyak mencerminkan adanya konflik komunikasi yang saling bersaing. Di dalam kancah pertarungan wacana, aspek-aspek yang menjadi lingkup dan dimensi isi pemberitaan Susno Duaji menggambarkan adanya pihak-pihak oposisi dan pihak yang berkoalisi; peminggiran untuk mencapai opini yang *powerful*; pertarungan di kelembagaan internal; serta argumentasi yang mengokohkan dan mengukuhkan siapa yang salah dan siapa yang dipersalahkan. Level perbincangan semacam ini dapat terjadi pada level personal, kelembagaan, pemerintahan dan organisasional. Dalam posisi demikian, seringkali media massa menghadapi dilema.

Pertama, adanya ketersediaan informasi yang datang dari berbagai sumber yang berbeda, yang memaksa para jurnalis

mengambil keputusan dan pemilihan. Kedua, ketersediaan informasi yang datang dari berbagai sumber yang berbeda, dengan muatan informasi yang sama atau pun berbeda sekalipun, dapat mengaburkan pengertian nilai berita. Pada taraf-taraf tertentu, nilai berita dapat digeser oleh nilai kepentingan berita. Pergeseran-pergeseran semacam ini, bila tidak dicermati dapat menjadi jalan dan celah dimana penyimpangan, penyesatan dan bias terjadi.

Dalam pemberitaan kasus Susno Duaji, khalayak pemirsa masih mempunyai kepercayaan kepada media pemberitaan televisi, bahwa apa yang diberitakan televisi selama ini adalah benar. Sebanyak 61 persen, mereka menyatakan sangat percaya bila media televisi di dalam melakukan pemberitaan terhadap kasus Susno Duaji sebagai informasi yang benar benar. Namun sebaliknya, sebesar 39 persen atau 152 khalayak pemirsa responden menyatakan sangat tidak percaya kalau media televisi menyajikan informasi tentang kasus ini secara benar.

Tabel 5.31
Data Responden dan Tingkat Kepercayaan Terhadap TV
Sebagai Media Pemberitaan

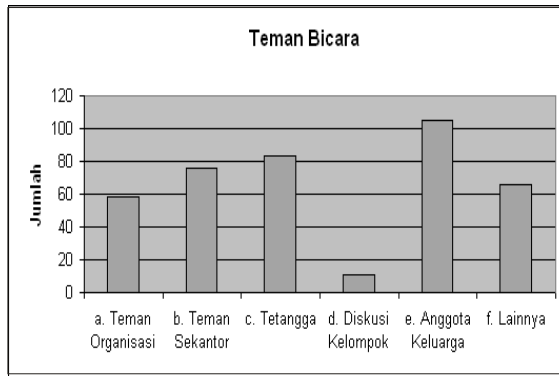


5.7.2. Berita dan Diskusi Berita Politik: Kasus Susno Duaji

Sementara itu berdasarkan pada tabel 5.32 diskusi-diskusi yang khalayak pemirsa lakukan terhadap berita-berita politik kasus Susno Duaji yang diperoleh melalui media televisi, dilakukan paling banyak

dilakukan dengan anggota keluarga. Hasil ini menguatkan temuan yang sebelumnya, yang melihat kepada siapa, khalayak pemirsa melakukan diskusi dan perbincangan terhadap berita-berita politik yang mereka dapatkan melalui media televisi. Hasilnya, mereka mendiskusikannya kepada anggota keluarga. Hasil ini dapat diperbandingkan antara tabel 5.32 dengan tabel 5.15

Tabel 5.32
Data Responden dan Diskusi Politik
Dalam Pemberitaan Kasus Susno Duaji



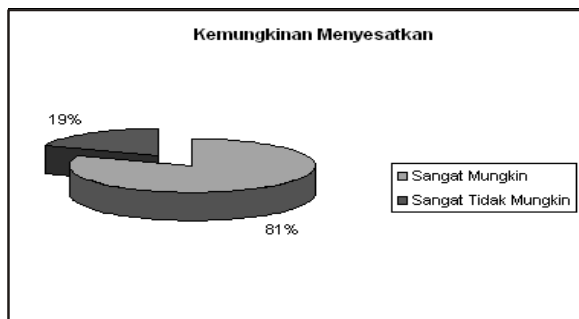
5.7.3. Televisi dan Disinformasi: Kasus Susno Duaji

Seperti halnya dalam pemberitaan kasus bailout Bank Century ataupun kasus Cicak Versus Buaya, keyakinan khalayak pemirsa terhadap adanya kemungkinan di dalam pemberitaan kasus Susno Duaji terjadi pemberitaan yang menyesatkan, khalayak mempercayainya. Sebesar 81 persen khalayak pemirsa menyatakan sangat mungkin pemberitaan kasus Susno Duaji dapat menyesatkan.

Hasil ini jauh lebih tinggi dengan keyakinan khalayak pemirsa untuk kasus bailout Bank Century ataupun dengan Cicak versus Buaya. Hasil ini juga membuktikan bahwa pada satu sisi, mereka mempercayai bahwa apa yang dilakukan media televisi umumnya merupakan informasi yang dapat dipercayai, namun pada sisi lain, mereka juga menyadari adanya kemungkinan bahwa pemberitaan tersebut dapat menyesatkan.

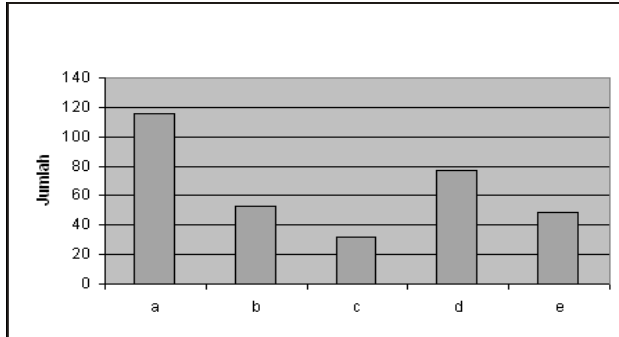
Ini menjelaskan hubungan antara kebutuhan informasi dan potensi yang dimiliki media televisi. Media televisi merupakan salah satu saluran informasi yang mereka butuhkan di dalam mendapatkan informasi-informasi politik, sedangkan pada sisi lain, media khususnya media televisi mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu sehingga berpeluang melakukan penyesatan informasi.

Tabel 5.33
Data Responden dan Kemungkinan
Disinformasi Dalam Pemberitaan Kasus Susno Duaji



Di dalam menjelaskan keyakinan khalayak pemirsa lebih jauh tentang kemungkinan adanya disinformasi di dalam pemberitaan kasus Susno Duaji, faktor kepentingan politik televisi dan kontrol yang dilakukan negara, dipercaya sebagai faktor terpenting yang menjelaskan disinformasi terjadi. Faktor-faktor lain diantaranya mengenai rutinitas media di dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi itu sendiri. Sedangkan faktor sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sekalipun hal ini menjadi salah satu faktor yang dicurigai sebagai penyebab terjadinya kemungkinan disinformasi di dalam pemberitaan, faktor ini dipandang kurang begitu penting dibandingkan faktor-faktor yang disebutkan tadi.

Tabel 5.34
Data Responden dan Faktor-Faktor
Disinformasi Pemberitaan Kasus Susno Duaji



Keterangan

- a. Televisi mempunyai kepentingan politik
- b. Televisi terjebak rutinitas
- c. Televisi tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai
- d. Dikontrol penguasa
- e. Dikontrol kepentingan ekonomi

Berdasarkan data di atas, maka jelaslah bahwa khalayak pemirsa pada dasarnya pada satu titik tertentu telah memiliki pemahaman bahwa media televisi sangat sulit untuk menjadi obyektif. Persoalan ini tidak sederhana karena bisa menyebabkan disinformasi yang pada gilirannya akan keluar dari substansi informasi itu sendiri. Data-data tersebut juga memberikan sebuah gambaran bahwa khalayak pemirsa bukanlah khalayak yang pasif yang dengan mudah menelan mentah-mentah setiap informasi yang ditayangkan. Masyarakat adalah khalayak aktif yang juga memiliki pendapat tersendiri terhadap informasi yang akan ditayangkan.

Kalaupun sudah ada kebebasan dalam menyiarkan informasi dan hal itu dijamin dengan undang-undang, maka media televisi juga menghadapi persoalan yaitu control pemilik modal terhadap berita yang akan disiarkan, kontrol penguasa (walau secara implisit). Masyarakat ternyata juga mempunyai satu persepsi bahwa berita-berita politik di era keterbukaan media saat ini juga bisa menjadi komoditas ekonomi.

Menurut Ashadi Siregar, belenggu yang paling membahayakan bagi kebebasan pers adalah belenggu yang diciptakan oleh pers sendiri, berupa belitan assetnya yang berjumbuh dengan dunia bisnis non pers. Derajat kebebasan akan menjadi berkurang akibat kepentingan dan orientasi yang berasal dari posisi semacam ini jauh lebih buruk, sebab dapat karena alasan-alasan pragmatis pers bisa mengkhianati masyarakat. Dalam konteks ini, sekecil apapun media pers perlu membangun keberadaannya sebagai institusi sosial. Dalam permodalan sebagai institusi ekonomi, boleh saja berada dalam satu group untuk efisiensi, namun sikap ini bila akan dibawa dalam pengelolaan pers sebagai institusi sosial harus dipertimbangkan. Menurut Robert MC Chasney (1998) penguasaan terhadap sistem media dan komunikasi bukanlah suatu praktek yang netral dan menguntungkan semua pihak dan akan memberi peluang besar bagi kepentingan komersial yang mempengaruhi media.



BAB VI

DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK DI RUANG SIDANG DPR

Rentetan kasus *bailout* Century yang menjadi perbincangan masyarakat, tidak bisa lepas dari peran media. Media bekerja berdasarkan isu atau konflik-konflik yang berkembang dalam masyarakat. Tatkala media mengangkat sebuah isu atau persoalan, ada agenda yang akan disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki agenda sendiri dari fakta yang dilihatnya sehingga bila agenda media dan agenda masyarakat sama maka sangat mungkin berpotensi membentuk terjadinya opini publik.

Posisi keterlibatan media dalam konflik politik pada dasarnya sebagai pencerita (*story teller*). Dalam posisi sebagai pencerita, media bisa memainkan peran meredakan konflik politik yang muncul, mempertajam atau menetralkan konflik politik yang muncul. Namun ada kalanya, media tidak menyadari mereka telah terbawa dari satu konflik ke konflik lain oleh penguasa demi mempertahankan hegemoni.

Di era kebebasan pers yang dijamin dalam UU No 40 Tahun 1999, memberikan peluang pada media massa untuk mengembangkan atau menggali persoalan yang berpotensi membentuk opini publik. Kebebasan pers juga memberikan peluang bagi pekerja media untuk tidak tergantung pada sumber informasi rutin. Disinilah sebenarnya media bisa melepaskan diri dari

kepentingan-kepentingan penguasa terhadap informasi yang akan dimuat media,

Ketika media telah menjadi sebuah intitusi bisnis dimana pemilik kapital menguasai maka, kebebasan pers bagi media dimungkinkan bergeser menjadi kepemilikan kepentingan yang menyebabkan standar profesionalisme terabaikan.

Di sisi lain kebebasan yang tidak tepat dipahami masyarakat berdampak pada tindakan-tindakan anarki. Hal ini seringkali menjadi penghambat pelaku media melakukan tugas,. Di era kebebasan ini ancaman yang dihadapi pekerja media adalah pemilik modal, dan kekerasan yang dilakukan masyarakat.

Kebebasan juga menuntut pejabat publik lebih transparan membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Dampaknya, lembaga-lembaga publik harus transparan menyampaikan proses pengambilan keputusan. Hal ini direspons positif oleh wakil rakyat dengan memberikan ruang agar publik mengetahui apa yang dikerjakan.

Dalam beberapa waktu terakhir, bukan hal aneh bila media massa baik cetak maupun elektronik menayangkan siaran langsung sidang-sidang DPR. Bab ini mencoba mendiskripsikan dinamika komunikasi politik antarsuprastruktur politik di DPR untuk kasus Bank Century.

6.1. Kompleksitas Komunikasi Politik Antar Supraturstruktur Politik

Lembaga legislatif dalam sistem politik di Indonesia memainkan peran sangat strategis yaitu bersama-sama pemerintah akan menggodok berbagai regulasi yang nantinya bersifat *binding* atau mengikat bagi semua warga negara. Pada masa Orde Baru gaung lembaga legislatif ini kurang banyak terdengar, lembaga ini lebih banyak menjadi pihak yang pasif dalam pembuatan undang-undang. Artinya usulan untuk pembuatan undang-undang lebih banyak datang dari pihak pemerintah.

Namun Pasca Orde Baru, kondisi berubah. DPR baik pusat maupun daerah semakin dinamis. Masyarakat semakin terbiasa membaca, melihat atau mendengar berdebatan, konflik yang muncul dalam proses pembuatan sebuah keputusan. Lembaga yang diharapkan bisa menjalankan fungsi *agregasi* yaitu mengolah masukan menjadi sebuah kebijakan semakin aktif menggunakan hak-hak yang dimiliki.

Torehan sejarah yang menunjukkan ‘taring’ DPR adalah ketika lembaga ini menggunakan hak insiatif untuk meninjau kembali UU No 21 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pers. Undang-undang ini dinilai semua kalangan telah memasung kebebasan pers. Hak inisiatif DPR untuk meninjau Undang-undang yang menyangkut pers membawa dampak yang luar biasa bagi insan media baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan penelitian Sri Pangestuti (2000) pada masa transisi pers Indonesia terbukti telah mampu mengartikulasikan elemen-elemen demokratisasi yang sangat penting dan substansial bagi kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang menyangkut tuntutan (1) supermasi hukum, (2) otonomi parlemen, (3) pemilu yang jujur (4), otonomi daerah, (5) penegakkan HAM, (6) kebebasan pers (7) pencabutan dwi fungsi ABRI, (8) pemberantasan KKN .

Adanya ruang kebebasan inilah memberikan dampak *eksposure* masyarakat terhadap apa yang terjadi di lembaga legislatif. Masyarakat menjadi terbiasa dengan informasi tentang sepak terjang yang terjadi DPR. Lembaga ini juga menyadari mereka tidak bisa lagi menutup diri dari media, segala sesuatu yang terjadi di lembaga ini akan diliput oleh media.

Kepala Bagian Pemberitaan Sekretariat DPR Drs.Suratna, M.Si mengemukakan, di DPR paling sedikit setiap hari jumlah wartawan yang meliput mencapai 150 orang dari berbagai media cetak, elektronik dan *on line*. Mereka diberi fasilitas *media center*. "...kami dari bagian pemberitaan tidak bisa melarang apakah suatu sidang bersifat terbuka atau tertutup bagi media. Yang menentukan adalah pimpinan rapat itu sendiri. Fungsi kami disini adalah memberikan pelayanan serta mengatur bagaimana sidang berjalan lancar walaupun diliput secara langsung oleh media elektronik," tuturnya.

Dibanding era-era sebelumnya, diakui Suratna, kondisi ini memang memberikan warna yang berbeda dalam peliputan media terhadap kinerja DPR. Lebih dinamis, berwarna dan lebih transparan. Belum ada satu standar baku tentang sidang yang sifatnya tertutup atau sidang yang terbuka, kenyataannya sidang yang dahulu sifatnya tertutup sekarang terbuka. Misalnya, dulu kalau masih tarafpanja (panitia kerja) sifatnya masih tertutup sekarang sudah terbuka. Bahkan baru aktivitas memilih pimpinan sidang sekarang sudah terbuka. Misalnya, sidang kasus Bank Century, kebijakan BBM dan lainnya.

Apakah satu rapat bersifat terbuka atau umum disampaikan oleh pimpinan DPR seperti kutipan di bawah ini.

" Yang terhormat Saudara Prof. DR. Boediono, Saudara Pimpinan Panitia Angket, dan yang terhormat Saudara Anggota Panitia Angket yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita sehingga hari ini kita kembali mengikuti Rapat Panitia Angket DPR RI dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan acara, maka pada hari ini Panitia Angket DPR RI mengadakan Rapat dengan Prof. DR. Boediono untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan mengenai proses kebijakan pemberian FPJP ketika Prof. DR. Boediono menjadi Pimpinan Bank Indonesia.

Saudara Pimpinan dan Anggota Panitia Angket DPR RI yang berbahagia, sesuai laporan dari Sekretariat bahwa daftar hadir yang sudah ditandatangani 8 Fraksi dan 23 Anggota dari 30 keseluruhan Anggota Panitia Angket, 9 Fraksi maaf, dengan demikian maka menurut Pasal 245 ayat (1) Tata Tertib Dewan *kuorum* telah terpenuhi, untuk itu dengan seizin Saudara-saudara Anggota Rapat Konsultasi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.... (Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Boediono pada kasus bank Century, tanggal 22 Desember 2009)

Hal ini menunjukkan rapat DPR yang pada masa-masa sebelumnya berlangsung secara tertutup, sekarang banyak berlangsung terbuka. Bahkan pada saat awal pembentukan Panitia Khusus, rapat berlangsung secara terbuka. Pembahasan masalah BankCentury sidang sudah dilakukan secara terbuka.

Ketua Pimpinan : Assalamualaikum wr.wb selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat para wakil ketua, yang terhormat para anggota dewan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama perkenankanlah kami atas nama pimpinan dewan terlebih dahulu mengajak kita sekalian untuk mempersembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rapat paripurna dewan dalam keadaan sehat wal'afiat. Menurut catatan dari Sekretariat Jendral DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna dewan pagi hari ini telah ditandatangani oleh 325 orang anggota dari 560 orang anggota dewan dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di dewan dengan perincian sebagai berikut. Fraksi partai Demokrat, 118 dari 148 orang. Fraksi partai Golkar 52 dari 106 anggota. Fraksi PDI Perjuangan, 48 dari 94 orang anggota. Fraksi PKS 27 dari 57orang anggota. Fraksi Pan 20 dari 46. Fraksi PPP 23 dari 38. Fraksi PKB 7 dari 28. Fraksi partai Gerakan Indonesia Raya dari 26 hadir 18. Fraksi partai Hanura 12 dari 17 orang anggota. Walaupun didalam ruangan terlihat masih banyak tempat yang kosong, maka dengan jumlah 325 orang tersebut forum rapat paripurna pada hari ini telah tercapai, dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim perkenankanlah saya selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna dewan kedelapan masa sidang pertama tahun sidang 2009-2010, hari ini Jum'at tanggal 4 Desember

2009 dan sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka rapat paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum” (sumber transkrip TV parlemen dan Risalah rapat pembentukan pansus Sekretariat DPR)

Suratna menjelaskan, apabila sidang bersifat terbuka maka sekretariat DPR akan mengatur pekerja media untuk bisa meliput senyaman mungkin sehingga bisa meminimalkan bias dalam memberitakan sidang-sidang tersebut. Sekretariat DPR dalam hal ini Bagian Pemberitaan biasanya akan mempersilahkan stasiun televisi untuk *share* gambar liputan dari TV Parlemen, sementara kamera yang diijinkan untuk masing-masing stasiun televisi hanya satu.

Keterbukaan DPR dengan dalih menjunjung transparansi kepada publik di sisi lain memang membawa dampak positif yaitu masyarakat akan mendapatkan informasi yang menyeluruh. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana suatu keputusan politik bisa terpenuhi. Perbedaan pandangan mendapatkan informasi yang menyeluruh terhadap dalam kehidupan politik adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Bagaimana perbedaan pandangan ini kemudian menjadi sebuah keputusan politik yang mengutamakan kepentingan masyarakat ?

Disinilah media massa memainkan peran sebagai pencerita peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di DPR. Anggota DPR adalah salah satu sumber informasi politik penting di tingkat Suprastruktur Politik, sehingga wajar apabila pekerja media akan selalu berada di tempat ini untuk mendapatkan informasi. Kompleksitas komunikasi politik yang berkembang di DPR baik antarfraksi, antarpantai atau anggota dalam satu partai memang akan memberikan alternatif kepada pekerja media untuk memilih mana yang akan/tidak diberitakan.

Hanya saja, akses masyarakat secara umum terhadap lembaga legislative ini terbatas maka terpaan informasi terkait dengan kinerja dan isu-isu politik masyarakat hanya melalui media. Melalui media masyarakat akan dengan mudah mengetahui bagaimana dinamika komunikasi politik yang berlangsung di lembaga legislatif. Pilihan-pilihan tentang informasi yang akan dipilih ini terkadang secara tidak

langsung akan menyebabkan terjadinya disinformasi politik.

Dalam bab ini dipilih beberapa kegiatan rapat DPR. Dari aspek narasumber setiap sidang, substansi pertanyaan, materi pertanyaan, bentuk pertanyaan dapat dilihat kecenderungan pesan yang disampaikan. Contoh yang dipilih di sini, akan memberikan gambaran bagaimana dinamika aktivitas yang terjadi di DPR, melalui tiga kategori rapat yaitu rapat pemeriksaan, rapat kecil, rapat lainnya yang mencakup sidang pleno dan rapat intern. Masing-masing rapat membahas persoalan yang berbeda.

Tabel 6.1. : Unit Analisis Narasumber Rapat Pemeriksaan Bank Century

No	Nama Rapat		Nama Rapat																								Jumlah	
			1		2		3		4		5		6		7		8		8		Jumlah							
	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P						
1	11	0,29	31	0,81	16	0,42	13	0,34	0	0	80	2,10	52	1,36	130	3,41	333	8,73										
2	17	0,45	27	0,71	20	0,52	17	0,45	115	3,02	14	0,37	52	1,36	112	2,94	374	9,81										
3	6	0,16	11	0,29	6	0,16	17	0,45	9	0,24	63	1,65	19	0,5	22	0,58	153	4,01										
4	14	0,37	24	0,63	8	0,21	16	0,42	4	0,1	17	0,45	39	1,02	45	1,18	167	4,38										
5	10	0,26	11	0,29	13	0,34	8	0,21	47	1,23	18	0,47	7	0,18	49	1,29	163	4,27										
6	7	0,18	20	0,52	7	0,18	22	0,58	26	0,68	0	0	31	0,81	42	1,1	155	4,07										
7	12	0,31	16	0,42	14	0,37	18	0,47	132	3,46	32	0,84	87	2,28	150	3,93	461	12,1										
8	17	0,45	7	0,18	5	0,13	15	0,39	45	1,18	25	0,66	35	0,92	52	1,36	201	5,27										
9	12	0,31	12	0,31	9	0,24	16	0,42	86	2,26	17	0,45	12	0,31	38	1	202	5,3										
10	70	1,84	141	3,7	106	2,78	109	2,86	466	12,2	230	6,03	232	6,08	236	6,19	1590	41,7										
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	176	4,62	300	7,87	204	5,35	251	6,58	930	24,4	496	13,02	566	14,8	890	23	3813	100										

Keterangan

- 1 Rapat Pemeriksaan Burhanuddin Adullah tgl 21 Desember 2009
- 2 Rapat Pemeriksaan Prof.Dr.Miran da Goletom tanggal 21 Desember 2009
- 3 Rapat Pemeriksaan Anwar Nasution tgl 21 Desember 2009
- 4 Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Dr. Boediono tanggal 22 Desember 2010
- 5 Rapat Pemeriksaan Maman Sumantri dan Rusli Simanjuntak tanggal 6 Januari 2010
- 6 Rapat Pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristina tanggal 7 Januari 2010
- 7 Rapat Pemeriksaan Mentkeu Sri Mulyani tanggal 13 Januari 2010
- 8 Rapat Pemeriksaan Susno Djuadi tanggal 20 Januari 2010

Tabel 6.2.: Unit Analisis Narasumber Rapat audiensi, angket, intern, RDPU

No	Nama Rapat	1		2		3		4		5		6		7		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
	Partai																
1	Golkar	0	0	11	01.81	11	1.81	10	1.65	0	0	25	4.12	22	3.62	79	13
2	Demokrat	4	0.66	10	1.65	24	3.95	11	1.81	0	0	40	6.6	5	0.82	94	15.5
3	Gerindra	0	0	1	0.17	2	0.33	0	0	0	0	0	0	9	1.48	12	1.98
4	Hanura	0	0	9	1.49	2	0.33	3	0.49	0	0	6	0.99	17	2.80	37	6.1
5	PKB	0	0	18	2.97	3	0.49	3	0.49	0	0	13	2.14	2	0.33	39	6.43
6	PAN	1	0.12	6	0.99	2	0.33	5	0.82	0	0	6	0.99	2	0.33	22	3.62
7	PDI/P	4	0.66	7	1.12	6	0.99	5	0.82	8	1.32	19	3.13	12	1.98	61	10
8	PPP	1	0.12	1	0.17	6	0.99	4	0.66	2	0.33	5	0.82	21	3.5	40	6.59
9	PKS	0	0	5	0.82	7	1.15	10	1.65	2	0.33	9	1.48	14	2.31	47	7.74
10	Pemerintah	0	0	50	8.24	0	0	0	0	0	0	75	12.36	0	0	125	20.6
11	Kuasa Hukum	7	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1.15
12	Lain-lain	28	4.61	0	0	0	0	0	0	16	2.64	0	0	0	0	44	7.25
	Jumlah	45	7.32	118	19.43	63	10.37	51	8.4	28	4.61	198	32.63	104	17.13	607	100

Keterangan

- 1 Rapat audiensi tanggal 10 Desember 2009
- 2 Rapat angket 2 (Konsultasi dengan PPATK) tanggal 17 Desember 2009
- 3 Rapat angket 3 Bank Century tanggal 16 Desember 2009
- 4 Rapat angket 4 panitia hak angket tanggal 22 Desember 2009
- 5 RDPU JKN tgl 7 Des 2009
- 6 Rapat intern I tgl 26 Januari 2010
- 7 Rapat intern 1 Maret 2010

Tabel 6.3. Unit Analisis Berdasarkan Narasumber Rapat Tim Kecil Bank Century

No	Nama Rapat	1		2		3		4		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	p	F	P
1	Golkar	9	11.392	4	5.063	0	0	0	0	9	11.4
2	Demokrat	8	10.127	6	7.595	4	5.06	2	2.53	20	25.3
3	Gerindra	2	2.5316	1	1.266	0	0	0	0	3	3.8
4	Hanura	0	0	0	0	1	1.27	1	1.27	2	2.53
5	PKB	0	0	0	0	2	2.53	0	0	2	2.53
6	PAN	1	1.2658	1	1.266	1	1.27	0	0	3	3.8
7	PDI P	5	6.3291	2	2.532	1	1.27	1	1.27	9	11.4
8	PPP	0	0	0	0	2	2.53	2	2.53	4	5.06
9	PKS	3	3.7975	7	8.861	6	7.59	5	6.33	21	26.6
10	Pemerintah	0	0	0	0	6	7.59	0	0	6	7.59
	Jumlah	28	35.443	21	26.58	23	29.1	11	13.9	79	100

Keterangan

- 1 Rapat timkecil tanggal 19 Desember 2009 (rapat tim kecil panitia hak angket)
- 2 Rapat Tim Kecil (Panitia Hak Angkat 20 Februari 2010)
- 3 Rapat pleno kecil pengusutan Bank Century tanggal 22 Februari 2010
- 4 Rapat timkecil (rapat tim kecil panitia hak angket) tanggal 22 Februari 2010

Rapat pemeriksaan adalah aktivitas rapat DPR yang banyak diliput oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Disini yang dipilih adalah (1) Rapat Pemeriksaan Burhanuddin Adullah tgl 21 Desember 2009, (2) Rapat Pemeriksaan Prof.Dr.Miranda Goletom tanggal 21 Desember 2009, (3) Rapat Pemeriksaan Anwar Nasution tgl 21 Desember 2009, (4) Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Dr.Boediono tanggal 22 Desember 2010,(5) Rapat Pemeriksaan Maman Sumantri dan Rusli Simanjuntak tanggal 6 Januari 201,(6) Rapat Pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristina tanggal 7 Januari 2010,(7) Rapat Pemeriksaan Mentkeu Sri Mulyani tanggal 13 Januari 2010 (8) Rapat Pemeriksaan Susno Djuadi tanggal 20 Januari 2010.

Rapat lainnya (1) rapat audiensi tanggal 10 Desember 2009, (2) rapat angket 2 (konsultasi dengan PPATK) tanggal 17 Desember 2009, (3) rapat angket Bank Century tanggal 16 Desember 2009 dan 22 Desember 2009 (4) rapat RDPJ JKN tanggal 7 Desember 2009 rapat intern tanggal 26 Januari dan 1 Maret 2010. Rapat tim kecil mencakup rapat tim kecil tanggal 19 Desember 2009, 20 Februari 2010, 22 Februari 2010, dan 22 Februari 2010.

Berdasarkan Tabel 6.1 di atas tampak dinamika komunikasi berlangsung dua arah antara anggota DPR yang menangani kasus Bank Century dengan pihak pemerintah. Dari delapan rapat pemeriksaan, anggota pansus beberapa fraksi aktif menanyakan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Bank Century. Tampak disini posisi DPR adalah pihak yang bertanya, sementara pihak yang dipanggil yang menjawab.

Padahal kalau melihat hirarki sistem politik di Indonesia antara DPR dan pemerintah adalah sejajar. Kedua lembaga tidak bisa saling menjatuhkan. Namun jika melihat dinamika komunikasi yang berlangsung dalam rapat pemeriksaan, maka DPR yang aktif. Persoalannya, kalau hal ini yang lebih banyak diekspose media, maka akan memunculkan citra bahwa DPR lebih dominan. Ini akan berdampak pada pencitraan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas politik tersebut. Berikut kutipan rapat sidang pemeriksaan.

Drs. Ade Komarudin, M.H (Fraksi Partai Golkar) : Terima kasih, Assalamualaikum Wr.Wb, pimpinan dan para anggota yang saya hormati, pak Susno sebagai saksi yang saya hormati. Pertama saya ingin sedikit klarifikasi tadi kebetulan saudara Ruhutnya belum ada, tapi tidak apa-apa saya kira disampaikan saja bahwa yang disampaikan itu bukan kata saya tadi kata saudara Robet Tantular pak Susno. Jadi, waktu itu saya bertanya kepada saudara Robet mengenai silsilah keluarganya, saya ingin tau dari mulai bapaknya sampai anak pertama sampai beliau dan waktu itu dikemukakan yang pertama saudara susah saya nyebut namanya tuh Hofud apa Opik Tantular sampai beliau ternyata saudara Hofud sudah di Shanghai dari sejak tahun 2000-an karena BLBI 1,2 trilyun pada saat itu dan seterusnya dan kita dapat pada waktu itu juga memang sudah tidak ada yang didalam negeri tetapi Cuma saudara Robet yang disini, di Shanghai, Singapura-Shanghai Singapura seperti itulah waktu itu. Jadi sekali lagi bukan kata-kata saya cuman saya bertanya kepada saudara Robet Tantular. Pertanyaan saya, saya akan mulai saya sedikit saja, menyangkut Bail out, saya ingin tahu pak Susno selaku Kabareskrim pada saat itu, sekarang mantan, apakah di Bareskrim sudah tahap di Polri sudah tahap penyelidikan atau penyidikan soal Bail Out ini.

Drs. Ade Komarudin, M.H (Fraksi Partai Golkar) : ya, tahapan penyelidikan ya pak ya, apakah setelah di penyelidikan ini tahapan penyelidikan ini, apa yang didapat soal penyelidikan soal Bail Out ini oleh Bareskrim.

Susno Duadji (mantan Kabareskrim) : pertama, kita lagi mengumpulkan apa namanya hal-hal yang bersifat normatif, yaitu aturan-aturan yang mengatur masalah Bail Out, kemudian aturan-aturan yang mengatur masalah penggantian, ehm, ganti apa namanya dana nasabah dan sebagainya.

Drs. Ade Komarudin, M.H (Fraksi Partai Golkar) : termasuk bapak sudah mengetahui yang bahwa Bail Outnya itu 6,7 Trilyun ya pak ya.

Susno Duadji (mantan Kabareskrim) : 6,7 Trilyun itu kita dapatkan karena ini masih penyelidikan kan belum didapatkan resmi kita minta, tapikan itu saya kira didapatkan melalui jalur resmi siaran pers dari LPS, LPS memberikan siaran pers, seperti itu.

Drs. Ade Komarudin, M.H (Fraksi Partai Golkar) : Apakah Bareskrim sudah membuat analisis atau belum terhadap data-data yang didapat oleh Bareskrim.

Susno Duadji (mantan Kabareskrim) : sudah, kalau analisis kan kita selalu buat, karena dengan analisis data itulah nantinya kita bekerja untuk melangkah melengkapi bahan-bahan yang nantinya penyidikanpun kita akan mengarah kesana.

Drs. Ade Komarudin, M.H (Fraksi Partai Golkar) : hasil analisisnya gimana pak ? boleh dijelaskan pak biar dari a sampai z supaya saya dapat dijelasi

Susno Duadji (mantan Kabareskrim) : kalau saya, ini saya bawa pak, sebenarnya tebal sekali ini pak ya

Drs. Ade Komarudin, M.H (Fraksi Partai Golkar) : yang point-pointnya saja, pak

Susno Duadji (mantan Kabareskrim) : point-pointnya kita menganggap bahwa itu yang harus kita sifatnya kan itu klarifikasi dengan data-data dan informasi. Pertama kita mengklarifikasi apa yang beredar dimasyarakat masalah tentang keabsahan Bail Out, kemudian yang kedua tentang rumor terkait dengan penyaluran dana, nah itu yang tugas kita untuk kita buktikan secara hukum tentunya banar apa tidak. Nah, untuk sampai masuk kesana kalau polisi bekerja ini kita pertama ngumpulkan bahan-bahan dulu, nah setelah itu baru kita meminta secara

resmi, baru nanti mulai meriksa, baru nanti masuk kepenyidikan, jadi tahapannya masih panjang pak. (sumber TV Parlemen, risalah rapat pemeriksaan)

Penggalan kutipan di atas nampak bahwa dalam rapat pemeriksaan posisi suprastruktur yang harusnya sejajar (tidak bisa saling menjatuhkan) menjadi berbeda. Lebih-lebih kalau siaran ini dilakukan secara langsung, kemudian ada pemotongan iklan, dan lainnnya maka informasi yang akan diterima oleh khalayak hanyalah mozaik-mozaik informasi yang tidak utuh. Rapat yang demikian panjang dengan pembicaraan kompleks, tidak bisa ditulis secara utuh oleh media cetak karena ada seleksi oleh pelaku media (*gate keeper*) dalam ranah *newsroom*.

Kalau kita melihat dominasi narasumber yang melakukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus Bank Century nampak bahwa (lihat table 6.1) tampak ada pergulatan kepentingan antarpolitical parties. Partai-partai besar yang berseberangan dengan pemerintah dalam kasus Bank Century nampak mendominasi pembicaraan, seperti Partai Golkar, Partai PDI-P. Sementara Partai Demokrat yang merupakan partai pemerintah merupakan pihak yang aktif melakukan pertanyaan.

Dalam konstelasi bergulatan politik yang sangat kompleks inilah, liputan media sangat berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di kalangan khalayak. Sebagai gambaran dalam delapan kali rapat pemeriksaan yang dilakukan oleh DPR maka narasumber pemerintah yang menjawab pertanyaan mencapai 41,7 %. Hal ini menyebabkan masyarakat mempunyai pemahaman pemeriksaan Bank Century itu untuk melakukan pembelaan kepada pemerintah. Hal ini bila dikaitkan dengan Bab 5.22 khalayak melihat bahwa pemberitaan Bank Century oleh media lebih berpihak kepada pemerintah (38%).

Padahal kalau melihat kecenderungan pertanyaan yang dilakukan oleh peserta rapat Bank Century yang dilihat dari kategori bentuk keperpihakan peserta rapat pemeriksaan adalah menyudutkan pemerintah (lihat Tabel 6.4, Tabel 6.5, Tabel 6.6) kemudian sebagian lagi memihak pemerintah. Disinilah sangat mungkin terjadi bias informasi yang menyebabkan perbedaan antara apa yang terjadi di tingkat

suprastruktur politik dengan yang dipahami masyarakat.

Media pada dasarnya memiliki agenda sendiri yang mengacu kepada kebijakan redaksional. Namun khalayak juga memiliki seleksi atas informasi-informasi yang diterimanya. Pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana persepsi masyarakat terhadap fakta tersebut.

Media pada dasarnya akan membingkai semua fakta yang dilihat. *Frame* media terhadap satu fakta akan mempengaruhi agenda publik dan agenda kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Disinilah kekuatan-kekuatan media akan bermain, lebih-lebih bila media itu dikuasai kapital yang mempunyai kepentingan politik maka akan mempengaruhi *frame* media terhadap fakta yang akan diliput tersebut, mulai dari pilihan narasumber, pilihan perbincangan dalam rapat tersebut, dll. Pada saat inilah sebenarnya mulai berlangsung terjadinya bias informasi politik yang sampai ke khalayak. Bias informasi yang berpotensi terjadinya disinformasi politik akan memberikan dampak terhadap putusan politik maupun pembentukan opini publik.

Tabel 6.4. : Unit Analisis Keperipihakan Rapat Pemeriksaan Bank Century

No	Nama Rapat	Nama Rapat																Jumlah	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	F	P
	Keperipihakkan peserta	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	Memihak pemerintah	65	4.37	3	0.2	3	0.20	1	0.07	22	1.48	218	14.7	75	5.05	120	8.08	507	34.12
2	Menyudutkan pemerintah	75	5.05	139	9.35	74	4.98	109	7.34	26	1.75	233	15.7	10	0.67	60	4.04	726	48.86
3	Memihak Partai tertentu	8	0.54	1	0.07	0	0	1	0.07	0	0	6	0.4	7	0.47	10	0.67	33	2.221
4	Menyudutkan partai tertentu	11	0.74	3	0.2	0	0	9	0.61	0	0	3	0.2	9	0.61	5	0.34	40	2.70
5	Memihak kelompok tertentu	2	0.13	0	0	0	0	0	0	5	0.34	0	0	85	5.72	0	0	92	6.19
6	Menyudutkan kelompok tertentu	35	2.36	0	0	0	0	0	0	5	0.34	44	2.96	4	0.27	0	0	88	5.92
	Jumlah	196	13.2	146	9.83	77	5.18	120	8.08	58	3.91	504	33.9	190	12.79	195	13.13	1486	100

Keterangan

- 1 Rapat Pemeriksaan Burhanuddin Adullah tgl 21 Desember 2009
- 2 Rapat Pemeriksaan Prof.Dr.Miranda Goletom tanggal 21 Desember 2009
- 3 Rapat Pemeriksaan Anwar Nasution tgl 21 Desember 2009
- 4 Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Dr.Boediono tanggal 22 Desember 2010
- 5 Rapat Pemeriksaan Maman Sumantri dan Rusli Simanjuntak tanggal 6 Januari 2010
- 6 Rapat Pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristina tanggal 7 Januari 2010
- 7 Rapat Pemeriksaan Mentkeu Sri Mulyani tanggal 13 Januari 2010
- 8 Rapat Pemeriksaan Susno Djuadi tanggal 20 Januari 2010

Tabel 6.5 Unit Analisis Bentuk Keperpihakan Rapat audiensi, angket, interen, RDPD

No	Nama Rapat	1		2		3		4		5		6		7		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	Keperpihakan peserta Memihak pemerintah	2	0.5	2	0.5	7	1.76	0	0	0	0	11	2.76	0	0	22	5.53
2	Menyudutkan pemerintah	14	3.52	54	13.6	37	9.30	40	10.10	9	2.26	76	19.1	0	0	230	57.79
3	Memihak Partai tertentu	0	0	1	0.25	1	0.25	1	0.25	0	0	1	0.25	88	22.1	92	23.12
4	Menyudutkan partai tertentu	0	0	3	0.75	1	0.25	0	0	2	0.50	15	3.77	15	3.77	36	9.05
5	Memihak kelompok tertentu	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.75	0	0	0	0	3	0.75
6	Menyudutkan kelompok tertentu	2	0.5	0	0	5	1.26	2	0.50	5	1.26	0	0	1	0.25	15	3.77
	Jumlah	18	4.52	60	15.1	51	12.82	43	10.85	19	4.77	103	25.9	104	26.1	398	100

Keterangan

1. Rapat audiensi tanggal 10 Desember
 2. Rapat angket 2 (Konsultasi dengan PPATK tgl/ 17 Desember 2009)
 3. Rapat angket 3 bank century 16-12-2009)
 4. Rapat angket 4
 5. RDPD JKN 071209
 6. Rapat Intern I tagl 26 Januari 2010
 7. Rapat intern 1 Maret 2010
- panitia hak angket 22-12-2009

Tabel 6.6 : Unit Analisis Berdasarkan Keperpihakaan Peserta Rapat Tim Kecil Bank Century

No	Nama Rapat	1		2		3		4		Jumlah		
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	
1	Memihak pemerintah	0	0	0	0	1	1.41	0	0	0	1	1.41
2	Menyudutkan pemerintah	4	5.63	0	0	7	9.86	0	0	0	11	15.5
3	Memihak Partai tertentu	11	15.5	11	15.5	8	11.27	0	0	0	30	42.3
4	Menyudutkan partai tertentu	13	18.3	4	5.63	2	2.82	0	0	0	19	26.8
5	Memihak kelompok tertentu	2	2.82	5	7.04	0	0	1	1.41	1	8	11.3
6	Menyudutkan kelompok tertentu	0	0	1	1.41	1	1.41	0	0	0	2	2.82
	Jumlah	30	42.3	21	29.6	19	26.77	1	1.41	1	71	100

Keterangan

- 1 Rapat timkecil 191209 (rapat tim kecil panitia hak angket)
- 2 Rapat Tim Kecil (Panitia Hak Angkat 20 Februari 2010)
- 3 Rapat pleno kecilpengusutan bank century tanggal 22 Februari 2010
- 4 Rapat timkecil (rapat tim kecil panitia hak angket)th 220210

Tabel 6.7 Unit Analisis Materi Pertanyaan Rapat Pemeriksaan Bank Century

No	Nama Rapat	Nama Rapat																		
		1		2		3		4		5		6		7		8		Jumlah		
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	
1	Markus	0	0	31	2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	2.53
2	Proses penyelidikan	37	2.76	27	2.01	35	2.61	22	1.64	0	0	110	8.2	40	2.98	1	0.07	272	20.27	
3	pihak yg diduga terlibat	14	1.04	11	0.82	5	0.37	1	0.07	8	0.6	27	2.01	0	0	3	0.22	69	5.14	
4	landasan yuridis	4	0.3	24	1.79	10	0.75	4	0.3	0	0	4	0.3	5	0.37	0	0	51	3.80	
5	Kronologi	45	3.35	11	0.82	23	1.71	0	0	16	1.19	140	10.4	56	4.17	2	0.15	293	21.83	
6	Penyidikan	3	0.22	20	1.49	45	3.35	109	8.12	1	0.07	81	6.04	4	0.3	1	0.07	264	19.67	
7	Kombinasi	44	3.28	16	1.19	0	0	0	0	12	0.89	95	7.08	35	2.61	12	0.89	214	15.95	
8	lain-lain	39	2.91	7	0.52	1	0.07	0	0	3	0.22	52	3.87	34	2.53	9	0.67	145	10.80	
	Jumlah	186	13.9	147	11	119	8.87	136	10.1	14	2.98	509	37.9	174	13	46	2.09	1342	100	

Keterangan

1. Rapat Pemeriksaan Burhanuddin Adullah tgl 21 Desember 2009
2. Rapat Pemeriksaan Prof.Dr.Miranda Goletom tanggal 21 Desember 2009
3. Rapat Pemeriksaan Anwar Nasution tgl 21 Desember 2009
4. Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Dr. Boediono tanggal 22 Desember 2010
5. Rapat Pemeriksaan Maman Sumantri dan Rusli Simanjuntak tanggal 6 Januari 2010
6. Rapat Pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristina tanggal 7 Januari 2010
7. Rapat Pemeriksaan Mentkeu Sri Mulyani 13 Januari 2010
8. Rapat Pemeriksaan Susno Djuadjji tanggal 20 Januari 2010

Tabel 6.8 Unit Analisis Materi pertanyaan Rapat audiensi, angket, interen, RDPU

No	Nama Rapat	1		2		3		4		5		6		7		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	Markus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Proses penyelidikan	0	0	25	5,63	23	5,18	18	4,05	1	0,23	51	11,5	14	3,15	132	29,7
3	pihak yg diduga terlibat	0	0	1	0,23	0	0	0	0	3	0,68	1	0,23	6	1,35	11	2,48
4	landasan yuridis	1	0,23	3	0,68	8	1,8	8	1,8	0	0	3	0,68	3	0,68	26	5,86
5	Kronologi	0	0	4	0,9	1	0,23	7	1,58	2	0,45	7	1,58	2	0,45	23	5,18
6	Penyidikan	6	1,35	11	2,48	13	2,93	3	0,68	1	0,23	20	4,5	0	0	54	12,2
7	Kombinasi	4	0,9	7	1,58	3	0,68	7	1,58	12	2,7	0	0	42	9,46	75	16,9
8	lain-lain	10	2,25	5	1,13	51	11,5	0	0	0	0	20	4,5	37	8,33	123	27,7
		21	4,73	56	12,6	99	22,3	43	9,68	19	4,28	102	23	104	23,4	444	100

Keterangan

- 1 Rapat audiensi tanggal 10 Desember
- 2 Rapat angket 2 (Konsultasi dengan PPAATK tgl 17 Desember 2009
- 3 Rapat angket 3 bank century 16-12-2009)
- 4 Rapat angket 4 panitia hak angket 22-12-2009
- 5 RDPU JKN 071209
- 6 Rapat Intern I tagl 26 Januari 2010
- 7 Rapat intern 1 Maret 2010

Tabel 6.9 Unit Analisis Berdasarkan Materi Pertanyaan Rapat Tim Kecil Bank Century

No	Nama Rapat	1		2		3		4		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	Markus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Proses penyelidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	pihak yg diduga terlibat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	landasan yuridis	0	0	0	0	1	1.75	0	0	1	1.75
5	Kronologi	0	0	1	1.75	1	1.75	1	1.75	3	5.26
6	Penyidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Prosedur pencairan	0	0	0	0	2	3.51	0	0	2	3.51
8	Kombinasi	8	4,04	10	17.5	6	10.5	10	17.5	34	59.6
9	lain-lain	0	0	0	0	12	21.1	5	8.77	17	29.8
	Jumlah	8	4,04	11	19.3	22	38.6	16	28.1	57	100

Keterangan

- 1 Rapat timkecil 191209 (rapat tim kecil panitia hak angket)
- 2 Rapat Tim Kecil (Panitia Hak Angkat 20 Februari 2010
- 3 Rapat pleno kecilpengusutan bank century tanggal 22 Februari 2010
- 4 Rapat tim kecil (rapat tim kecil panitia hak angket)th 220210

Tabel 6.4 sampai Tabel 6.9 memberikan gambaran kepada kita bahwa isi pesan komunikasi politik yaitu materi yang ditanyakan dalam rapat-rapat menyangkut persoalan makelar kasus, proses penyelidikan Bank Century, pihak yang diduga terlibat, landasan yuridis, kronologis, pencairan dana, kombinasi dari beberapa masalah di atas dan lain-lain. Berdasarkan tabel di atas maka materi pertanyaan yang banyak muncul dalam rapat-rapat tersebut adalah kronologis tentang bagaimana proses *bail out* Bank Century.

Dalam konteks ini kejelasan tersebut dibutuhkan agar masyarakat memiliki gambaran yang lebih menyeluruh terkait kasus tersebut. Kalau dikaitkan dengan pendapat masyarakat tentang berita-berita politik tentang Bank Century (lihat Tabel 5.18) maka siaran langsung tentang bagaimana proses berlangsungnya kasus bank Century bisa menambah kejelasan masyarakat tentang hal itu. Misal pemeriksaan kedua terhadap mantan Gubernur BI, Prof.Dr. Boediono, sebagai berikut :

F-PKS (ANDI RAHMAT, SE):

Tapi ide LPS itu pak, maaf ketua ini ya Saya langsung interaktif dengan Pak Boediono, jadi ide LPS ini memang Saya anggap belum sebagai keputusan pak, tetapi ini kan suatu usulan atau kajian dari satu lembaga pak ya. Yang kemudian disodorkan di dalam rapat tanggal 17 nopember itu pak, dan kelihatannya ide ini tidak pernah di follow upi, karena ada 2 ide pak LPS itu pada hari itu, pertama itu tidak perlu kita selamatkan yang kedua dia mengatakan bahwa investor PT Sinar Mas itu hanya akan masuk kalau LPS masuk duluan pak. Itu dilaporkan LPS dalam rapat itu. ini perlu pak karena ini dokumentasi rapat yang Saya jadikan dasar untuk pertanyaan bapak.

MANTAN GUBERNUR BI (PROF. DR. BOEDIONO):

Ya itu pandangan yang dari satu institusi yang sebenarnya bukan pada forum yang mengambil keputusan, tetapi dari awal bapak, Bank Indonesia punya pendapat bahwa dalam situasi krisis

yang sangat eksklusif dengan pemburukan yang sangat cepat, bahkan dengan rumor-rumor yang luar biasa pada waktu itu berapa bank mengalami kesulitan dan sebagainya, ini bisa menimbulkan trigger pengaruh sistemik yang luar biasa apabila ditutup. Jadi dari awal kami memang punya pandangan seyogyanya dalam situasi seperti itu jangan sampai ada bank yang ditutup.(sumber risalah Rapat Pemeriksaan Prof.Dr.Boediono)

Tabel 6.10 Unit Analisis Kecenderungan sidang Rapat Pemeriksaan Bank Century

No	Nama Rapat	Nama Rapat																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		Jumlah	
	Kecenderungan sidang	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	Penyelesaian masalah	83	7.18	60	5.19	30	2.6	52	4.5	7	0	86	7.44	50	4.33	50	4.33	418	36.16
2	Memperbesar	47	4.07	4	0.35	4	0.35	60	5.19	4	0.35	125	10.8	20	1.73	16	1.38	280	24.22
3	Memperdalam	56	4.84	71	6.14	46	3.98	8	0.69	48	4.15	130	11.2	54	4.67	45	3.89	458	39.62
	Jumlah	186	16.1	135	11.68	80	6.92	120	10.4	59	4.5	341	29.5	124	10.7	111	9.6	1156	100

Keterangan

- 1 Rapat Pemeriksaan Burhanuddin Adullah tgl 21 Desember 2009
- 2 Rapat Pemeriksaan Prof.Dr.Miranda Goel tom tanggal 21 Desember 2009
- 3 Rapat Pemeriksaan Anwar Nasution tgl 21 Desember 2009
- 4 Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Dr. Boediono tanggal 22 Desember 2010
- 5 Rapat Pemeriksaan Maman Sumantri dan Rusli Simanjuntak tanggal 6 Januari 2010
- 6 Rapat Pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristina tanggal 7 Januari 2010
- 7 Rapat Pemeriksaan Mentkeu Sri Mulyani tanggal 13 Januari 2010
- 8 Rapat Pemeriksaan Susno Djuadi tanggal 20 Januari 2010

Tabel 6.11 Unit Analisis Kecenderungan sidang Rapat Pemeriksaan Bank Century

No	Kecenderungan sidang	Nama Rapat																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	Penyelesaian masalah	83	7.18	60	5.19	30	2.6	52	4.5	7	0	86	7.44	50	4.33	50	4.33	418	36.16
2	Memperbesar	47	4.07	4	0.35	4	0.35	60	5.19	4	0.35	125	10.8	20	1.73	16	1.38	280	24.22
3	Mempertdalam	56	4.84	71	6.14	46	3.98	8	0.69	48	4.15	130	11.2	54	4.67	45	3.89	458	39.62
	Jumlah	186	16.1	135	11.68	80	6.92	120	10.4	59	4.5	341	29.5	124	10.7	111	9.6	1156	100

Keterangan

- 1 Rapat Pemeriksaan Burhanuddin Adullah tgl 21 Desember 2009
- 2 Rapat Pemeriksaan Prof.Dr.Miranda Gol etom tanggal 21 Desember 2009
- 3 Rapat Pemeriksaan Anwar Nasution tgl 21 Desember 2009
- 4 Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Dr. Boediono tanggal 22 Desember 2010
- 5 Rapat Pemeriksaan Maman Sumantri dan Rusli Siman juntak tanggal 6 Januari 2010
- 6 Rapat Pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristina tanggal 7 Januari 2010
- 7 Rapat Pemeriksaan Mentkeu Sri Mulyani tanggal 13 Januari 2010
- 8 Rapat Pemeriksaan Susno Djuadi tanggal 20 Januari 2010

Tabel 6.12. Unit Analisis Kecenderungan Sidang Rapat audiensi, angket, interen, RDPU

No	Nama Rapat	1		2		3		4		5		6		7		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
	Kecenderungan sidang																
1	Penyelesaian masalah	11	2.48	30	6.76	43	9.68	36	8.11	3	0.68	59	13.3	26	5.86	208	46.8
2	Memperbesar	1	0.23	5	1.13	3	0.68	0	0	3	0.68	18	4.05	43	9.68	73	16.4
3	Memperdalam	6	1.35	25	5.63	5	1.13	7	1.58	49	11.04	26	5.86	45	10.1	163	36.7
	Jumlah	18	4.05	60	13.52	51	11.5	43	9.68	55	12.40	103	23.2	114	25.7	444	100

Keterangan

- 1 Rapat audiensi tanggal 10 Desember
- 2 Rapat angket 2 (Konsultasi dengan PPATK tgl 17 Desember 2009
- 3 Rapat angket 3 bank century 16-12-2009)
- 4 Rapat angket 4 panitia hak angket 22-12-2009
- 5 RDPU JKN 071209
- 6 Rapat Intern I tagl 26 Januari 2010
- 7 Rapat intern 1 Maret 2010

Tabel 6.13. Unit Analisis Berdasarkan kecenderungan Sidang Rapat Tim Kecil Bank Century

No	Nama Rapat	1		2		3		4		Jumlah	
		F	P	F	p	F	p	F	p	F	P
1	Penyelesaian masalah	11	15,94	10	14,49	1	1,45	2	2,9	14	20,29
2	Memperbesar	6	8,70	6	8,70	3	4,35	5	7,25	20	28,99
3	Memperdalam	13	18,84	5	7,25	13	18,8	4	5,8	35	50,72
	Jumlah	30	43,48	21	30,44	17	24,6	11	15,9	69	100

Keterangan

- 1 Rapat tim kecil 191209 (rapat tim kecil panitia hak angket)
- 2 Rapat Tim Kecil (Panitia Hak Angkat 20 Februari 2010)
- 3 Rapat pleno kecil/pengusutan bank century tanggal 22 Februari 2010
- 4 Rapat timkecil (rapat tim kecil panitia hak angket)th 220210

Berdasarkan table di atas peserta rapat pemeriksaan Century pertanyaannya walaupun terkesan menyudutkan pemerintah (Tabel 6.3,4,5) namun arah pertanyaan yang diajukan mengerucut pada upaya untuk mencari penyelesaian masalah serta memperdalam masalah. Bisa jadi hal ini merupakan upaya dari DPR untuk memperjelas persoalan yang sudah menjadi perbincangan Masyarakat.

Table 6.14 Unit Analisis Bentuk Pertanyaan Rapat Pemeriksaan Bank Century

No	Nama Rapat	Nama Rapat																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		Jumlah	
Bentuk pertanyaan	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	
1	Menyanggah	0	0	14	0,78	0	0	19	1,06	3	0	88	4,89	45	2,5	620	34,44	789	43,8
2	Menyelidiki	37	2,06	87	4,83	58	3,22	70	3,89	0	0	146	8,11	80	4,44	10	0,56	488	27,1
3	Klarifikasi	14	0,78	19	1,06	18	1	21	1,17	8	0,44	77	4,28	21	1,17	10	0,56	188	10,4
4	Memberi masukan	4	0,22	7	0,39	0	0	7	0,39	0	0	12	0,67	10	0,56	10	0,56	50	2,78
5	Kombinasi	45	2,5	9	0,5	1	0,06	3	0,17	16	0,89	68	3,78	12	0,67	0	0	154	8,56
6	Lain-lain	3	0,17	0	0	4	0,22	0	0	1	0,06	113	6,28	10	0,56	0	0	131	7,28
	Jumlah	103	5,72	136	7,56	81	4,5	120	6,67	14	1,39	504	28	1,78	9,89	650	36,12	1800	100

Keterangan

- 1 Rapat Pemeriksaan Burhanuddin Adullah tgl 21 Desember 2009
- 2 Rapat Pemeriksaan Prof.Dr.Miranda Goletom tanggal 21 Desember 2009
- 3 Rapat Pemeriksaan Anwar Nasution tgl 21 Desember 2009
- 4 Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Dr. Boediono tanggal 22 Desember 2010
- 5 Rapat Pemeriksaan Maman Sumantri dan Rusli Simanjuntak tanggal 6 Januari 2010
- 6 Rapat Pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristina tanggal 7 Januari 2010
- 7 Rapat Pemeriksaan Mentkeu Sri Mulyani tanggal 13 Januari 2010
- 8 Rapat Pemeriksaan Susno Djuadi tanggal 20 Januari 2010

Tabel 6.15 Unit Analisis Bentuk pertanyaan Rapat audiensi, angket, interen, RDPU

No	Nama Rapat	1		2		3		4		5		6		7		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
	Bentuk Pertanyaan																
1	Menyanggah	0	0	1	0,25	4	1,01	3	0,75	0	0	20	5,03	2	0,5	30	7,54
2	Menyelidiki	2	0,5	43	10,8	2	0,5	0	0	3	0,75	31	7,79	9	2,26	90	22,61
3	Klarifikasi	0	0	4	1,01	1	0,25	2	0,5	0	0	7	1,76	16	4,02	30	7,54
4	Memberi masukan	9	2,26	5	1,26	28	7,04	24	6,03	11	2,76	18	4,52	27	6,78	122	30,65
5	Kombinasi	7	1,76	1	0,25	11	2,76	14	3,52	5	1,26	11	2,76	12	3,02	61	15,33
6	Lain-lain	0	0	6	1,51	5	1,26	0	0	0	0	16	4,02	38	9,55	65	16,33
	Jumlah	18	4,52	60	15,1	51	12,8	43	10,8	19	4,77	103	25,88	104	26,1	398	100

Keterangan

- 1 Rapat audiensi tanggal 10 Desember
- 2 Rapat angket 2 (Konsultasi dengan PPATK tgl 17 Desember 2009
- 3 Rapat angket 3 bank century 16-12-2009)
- 4 Rapat angket 4 panitia hak angket 22-12-2009
- 5 RDPU JKN 071209
- 6 Rapat intern 1 tagl 26 Januari 2010
- 7 Rapat intern 1 Maret 2010

Tabel 6.16 Unit Analisis Berdasarkan Narasumber Rapat Tim Kecil Bank Century

No	Nama Rapat	1		2		3		4		Jumlah	
		F	P	F	p	F	p	F	p	F	P
1	Menyanggah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Menyelidiki	4	5,06	0	0	0	0	0	0	4	5,06
3	Klarifikasi	1	1,27	1	1,27	0	0	1	1,27	3	3,8
4	Memberi masukan	15	19	10	12,7	10	12,7	10	12,7	45	57
5	Kombinasi	8	10,1	5	6,33	1	1,27	2	2,53	16	20,3
6	Lain-lain	2	2,53	5	6,33	0	0	4	5,06	11	13,9
	Jumlah	30	38	21	26,6	11	13,9	17	21,5	79	100

Keterangan

- 1 Rapat timkecil 191209 (rapat tim kecil panitia hak angket)
- 2 Rapat Tim Kecil (Panitia Hak Angkat 20 Februari 2010
- 3 Rapat pleno kecil pengusutan bank century tanggal 22 Februari 2010
- 4 Rapat timkecil (rapat tim kecil panitia hak angket)th 220210

Berdasarkan Tabel di atas, peserta rapat Bank Century , khususnya pada rapat pemeriksaan peserta rapat sebagian besar banyak melakukan penyanggahan tentang apa yang disampaikan pemerintah. Bisa jadi perdebatan yang muncul di ruang sidang inilah menjadi titik awal terjadinya disinformasi terkait dengan kasus Bank Century. Kalau dikaitkan dengan Tabel 5.23 di mana responden 79 % mempunyai pendapat bahwa berita politik yang disiarkan oleh media televisi sangat mungkin akan menyesatkan karena kepentingan politik dan kontrol penguasa.

Contoh suasana sidang yang pertanyaannya menyanggah:

MANTAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI (PROF. DR. ANWAR NASUTION):

Jadi pada waktu Orde Baru itu kita tahu bahwa kebijakan perkeriditan itu adalah kredit selektif. Pemerintah melakukan arah pengurangan kredit dan juga sehubungan subsidi. Setelah krisis kita beralih kepada system yang bermarket pasar. Jadi pemberian kredit itu didasarkan pada dasar pemilihan berhak kami kekuatan modal, kemampuan usaha, karakter dan lain sebagainya. Dan juga pengawasan pemeriksaan itun didasarkan kepada resiko yang dialami oleh perbankan itu.

KETUA RAPAT:

Saya potong dulu Prof. Jadi jabatan Pak Anwar sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, ya?

MANTAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI (PROF. DR. ANWAR NASUTION):

Betul.

KETUA RAPAT:

Itu sejak tahun?

MANTAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI (PROF. DR. ANWAR NASUTION):

Sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004.

Kutipan Pemeriksaan yang pertanyaannya mengarah pada upaya menyelidiki

MANTAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI (PROF. DR. MIRANDA S. GOELTOM):

Saya mengenal baru belakangan-belakangan, beberapa tahun yang lalu pada saat beliau beberapa kali datang hari raya, bukan kemana-mana. Hari raya tahun baru di Bank Indonesia itu biasanya atau itu.

F-PDI PERJUANGAN (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Apakah Ibu pernah bertemu dengan RAR (Rafat Ali Rifi)? Karena dalam wawancara yang dipublikasikan secara luas tanggal 12 Oktober 2009, rapat mengatakan kami sangat difasilitasi oleh Ibu didalam urusan Bank Century ini?

MANTAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI (PROF. DR. MIRANDA S. GOELTOM):

Dia saja diangkat, ajak kesini bersumpah. Saya tidak tahu dia siapa? Tidak pernah fasilitasi dia.

F-PDI PERJUANGAN (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Ibu tidak pernah bertemu Rafat Ali?

..... (Risalah rapat pemeriksaan Mantan Deputy Bank Indonesia Miranda Goeltom)

Adakalanya dalam rapat-rapat di DPR pertanyaan yang diajukan tidak substansial atau tidak sesuai topik. Lihat tabel 6.19, 6.20, 6.21. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansial bisa jadi juga menjadi sumber terjadinya disinformasi politik. Bahkan ada kalanya pertanyaan tidak relevan dengan persoalan yang dibahas. Hal-hal ini terkadang justru sering terekam oleh media.

Tabel 6.17 Unit Analisis Subtansi Pertanyaan Rapat Pemeriksaan Bank Century

No	Kecenderungan sidang	Nama Rapat																
		1		2		3		4		5		6		7		8		Jumlah
	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	173	8,18	131	6,2	76	3,6	107	5,06	22	0	498	23,6	230	10,88	670	31,7	1907	90,21
2	13	0,62	4	0,19	4	0,19	11	0,52	35	1,66	125	5,91	7	0,331	8	0,38	207	9,79
Jumlah	186	8,80	135	6,39	80	3,79	118	5,58	57	1,66	623	29,5	237	11,21	678	32,1	2114	100

Keterangan

- 1 Rapat Pemeriksaan Burhanuddin Adullah tgl 21 Desember 2009
- 2 Rapat Pemeriksaan Prof.D.r.Miranda Goletom tanggal 21 Desember 2009
- 3 Rapat Pemeriksaan Anwar Nasution tgl 21 Desember 2009
- 4 Rapat Pemeriksaan Mantan Gubernur BI Prof.Dr. Boediono tanggal 22 Desember 2010
- 5 Rapat Pemeriksaan Maman Sumantri dan Rusli Simanjuntak tanggal 6 Januari 2010
- 6 Rapat Pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristina tanggal 7 Januari 2010
- 7 Rapat Pemeriksaan Mentkeu Sri Mulyani tanggal 13 Januari 2010
- 8 Rapat Pemeriksaan Susno Djuadi tanggal 20 Januari 2010

Tabel 6.18 Unit Analisis Kecenderungan Sidang Rapat audiensi, angket, interen, RDPU

No	Nama Rapat	1		2		3		4		5		6		7		Jumlah	
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	Sesuai topik	13	3,29	57	14,4	47	11,9	43	10,89	6	1,52	84	21,3	63	15,95	313	79,2
2	Tidak sesuai topik	4	1,01	3	0,76	3	0,76	0	0	13	3,29	18	4,56	41	10,38	82	20,8
	Jumlah	17	4,3	60	15,2	50	12,7	43	10,89	19	4,81	102	25,8	104	26,33	395	100

Keterangan

Rapat audiensi tanggal 10

- 1 Desember
- 2 Rapat angket 2 (Konsultasi dengan PPATK tgl 17 Desember 2009)
- 3 Rapat angket 3 bank century 16-12-2009)
- 4 Rapat angket 4 panitia hak angket 22-12-2009
- 5 RDPU JKN 071209
- 6 Rapat Intern I tagl 26 Januari 2010

Tabel 6.19. Unit Analisis Berdasarkan Substansi Pertanyaan Rapat Tim Kecil Bank Century

No	Nama Rapat	1		2		3		4		Jumlah	
		F	P	F	p	F	p	F	P	F	P
1	Sesuai topik	18	27,69	16	24,6	6	9,23	11	16,92	35	53,8
2	Tidak sesuai topik	12	18,46	5	7,69	5	7,69	8	12,31	30	46,2
	Jumlah	30	46,15	21	32,3	11	16,9	19	29,23	65	100

Keterangan

- 1 Rapat timkecil 191209 (rapat tim kecil panitia hak angket)
- 2 Rapat Tim Kecil (Panitia Hak Angkat 20 Februari 2010)
- 3 Rapat pleno kecil pengusutan bank century tanggal 22 Februari 2010
- 4 Rapat timkecil (rapat tim kecil panitia hak angket)th 220210

Contoh arah pertanyaan yang tidak sesuai topik :

F-PDI PERJUANGAN (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Tetapi di Notulen Rapat, sayang ini kita tidak mau melangkah KSSK. Saya membatasi ini, tetapi Saya ingin sampaikan kepada Bapak notulen-notulen rapat KSSK sangat jelas dan Bapak dalam posisi yang sangat rentan, karena kata “insolvensi” tiba-tiba menguat.

Baik, yang terakhir kepada Pak HERU KRISTIANA. Pak Heru ini spealis menilai-nilai agunan ya Pak ya? Ya paling tidak, silakan Pak.

DIREKTUR PENGAWASAN BI (HERU KRISTIANA):

Ya, sepanjang karir Saya memang Saya di pengawasan dan pemeriksaan bank Pak.

F-PDI PERJUANGAN (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Jadi, artinya kalau meminjamkan, inikan mau memberikan fasilitas pinjaman jangka pendek Pak. Bapak pernah belajar itu 5C?

DIREKTUR PENGAWASAN BI (HERU KRISTIANA):

Ya.

F-PDI PERJUANGAN (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Boleh, mungkin sudah lupa ya? Tidak ya? Apa Pak?

DIREKTUR PENGAWASAN BI (HERU KRISTIANA):

5 C itu Capital, Capacity.

Melalui paparan di atas, kebebasan pelaku media mendapatkan informasi memang memberikan keuntungan pada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa besar yang mempunyai potensi terjadinya pembentukan opini publik. Media tidak bisa dilarang untuk mendapatkan informasi mengingat pekerja media telah dijamin oleh

undang-undang untuk menjalankan untuk mendapatkan informasi.

“Tidak ada yang bisa melarang wartawan untuk mendapatkan berita dan memuat satu berita. Namun tetap dalam koridor peliputan yang profesional. Wartawan walaupun sudah diberi kebebasan tetap harus mendasarkan pada Kode Etik Jurnalistik. Demikian pula dalam hal peliputan sidang-sidang DPR maupun peristiwa-peristiwa politik,” ujar Pengurus Dewan Pers Wina Armada ketika ditemui di Jakarta.

Namun tatkala ditanyakan, dampak bagi masyarakat bila siaran atau pemberitaan yang konflik-konflik politik yang terlalu terbuka terhadap tingkat partisipasi politik, kepercayaan pada masyarakat atau bisa memicu kerusuhan, Wina mengatakan semua membutuhkan proses. Artinya, masyarakat perlu diberikan kesadaran untuk memilih berita yang sehat. Namun jangan sampai persoalan politik yang berkembang di tingkat suprastruktur politik kemudian dijadikan alasan untuk mengekang kebebasan pers.

“Pendidikan politik terhadap masyarakat harus tetap jalan tetapi di sisi lain jangan sampai mengekang kebebasan pers. Justru peristiwa politik yang terekam media inilah menjadi proses pendidikan politik bagi masyarakat,” ujar Wina.

Nina Armando dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ketika ditemui di Jakarta mengemukakan, pihaknya tidak bisa melarang sebuah stasiun televisi akan menyiarkan satu berita atau tidak. Persoalan konten yang akan menangani adalah Dewan Pers, KPI akan mengawasi dari aspek penyiaran. Kalau sebuah fakta politik yang diberitakan dan menonjolkan sisi yang bisa memicu perilaku kekerasan atau memicu konflik-konflik horizontal maka KPI bisa menegur. Ia mencontohkan, liputan tentang konflik Mbah Priok dimana aksi kekerasan massa diulang-ulang ditayangkan.

Dalam tataran ini, maka dinamika kebebasan pers harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme media dalam mencari, mengolah dan bagaimana *gatekeeper* melakukan seleksi atas informasi yang ditulis oleh media. Pada dasarnya, bias informasi yang berakibat disinforamasi politik, bisa terjadi dari tataran sumber berita yang dipilih wartawan, fakta-fakta dari sekian fakta yang ada.

Dalam kasus politik dit ataran nasional, maka kepentingan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas komunikasi politik juga menjadi sumber terjadinya disinformasi politik. Penyimpangan terhadap materi yang dibahas, kecenderungan pernyataan yang disampaikan, kelompok yang mendominasi komunikasi politik menjadi pemicu terjadinya disinformasi politik.

Dalam dunia politik segala upaya untuk memenangkan persaingan adalah hal yang lumrah. Segala cara akan ditempuh salah satunya adalah memanfaatkan media. Semakin sering seorang muncul di media diharapkan masyarakat mengenal sosoknya, dampak lebih jauh kalau nantinya akan mencalonkan diri dalam kompetisi politik masyarakat tidak merasa asing.

Sistem pemilihan umum yang dilakukan secara langsung dan berdasarkan suara terbanyak memang mengharuskan seorang calon dikenal oleh masyarakat. Proses untuk bisa dikenal membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu ajang untuk mempromosikan diri calon yang akan menduduki jabatan politik tidak bisa hanya pada saat kampanye pemilu –sebagaimana pada pemilu 2009 – .namun melalui berbagai sarana. Rentang waktu antara satu pemilu menuju pemilu berikutnya yaitu lima tahun, maka para kandidat politik satu partai perlu memanfaatkan berbagai event, media sebagai alat mempromosikan dan mengkomunikasikan ide dan inisiatif politik mereka. Harapannya, masyarakat akan mempunyai persepsi positif tentang mereka.

Dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan kandidat partai yang duduk di DPR pusat maupun daerah memerlukan ruang untuk memasarkan inisiatif politik, gagasan, isu politik, ideology bahkan kepentingan mereka dan kelompoknya. Perubahan mekanisme system pemilihan pejabat publiklah menjadi pendorong kuatnya kebutuhan akan ruang tersebut.

Bukan hal yang aneh pula, bila kita meliha DPR dinamika komunikasi politik antar actor dalam stuktur politik demikian cepat. Tuntutan akan transparansi atas kinerja wakil rakyat ini memberikan kebutuhan akan satu media yang bisa menggambarkan bagaimana mereka bekerja dan berjuang untuk menggoalkan ide-ide mereka.

Sidang-sidang DPR yang biasanya berlangsung secara tertutup kecuali sidang pleno, saat ini dilaksanakan secara terbuka. Isu-isu politik sensitive yang berkecenderungan menimbulkan disinformasi politik dengan gamblang bisa dilihat di berbagai media.

Mengapa menimbulkan disinformasi politik? Mengingat sidang-sidang di DPR yang sifatnya masih premature karena masih minta keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bertikai sudah diberitakan. Padahal, proses sidang di DPR relative lama, disisi lain kontinuitas media memberitakan juga tidak sama. Misalnya, kasus Bank Century yang menghiasi media massa relative cukup lama tidak semua sidang di DPR yang berlangsung terbuka tersebut disiarkan langsung oleh televisi, atau diberitakan secara lengkap oleh media lainnya. Disinilah letak potensi terjadinya disinformasi politik terhadap kasus-kasus politik besar yang dibahas oleh DPR.

Disinformasi politik yang muncul juga tampak bagaimana anggota DPR dalam mencerca berbagai pertanyaan kepada pihak yang dimintai keterangan, seperti mantan Menkeu Sri Mulyani, Mantan Gubernur BI Prof. Dr. Budiono, dll. Tatkala perdebatan ini di ruang sidang dimunculkan di media secara langsung yang terjadi adalah pemahaman adanya tarik menarik kepentingan terhadap kelompok tertentu. Memang, hal yang lumrah bila dalam politik akan terjadi tarik menarik kepentingan. Mengingat, dunia politik adalah satu aktivitas yang menyangkut perebutan dan distribusi kekuasaan.

Ciri dunia politik (Firmansyah, 2008) pertama, adanya masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, dunia politik memiliki institusi legal yang menyusun interaksi social di dalamnya. Institusi bisa partai politik, parlemen, public dan media. Ketiga, politik memiliki aturan main legal dan etika yang mengatur interaksi actor-aktor politik. Aturan main ini penting guna menghindari terjadinya konflik yang tidak masuk akal. bagaimanapun juga interaksi antar actor politik pasti ada konflik kepentingan.

Hanya saja, bila konflik antar actor tersebut disajikan secara terbuka itu disajikan secara langsung tanpa sensor (karena siaran langsung-red) maka akan menimbulkan disinformasi dan

menggabungkan persoalan substansial yang dibahas di DPR. Bahkan akan menjadi pertunjukan “teater” yang tidak seharusnya terjadi.

Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus-kasus politik yang besar yang dibahas di DPR adalah konflik kepentingan kelompok tidak dikelola dengan baik, aturan dan etika politik semakin kabur. Masyarakat, bisa dengan mudah melihat bahwa isu-isu politik yang besar seperti Bank Century, Susno Djuaji, Cicak VS Buaya sarat dengan kepentingan kelompok (lihat hasil bab V) yang sangat mudah dibaca arahnya.

Kalau ini yang terjadi maka ruang yang dibutuhkan aktor politik untuk menyalurkan ide-ide politik, pemikiran politik dan diharapkan akan mengangkat citranya di masyarakat menjadi berbelok. Ketidaksiawaian dalam mengelola pesan politik untuk merespon satu isu politik justru akan memperburuk pencitraan mereka di masyarakat.



BAB VII

DISINFOMASI BERITA POLITIK DAN MEDIA MASSA: INTEPRETASI

7.1. Kausalitas Disinformasi Berita Politik

Dari uraian bab-bab sebelumnya, terdapat posisi-posisi penting, yang menjelaskan berbagai sebab dan hubungan-hubungan, yang menjadikan pemberitaan politik yang dilakukan media, bersifat disinformatif. Pertama, praktek-praktek yang dilakukan media itu sendiri. Ini mencakup dimensi yang sangat luas, dari level individu yang mencerminkan aspek-aspek individu seperti usia, pendidikan, jender, orientasi dan afiliasi politik, keterlibatan keorganisasian dan partai politik, orientasi agama sampai pada level rutinitas media yang mengakibatkan ketergantungan pada narasumber atau pun pada pola-pola baku, hingga sampai pada level organisasional, dan level ideologi.

Pada setiap level di dalam media, di mana materi pemberitaan dikumpulkan, diputuskan dan disiarkan, berada di dalam proses-proses taktis, substantif atau pun pragmatis. Dengan perkataan lain, proses produksi teks media, dan proses-proses distributifnya mau tidak mau, berada di dalam praktek-praktek diskursif (*discursive practices*) yang luas, tidak hanya mencakup budaya *newsroom* yang terbatas, melainkan budaya *newsroom* itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kepentingan yang berasal dari bermacam-macam pihak di luar institusi media itu sendiri.

Terdapat berbagai macam pola interaksi yang ada dan tumbuh di dalamnya yang menimbulkan berbagai macam dilema. Dilema antara norma-norma profesional dengan norma-norma bisnis; dilema antara norma-norma profesional dengan norma-norma hiburan, serta dilema dalam kekuatan-kekuatan yang mengontrol yang datang dari berbagai arah. Akibatnya ranah yang menjadi domain para jurnali sering kali terjadi silang sengkabut atau pun carut marut karena gagal membedakan ranah informatif pemberitaan yang mengedepankan kepentingan publik dengan ranah hiburan atau pun komersial.

Sementara praktek-praktek diskursif ini pun sesungguhnya terjadi hampir pada setiap level praktek media. Kunci dalam memahami persoalan ini adalah proses-proses interaktif dialektif yang bersumber pada kepentingan-kepentingan yang berbeda di setiap levelnya dan antar level yang ada. Sementara berbagai sumber kepentingan yang berbeda itu memunculkan persoalan siapa memanfaatkan apa di dalam pemberitaan dan politik pengemasan berita sehingga menimbulkan disinformasi pemberitaan. Di dalam berbagai situasi, semua pihak berusaha mendapatkan kepentingannya masing-masing.

Itulah kenapa, lebih mudah memahami bila ternyata pandangan-pandangan yang ada dalam peserta FGD dan *workshop* yang mengemuka menyatakan bahwa disinformasi pemberitaan politik, terjadi di dalam budaya kerja media itu sendiri dan sebagai keniscayaan. Bahkan ada yang percaya bahwa pemberitaan yang disinformatif membuat masyarakat dapat memberi interpretasi dan pemahaman secara kritis. Mereka tidak lebih mudah percaya terhadap pemberitaan tanpa disertai skeptis terlebih dulu. Sebab terdapat banyak faktor seperti kepentingan jurnalis, kepentingan redaktur di atas kepentingan para jurnalis, serta kepentingan pemilik modal terhadap semua kebijakan perusahaan yang mengikat semua karyawan, dipandang sebagai faktor-faktor penyebab disinformasi berita politik.

Sesungguhnya pandangan yang berbicara tentang kompetensi dan kapabilitas jurnalis, kode etik jurnalistik dan sumber-sumber etika lain yang diacu di dalam praktek dan kerja media, tidak lain

membicarakan level individu sebagai level yang paling dasar di dalam memahami karakteristik isi media serta merupakan cara di dalam upaya membaca, yakni kenapa disinformasi berita politik terjadi dan dilakukan media.

Para peserta FGD dan workshop percaya bahwa dengan kembali kepada kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki para jurnalis serta dengan kembali berkiblat pada kepentingan publik serta mempertimbangkan norma dan kode etik yang ada, pemberitaan yang bersifat disinformatif dapat dicegah. Namun, bila dicermati, pemberitaan yang bersifat disinformatif, faktor kemampuan dan kompetensi jurnalis bukan merupakan satu-satunya penyebab. Bahkan dalam berbagai tarik ulur kepentingan itu, banyak persoalan yang berada di luar jangkauan pemahaman dan pengertian para jurnalis. Dengan demikian, posisi mereka sebenarnya sangat rentan di dalam berbagai interaksi yang terjadi.

Pada level individu, sebagaimana telah diuraikan dan terungkap di dalam FGD dan *workshop*- mencakup segi-segi yang luas. Disinformasi pemberitaan politik dapat terjadi pada tahap awal yakni pada jurnalis yang ada di lapangan. Mereka merupakan ujung tombak yang langsung bertemu narasumber atau peristiwa sebagai fakta pemberitaan. Disinformasi pemberitaan politik sudah dapat terjadi sejak pada saat pengumpulan dan pemilihan fakta.

Selain hal ini sebagai keniscayaan, karena dihadapkan pada karakteristik media yang dibatasi oleh ruang dan waktu, namun seringkali, keputusan untuk melakukan apa yang dikumpulkan dan apa yang dipilih, lebih ditentukan oleh kepentingan dan sudut pandang yang dinilai relevan oleh jurnalis sendiri yang tidak sepenuhnya oleh pertimbangan profesionalitas. Mereka bekerja dengan ruang halaman atau siar yang terbatas dan ditentukan batas waktu yang saling berburu dan berkejaran.

Dalam apa yang dipandang relevan oleh jurnalis di dalam melakukan seleksi dan pengumpulan data, belum tentu dianggap relevan oleh pihak yang berkepentingan yang berbeda. Mereka berusaha menyajikan kebenaran dan informasi kepada publik, tetapi tidak semua kebenaran dan informasi itu dapat disajikan dengan

keterbatasan dan pilihan yang harus mereka lakukan.

Ada banyak variabel yang dapat dimasukkan di dalam kasus dan level ini. Seperti yang juga telah diuraikan bahwa para jurnalis itu sendiri adalah pekerja dalam sebuah organisasi perusahaan media. Oleh karena itu, di dalam menjalankan pekerjaannya, selain dipandu oleh prinsip-prinsip baku dan standar jurnalistik, ia adalah seorang manusia yang juga membutuhkan kesejahteraan.

Hubungan-hubungan yang terjadi dan terjalin di lapangan antara jurnalis dan narasumber seringkali menimbulkan dilema dan ketegangan-ketegangan di dalam melakukan pemilihan dan pemilahan fakta pemberitaan. Pola hubungan yang rutin terhadap narasumber yang dihadapi oleh para jurnalis, apalagi narasumber tersebut merupakan figur yang mempunyai kekuasaan politis dan ekonomi dapat mengakibatkan kepekaan dan tingkat ketajaman pemberitaan menjadi tumpul. Dalam relasi rutin tersebut posisi seorang jurnalis dapat terkooptasi sehingga fakta yang didefinisikan, seringkali tidak mengikuti alur dan logika kepentingan publik, melainkan menjadi kepentingan narasumber itu sendiri.

Dalam banyak hal, cara memperoleh informasi sebagai fakta pemberitaan politik telah menjadi ritual dan seremonial yang terlihat ketika para jurnalis berhadapan dengan narasumber yang selalu berulang-ulang sama, mendapatkan bahan *press release* yang tidak dijadikan acuan lebih jauh untuk melakukan penelusuran; menghadiri *press conference* yang diterima sebagai *take for granted* dengan mengabaikan konteks yang membentuknya; atau pun dari bahan-bahan pidato yang kemudian diolah secara instan yang untuk selanjutnya disajikan di media. Atau, penyajian itu dilakukan hanya berdasarkan kronologis dan alur kejadian yang kurang memberi dan meredakan ketidakpastian serta kebutuhan informasi publik.

Padahal sumber-sumber pemberitaan semacam itu, yakni *press release*, *press conference*, upacara seremonial, dan materi pidato misalnya, umumnya diberikan telah dikemas untuk kepentingan dan pencitraan tertentu. Dengan demikian, besar kemungkinannya pesan tersebut telah dikonstruksi sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan tertentu yang secara inklusif mengabaikan perseptif dan

keluasan informasi yang lain. Apalagi yang informasi yang dianggap kurang menguntungkannya akan jauh disampaikan sebagai sebuah kenyataan. Di dalam konteks seperti itu, kecil peluangnya terdapat keberagaman pemikiran dan pandangan sehingga masyarakat dapat menilai tingkat kebenaran dan akurasinya.

Posisi jurnalis di lapangan yang berhadapan langsung dengan narasumber dan peristiwa yang menjadi fakta pemberitaan, bila dicermati lebih jauh, sampai terjebak pada pola rutinitas yang tidak berkembang, tidak merupakan faktor yang berdiri sendiri. Di dalam diri jurnalis, apakah dinilai sebagai sesuatu yang tampak dan langsung berpengaruh pada peluang terjadinya disinformasi, faktor pendidikan dan berbagai lekatan yang ada pada dirinya, memberi sumbangan besar di dalam cara melakukan pembingkaihan terhadap fakta yang dilihatnya.

Pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan jelas merupakan faktor-faktor penting yang sering dilihat untuk menjelaskan adanya disinformasi pemberitaan politik. Ini tidak selalu berarti bahwa pendidikan, pengalaman dan ketrampilan yang tinggi pasti akan memperkecil terjadinya disinformasi pemberitaan. Sebab antara pendidikan, pengalaman dan ketrampilan yang tinggi dengan yang rendah, keduanya dapat melakukan pemberitaan politik yang disinformatif. Mereka yang pandai dapat secara sadar memanfaatkan kekuatan media yang mereka kelola untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Namun sebaliknya, mereka yang kurang berpendidikan pun mempunyai peluang yang sama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan politis pihak lain tanpa disadarinya. Ini tergantung seberapa besar godaan kepentingan yang ingin dicapainya serta seberapa besar tawaran-tawaran yang ada saling menguntungkan kedua belah pihak.

Disinformasi pemberitaan politik dapat terjadi pada rutinitas media secara keseluruhan. Sebagian khususnya menyangkut pola ajeg perilaku jurnalis yang karena menyangkut kapabilitas dan kemauan, sebenarnya, adalah rutinitas media pula. Namun demikian, pembicaraan rutinitas media sebagai penyebab disinformasi pemberitaan politik, tidak cukup dan memadai bila hanya melihat

pada pola ajeg yang dilakukan para jurnalis. Ada banyak segi yang tercakup di dalamnya. Pertama, rutinitas dalam sumber pemberitaan. Kedua, pandangan terhadap khalayak sebagai konsumen yang juga merupakan bagian dari rutinitas dan pola orientasi kerja mereka. Ketiga, persoalan nilai berita dan struktur penulisan serta penceritaan.

Masing-masing dari aspek ini memiliki konsekuensi di dalam melakukan pengemasan pemberitaan. Memang, pada satu sisi, standarisasi dan rutinitas media, akan memudahkan kerja dan mempercepat hasil yang diinginkan seiring dengan tuntutan waktu yang menjadi karakteristik dari produk media, yakni membutuhkan kecepatan (aktualitas) dan memiliki *lifespan* yang pendek. Di sisi lain, orientasi yang menitikberatkan pada kecepatan yang berdasarkan pada pola-pola ajeg apalagi yang bertumpu pada kepentingan pasar, dapat menjadi jalan masuk terjadinya pemberitaan yang disinformatif. Kualitas pemberitaan yang dihasilkan pun masih jauh dari *deep structure* yakni semacam struktur terdalam yang ada di balik wacana dan informasi.

Dalam tingkatan tertentu, seringkali tidak jelas, mana yang disebut sebagai nilai berita (*news value*) dengan pemberitaan yang menjual (*what sells*) sebagai komoditas. Munculnya sensasionalisme dan dramatisasi pemberitaan setidak-tidaknya muncul dari ketegangan kepentingan tersebut. Sementara, dramatisasi dan sensasionalisme sering dituduh sebagai penyebab mengaburnya esensi informasi yang diberitakan dan karenanya dapat menyesatkan.

Keduanya, yakni dramatisasi dan sensasionalisme mempunyai tujuan utamanya adalah membangun ketertarikan dan perhatian, yang digerakkan oleh kekuatiran ditinggalkan oleh khalayak pemirsa atau pembacanya. Kerancuan-kerancuan dalam menempatkan ranah mana yang disebut ranah publik dan informasi publik dengan mana yang merupakan ranah hiburan dan komersial, muncul dari kondisi-kondisi semacam ini yang menyumbang pada terjadinya disinformasi pemberitaan.

Di dalam tradisi dan dunia jurnalistik, tampaknya sudah terdapat semacam dogma dan prinsip-prinsip yang aksiomatik di dalam memandang sesuatu sebagai berita dan nilai berita yang dianut.

Misalnya *bad news is good news*. Berita yang buruk adalah berita yang baik. Contoh yang lain: *Big names make big news*. Nama besar membuat berita besar. Prinsip-prinsip semacam itu, disadari atau tidak, ternyata bertali temali dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam media.

Seperti ungkapan bahwa *bad news is good news* sangat relevan dengan tujuan-tujuan bisnis. *Bad news is good news* merupakan sebuah komoditas yang akan menghasilkan sensasional dan dramatisasi pemberitaan yang mengaburkan esensi informasi. Demikian pula, orientasi jurnalis pada nama besar dan populeritas mengakibatkan pemberitaan yang disajikan adalah elitis dan terbatas serta hanya terpaku pada figur dan tokoh yang sering pula mengabaikan esensi dan kepentingan yang lebih luas. Pada gilirannya pemberitaan itu hanya merupakan kegaduhan politik yang bersifat selebritas yang jauh dari esensi informasi yang dibutuhkan publik atau masyarakat. Kegaduhan ini diperparah dengan kondisi banyaknya aturan main politik yang saling kontradiktif dan saling menafikan.

Tentu saja penilaian para jurnalis dalam menilai sesuatu sebagai berita, tidak terbatas pada persoalan tersebut. Namun, yang pokok di dalam paparan ini hendak dijelaskan bahwa prinsip-prinsip di dalam menilai sesuatu sebagai berita dan mengandung nilai berita, sebagai sesuatu yang baku dan rutin yang menjadi acuan para jurnalis.

Demikian pula rutinitas terjadi menyangkut struktur penulisan pemberitaan. Struktur penulisan 5W+ 1H sendiri tidak mempunyai proporsi yang sama di dalam penekanannya sehingga kesan pemberitaan terkesan artifisial. Sebab bila dicermati, setiap elemen formula tersebut mengandung konsekuensi dan implikasi, pada segi apa dan yang mana yang ingin di dalami. Segi *what* tentu mempunyai dimensi dan sisi implikasi pendalamannya terhadap unsur *why, who, where* dan seterusnya. Keinginan untuk menyajikan semua unsur, pada gilirannya menghasilkan sajian ringkas yang cukup mengarahkan pada khalayak hanya tahu dan berhenti di situ saja.

Lebih jauh, para jurnalis umumnya tidak melaporkan kejadian, melainkan menceritakan sebuah cerita kejadian. Mereka tidak

membangun fakta dan data, melainkan menyodorkan spekulasi dan asumsi serta kecurigaan. Sekalipun satu dari peserta FGD, hal ini dianggap penting serta menilai bahwa disinformasi pemberitaan politik sebagai keniscayaan. Kecerdasan masyarakat justru dipicu oleh sikap-sikap media yang bersifat spekulatif dan asumsi yang berdasarkan pada kecurigaan tertentu.

Rutinitas terjadi juga pada narasumber dan ketergantungan media terhadap sumber media lain. Secara teoritis, media pemberitaan mempunyai sumber-sumber pemberitaan yang tidak terhitung sebagai bahan mentah seperti melalui observasi, kepustakaan dan *polling* sehingga kualitas informasi yang disajikan jauh lebih baik dan mendalam. Namun secara praktis, mereka cenderung tergantung pada sebagian besar melalui *interview* individu bagi informasi yang mereka peroleh.

Seperti yang telah diuraikan bahwa saluran-saluran rutin yang umumnya digunakan oleh para jurnalis di dalam pemberitaannya mencakup bahan prosiding resmi baik di dalam peristiwa pengadilan atau pun di dalam dengar pendapat di dewan legislatif; *press release*; *press conference*; pengadilan, kepolisian, kejaksaan, kejadian-kejadian spontan seperti pidato, ceramah, seremonial dan seterusnya. Sumber-sumber tersebut menunjukkan semakin besarnya kontrol informasi bukan dari sudut pandang kepentingan publik, melainkan dari kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu.

Ini dapat berasal dari mana saja, seperti industri, parlemen, kementerian dan departemen, juru bicara kepresiden, ketua organisasi sosial atau pun politik. Semua memiliki kecenderungan dan mempunyai kebijakan pengemasan pesan yang diperuntukkan kepada media. Hubungan ini diperkuat dengan pengembangan yang apa mereka sebut sebagai *media relations*. Ada kecenderungan di dalam konsep-konsep *media relations* yang dikembangkan di dalamnya, pihak-pihak berkepentingan, perlu memelihara hubungan baik dengan media, bagi pencitraan sepihak mereka.

Ketergantungan media terhadap sumber-sumber rutin tersebut, mau tidak mau media menjadi mengikuti mereka dalam hal cara bagaimana sumber-sumber pemberitaan tersebut memberikan definisi

terhadap sesuatu. Pada tingkatan tertentu, mereka mendiktekan informasi terhadap apa yang perlu dimuat dan apa yang tidak perlu dimuat berdasarkan keterangan-keterangan yang mereka berikan. Sementara para jurnalis itu sendiri tidak cukup waktu untuk melakukan pendalaman lebih jauh karena dituntut waktu dan jam siar. Bila tidak demikian sudah cukup percaya dengan apa yang mereka terima berdasarkan hubungan-hubungan yang memang sudah terjalin dengan baik. Hubungan ini bersifat subjektif dan karenanya mempengaruhi pertimbangan di dalam mendefinisikan nilai dan artinya pentingnya pemberitaan.

Pengaruh kekuatan lain yang menjadikan pemberitaan politik bersifat disinformatif adalah dari pemilik modal media. Pandangan-pandangan kritis terhadap besarnya pengaruhnya pemilik modal media terhadap isi media sangat besar dan tajam. Mereka mengingatkan bahwa pengaruh itu sangat terasa pada berbagai kebijakan redaksional, penyediaan ruang bagi iklan, serta intervensi terhadap isi bila menyangkut kepentingan-kepentingan pemilik modal.

Televisi dapat mendapat tekanan dari pemilik-pemiliknya, perusahaan-perusahaan yang membayar iklan, pemerintah yang memberi subsidi dan seterusnya. Faktor-faktor ini, dalam pandangan Bourdieu misalnya sebagai mekanisme yang tidak tampak di dalam berbagai jenis sensor di televisi yang menjadikannya sebagai instrumen untuk menjaga tatanan simbolik.

Dalam analisisnya Bourdieu menunjukkan adanya paradoks antara apa yang disajikan dengan apa yang disembunyikan (*show and hide*). Ia menyatakan bahwa media televisi menyembunyikan sesuatu dengan menunjukkan sesuatu dari apa yang seharusnya ditunjukkan. Artinya bila diamati betul, media televisi melakukan seleksi terhadap aspek yang sangat spesifik terhadap kategori-kategori yang tertentu sebagai sebuah cara mereka melihat sesuatu. Kategori-kategori ini dapat merupakan produk dari pendidikan, sejarah, budaya dan seterusnya yang membentuk pola pikir dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan terhadap realitas yang terjadi di sekelilingnya

Namun hal yang penting dari pandangannya adalah bahwa prinsip determinasi terhadap seleksi ini adalah dalam rangka mencari sensasi dan spektakuler yang ditujukan untuk kepentingan komoditas dan ekonomi. Televisi mencari dramatisasi dalam dua hal. Pertama meletakkan kejadian pada panggung dan keduanya menempatkannya pada suatu image/citra tertentu. Dengan dua hal tersebut, suatu kejadian dapat menjadi serius, dramatik bahkan tragis.

Seperti telah dijelaskan bahwa media televisi mempunyai kapasitas khusus untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai *reality effect* yakni menunjukkan sesuatu dan menjadikan orang-orang percaya terhadap apa yang ditontonkan. Kekuatan pada tontonan ini adalah kekuatan untuk memobilisasi, massifikasi, dan audivisual. Televisi dapat memberi kehidupan suatu gagasan atau citra-citra tertentu. Kehidupan sosial primer dideskripsikan dan dipreskripsikan oleh televisi secara sewenang-wenang. Ironisnya, kepercayaan khalayak pemirsa televisi membuat keberadaan media televisi menjadi lebih percaya diri terhadap keberadaannya.

Kekuatiran terbesar pada masalah ini terletak pada logika ekonomi yang mendiktekan isi pemberitaan. Sudut pandang pemberitaan bisa saja ditekan oleh pemilik modal media untuk selalu dikaitkan dengan kepentingan ekonomi. Masalah ini menjadi semakin mempersempit indenpedensi para jurnalis ketika pemilik modal media juga merupakan tokoh dan figur dalam sebuah partai politik tertentu. Dengan perkataan lain, pada satu segi mereka dituntut untuk melakukan asimilasi terhadap kepentingan bisnis pemilik modal di dalam pemberitaannya, di segi lain, mereka juga harus menjaga dan memelihara reputasi dan pencitraan pemilik modal dalam kancah politik di mana pertarungan kepentingan terjadi.

Pembicaraan-pembicaraan semacam ini mencuatkan dua pemilik media televisi sebagai contoh yakni Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri. Keduanya pernah menjadi rivalitas dalam pencalonan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena kepentingan-kepentingan itu, Metro TV cenderung menunjukkan keberpihakannya kepada Surya Paloh sedangkan TV One cenderung menunjukkan keberpihakannya kepada Abu Rizal Bakri. Contoh kasus lain,

misalnya ketika terjadi polemik dan perseteruan antara Bakri dengan Sri Mulyani. Pada tingkatan tertentu, TV One melakukan pembingkaiannya pemberitaan yang cenderung memberi pembelaan terhadap pemiliknya.

Segi-segi ini secara garis pokoknya, yang sering dipertimbangkan kenapa pemberitaan yang bersifat disinformatif terjadi. Proses interaksi dari berbagai kepentingan yang terjadi di dalam media sendiri telah menimbulkan persaingan-persaingan, gesekan-gesekan kepentingan dan mempengaruhi kebijakan redaksional pemberitaan.

Faktor kedua adalah unsur-unsur yang berada di luar media yang mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu terhadap media serta menyadari betul tentang karakteristik media dan kekuatannya. Sebagaimana dipahami bahwa setiap kepentingan itu bersaing. Di dalam setiap persaingan itu membutuhkan sarana untuk memenangkannya. Sedangkan kekuatan komunikasi merupakan salah satu jalan penting bagi kemenangan pertarungan kepentingan yang ada. Kekuatan komunikasi dengan penciptaan opini publik misalnya, mampu membangun *political construction dan political framing* yang dapat menonjolkan sekaligus meminggirkan rivalitas-rivalitas kepentingan yang lain.

Pandangan pejabat publik dan masyarakat di luar institusi media terhadap peran media massa sendiri penting dalam menentukan hubungan kepentingan-kepentingan mereka pada satu sisi, sedangkan sisi lain dengan pemanfaatannya. Di dalam negara demokratis seperti AS, para pejabat pemerintah dan publik, menurut beberapa studi yang telah dilakukan menyetujui kalau peran media massa mencakup menginformasikan, melakukan interpretasi dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan pejabat negara.

Sementara publiknya, juga memandang peran media massa khususnya pers didapatkan bahwa hampir setiap orang menyetujui kalau media massa sangat penting di dalam kehidupan mereka dalam mendapatkan informasi dan memahami apa-apa yang terjadi di sekitar mereka (Martin, 1981: 448). Dengan demikian, setiap pihak masing-masing mempunyai kesadaran untuk saling memanfaatkan

kekuatan yang dimiliki masing-masing terhadap media.

Untuk itu, hubungan-hubungan yang terjadi di seputar media dan kekuatan-kekuatan di luar institusi media, lebih menunjukkan kekuatan dan fungsi yang dijalankan media massa serta pemahaman tentang pemanfaatannya bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Sebuah cara yang dilakukan biro-biro pemerintah dan politisi mengontrol kegiatan pers misalnya adalah dengan memberikan atau menahan akses berita dan akses terhadap sumber berita di tengah kesimpangsiuran aturan dan kelembagaan politik.

Ini berarti kerumitan yang terjadi berlapis-lapis. Lapis pertama, kekacauan informasi dapat terjadi karena adanya pertarungan kepentingan. Kedua, kekacauan informasi karena mereka dihadapkan pula oleh kesimpangsiuran kelembagaan dan aturan sehingga menimbulkan bentuk-bentuk pesan dan keterangan yang saling kontradiktif dan berbenturan.

Mereka memiliki kepiawaian di dalam mengatur dan mengendalikan jenis informasi apa yang dibutuhkan dan diminati. Ini merupakan bagian penting temuan di dalam penelitian ini, yang melihat bahwa pemberitaan disinformatif sebenarnya terjadi tidak hanya bersumber dari institusi media, tetapi oleh berbagai permainan-permainan kepentingan yang mau tidak mau melibatkan komunikasi sebagai salah satu sumber kekuatan yang dipakai untuk mendapatkannya.

Seperti pada awal paparan penelitian telah dijelaskan bahwa ketidaklengkapan, ketidakakuratan atau pernyataan palsu tidak dikategorikan sebagai disinformasi bila tidak ada unsur tujuan. Semua bentuk ketidakakuratan, ketidaklengkapan atau pernyataan palsu yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu dapat dikatakan sebagai disinformasi. Derajat disinformasi terjadi ketika sumber menyajikan informasi yang dipilih untuk menyesatkan, mendistorsi, atau menyalahgunakan target dengan tujuan menyesatkan. Adanya banyak cara penyesatan ini dilakukan, misalnya dengan memberikan argumen dan alasan palsu, menyembunyikan kebenaran, memberi bukti yang tidak relevan dan sebagainya.

Sementara itu, kompetisi kelompok kepentingan untuk memastikan agenda kebijakan dan kepentingannya pun terjadi sangat tajam dan keras. Sebab tidak ada masyarakat atau sistem politik manapun di dunia yang mempunyai kapasitas institusional yang mengarahkan semua alternatif-alternatif yang ada kepada semua masalah yang muncul. Kelompok kepentingan, elit politik atau aktor politik harus bertarung untuk menempatkan isu-isu mereka di antara isu-isu yang lain. Di lain pihak, banyak para jurnalis di dalam konteks tersebut hanya menempatkan diri sebagai penonton tanpa mampu memahami akar persoalan pokok dan apa yang menjadi kepentingan publik dari pertarungan kepentingan semacam itu.

Bagi mereka yang bertarung bahkan selalu berusaha ketika isu-isu tersebut telah mendapatkan perhatian publik, masih harus berjuang untuk memastikan bahwa gambaran mereka terhadap isu yang mereka perjuangkan masih tetap berada di jajaran depan di antara isu-isu yang lain. Alasannya sangat jelas sebagaimana dinyatakan oleh Schattschneider yang menyatakan bahwa kelompok, elit politik atau aktor politik yang sukses mendeskripsikan masalah mereka adalah orang-orang yang akan menentukan pemecahannya dan karena itu mereka yang akan mendominasi perdebatan dalam proses pengambilan keputusan (Birkland, 2001: 106). Lazimnya, mereka yang berhasil mendominasi perdebatan dan menentukan keputusan dan pemecahannya adalah yang akan mengontrol kekuasaan. Kekuatan mereka semakin besar ketika media memperbesar eskalasi isu di dalam pemberitaannya.

Setiap komunitas dan setiap organ pemerintah, seperti parlemen, eksekutif, yudikatif, komisi negara dan seterusnya mempunyai sejumlah isu yang ada bagi perdebatan, diskusi atau pun disposisi. Semua isu dapat dikategorisasikan berdasarkan perluasan yang dilakukan institusi yang dipersiapkan untuk membuat keputusan supaya dijalankan dan diimplementasikan atau untuk menolak kebijakan-kebijakan tertentu.

Dalam pandangan Birkland (2001) bila gagasan dalam agenda sistemik ini berhasil dielevasikan, maka agenda ini bergerak menjadi agenda institusional yang menjadi pertimbangan serius bagi para

pengambil keputusan di dalam kekuasaan pemerintahan. Dalam kenyataannya, hanya sedikit isu yang akan mencapai agenda keputusan (*decision agenda*). Tidak semua agenda-agenda kelembagaan menjadi agenda keputusan. Umumnya, agenda keputusan merupakan abstraksi atau saripati dari agenda-agenda kelembagaan. Untuk itu, pertarungan-pertarungan semacam ini, dapat ditemukan di berbagai badan dan lembaga baik politik, birokratis, sosial atau keagamaan. Mereka umumnya memperjuangkan isu-isu kepentingannya, menjadi agenda kebijakan hingga menjadi agenda keputusan.

Faktor ketiga adalah disinformasi berita tidak jarang dihasilkan oleh kondisi kesimpangsiuran aturan main atau kisruhnya aturan main yang saling bertentangan satu sama lain. Karena batas antas privat dan publik, antara negara-rakyat tidak pernah jelas maka pencampuradukan selalu tak terhindarkan. Akibatnya, masing-masing berargumen dan berangkat dari aturan main masing-masing, sementara aturan yang satu dengan aturan yang lain, tidak saja bertentangan, tetapi sekaligus menimbulkan potensi konflik kepentingan. Sedangkan, *policy makers* tidak mungkin mengetahui semua variable dan konsekuensi dari pilihan-pilihannya sehingga apa yang ia bicarakan dan sampaikan hanya berpedoman kelaziman ketentuan yang biasa dijalannya, tanpa mempertimbangkan bahwa apa yang dipahami dan dijalankan itu berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang lain. Untuk yang menjadi bidangnya, mungkin saja tidak semua persoalan dikuasai dan dimengerti, apalagi apa yang menjadi lingkup di luar bidang dan kompetensinya.

7.2. Disinformasi Pemberitaan Politik: Jalan Masuk

Dengan paparan di atas, disinformasi dan misinformasi dalam berbagai situasi dan kondisi sangat mungkin terjadi. Seperti telah diuraikan bahwa misinformasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai *false, mistaken* atau *misleading information*. Disinformasi berbuntut pada distribusi, pernyataan atau penyebaran informasi yang *false, mistaken* atau yang *misleading* dengan tujuan-tujuan menyesatkan, membohongi atau membingungkan.

Dipahami pula bahwa pada kenyataannya banyak sumber-sumber disinformasi yang diketahui (*overt disinformation*) tetapi kadang-kadang pula sumber-sumber disinformasi ini bersifat tertutup dengan tidak ada identifikasi atau dengan memberi identifikasi yang menyesatkan (*covert disinformation*). Pada umumnya kuantitas dan kualitas disinformasi sukar untuk dinilai tetapi dapat dipandang kurang lebih sebagai tindakan membohongi. Penjelasan ini kembali menegaskan bahwa sumber informasi dapat berasal dari siapa dan apa saja bahkan sumber tersebut dapat jelas atau tersembunyi.

Untuk itu, berikut ini identifikasi yang dapat disajikan berdasarkan data-data penelitian yang dicermati terhadap jalan dan terbukanya kemungkinan disinformasi pemberitaan politik terjadi di dalam media yang didasarkan dari berbagai data-data penelitian yang dikumpulkan baik yang berasal dari deskripsi keterangan dari para narasumber, hasil analisis dari berbagai bahan rekaman serta penyebaran kuesioner.

7.2.1. Fungsi Agenda Media

Fungsi agenda media dapat menjadi sebab terjadinya disinformasi pemberitaan politik. Ini berhubungan dengan hambatan teknis dan mekanistik yang melekat pada media yang dibatasi oleh ruang dan waktu, jumlah halaman atau jam siar serta karakteristik *product media* yang *lifespan*-nya sangat singkat. Untuk itu, semua pekerja media dihadapkan pada pilihan-pilihan di dalam menentukan fakta dan kejadian di lapangan dengan waktu yang sempit dan ruang keleluasaan yang terbatas. Proses seleksi sebagai fungsi agenda media ini dapat menimbulkan pengabaian fakta dan mementingkan fakta tertentu. Proses seleksi ini berimplikasi pada frekuensi dan intensitas pemberitaan yang tertuju pada hal-hal tertentu sehingga umumnya tidak mencakup semua segi yang komprehensif di dalam pemberitaan dan pembingkaiian pemberitaan politik. Sedangkan pembingkaiian terhadap pemberitaan ini mencerminkan berbagai proses selektif yang dilakukan oleh para *gatekeeper* media.

Meskipun mereka berada pada sebuah lingkungan dan peristiwa yang tidak terbatas. Namun, sebagai hal yang tidak

mungkin, jika semua tersebut dikumpulkan dan disajikannya. Mungkin, mereka telah menyajikan kebenaran, tetapi tidak semua kebenaran dapat dikumpulkan dan disajikannya.

Pergeseran perhatian dapat terjadi. Apa yang dipilih dan dipilah wartawan di lapangan ketika berhadapan dengan peristiwa dan narasumber sebagai fakta pemberitaan, tidak sepenuhnya, terjamin tidak mengalami perubahan kembali. Hasil pemilihan dan pemilahan ini masih harus melewati berbagai saringan-saringan lain pada tingkat dan struktur yang lebih tinggi seperti redaktur pelaksana sampai pada pemimpin redaksi.

Perubahan-perubahan semacam ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan redaksi pada elit media. Di dalam proses dan alur di mana materi pemberitaan menjadi sangat matang dan siap untuk disajikan, terdapat proses yang harus dilewati melalui pintu *gatekeepers* sehingga apakah berita yang ingin disiarkan itu benar-benar pasti, termasuk konsekuensi legal bila hal itu disiarkannya.

7.2.2. Kepentingan Individu Jurnalis

Seperti yang diketahui bahwa para jurnalis yang ada di lapangan adalah individu-individu yang berhadapan langsung dengan kejadian-kejadian atau narasumber. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang jurnalis tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan yang melekat. Pandangan-pandangan yang ada menunjukkan bahwa faktor dan tingkat kesejahteraan para jurnalis yang ada di dalam lapangan, menjadi sebab mereka mencari jalan sendiri, di dalam memperjuangkan kepentingannya, di atas jalan dan pekerjaannya sebagai jurnalis.

Untuk itu, mereka menjalin hubungan-hubungan krusial dengan berbagai narasumber penting yang memiliki akses kekuasaan politis dan ekonomis yang luas yang dicerminkan bagi kepentingannya sendiri. Dalam konteks hubungan dan kepentingan itu, apakah di bawah kondisi atas kesadaran atau ketidaksadaran, kebijakan personal pemberitaan terhadap narasumber yang telah terjalin baik, cenderung menghindari pemberitaan yang menimbulkan pencitraan yang negatif serta cenderung tunduk terhadap apa yang

diinginkan oleh narasumber.

Pemberitaan disinformatif terjadi ketika fakta dan nilai pemberitaan tidak lagi diarahkan kepada kepentingan publik, melainkan memberi jaminan bahwa pemberitaan itu mengikuti apa yang diinginkan oleh narasumber. Ketidakteguhan para jurnalis dalam menolak keinginan narasumber disebabkan telah terjadinya hubungan-hubungan subjektif. Mengurai persoalan ini, tidak sederhana. Relasi-relasi semacam ini karena bersifat tumpang tindih, antara kepentingan pribadi, baik dari sisi jurnalis atau pun dari sisi narasumber, juga tumpang tindih antara tugas profesional dan kepentingan pribadi.

7.2.3. Rutinitas dan Ketergantungan Narasumber

Pola-pola rutin dan ketergantungan terhadap narasumber yang tetap dapat mengakibatkan lemahnya kesadaran dan ketajaman terhadap substansi pesan yang disampaikan. Banyak para jurnalis berada di tempat-tempat tertentu untuk narasumber dan kejadian yang sama, tokoh-tokoh yang sama, lokasi-lokasi yang sama, dan cara-cara yang sama. Misalnya mereka yang ada di kepolisian, di parlemen, di Kejaksaan, kepresidenan dan seterusnya.

Mereka mengharapkan keterangan dari tokoh narasumber yang dinilai paling kompeten dari pola rutin kegiatan mereka dan tidak mempersiapkan betul terhadap apa yang akan digali informasinya dari narasumber yang mereka hadapi. Tingkat ketergantungan yang tinggi dan percaya begitu saja, menjadi jalan masuk bagi terjadinya disinformasi pemberitaan politik. Pemberitaan semacam ini cenderung bersifat selebritas dan hanya merupakan sebuah kegaduhan, yang kemudian senyap tanpa meninggalkan pengertian yang mendalam.

Besar ketergantungan terhadap narasumber mengakibatkan tingkat kepercayaan yang diberikan jurnalis kepada mereka bersifat tanpa *reserve*. Dalam posisi demikian, posisi jurnalis dan media hanya berfungsi melakukan translasi tanpa melakukan interpretasi dan penggalian pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh narasumber. Dalam konteks ini sebenarnya, yang terjadi adalah bahwa para jurnalis disadari atau tidak jauh dari memiliki kompetensi

dan upaya yang lebih keras dalam melihat relevansi pesan yang disampaikan oleh narasumber.

7.2.4. Pengaruh Pemilik Media

Banyak persoalan terkait isi media dipengaruhi dan diintervensi oleh pemilik media sepanjang itu menyangkut kepentingannya. Pengaruh logika ekonomi dan logika politik sering mengintervensi kemandirian kebijakan redaksional. Dalam banyak segi kebijakan program siaran atau kebijakan redaksi pemberitaan, tidak semata-mata ditentukan oleh kebutuhan informasi publik, yakni apa yang sedang diharapkan, melainkan, apakah perhatian publik tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi pengelolaan industri media yang dikelolanya. Khalayak pemirsa lebih ditempatkan sebagai konsumen dari pada ditempatkan sebagai publik. Seperti yang dijelaskan kedudukan publik lebih diikat oleh wacana rasional, sedangkan posisi konsumen lebih ditempatkan dalam kaitannya dengan apa mendapatkan keuntungan apa dari mereka.

Dengan demikian, kemasan dan komposisi halaman, penempatan, volume pemuatan, proporsisi pemberitaan, seberapa banyak iklan harus ditempatkan, serta seberapa jauh pemberitaan dimaksudkan untuk kepentingan personal, semua dapat diintervensi oleh pemilik media. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan logika ekonomi yang diambil telah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh semua karyawannya termasuk para jurnalis. Pengaruh ini juga dapat dirasakan bila pemilik media sekaligus adalah tokoh atau selebritas politik sehingga pesan-pesan politik yang menjadi konsep pemikiran dan garis perjuangan pemilik media dapat terjabarkan di dalam kepentingan-kepentingannya.

Kekacauan menempatkan ranah dan domain pemberitaan sering terjadi di dalam tarik ulur kepentingan ekonomi politik tersebut. Dalam praktek-praktek jurnalistik, prinsip dan standar kompetensi sering dicampur-baurkan antara ranah hiburan dan komersial dengan ranah yang lebih serius terutama dalam ranah kepentingan publik. Akibatnya, terdapat kerumitan-kerumitan tertentu di dalam menentukan mana yang serius, mana yang menjadi bahan lelucon

dan tertawaan serta mana yang memang penting bagi kepentingan publik. Banyak hal sesuatu yang serius dan penting, menjadi sebuah sensasionalitas karena tuntutan kepentingan ekonomi politik. Kondisi ini semua umumnya dikacaukan oleh kepentingan dan logika bisnis yang melekat pada media.

7.2.5. Kesimpangsiuran Aturan Main Politik dan Kelembagaan

Peraturan dan aturan main politik yang saling bertolak belakang dan berbenturan satu dengan yang lain serta kedudukan dan peran kelembagaan politik yang tumpang tindih mengakibatkan penjelasan dan informasi yang diberikan berbeda-beda meski untuk persoalan yang sama. Dalam budaya politik dan organisasi birokratis di Indonesia, hal ini menjadi semacam sangat umum terjadi. Pada satu sisi, hal ini memberi keberagaman pandangan, namun keberagaman pandangan tersebut, dikuatirkan justru tidak mengarah pada kristalisasi informasi yang dibutuhkan, melainkan menjadi semacam kegaduhan informasi, yang tidak jelas ujung dan pangkal permasalahannya. Hal yang tampak adalah masing-masing narasumber membuat pernyataan yang memoralisasi kepentingan dan diri mereka sendiri.

Problem flow of information di dalam aturan main politik dan problem struktural kelembagaan politik, tidak jarang diwarnai oleh keinginan untuk memproteksi kepentingan-kepentingan sektoral yang mereka miliki masing-masing. Akibatnya, apa yang dituduhkan baik dari sisi kelembagaan atau pun dari aturan main politik, semua dapat disembunyikan ke dalam aturan dan kelembagaan yang memang telah simpang siur dengan mensahkannya sebagai sesuatu yang prosedural dan resmi.

Ini celah di mana terjadinya disinformasi sekaligus menjadi jalan bagi terbuka praktek-praktek korupsi dan korupsi terhadap informasi. Dalam tingkatan dan kondisi semacam ini, akuntabilitas informasi sulit diharapkan karena masing-masing berpedoman terhadap lingkup dan bidang yang dipayungi oleh aturan main dan kelembagaan. Perdebatan ini juga mengarahkan pada pandangan

bahwa yang namanya kebijakan tidak dapat dihukum, karena dilakukan berdasarkan pada aturan dan prosedur serta konteks situasi yang terjadi. Namun dalam situasi-situasi tertentu, seringkali ini menjadi jalan untuk terjadinya pemilintiran terhadap fakta dengan bersembunyi di atas aturan dan permainan yang saling kontradiktif di dalam lembaga-lembaga politik.

Disinformasi pemberitaan politik terjadi di dalam kondisi dan situasi di mana kesimpangsiuran aturan main dan kelembagaan politik tidak teruraikan. Sementara para jurnalis sendiri, kurang cukup berdaya dan waktu di dalam mencermati kerumitan dari kesimpangsiuran aturan main yang sering diplintir (*spin*) dengan bersembunyi secara kelembagaan politik oleh para pelaku yang umumnya pula dijadikan narasumber pemberitaan.

7.2.6. Kompetisi Dalam Industri Media

Produksi informasi secara massif yang menandai lahirnya sebuah masyarakat informasi mengakibatkan banjirnya informasi (*information overload*). Dengan perkataan lain, informasi secara sadar diproduksi secara massal. Pertama, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa. Kedua, melihat informasi sebagai komoditas yang menjanjikan, yang kemudian menjadi sebuah entitas ekonomi dan industri. Kecuali produksi informasi ilmiah, dunia juga dibanjiri oleh produksi informasi dari jaringan komunikasi massa global, regional dan nasional yang menghasilkan dan menyebarkan informasi hiburan dan komersial yang jauh lebih banyak setiap harinya misalnya siaran tv yang sehari penuh dari puluhan ribu stasiun televisi.

Industri hiburan misalnya televisi, radio, film, koran, majalah, internet, musik, fashion, adalah contoh-contoh industri mengandalkan pada informasi. Dalam bidang politik, munculnya konsultan-konsultan politik, pejabat Public Relations, juru bicara, lembaga riset politik seperti lembaga polling juga merupakan industri yang mendasarkan pada informasi.

Dalam posisi demikian, banyak yang melihat hal ini sebagai hal yang lebih banyak *mudharat* dari pada manfaatnya. Seorang

redaktur *Future Survey* Michael Marien mengatakan bahwa dalam banjir informasi, pengetahuan atau informasi yang benar-benar dapat memberi arah kepada masyarakat justru semakin berkurang jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah informasi hiburan dan komersial. Banyak informasi yang mirip-mirip dan diproduksi secara massal, namun tidak mempunyai fungsi di dalam meredakan ketidakpastian dan tidak benar-benar memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat.

Ciri menonjol dari persoalan ini adalah sifat *ubiquitos* yakni keseragaman informasi yang dilakukan media. Sifat ini mengacu para perilaku media yang menyajikan informasi secara berulang-ulang, perhatian yang berlebihan, eksploitasi yang berlebihan, dan mengabaikan unsur ketercukupan kebutuhan informasi. Bila semua media melakukan tindakan-tindakan serupa karena adanya persaingan di dalam mendapatkan materi pemberitaan, pemasangan iklan dan merebut perhatian khalayak sebagai konsumen, membawa akibat terjadinya informasi yang melimpah, yang sering mengacaukan dan mengaburkan esensi informasi yang diperlukan.

7.2.7. Penciptaan Opini Publik

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ketika opini publik yang tercipta dihubungkan dengan berbagai aktivitas politik baik mereka yang berada di badan legislatif, yudikatif, eksekutif dengan tujuan-tujuan politik yang ingin mereka capai, maka kekuatan opini publik ini dapat menjadi cara yang dapat digunakan untuk membentuk agenda-agenda politik serta dapat menjadi kekuatan bagi upaya mencapai kepentingan-kepentingannya.

Opini publik dan aktivitas politik dapat diarahkan untuk melakukan konstruksi politik (*political construction*) yang diselaraskan dengan tujuan yang ingin dicapai (Nimmo, 1978: 9-10). Dengan kekuatan semacam itu, kekuatan opini sering digunakan untuk mengesampingkan alternatif dan hal-hal yang relevan kecuali sesuatu yang diinginkan di dalam opini itu sendiri.

Kekuatan opini publik terlihat sangat nyata ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tersedia di dalam melihat alternatif-

alternatif sebagai landasan di dalam proses pengambilan keputusan. Kekuatan opini yang bersifat mayoritas, tidak saja dapat menindas opini yang bersifat minoritas, tetapi juga menjadikan orang merasa kuatir dan cemas ketika seseorang berada di dalam situasi yang dirasa tidak ada lagi ruang yang dapat menentang pandangan mayoritas ini. Dalam konteks ini, isu mayoritas mendominasi terhadap isu minoritas. Kekuatan opini publik terbentuk karena relasi yang terjadi antara apa yang dibicarakan masyarakat dan kekuatan yang dimiliki media massa.

Dalam situasi semacam itu, prinsip kebebasan berpendapat dan ketersediaan informasi yang beragam, menjadi terhenti oleh kekuatan dan dominasi informasi yang terbentuk dalam opini tersebut. Akibatnya seseorang memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan opini yang dimilikinya dan diam.

Masalahnya adalah tidak semua opini mencerminkan informasi yang benar. Saat dimana opini publik tidak mencerminkan informasi yang benar, telah terjadi penyimpangan informasi di tengah dominannya opini yang ada. Hal yang paling dikuatirkan adalah bahwa opini publik ini merupakan rekayasa (*social engineering*) yang dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu.

Sementara para jurnalis, kurang mampu melihat desain pesan dari narasumber dan pandangan masyarakat sebagai cara mereka di dalam mengontrol dan mengendalikan informasi yang dibutuhkan. Persoalan ini satu posisi dengan posisi yang lain secara terkait, namun untuk melihat siapa memanfaatkan siapa, merupakan penelusuran yang tidak begitu mudah dilakukan. Hubungan antara elit politik pada satu sisi, hubungan dari pandangan-pandangan masyarakat pada sisi lain, tidak dengan sederhana menjelaskan hubungan-hubungannya dengan media massa yang sering dipahami sebagai kekuatan yang besar di dalam menciptakan opini publik.

Sekalipun demikian, dalam berbagai kenyataan, opini publik yang bersifat disinformatif baik sebagai akibat atau penyebab, sering tetap dipercaya sebagai kebenaran yang dipakai sebagai alat pengabsah di dalam memberi penilaian dan keputusan sesuatu. Penyimpangan informasi baik sebagai disinformasi atau pun sebagai

misinformasi dapat dikarenakan sengaja diciptakan atau pun karena ketidakmampuan dalam melihat persoalan dan inti masalah secara jelas. Ketidamampuan itu sendiri dapat berasal karena ketersediaan informasi yang terbatas sehingga memang tidak mampu mereduksi sejumlah ketidakpastian atau karena ketidakmampuan mengaksesnya dan memahami inti persoalan.

Dengan kenyataan semacam itu yakni berbagai jalan yang menjadi penyebab terjadinya pemberitaan yang bersifat disinformatif, berbagai pemikiran tentang cara dan pemecahan terhadap upaya untuk mencegah terhadap disinformasi pemberitaan politik, mengarah pada dua persoalan pokok. Pertama, penguatan sumber daya para jurnalis yang melihat pada kapabilitas dan kompetensi profesionalitas sebagai seorang jurnalis, sedangkan kedua adalah upaya penguatan kelembagaan insitusi media.

Segi pertama, tetap menekankan pada komitmen dan konsistensi para pekerja media-jurnalistik bahwa domain mereka berada pada ranah kepentingan publik sehingga apa yang menjadi bidang garap dan pekerjaan mereka adalah ada pada informasi publik yang tidak dikacaukan oleh ranah dan domain informasi lain seperti hiburan dan komersial. Penguatan terhadap sumber daya bagi para jurnalis ini juga mencakup penguatan pada pengetahuan dan ketrampilan di dalam mengejawantahkan norma dan kode serta etika jurnalistik, meluaskan kemampuan analisis, keberagaman narasumber, serta kemampuan di dalam memahami konteks permasalahan dan interpretasinya.

Pada capaian tertentu, para jurnalis dapat mengukur dan menentukan diri, apakah pemberitaan yang dilakukan hanya merupakan translasi dari fakta yang dikumpulkan, atau merupakan konstruksi dan interpretasi. Setiap cara di dalam bagaimana mereka menyajikan fakta pemberitaan seharusnya dipahami tentang implikasi yang ditimbulkan bagi kepentingan publik yang menjadi orientasi pokok di dalam menjalankan tugasnya.

Muara penguatan semacam ini berakhir pada kemandirian dan kemampuan para jurnalis di dalam mengemas peristiwa dan keterangan narasumber sehingga tidak terjadi pemberitaan yang

disinformatif. Kemandirian ini mempunyai pengertian, bahwa di dalam menjalankan tugas profesionalitasnya, ia tidak dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan yang datang dari berbagai arah seperti dari senioritas, pemilik media, narasumber, serta carut marut aturan politik dan kelembagaan yang ada kecuali mereka dituntun oleh kepentingan publik yang merupakan tujuan yang lebih besar dari pada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu yang menjadi subyek dan materi pemberitaannya.

Sementara penguatan kelembagaan media, mencakup pada kekuatan struktural dan semua sumber daya lembaga media yang ditujukan untuk mengikat dan mengembangkan kapasitas kelembagaan keorganisasian dan sumber daya manusia. Masalah-masalah yang sering timbul dalam hubungan antara lembaga media dan individu sebagai anggota organisasi adalah persoalan kesejahteraan. Hubungan antara agen (individu) dan struktur merupakan problem yang dilematik. Sebab kualitas organisasi akan mempengaruhi kualitas anggotanya, sedangkan kualitas anggota sebuah organisasi akan mempengaruhi struktur kelembagaan organisasi.

Dengan demikian, sumber daya organisasi media pada gilirannya akan menentukan corak sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Demikian pula sebaliknya, sumber daya manusia yang ada akan menentukan kualitas dan corak kelembagaan organisasi. Dalam pengertian ini, kelembagaan organisasi ini mencakup sifatnya sebagai organisasi perusahaan dan dalam sifatnya sebagai organisasi profesi yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Tabel 7.1
Sumber-Sumber Disinformasi
Dalam Pemberitaan Media

No	Sumber Disinformasi	Karakteristik Pemberitaan Disinformatif
1	Fungsi Agenda Setting	Adanya keterbatasan ruang dan waktu yang melekat pada media, pengumpulan dan penyajian media didasarkan pada proses seleksi . Pemberitaan yang disinformatif dapat terjadi ketika proses seleksi dilakukan.
2	Kepentingan Jurnalis	Hubungan-hubungan para jurnalis dengan narasumber menciptakan hubungan-hubungan yang bersifat subjektif. Jurnalis memperjuangkan kepentingannya sendiri di dalam relasi yang dibangun dan diciptakan dengan narasumber yang mempunyai kemampuan ekonomi dan politis yang luas.
3	Kepentingan Pemilik Media	Intervensi ekonomi politik yang dilakukan oleh pemilik media berkaitan dengan kepentingan-kepentingan subjektif mereka
4	Kesimpangsiuran Politik	Aturan dan permainan politik di lembaga-lembaga politik birokratis mengakibatkan terjadi ketidakjelasan informasi yang diberikan
5	Rutinitas dan Ketergantungan Narasumber	Mencakup pola standarisasi kerja dan tolok ukur, serta menyandarkan sumber berita dan peristiwa sebagai fakta di lapangan pada kegiatan yang rutin
6	Banjir Informasi Dalam Kompetisi Media	Produksi informasi yang melimpah, yang mengaburkan esensi pemberitaan, karena baur dengan kepentingan-kepentingan media sebagai entitas ekonomi dan industri
7	Pembentukan Opini Publik	Digunakan oleh pihak-pihak tertentu di dalam mengontrol pendapat umum sehingga tidak memberi alternatif bagi informasi-informasi lain yang minor yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu

7.3. Khalayak: Kesadaran terhadap Pemberitaan Disinformatif

Fakta penting di dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap perilaku khalayak di dalam menggunakan media serta pola-pola konsumsi mereka terhadap media khususnya media televisi terhadap pemberitaan politik. Pemahaman ini pada akhirnya menuntun peneliti sampai pada pemahaman bahwa khalayak

sebenarnya mempunyai kesadaran terhadap potensi yang dimiliki media di dalam melakukan pemberitaan politik yang disinformatif. Pada sisi lain, mereka juga mengerti bahwa media televisi dan media lain yang menjadi preferensi dalam memenuhi kebutuhan informasinya, telah memberi kejelasan terhadap pokok-pokok persoalan politik yang menjadi perdebatan para elit politik selama ini.

Ketersediaan media yang luas, selain memberi pilihan yang besar, tetapi sekaligus keterbatasan. Keleluasaan pilihan dengan adanya banyak media, pada gilirannya dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola hidup sehari-hari dari khalayak. Misalnya, khalayak dihadapkan pada pilihan media televisi yang beragam, dari *pay tv* (televisi berlangganan) sampai pada *free to air* (televisi bebas siar). Masing-masing akan memberi prioritas terhadap apa yang menjadi pilihannya. Sekali lagi pilihan ini seringkali disesuaikan dengan ritme dan pola hidup serta kebiasaannya. Oleh karena itu, pilihan media dan waktu yang digunakan untuk menyaksikan media televisi, pun mencerminkan kondisi seperti itu.

Dengan demikian, pilihan-pilihan utama khalayak pemirsa sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 5 misalnya, yang menempatkan RCTI, Trans TV, Metro TV dan TV One sebagai pilihan-pilihan pokok khalayak, mencerminkan pada prioritas-prioritas tertentu terhadap apa yang mereka perlukan serta kesesuaian dengan kegiatan dan orientasi yang dimiliki.



BAB VIII

KESIMPULAN

8.1. Kesimpulan

Ada simpulan-simpulan penting yang diperoleh di dalam penelitian ini, khususnya ketika melihat faktor-faktor yang mendeskripsikan adanya, pemberitaan politik yang disinformatif pada media. Gambaran umumnya telah dijelaskan bahwa pemberitaan yang disinformatif dapat bersumber dari media itu sendiri dan kekuatan-kekuatan kepentingan luar media. Dua kepentingan besar di antaranya yang mempengaruhinya adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Penyebutan kepentingan ekonomi dan politik, hanyalah sebagian dari banyaknya faktor itu, untuk menegaskan bahwa jalinan kepentingan yang ada, tidak sesederhana hanya dengan menyebut dua kepentingan tersebut.

Dengan demikian, kesimpulan ini lebih mencerminkan pada esensi pokok yang menjabarkan tentang pemberitaan politik disinformatif media daripada melakukan pengulangan paparan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan ini hanya menandai temuan-temuan pokok di dalam penelitian yang mendeskripsikan relasi-relasi penting dan kausalitas antara mana yang menjadi faktor-faktor penyebab dan mana yang menjadi faktor-faktor akibat ketika adanya pemberitaan yang disinformatif.

Pertama, baik yang bersumber dari media atau pun dari luar media, pemberitaan politik dapat bersifat disinformatif disebabkan adanya kepentingan. Berbagai bentuk kompetisi, persaingan dan konflik digerakkan oleh kepentingan-kepentingan yang ada, seperti pencitraan, perjuangan mendapatkan kewenangan, pendapatan tambahan, status quo, jabatan, dan kekuasaan. Upaya-upaya semacam itu sejauh yang dapat dimengerti telah memberi indikasi tentang sejauh mana kepentingan itu diperjuangkan serta sejauh mana kepentingan itu dikompromikan serta dipertentangkan.

Dalam hubungan itu, banyak benturan-benturan kepentingan memunculkan bentuk-bentuk komunikasi, yang dalam bentuknya dapat bersifat hakiki dan artifisial atau yang substansi dan yang periferial. Ketika persoalan ini merambah ke media, pemberitaan disinformatif muncul, karena media gagal menangkap inti persoalan di dalam pertarungan kepentingan itu dan bagaimana mereka merefleksikan kepentingan itu bagi kepentingan publik.

Kepentingan-kepentingan itu meliputi satuan yang baur, luas dan besar, yakni dari satuan kepentingan individu, kelompok, publik, atau pun masyarakat. Kepentingan ini ada yang berdiri sendiri, tetapi juga banyak pula yang berkaitan dan tali temali. Hubungan berbagai kepentingan yang berbeda di dalam satuan interaksi yang berbeda-beda dapat memproduksi pesan dan kualitas informasi yang tidak sama.

Interaksi berbagai kepentingan yang masuk di dalam proses pengumpulan informasi, pengolahan dan penyajiannya melibatkan pertarungan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Posisi yang terombang-ambing ini kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar media untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan media sedemikian rupa. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kepentingan terbesar yang mengakibatkan terjadinya disinformasi ini adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.

Kedua, di tengah klaim yang kuat dan keras bahwa media massa, di dalam konteks ini adalah pers (termasuk jurnalistik televisi), sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berekspresi

freedom of speech/freedom of expression serta kebebasan pers, ternyata kedudukan dan perannya yang dibanggakan sebagai kekuatan yang *powerful* dan sebagai kekuatan keempat di dalam pemerintahan adalah sangat rapuh dan rentan.

Artinya jargon dan asumsi-asumsi yang dipakai, yang menunjukkan dan dipakai untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan mereka bahwa pers sebagai pengawas dan melakukan kontrol sosial serta mempunyai kemandirian di dalam memberitakan, tidak sepenuhnya dapat dibuktikan oleh para pelaku media sendiri. Mereka dihadapkan pada ketidaksepakatan ketika mereka terlibat di dalam pertarungan kepentingan yang muncul misalnya terhadap arti nilai berita, keobjektifan, kebenaran, dan pembelaan terhadap kepentingan publik.

Dari berbagai level kelembagaan media atau secara personal di dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai jurnalis, mereka sering terjebak oleh kepentingan-kepentingan yang lebih sempit di seputar kepentingan mereka sendiri, dibandingkan kepentingan publik atau yang lebih idealis yang bertumpu pada kebenaran.

Dengan demikian, kedudukan pers secara paradigmatis, tidak dapat dilihat hanya pada satu sisi yang terbatas, misalnya hanya pada kemampuannya dalam menyajikan berita yang objektif, tidak bias, tetapi juga perlu ditunjukkan adanya kenyataan bahwa media dapat melakukan pemberitaan yang disinformatif. Pertentangan dan dilema di dalam pemberitaan bukan sesuatu yang mudah dihindari. Pengkajian terhadap isi media mencerminkan pengkajian adanya tarik ulur kepentingan terhadap fungsi dan peran media di dalam konstelasi politik yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran dan keobjektifan.

Simpulan penting yang ketiga adalah adanya pengakuan tentang perlunya penguatan-penguatan tertentu yang harus dilakukan bagi meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas para jurnalis. Ini dilakukan mencakup aspek kelembagaan dan struktural yang berkaitan dengan pekerjaan mereka serta adanya penguatan yang dilakukan secara personal terhadap para pekerja media tersebut.

Dalam pengertian itu, penguatan ini bila dilakukan harus memberi tekanan dari segi ekonomis, yakni kegiatan yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan dan kepastian terhadap jaminan-jaminan yang selayaknya mereka dapatkan ketika mereka bekerja dalam menjalankan tugas-tugas profesional sebagai seorang jurnalis. Selain itu, penguatan harus dilakukan pada ketrampilan dan pengetahuan yang akan meningkatkan kapabilitas mereka, serta pengembangan jaringan yang besar, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mereka.

Kemiskinan dalam arti ekonomis dan kemiskinan dalam artian ketidakmampuan para jurnalis seringkali dilihat sebagai jalan masuk bagi perilaku-perilaku yang menyimpang di dalam mengemban dan menegakkan keberpihakan pada kepentingan publik dan kebenaran di atas pertarungan kepentingan yang lain. Di balik idealisme-idealisme tertentu, rambu-rambu norma dan kode etik yang melandasi tindakan dan perilaku mereka di dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikannya, kerap kali tidak mampu membendung keinginan mereka untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan lain dan bujukan pihak-pihak tertentu.

Keempat, dalam konteks dan situasi tertentu, pemberitaan informasi yang bersifat disinformatif, bukanlah merupakan penyebab sebagaimana telah terlihat pada penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian di atas. Pemberitaan disinformatif bukan merupakan penyebab, melainkan sebagai akibat adanya kesimpangsiuran regulasi, ketentuan, aturan-aturan politik, serta keterlibatan para aktor politik, yang bersembunyi di balik aturan-aturan tersebut membuat pemberitaan-pemberitaan politik yang bersifat disinformatif merupakan akibat dari pada sebagai penyebab.

Dengan perkataan lain, pemberitaan politik disinformatif merupakan keniscayaan, bila tidak ada pembenahan dan perbaikan-perbaikan yang memadai terhadap berbagai macam kontradiksi dan ketidakteraturan regulasi serta permainan politik yang ada. Dengan demikian, tujuan perbaikan dalam konteks ini bukan pada apa yang dilakukan media, melainkan apa yang dilakukan negara dan pemerintah di dalam menjamin akuntabilitas informasi di dalam

permainan dan aturan politik yang ada.

Upaya ini langsung atau tidak langsung sebenarnya mengarah pada apa yang disebut sebagai keterbukaan dan transparansi informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cara yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pemberitaan politik yang disinformatif.

Kelima, selain penguatan-penguatan yang dapat dilakukan bagi upaya pencegahan dan meminimalisasikan terjadinya pemberitaan politik yang bersifat disinformatif, baik dilakukan pada media dan pada upaya peningkatan keterbukaan informasi, penguatan juga harus dilakukan pada penguatan khalayak sebagai subyek penerima dan pengguna informasi yang disajikan media. Asumsinya adalah, bila kesadaran dan daya kritis masyarakat sebagai khalayak pengguna media, terhadap pemberitaan-pemberitaan politik yang ada, dampak dari pemberitaan disinformasi, tidak akan terlalu serius. Masyarakat pada akhirnya tidak akan menerima berbagai macam bentuk rekayasa yang mencerminkan tindakan tujuan menghalalkan segala cara.

Namun begitu, ini pula yang menjadi argumen bahwa pemberitaan-pemberitaan yang disinformatif dapat memberi cara bagi masyarakat untuk bersikap kritis. Sekalipun pandangan-pandangan semacam ini, tampaknya benar, namun bila didalami lebih jauh tampak naif. Sebab, kecerdasan masyarakat tidak terjadi karena pemberitaan-pemberitaan disinformatif tersebut, melainkan adanya ketersediaan berbagai informasi yang saling bersaing dan bertarung.

Pada titik ini, masyarakat memberi penilaian berdasarkan pada preferensi dan kemampuan intelektual yang mereka miliki. Dengan perkataan lain, masyarakat sendiri telah mengembangkan kesadaran-kesadaran tertentu tentang potensi negatif, erotif dan disinformatif media di dalam menyajikan pemberitaan-pemberitaannya. Ada banyak hal yang melekat pada diri masyarakat sebagai khalayak untuk dapat menerima dan menolak berbagai bentuk pemberitaan-pemberitaan politik, baik yang berkualitas atau pun yang menyesatkan.

Jadi, butir-butir yang diuraikan di atas merupakan rangkaian yang saling berkaitan yang menjelaskan tentang pokok-pokok temuan

penelitian. Bila dicermati, temuan-temuan penting tersebut membawa implikasi ke berbagai arah, yakni pada implikasi kebijakan dan implikasi pada program.

8.2. Implikasi Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan bahwa penelitian ini memberi implikasi lebih lanjut tentang perlunya upaya-upaya tertentu, yakni upaya yang membawa perbaikan terhadap kualitas pemberitaan politik agar tidak terjadi pemberitaan yang disinformatif, juga mengandung konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang berada di dalam pengambilan keputusan baik yang berada di dalam media atau pun di luar media dalam kaitannya mencegah atau mengurangi cara-cara pemberitaan disinformatif pada media. Sebab seperti yang telah diketahui bahwa sumber-sumber pemberitaan disinformatif tersebut dapat berasal dari siapa dan kapan saja, personal atau institusional.

Implikasi yang disajikan di dalam penelitian ini tidak mengarah pada implikasi-implikasi yang merujuk pada konsekuensi-konsekuensi teoritik atau pun metodologis, melainkan lebih ditujukan dan diajukan untuk membangun proposisi-proposisi praktis yang langsung diarahkan pada perbaikan dan pencegahan terhadap pemanfaatan yang pihak-pihak tertentu sehingga tidak terjadi pemberitaan distortif dan erotif.

8.2.1. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini menunjukkan implikasi yang jelas pada perlunya kebijakan yang perlu ditempuh oleh beberapa pihak yang mempunyai keterkaitan dengan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi yang dilakukan media. Pertama, kebijakan yang dilakukan oleh media, yang mencakup perumusan dan implementasi dalam menegakan kemandirian media. Pemilik media, redaktur senior, dan semua proses gatekeeping media, perlu ditetapkan sebagai wilayah yang relatif steril dari intervensi. Dengan perkataan lain, kebijakan redaksional harus bebas dari intervensi dan kepentingan kecuali kepentingan publik.

Kedua, kebijakan dari pihak-pihak lain di luar media yang berhubungan dengan media, yakni menjamin adanya keterbukaan informasi dan penataan pola arus informasi dari lembaga-lembaga yang bersangkutan sehingga informasi yang diberikan merupakan informasi yang akuntabel. Ini berarti semua lembaga yang ada yang melakukan hubungan kemediaman semestinya melakukan perbaikan struktural beserta penataan peraturan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang fatal.

Ketiga, kebijakan yang mengatur tentang hubungan antara media dengan narasumber di dalam pemberitaan. Praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyesatan informasi perlu dihambat dengan kebijakan-kebijakan yang disepakati bersama antara media dan narasumber. Dengan demikian, narasumber mengetahui dan mengerti apa yang harus dilakukan kepada media, penghormatan, perlindungan, pengutamaan yang menjamin adanya keterbukaan dan pola arus informasi yang egaliter dan transparan. Demikian pula, para jurnalis mengetahui dan memahami bagaimana seharusnya memperlakukan narasumber di dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian pemberitaannya.

Semua bentuk kebijakan-kebijakan yang diuraikan tersebut merupakan implikasi dari penelitian ini. Upaya dan pengendalian terhadap pemberitaan-pemberitaan yang bersifat disinformatif sedikit banyak dapat dihambat dengan berbagai kebijakan-kebijakan tersebut. Sekalipun disinformasi pemberitaan politik, katakanlah sebagai keniscayaan, kebijakan-kebijakan tersebut setidaknya dapat mengkonstruksi dan menciptakan kondisi yang menentukan kualitas informasi yang diberitakan. Seperti yang diuraikan, dua ekstrem pemberitaan, yakni pemberitaan yang bohong, dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Demikian pula pemberitaan yang sangat terbuka, juga dapat menimbulkan dampak yang juga berbahaya bagi masyarakat. Penataan dan kebijakan redaksi yang memberi pencerahan dan kecerdasan bagi masyarakat merupakan bagian penting dari implikasi penelitian ini yang diwujudkan di dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh para stakeholder yang ada.

8.2.2. Implikasi Program dan Aksi

Implikasi kebijakan dengan sendirinya akan membawa konsekuensi pada implementasi dan aksi. Sebab tanpa aksi dan implementasi, kebijakan hanya akan menjadi rumusan-rumusan dan keputusan-keputusan yang tidak atau kurang mempunyai arti bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pemberitaan agar tidak terjadi pemberitaan yang bersifat diinformatif.

Secara umum program perbaikan dan peningkatan yang mendukung pada produksi informasi yang berkualitas dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, aksi dan program yang dilakukan di dalam media khususnya yang menggodok dan menyajikannya. Program dan aksi ini mencakup semua alur dan prosedur di dalam *newroom-gate keeping* media yang memastikan apakah sebuah informasi yang sudah dikumpulkan dapat disiarkan dan tetap konsisten tidak mengalami perubahan dan penyimpangan-penyimpangan tertentu. Program ini dapat merupakan program pemberdayaan atau merupakan penciptaan budaya organisasi pemberitaan.

Kedua, aksi dan program yang membangun sikap dan budaya di dalam menerima para jurnalis yang dilakukan pada pihak-pihak eksternal media. Aksi dan program semacam ini dimaksudkan untuk meminimalisasi politisasi informasi ketika mereka menghadapi para jurnalis dan politisasi informasi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Ini mempunyai arti penting ketika pemberitaan disinformatif dapat terjadi dari narasumber.

Aksi dan program ini secara teknis dapat diselenggarakan secara bersama sehingga antara media dan berbagai narasumber yang menjadi rujukan penting media dapat berdialog secara terbuka terhadap berbagai keterbatasan dan hambatan yang terjadi, baik teknis, politis atau pun ekonomis. Diskusi tersebut setidaknya-tidaknyanya dapat membuka pemahaman terhadap masing-masing ranah yang dapat terbuka secara bebas, terbatas atau sama sekali tidak dapat dimasuki. Hubungan yang bersifat terbuka atau tertutup tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan subjektif dan terbatas, melainkan pada kepentingan-kepentingan dari urgensi informasi yang

disajikan itu sendiri. Sepanjang informasi tersebut menyangkut kepentingan publik yang dapat disepakati, maka pemberitaan yang bersifat disinformatif semestinya tidak terjadi.

8.3. Saran

Usulan yang dapat diajukan di dalam akhir hasil penelitian ini adalah untuk tujuan membangun terciptanya dan terbangunnya kualitas informasi bagi masyarakat adalah penciptaan forum-forum yang lebih luas dan tersebar bagi kegiatan-kegiatan komunikasi yang egaliter dan terbuka. Secara instrumental hal ini sering disebut sebagai *public sphere*, namun sebenarnya, selain hal-hal itu, terdapat cara-cara yang institusional dengan mendayagunakan dan memaksimalkan fungsi-fungsi pemberitaan dan penyajian informasi yang berbasis pada komunitas dan kepentingan publik. Sekalipun keduanya, yakni *public sphere* dan lembaga-lembaga pemberitaan yang mandiri dan tidak berorientasi kepentingan ekonomi dan politis semata tersebut saling bersinergi dalam membangun menciptakan budaya informasi dan komunikasi yang lebih terbuka dan jujur.



DAFTAR PUSTAKA

- Altheide, David, "Iran vs US TV News: The Hostage Story Out of Content," in Doris A Graber, 1984, *Media Power in Politics*, Washington: Congressional Quarterly Inc
- Bagdikian, Ben H., 2004, *The New Media Monopoly*, Boston: Beacon Press
- Barendt, 1985, *Freedom of Speech*, New Jersey: Routledge
- Bell, Daniel, 1973, *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, New York: Basic Book
- Birkland, Thomas A., 2001, *An Introduction to the Policy Process Theories, Concepts and Models of Public Policy Making*, New York: M.E Sharpe
- Blummer, Herbert, 1969, *Symbolic Interaction Perspective and Method*, New Jersey: Prentice Hall
- Blumler, Jay G and Gurevitch, Michel, "Politicians and the Press: An essay on Role Relationships " in Dan D Nimmo and Keith R Sanders, 1981, *Handbook of Political Communication*, Beverly Hill: Sage Publication
- Bryant, Jennings and Zillman, Dolf, "A Retrospective and Prospective Look at Media Effect, in Robin L. Nabi and Mary Beth Oliver, 2009, *Media Processes and Effects*, London: Sage Publication
- Bungin, Burhan, 2001, *Imaji Media Massa*, Yogyakarta: Pustaka Karya
- Castells, Manuel, 2009, *Communication Power*, New York: Oxford University Press
- Carl, L., 1990, *The International Directory of Intelligence*, McLean, VA: International Defense Consultant Services
- Cobb, Roger W., and Elder, Charles D, "Mass Communication and Public Policy, " in Dan D Nimmo and Keith R Sanders, 1981, *Handbook of Political Communication*, Beverly Hill: Sage Publication
- Cohen, Bernard C, 1963, *The Press and Foreign Policy*, New Jersey: Princeton University Press
- Champion, T., 1998, *Budaya Konsumen*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dahlan, Alwi, 1997, *Pemerataan Informasi, Komunikasi dan Pembangunan*, Jakarta: FISIP UI

- Feith, Herbert, and Castle, Lance, 1970, *Indonesia Political Thinking*, Ithaca: Cornell University Press
- Fotana, Andrea and Frey, James H, " Interviewing: The Art of Science, " in Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication
- Fuss, D, 1989, *Essentially Speaking: Feminism, Nature and Difference*, London: Routledge
- Guba, Egon G and Lincoln, Yvonna S, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hill: Sage Publication
- Habermas, Jurgen, 1987, *The Theory of Communicative Action*, Boston: Beacon Press
- Hanazaki, Yasuo, 1998, *Pers Terjebak*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi
- Heath, Robert L and Millar, Dan P, " A Rhetorical Approach to Crisis Communication, Management, Communication Processes and Strategic Responses, in Robert L Heath and Dan P Millar, 2004, *Responding to Crisis A Rhetorical Approach to Crisis Communication*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
- Kaid, Lynda Lee, " Political Advertising, " in Dan D Nimmo and Keith R Sanders, 1981, *Handbook of Political Communication*, Beverly Hill: Sage Publication
- Kelley, David and Donway, Roger, " Liberalism and Free Speech, in Judith Lichtenberg, 1990, *Democracy and The Mass Media*, New York: Cambridge University
- Lichtenberg, Judith, 1990, *Democracy and The Mass Media*, New York: Cambridge University Press
- Littlejohn, Stephen W, 2002, *Theories of Human Communication*, CA: Wadworth
- Maclup, Fritz, 1962, *The Production and Distribution of Knowledge in the United States*, Princeton: Princeton University Press
- Martin, L. John, " Government and News Media, in Dan D Nimmo and Keith R Sanders, 1981, *Handbook of Political Communication*, Beverly Hill: Sage Publication
- McNair, Brian, 2004, *An Introduction to Political Communication*, London: Routledge
- McQuail, Denis, 1998, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publication
- Melody, William H., " Communication Policy in the Global Information Economy: Whither the Public Interest, " in Marjorie

- Fergusson, 1991, *Public Communication The New Imperative*, London: Sage Publication
- Merril, John C., 1991, *Global Journalism Survey of International Communication*, New York: Longman
- Miller, Susan Heilmann, " Reporters and Congressman: Living in Symbiosis, A Graber, 1984, *Media Power in Politics*, Washington: Congressional Quaterly Inc
- Noelle-Neumann, Elisabet, 1984, *The Spiral of Silence: Public Opinion-Our Social Skin*, Chicago: University of Chicago Press
- Nimmo, Dan, 1978, *Political Communication and Public Opinion in America*, California: Goodyear Publising Company
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Price, Vincent, 1992, *Public Opinion*, London: Sage Publication
- Prajarto, Nunung, 1993, *Media Berita Dalam Sebuah Konflik*, laporan hasil penelitian Fisipol UGM.
- Johannessen, Richard L., 1990, *Etika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rogers, Everret M., 1994, *A History of Communication Study*, New York: Free Press
- Russel, Mary, " The Press and the Committee System, in Doris A Graber, 1984, *Media Power in Politics*, Washington: Congressional Quaterly Inc
- Shannon, Claude E., and Weaver, Warren, 1949, *The Mathematical Theory of Communication*, Urbana: The University of Illinois Press
- Shoemaker, Pamela J., and Reese, Stephen D., 1996, *Mediating The Message Theories of Influences on Mass Media Content*, New York; Longman
- Stiglitz, Joseph, 2002, *Globalization and Discontent*, London: Penguin Book
- Suparno, Basuki Agus, 2010, *Kontestasi Makna dan Dramatisme: Studi Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia*, Disertasi-Jakarta: UI
- Schwandth, Thomas A, " Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry, " in Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication

Tichenor, Philip J, Donohue, George A., Olien, Clarice N, " Communication and Community Conflict, in Doris A. Graber, 1984, *Media Power in Politics*, Washington: Congressional Quaterly Inc.

Tiffen, Rodney, 1989, *News and Power*, Sydney: Allen and Unwin

Unniskrisnan, Namita and Shailaja, Bajpai, 1996, *The Impact of Television Advertising on Children*, New Dehli: Sage Publication

Jurnal

McCombs, M.E and Shaw, D.L, 1972, *The Agenda Setting Function of Mass Media*, Public Opinion Quaterly, Vol 36

Weick, K.E, 1988, *Enacted Sense-Making in Crisis Situation*, Journal of Management Studies, Vol.25

Paper

Dahlan, Alwi, " Carut Marut Informasi Publik: Misinformasi, Disinformasi dan Kerancuan Komunikasi, Yogyakarta, 20 Juli 2010

Fetzer, James H, " Disinformation: The Use of Flase Information, Pittsburg, 10 August 2001

Santoso, Purwo, *Respon Terhadap Diinformasi Beruta Politik di Media :Tinjauan Politik*

Yogyakarta, 20 Juli 2010

Siregar, Ashadi, *Disinformasi Berita Politik Dalam Forum Publik di Media Televisi*, Yogyakarta, 20 Juli 2010

Undang-Undang

UU No 40 tahun 1999 tentang Pers

UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

INDEKS

A

Aburizal Bakrie 21
 Adi Prabowo 122, 123, 134
 Agenda keputusan 57, 77
 Allan 33, 34
 Alwi Dahlan 2, 93, 94, 97, 100, 101,
 102, 103
 Anggodo Widjojo 22
 Antasari 22
 Ari Muladi 22
 Arie Giyarto 120, 133
 Arie giyarto 128
 Aristoteles 61, 141
 Arna and Dissanayake 12
 Ashadi Siregar 48, 93, 104, 106, 107,
 110, 111, 112, 180
 Asimetris informasi 8
 asimetris informasi 8

B

Bambang Hendarso Hanuri. 20
 Barendt 26, 28, 257
 Benturan kepentingan 64, 69, 166, 249
 Bibit Samad 20, 22
 blogs 99
 Blumer 80, 83
 Boediono 18, 21, 44, 162, 163, 184,
 191, 202, 203
 Briefing 76
 Brikland 57, 234
 business enterprise 121

C

Carut Marut Informasi 112, 260
 Censorship 32
 Champion 16, 257
 Chandra M Hamzah 22
 Citra 68, 99, 191, 231
 Concern 98, 99
 Corporate culture 120
 Cover both sides 101, 102
 Covert disinformation 236

D

Daerah Istimewa Yogyakarta 23, 138,
 141, 142, 148
 Data Management 89
 David Kelley 32
 Definition units 86
 Demokrasi 44
 demokrasi 1, 8, 10, 16, 27, 28, 29, 30,
 31, 32, 39, 47, 50, 56, 61, 62, 66, 120
 Denis McQuail 45
 Dewan Perwakilan Rakyat 17, 83
 Diskursif 222, 223
 Diminisher 45
 Disparitas sosial 41
 Distortif 44, 76, 253
 Dramatisasi 16, 68, 110, 227, 228, 231

E

E.E Schattschneider 58
 Ekonomi politik 23, 24, 87, 93, 94, 104,
 117, 139, 140, 239, 240
 Ekonomi politik media 87, 93, 94, 104
 Erotif 252

F

Fachri Ali 21
 Fetzer 15, 260
 Flow of information 240
 Focus Group Discussion 85, 87, 90, 93,
 102, 139
 Foss 5
 Frame 124. 195
 Framing-analysis 133
 Free to Air 148
 Freedom of press 29, 31, 32, 34, 35
 Freedom of speech 25, 26, 31, 32
 34, 35, 250, 257
 Fritz Maclup 39

G

Gate keeping 55, 256

George Gerbner 16
 Golkar 98, 119, 185, 192, 193, 194, 231
 Golongan Karya 98
 Gurevitch 47

H

Hanazaki 28, 258
 Harold A Innis 40
 Headline 52, 70
 Heath and Millar 4
 Heavy viewer 138, 152
 Hubungan kompetisi 68

I

Informasi politik 29, 52, 60, 70, 135,
 138, 140, 141, 147, 159, 166, 167,
 178, 186, 195
 Informasi Publik 1, 29, 31, 41, 54, 95,
 110, 125, 226, 228, 240, 245, 253.
 262
 Information overload 40, 242
 Intensifier 45
 Interaksi simbolik 27

J

James Madison 1
 Jaringan komunikasi sosial 99
 Jay Blumler 47
 Jeffrey Abramson 46
 John C Merrill 44
 John Stuart Mill 25, 118
 Joseph Stiglitz 8
 Judith Lichtenberg 30
 Jurgen Habermas 6, 7
 Jurnalisme 48, 49, 55, 78, 101, 103,
 105, 107, 108, 109, 110, 111
 Jusuf Kalla 20

K

Kapital 98, 182, 195
 Koalisi Kebebasan Informasi 1
 Komisi Pemberantasan Korupsi 10,
 168

Komunikasi massa 29, 36, 40, 44, 46,
 47, 52, 66, 84, 242
 Komunikasi politik 10, 11, 23, 47, 68,
 86, 87, 93, 94, 95, 122, 134, 139, 141,
 181, 182, 186, 202, 219, 261
 Konfrontatif 1
 Konstruksi politik 13, 65, 243
 Kualitatif interpretatif 79, 80

L

Legislatif 11, 13, 30, 44, 119, 130, 131,
 182, 183, 187, 228, 241
 Leisure time 151
 Lifespan 226, 235
 Light viewer 138, 152
 Littlejohn 2, 37, 38, 63, 258
 Lusiano Floridi 38

M

M Sobirin 117, 123
 Maryono 19, 20
 Masduki 110
 mass media-space time 33, 71
 Media Habit 147
 Media habit 148
 media habit 138, 148
 Metro TV 111, 127, 148, 149, 150,
 155, 156, 230, 246
 Misinformasi 14, 41, 96, 234, 243, 260
 Mode of discourse 83
 Muhammad Nadjib 103
 Multifacet 22, 73

N

Naif 111, 251
 News room 106, 112
 Newscast 106
 Nilai berita 75, 107, 109, 121, 132, 176,
 226, 227, 249
 Nunung Prajarto 45
 Nurhadi 95, 96, 98, 100, 101, 102

O

Ombudsman 31
 Ombudsman 130
 Opini populer 13
 Opinion climate 83
 Overt disinformation 14, 41, 235

P

Pamela J Shoemaker 35
 Pay TV 147, 148, 246
 PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) 43
 Persatuan Wartawan Indonesia 98
 Personal construction 12
 Platform 5, 48, 60
 Policy makers 124, 234
 Political construction 13, 15, 65, 162, 231, 241
 Political framing 231
 Political pressure 12
 POLRI 145, 168, 174
 Polri 20, 95, 119, 145, 146, 192
 Pope 2, 9, 30, 31, 259
 Press conference 52, 76, 128, 167, 224, 228
 Press release 33, 51, 71, 76, 167, 224, 228
 Public hearing 76
 Public sphere 6, 7, 48, 65, 255
 Purwo Santoso 93, 113
 PWI 98, 103, 133

R

Rahmat Arifin 119, 120, 123
 Reality effect 68, 230
 Reality show 150
 Robert Tantular 18, 19
 Rodney 10, 11, 260
 Roger Donway 32

S

Self-defining 72
 Self-regulation 105
 Semantik 36, 37
 Sensasionalisme 226

Sertifikasi 103
 Social construction 13
 Social engineering 242
 Social pressure 12
 Space 33, 71, 100, 132
 Spiral of Silence 259
 Spiral of silence 64
 Sri Johar Winarli 114
 Sri Mulyani 18, 19, 21, 44, 118, 162, 163, 191, 219, 231
 stakeholder 253
 Stephen D. Reese 35
 Stereotipe 44
 Storytelling 137
 Struggle of control 4
 Struktur politik 59, 60
 Suparno 3, 6, 16, 260
 Suratna 183, 186
 Surya Paloh 111, 230
 Susilastuti 114, 127, 134
 Susilo Bambang Yudoyono 162
 Susno Duaji 9, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 138, 139, 154, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
 Susno Duaji. 23

T

Third party 45
 Tichenor, Donohue and Olien 3
 Tichenor, Philip J, Donohue 260
 Time 67, 100, 151
 Triangulasi 89
 TV One 111, 127, 148, 149, 150, 155, 230, 246
 TVRI 98, 148

U

Unit konteks 86
 Unit rekaman 86
 Unit sampling 86
 Unniskrisnan dan Bajpai 16

V

Validasi 89

W

Walter Lippman 65

Watchdog 49, 58

Weick 3, 260

Workshop 93, 94, 100, 139, 222, 223

World Bank 21

Y

Yulianto 119, 131, 135

Z

Zoon politicoon 141

Tentang Penulis Buku



Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si lahir di Sragen 6 Mei 1971. Menempuh pendidikan S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (Lulus 2010), S2 Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret S2 Ilmu Komunikasi (Lulus 2003). Pekerjaan 1997-Sekarang: Dosen tetap Prodi Komunikasi UPN "Veteran" Yogyakarta. Publikasi yang dihasilkan antara lain tulisan tentang Kualitas Komunikasi Gus Dur dan Kedewasaan Politik Kita, Pemilu dan Legitimasi Politik, Memproyeksikan Nasib Gus Dur dalam Sidang Umum, Reposisi Televisi Kita dalam Tanggung Jawab Sosial, Demokrasi Kita dan Kecemasan Sosial yang semuanya dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat. Tulisan di jurnal antara lain Memahami Teori-Teori Kritis dalam Ilmu Komunikasi (Jurnal Paradigma) Makna Iklan dalam Media Televisi (Jurnal Ilmu Komunikasi) Sistem Kognitif Individu dan Perencanaan Pesan Iklan (Jurnal Administrasi Bisnis), Politik Komunikasi dalam Teknologi Informasi (Jurnal Ilmu Komunikasi). Beberapa pengalaman lain terlibat dalam Uji Coba Rating Alternatif Depkominfo Jakarta, Penyusunan Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI Jakarta, Penyusunan Buku Manusia Komunikasi Komunikasi Manusia Diterbitkan Gramedia

Dra. Susilastuti Dwi N, M.Si, lahir di Yogyakarta 18 Februari 1964. Menempuh pendidikan S2 Ilmu Politik di UGM (lulus tahun 2002), S1 Ilmu Komunikasi (lulus tahun 1988). Pekerjaan sekarang dosen Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Yogyakarta (1995-sekarang), Pemred Majalah Suara 'Aisyiyah (tahun 2002-sekarang). Masih aktif menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Cabang Yogyakarta. Publikasi yang dihasilkan antara lain Meretas Kebebasan Pers di Indonesia (Bigraf) *Women In Public Sector* (salah satu penulis PSW UGM bekerjasama dengan Tiara Wacana), Peran Pers dalam Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Jurnal Ilmu Komunikasi), Media

dan Pembangunan Iptek di Indonesia (Jurnal Paradigma), *Television and Gender Inequality in Indonesia (Proceeding Gender in Sustainable Development)*, *International Symposium*. Pengalaman lain, menjadi tim ad hoc seleksi Anggota KPU Kota Yogyakarta tahun 2004, Tim Adhoc Pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Dearah (KPID) DIY tahun 2010, mengikuti pelatihan saksi ahli Dewan Pers (2010), *Trainer of Trainer* Jurnalistik Dasar (PWI Pusat), pelatihan penulisan berkedalaman berwawasan social (LPDS Dr.Soetmo).Aktif dalam penelitian tentang media dan gender.

Dra.Esti Susilarti, M.Pd, lahir di Yogyakarta 25 April 1961, pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di UGM (lulus tahun 1985), S2 bidang Pendidikan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (lulus tahun 2007). Bekerja di SKH Kedaulatan Rakyat (1985-sekarang), aktif menjadi anggota PWI Cabang Yogyakarta dan menjadi pengurus Seksi Pendidikan PWI Cabang Yogyakarta (2010-sekarang). Pernah menjuarai berbagai penghargaan penulisan jurnalis: editorial pendidikan penghargaan dari Mendiknas (2007 dan 2008), liputan kebijakan pro-miskin (Lembaga Pendidikan Jurnalistik Dr Soetomo/ 2005), Feature Pendidikan (dari Mendiknas 2006). Aktif mengikuti pelatihan-pelatihan tentang jurnalistik dan gender.

Dr.Adi Soeprapto, M.Si, lahir di Surabaya 4 April 1971 pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Admnistrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (lulus tahun 2009), S2 Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Konsentrasi Pengembangan Sistem Informasi Universitas Brawijaya Malang (lulus tahun 2003), S1 Jurusan Ilmu Administrasi Niaga FIA Universitas Brawijaya Malang (lulus tahun 1996). Sekarang menjadi Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fisip UPN "Veteran" Yogyakarta (1997-sekarang). Aktif sebagai Wakil Ketua I Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Yogyakarta (periode 2006-2011). Saat ini sebagai Dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta. Publikasi antara lain *Political Marketing : Suatu Kontribusi Teori Marketing dalam Bidang Politik*, Paradigma, Jurnal Masalah-masalah

Kebijakan, Vol.9, Nomor 1, Maret (2005), Pilkada Langsung dan Pengembangan Ekonomi Daerah, dalam buku Pilkada langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Subhan afifi, Nikolaus Loy, Susilastuti, DN (ed.), (2005), FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta Press, Yogyakarta. Penelitian terkini adalah tentang Pengembangan Model Analisis Dampak Sosial Pelayanan Transportasi Publik Perkotaan (2009).

Drs.Sihono HT, M.Si, lahir di Klaten 9 Desember 1962. Pendidikan S1 Ilmu Komunikasi UGM (lulus tahun 1989), S2 Ilmu Komunikasi UNS (lulus tahun 2004). Sekarang bekerja sebagai Redaktur SKH Koran Merapi, menjadi Ketua PWI Cabang Yogyakarta (2010-2015). Publikasi antara lain tulisan di media cetak dan pertemuan ilmiah antara lain media relations dalam kegiatan public relation, mengupas kulis jurnalisme kuning, berebut kursi di bawah pohon beringin. Penelitian yang dilakukan antara lain: Strategi Komunikasi Promosi dan Pemasaran Media Cetak tahun 2003.

Drs.Hudono, SH, lahir di Kulonprogo 6 Maret 1967. Pendidikan S1 Fakultas Ilmu Pendidikan UNY (lulus tahun 1992), Fakultas Hukum UGM (lulus 1996). Pengalaman kerja: wartawam SKH Kedaulatan Rakyat (1994-sekarang), Staf Komisi Hukum Nasional tahun 2000, staf pengajar Universitas Cokroaminoto (1999-2004). Sekarang aktif sebagai Wakil Ketua PWI Cabang Yogyakarta Bidang Pembelaan Wartawan periode (2010-2015)

Didik Indarwanta, S.Sos, M.AB, Lahir di Solo,09 Desember 1972. Sekarang bekerja sebagai staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta. Pendidikan Magister Administrasi Bisnis (MAB), Program Studi Administrasi Bisnis Program Pasca Sarjana UNIBRAW, 2004, S1Jurusan Administrasi Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta, 1999. Tulisan yang dihasilkan antara lain , Kebijakan untuk mensikapi Holding Company. (Paradigma, 2001), Memanage Oporating Exposure dalam rangka meminimalkan resiko (Paradigma, September 2003),

Mendekatkan Lembaga Keuangan Mikro : Upaya mengurangi kemiskinan. (Paradigma, Maret 2006). (4) Analisis Strategi Pemasaran Lembaga Keuangan Mikro dalam Usaha Pemberdayaan Usaha Kecil. (Jurnal Bisnis, 2007), Profitabilitas sebagai penentu Kebijakan Pembayaran, (Paradigma, Juni 2007), Sukuk Negara dan Prospeknya di Indonesia, (Jurnal Bisnis, Januari 2008), Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran, (Paradigma, Maret 2008).

